



GREAT INFRASTRUCTURE SERVICE

LAPORAN TAHUNAN 2017 ANNUAL REPORT

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL HIGHLIGHTS

4

- 6 Tinjauan Keuangan 2017
2017 Financial Highlights
- 10 Ikhtisar Obligasi
Bond Highlights
- 13 Laporan Dewan Komisaris
Report from the Board of Commissioners
- 17 Laporan Direksi
Report from the Board of Directors

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

60

- 62 Pengembangan Sumber Daya Manusia
Human Resources Development

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE

22

- 24 Profil Perusahaan
Company Profile
- 30 Sejarah Singkat Perusahaan
Brief Company History
- 32 Bidang Usaha
Lines of Business
- 32 Layanan Kami
Our Services
- 33 Visi, Misi, dan Nilai Inti
Vision, Mission, and Core Values
- 34 Struktur Organisasi
Organizational Structure
- 36 Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Profiles
- 39 Pernyataan Independensi Komisaris Independen
Statement of Independence of Independent Commissioner
- 40 Profil Direksi
Board of Directors' Profiles
- 48 Daftar Pemegang Saham
List of Shareholders
- 50 Informasi Anak Perusahaan
Information on Subsidiaries
- 52 Kronologi Pencatatan Obligasi
Bonds Listing Chronology
- 54 Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal
Names and Addresses of Capital Market Institutions and Professionals
- 56 Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications
- 57 Peringkat
Ratings
- 58 Portofolio Menara Kami
Our Tower Portfolio

159 KONTAK KAMI

Contact Us

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

66

- 68 Analisa dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis
- 72 Kinerja Keuangan Komprehensif
Comprehensive Financial Performance
- 75 Struktur Modal
Capital Structure
- 76 Informasi atau Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal
Laporan Akuntan
Material Information or Facts Subsequent to the Accountant's
Report
- 78 Prospek Bisnis
Business Prospects
- 82 Strategi Usaha
Business Strategies
- 86 Perbandingan antara Proyeksi dengan
Pencapaian di Tahun 2017
Comparison of 2017 Outlook and Actual Results
- 87 Aspek Pemasaran
Marketing Overview
- 88 Informasi Material Terkait dengan Investasi, Ekspansi,
Divestasi, Akuisisi atau Restrukturisasi Utang atau Modal
Material Information Regarding Investment, Expansion,
Divestment, Acquisition or Restructuring of Debt or Capital
- 89 Kebijakan Dividen
Dividend Policy
- 90 Transaksi Benturan Kepentingan dan dengan Pihak Berelasi
Conflict of Interest and Related Party Transactions
- 91 Perubahan pada Kebijakan Akuntansi
Changes in Accounting Policies
- 93 Peristiwa Penting 2017
Event Highlights in 2017

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

152

- 154 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE

96

- 98 Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Good Corporate Governance
- 100 Dewan Komisaris
The Board of Commissioners
- 106 Direksi
The Board of Directors
- 111 Piagam Dewan
Board Charter
- 111 Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders
- 117 Komite Audit
Audit Committee
- 123 Komite Remunerasi dan Nominasi
Remuneration and Nomination Committee
- 127 Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary
- 130 Departemen Audit Internal
Internal Audit Department
- 135 Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System
- 135 Sistem Manajemen Risiko
Risk Management System
- 138 Faktor Risiko
Risk Factors
- 142 Permasalahan Hukum
Legal Matters
- 142 Sanksi Administratif
Administrative Sanctions
- 143 Sistem Whistle Blower
Whistle Blower System
- 145 Pedoman Perilaku Perusahaan
Corporate Code of Conduct
- 148 Kebijakan Perusahaan untuk Memenuhi Hak Kreditor
Company Policy on Creditor's Rights
- 149 Akses Terhadap Informasi
Access to Information
- 151 Kebijakan Penggunaan Teknologi Informasi untuk
Keterbukaan Informasi
Policy on the Utilization of Information Technology for
Information Transparency

- 161 **PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2017**
Statements of Responsibility of the Board of Commissioners
and the Board of Directors Regarding the 2017 Annual Report

- 165 **LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT PROFESIONAL
TELEKOMUNIKASI INDONESIA DAN ANAK PERUSAHAAN**
Consolidated Financial Statements PT Profesional
Telekomunikasi Indonesia and Its Subsidiaries



PERTUMBUHAN

GROWTH



**BERFOKUS PADA PERTUMBUHAN
BERKELANJUTAN JANGKA PANJANG**

FOCUS ON LONG TERM SUSTAINABLE GROWTH

TINJAUAN KEUANGAN 2017

2017 FINANCIAL HIGHLIGHTS

Uraian / Description (dalam miliar Rupiah / in billion IDR)	2017	2016	2015
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT AND LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME			
Pendapatan Revenue	5.337,9	5.053,1	4.469,8
Beban Usaha Operating Expenses	455,9	445,7	524,4
EBITDA EBITDA	4.604,7	4.398,0	3.763,7
Laba Bruto Gross Income	4.166,3	3.659,3	3.262,4
Laba Usaha Operating Income	3.423,9	3.101,5	2.236,3
Laba dari Operasi yang Dilanjutkan sebelum Beban Pajak Penghasilan Income Before Corporate Income Tax Expense from Continuing Operations	2.802,5	2.488,7	1.686,1
Laba dari Tahun Berjalan dari Operasi yang Dilanjutkan Income for the Year from Continuing Operations	2.107,5	1.758,5	1.259,9
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	2.107,5	2.131,3	1.259,9
Laba Penghasilan Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Income for the Year Attributable to:			
Pemilik Entitas Induk Equity Holders of the Parent Entity	2.107,5	2.128,0	1.253,6
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling Interests	0,0	3,3	6,3
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan, sesudah Pajak Total Comprehensive Income for the Year, Net of Tax	2.155,3	2.122,4	1.257,1
Total Penghasilan Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: Total Comprehensive Income Attributable to:			
Pemilik Entitas Induk Equity Holders of the Parent Entity	2.155,3	2.117,3	1.250,8
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling Interests	0,0	5,1	6,3
Laba Tahun Berjalan per Saham (dalam angka penuh) Earnings per Share (in full amount)	634	640	377
Laba Tahun Berjalan dari Operasi yang Dilanjutkan (dalam angka penuh) Earnings per Share from Continuing Operations (in full amount)	634	528	377

Uraian / Description (dalam miliar Rupiah / in billion IDR)	2017	2016	2015
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION			
Total Aset Lancar Total Current Assets	3.020,8	3.593,0	3.532,6
Aset Tetap setelah dikurangi Akumulasi Depresiasi Fixed Assets, Less Accumulated Depreciation	12.600,6	12.269,4	9.813,8
Total Aset tidak Lancar Total Non-Current Assets	15.708,8	15.187,6	12.853,6
Total Aset Total Assets	18.729,6	18.780,5	16.386,3
Total Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	2.214,8	3.328,0	2.000,0
Utang Jangka Panjang & Utang Obligasi Long-Term Loans & Bonds Payable	8.998,7	9.918,9	9.902,5
Total Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	9.431,2	9.518,1	10.570,7
Total Liabilitas Total Liabilities	11.645,9	12.846,1	12.570,7
Total Ekuitas Total Equity	7.083,7	5.934,4	3.815,6

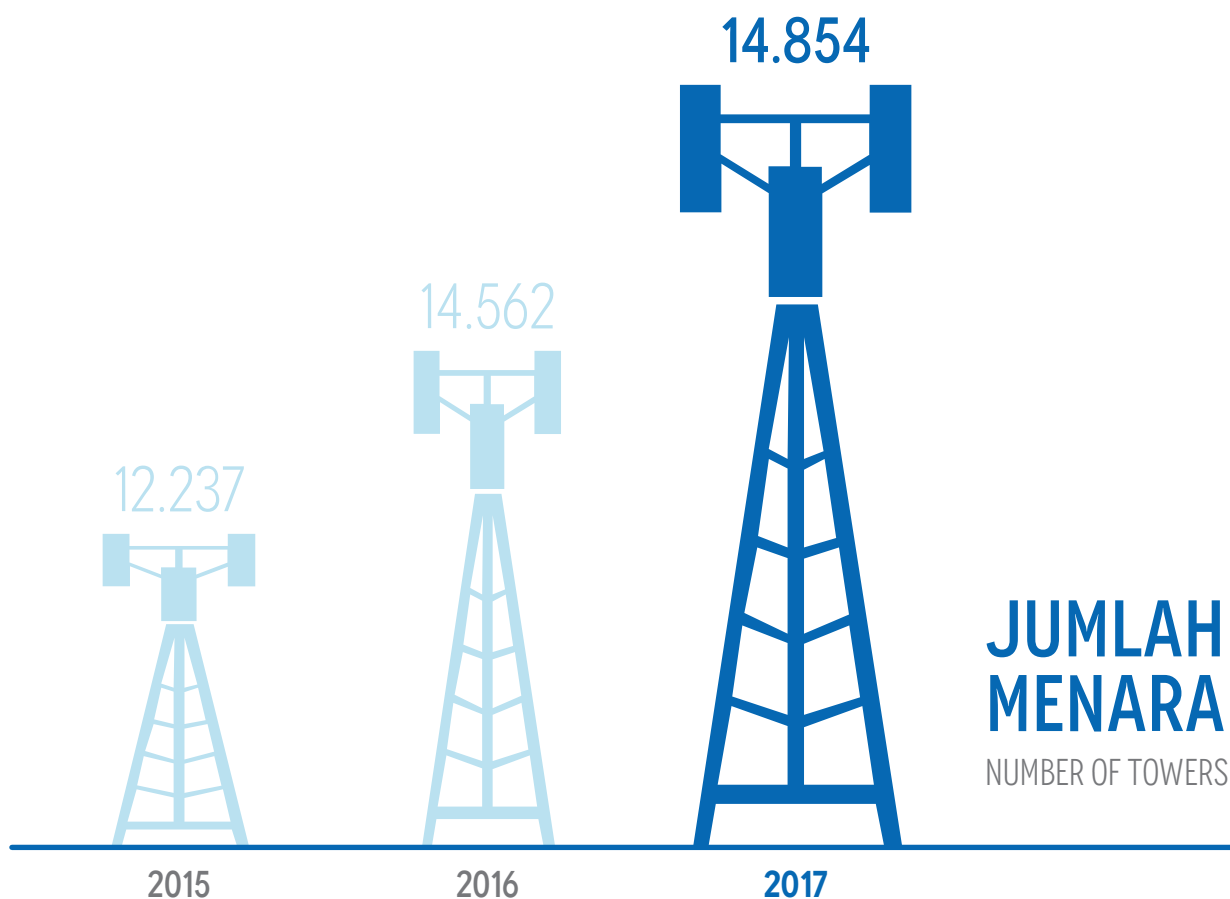
Perseroan mengimplementasikan perubahan terhadap kebijakan akuntansi dari PSAK 13 (Properti Investasi) ke PSAK 16 (Aset Tetap)
The Company implemented a change in accounting policies from PSAK 13 (Investment Property) to PSAK 16 (Fixed Asset)

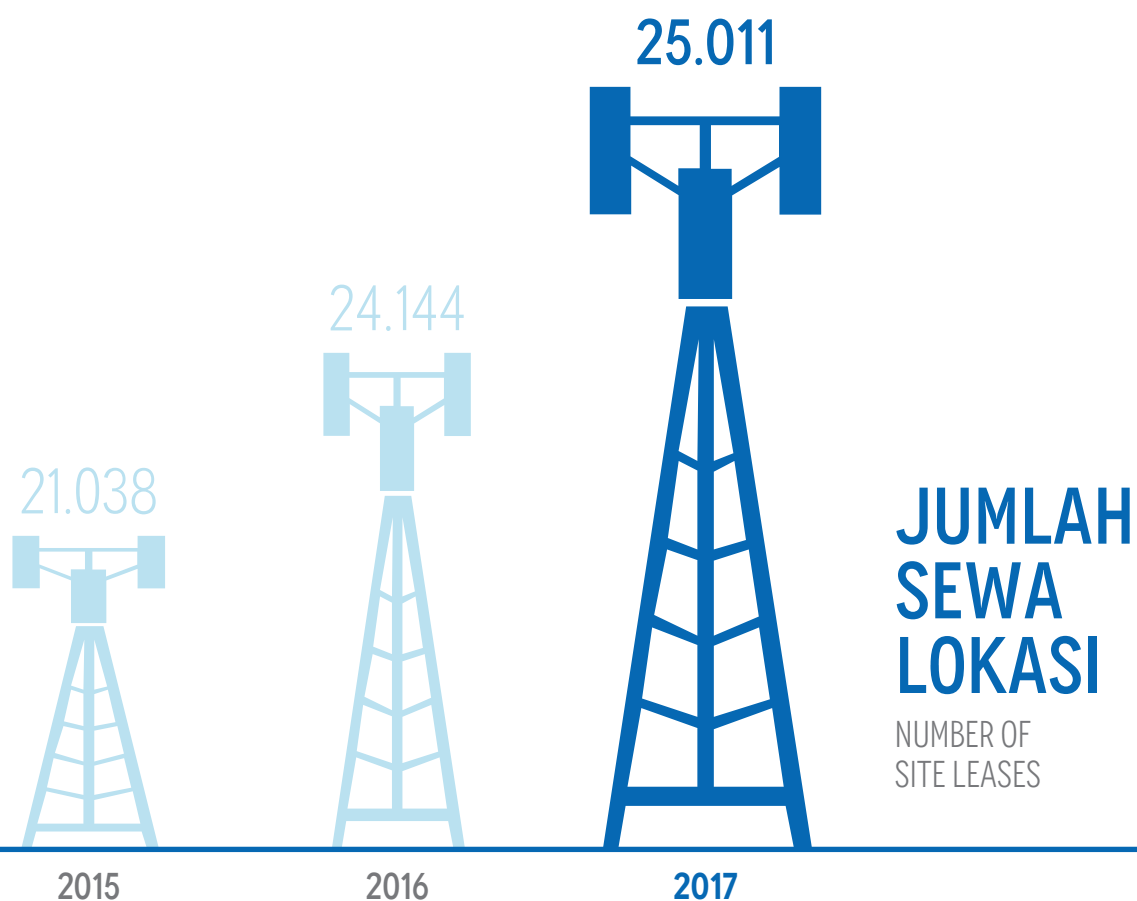
Uraian / Description (%)	2017	2016	2015
RASIO RATIO			
Marjin EBITDA EBITDA Margin	86,3	87,0	84,2
Marjin Laba Usaha Operating Income Margin	64,1	61,4	50,0
Marjin Laba Tahun Berjalan Net Income Margin	39,5	42,2	28,2
Rasio Laba terhadap Total Ekuitas Return on Equity	29,8	35,9	33,0
Rasio Laba terhadap Total Aset Return on Assets	11,3	11,3	7,7
Rasio Lancar (X) Current Ratio (X)	1,4	1,1	1,8
Rasio Utang Neto terhadap Ekuitas (X) Net Debt to Equity Ratio (X)	1,0	1,2	1,9
Rasio Utang Neto terhadap Aset (X) Net Debt to Asset Ratio (X)	0,4	0,4	0,4
Rasio Utang Neto terhadap LQA EBITDA* (X) Net Debt to LQA EBITDA* Ratio (X)	1,4	1,6	1,7

* Triwulan terakhir EBITDA yang disetahunkan / Last Quarter Annualized EBITDA

Uraian / Description (%)	2017	2016	2015
IKHTISAR OPERASIONAL OPERATIONAL HIGHLIGHTS			
Jumlah Menara* Number of Towers*	14.854	14.562	12.237
Jumlah Sewa Lokasi Number of Site Leases	25.011	24.144	21.038

* *Ready For Installation* ("RFI"): kondisi dimana menara siap untuk instalasi peralatan penyewa.
Ready For Installation ("RFI"): a tower is built and ready for installation of the tenants' equipment.





IKHTISAR OBLIGASI

BOND HIGHLIGHTS

Nama Obligasi Name of the Bond	Penerbit Issuer	Jumlah Pokok Principal Amount	Jangka Waktu Tenor
Obligasi Protelindo I Tahun 2014 Protelindo Bonds I Year 2014	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo")	Rp1 triliun IDR1 trillion	3 tahun 3 years
Obligasi Senior Tanpa Jaminan Jatuh Tempo Tahun 2024 The Senior Unsecured Guaranteed Bonds due 2024	Protelindo Finance B.V. ("Protelindo Finance") kemudian dialihkan kepada Protelindo, yang dijamin secara tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali oleh Credit Guarantee and Investment Facility ("CGIF") Protelindo Finance B.V. ("Protelindo Finance") for the benefit of Protelindo, unconditionally and irrevocably guaranteed by a Credit Guarantee and Investment Facility ("CGIF")	AS\$180 juta US\$180 million	10 tahun 10 years
Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 Sustainable Bonds I of Protelindo Phase I Year 2016	Protelindo	Rp800 miliar yang terdiri dari: IDR800 billion consisting of: - Seri A: Rp661 miliar Series A: IDR661 billion - Seri B: Rp36 miliar Series B: IDR36 billion - Seri C: Rp103 miliar Series C: IDR103 billion	Seri A: 3 Tahun Series A: 3 years Seri B: 5 Tahun Series B: 5 years Seri C: 7 Tahun Series C: 7 years

Pembayaran Bunga Interest Payment	Suku Bunga Interest Rate	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Peringkat Ratings
Kuartalan Quarterly	10,5% per tahun 10.5% per.annum	28 Februari 2017 (telah dibayar penuh) February 28, 2017 (has been fully paid)	PT Fitch Ratings Indonesia rating: AAA (idn) (Triple A)
Semesteran Semi-Annually	3,25 % per tahun 3.25% per.annum	27 November 2024 November 27, 2024	Standard and Poor's Ratings Services rating: AA (Double A)
Kuartalan Quarterly	Seri A: 7,90% per tahun Series A: 7.90% per.annum Seri B: 8,25% per tahun Series B: 8.25% per.annum Seri C: 8,75% per tahun Series C: 8.75% per.annum	Seri A: 23 November 2019 Series A: November 23, 2019 Seri B: 23 November 2021 Series B: November 23, 2021 Seri C: 23 November 2023 Series C: November 23, 2023	PT Fitch Ratings Indonesia rating: AAA (idn) (Triple A)



MEMPERSIAPKAN PERTUMBUHAN MASA DEPAN MELALUI DIVERSIFIKASI DAN KEKUATAN FINANSIAL.

PREPARING FOR FUTURE GROWTH THROUGH
DIVERSIFICATION AND FINANCIAL STRENGTH.

ARIO WIBISONO

Komisaris Utama | President Commissioner

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

REPORT FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM YANG TERHORMAT, DEAR SHAREHOLDERS,

Dengan senang hati kami sampaikan bahwa selama tahun 2017 PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Perseroan") mencatat pertumbuhan bisnis organik yang kuat dalam kondisi makro ekonomi yang tidak pasti. Pertumbuhan ini didukung oleh berbagai peristiwa spesifik industri yang berdampak langsung pada operator telekomunikasi di Indonesia. Ketidakpastian pasar yang utama sepanjang tahun 2015 dan 2016, di antaranya potensi perubahan peraturan yang berdampak kepada para operator telekomunikasi dan pelelangan spektrum tambahan, telah diselesaikan pada tahun 2017. Dengan berakhirnya ketidakpastian ini, industri mulai berinvestasi lagi dalam perluasan layanan di luar pulau Jawa dan pada peningkatan kapasitas di pulau Jawa.

Sepanjang tahun, operator telekomunikasi meneruskan peluncuran layanan 4G terutama di pulau Jawa namun semakin bertambah di kota-kota besar di seluruh negeri. Protelindo mendapatkan keuntungan dari ekspansi ini dikarenakan penambahan peralatan 4G baru menghasilkan tambahan pesanan sewa baru. Kami memperkirakan bahwa peluncuran peralatan 4G telah selesai sekitar 15 sampai 20 persen. Peningkatan lanjutan dari layanan 4G ini akan menjadi pendorong pertumbuhan bisnis yang stabil di tahun ini. Dengan banyaknya ketidakpastian yang mempengaruhi pasar, kami mengalami peningkatan yang substansial dalam penambahan menara dan kolokasi baru yang disertai dengan penyewaan

We are pleased to report that during 2017 PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (the "Company") recorded solid organic business growth in uncertain macro-economic conditions. Growth was supported by various industry specific events that directly impacted the telco operators in Indonesia. The major market uncertainties throughout 2015 and 2016, including potential regulatory changes and the auction of additional spectrum, were resolved in 2017. With these uncertainties resolved, the industry began to invest again in the expansion of services outside of Java and on improving capacity within Java.

Throughout the year, telco operators continued their rollout of 4G equipment particularly in Java but increasingly in major cities throughout the country. Protelindo benefits from this expansion as the addition of new 4G equipment results in additional new lease orders. We estimate that the rollout of 4G equipment is approximately 15 to 20 percent complete. The continued enhancement of 4G services was a steady driver of business growth this year. With many of the uncertainties that impacted the market resolved, we experienced a substantial increase in additional new tower builds and colocations accompanied by additional equipment leases as the operators expanded 4G services over their current network footprint.

peralatan tambahan dikarenakan operator memperluas layanan 4G melalui jejak jaringan mereka saat ini. Pertumbuhan pada tahun 2017 didorong oleh permintaan kontrak sewa baru dengan lebih dari 2.300 sewa dan pendapatan dari 3.700 sewa peralatan tambahan dan pertumbuhan yang kuat di *microcell poles*, VSAT dan koneksi internet perusahaan.

Dewan Komisaris melihat tren positif berlanjut di 2018 karena para operator telekomunikasi berusaha memberikan layanan berkualitas lebih baik kepada pelanggan mereka. Kami berharap operator telekomunikasi akan terus memperluas jangkauannya di luar pulau Jawa dan akan meningkatkan kapasitas di pulau Jawa. Belanja modal oleh operator didukung oleh peningkatan profitabilitas operator dan kebijakan penetapan harga yang rasional. Kerangka peraturan di Indonesia juga terus mendukung pertumbuhan industri menara di Indonesia.

Kami menutup tahun ini dengan 14.854 menara dan 25.011 penyewa dengan 2.351 pesanan sewa baru. Kami dapat mempertahankan *leverage* kami yaitu rasio *net debt to annualized EBITDA* sebesar 1,4x pada akhir tahun 2017 sedikit lebih rendah dari tingkat 1,6x yang dilaporkan pada akhir 2016. Lembaga pemeringkat internasional terus mengakui kekuatan solid neraca keuangan dan manajemen modal kami dengan memberikan peringkat *investment grade* kepada utang Perseroan. Moody's menegaskan peringkat Baa3/*Stable* kami pada bulan Maret, sementara Fitch International dan Fitch Indonesia menegaskan peringkat kami di BBB-/*Stable* dan AAA (idn)/*Stable* pada bulan Mei dan S&P menegaskan peringkat kami di BBB-/*Stable* pada bulan Desember. Kami sekarang termasuk perusahaan menara independen dengan *credit rating* terbaik di dunia dan salah satu perusahaan dengan peringkat tertinggi di antara semua perusahaan sektor swasta di Indonesia.

Kami terus berfokus untuk mengembangkan bisnis tanpa mengorbankan tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai pemain penting di pasar modal Indonesia, kami mengikuti persyaratan OJK dan badan pengatur lainnya mengenai tata kelola perusahaan dan menjaga kepatuhan terhadap standar

Growth in 2017 was driven by new lease contracts of more than 2,300 tenancy leases as well as revenues from 3,700 additional equipment leases and strong growth in microcell poles, VSAT and corporate internet connections.

The Board of Commissioners sees a positive trend going into 2018 as telco operators strive to provide better quality service to their customers. We expect that the telco operators will continue to expand their coverage outside of Java and will improve capacity in Java. Capital expenditures by operators are supported by increasing operator profitability and rational pricing policies. The regulatory framework in Indonesia also continues to be supportive of growth for Indonesia's tower industry.

We closed the year with 14,854 towers and 25,011 tenants with 2,351 new tenancy orders. We maintained our leverage to net debt to annualized EBITDA of 1.4x at year end 2017, slightly lower than the 1.6x level reported at the end of 2016. The international rating agencies continue to recognize the solid strength of our balance sheet and capital management activities by awarding the Company with investment grade debt ratings. Moody's affirmed our Baa3/*Stable* rating in March, while Fitch International and Fitch Indonesia affirmed our ratings at BBB-/*Stable* and AAA(idn)/*Stable* in May and S&P affirmed our rating at BBB-/*Stable* in December. We are now among the best rated independent tower companies in the world and one of the top rated companies among all private sector corporations in Indonesia.

We continue to focus on growing our business without sacrificing good corporate governance. As a significant player in Indonesia's capital markets, we observe the requirements of the OJK and other regulatory bodies on corporate governance and maintain compliance to the highest standards in Indonesia.

tertinggi di Indonesia. Salah satu pencapaian kami yang membanggakan di tahun 2017 adalah dengan dianugerahkan kembali sebagai *Frost & Sullivan Indonesia Telecoms Tower Company of the Year*. Kami akan berusaha mempertahankan kehormatan ini.

Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam pengawasan kinerja manajemen perusahaan dari Direksi. Kami melakukan pertemuan rutin bersama dengan Direksi untuk mengkoordinasikan dan menyelaraskan peran Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan tugasnya dan untuk mencapai tujuan Perseroan. Kami percaya bahwa kami dapat terus memaksimalkan nilai bagi para pemegang saham kami dengan mengeksplorasi berbagai peluang di menara Indonesia sementara struktur modal kami yang kuat akan memungkinkan kami mempertahankan momentum operasional dan keuangan yang signifikan di tahun-tahun mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direksi, karyawan, semua pemangku kepentingan, dan semua pihak yang telah berkontribusi dan bekerja keras sepanjang tahun untuk membuat Perseroan semaksimal mungkin seperti sekarang ini. Kami percaya bahwa kerja sama tim yang solid antara karyawan dan anggota Direksi merupakan kunci pencapaian yang luar biasa ini. Sebagai anggota Dewan Komisaris, sudah menjadi tugas kami untuk bekerja dengan anggota tim manajemen Perseroan untuk memastikan bahwa kami bertindak sesuai dengan praktik terbaik industri dan sesuai prinsip integritas juga transparansi kami sendiri. Sebagai hasilnya, kami percaya bahwa pemegang saham kami akan terus mendapat imbal balik yang baik.

One of our achievements in 2017 was to be named again as Frost & Sullivan Indonesia Telecoms Tower Company of the Year. We will work to maintain this distinction.

The Board of Commissioners is responsible for supervising the business management performance of the Board of Directors. We conduct regular joint meetings with the Board of Directors to coordinate and align the roles of the Board of Commissioners and Board of Directors in carrying out our duties and to achieve the objectives of the Company. We believe we can continue to maximize value for our shareholders by exploring the various opportunities in the Indonesian tower space while our solid capital structure will allow us to maintain significant operational and financial momentum in the coming years.

We extend our warmest appreciation to the Board of Directors, the employees, all stakeholders, and all parties who have contributed and worked so hard during the year to make the Company as successful as we are today. We believe that solid teamwork among the employees and members of the Board of Directors is key to this remarkable achievement. As members of the Board of Commissioners, it is our duty to work with members of the Company's management team to ensure that we act in accordance with the industry's best practices and our own core values of integrity and transparency. We believe that our shareholders will continue to be well rewarded as a result.

Atas nama Dewan Komisaris PT Profesional Telekomunikasi Indonesia
On behalf of the Board of Commissioners of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

ARIO WIBISONO

Komisaris Utama | President Commissioner



KEBERHASILAN KAMI ADALAH HASIL DARI PONDASI YANG KUAT UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN.

OUR SUCCESS TODAY IS THE RESULT OF OUR
SOLID FOUNDATION TO SUPPORT GROWTH.

FERDINANDUS AMING SANTOSO
Direktur Utama | President Director

LAPORAN DIREKSI

REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM YANG TERHORMAT, DEAR SHAREHOLDERS,

Dengan senang hati kami sampaikan bahwa tahun 2017 adalah tahun yang sukses bagi Perseroan. Setelah masa pertumbuhan organik yang relatif rendah pada tahun 2015 dan 2016, kami mengalami peningkatan yang kuat dalam pemesanan kolokasi baru di tahun 2017 yang kami percaya mengindikasikan siklus ekspansi baru oleh operator telekomunikasi utama.

Pertumbuhan stabil pada bisnis baru sepanjang tahun menyebabkan Perseroan mengoperasikan total 14.854 menara dengan 25.011 penyewaan pada akhir tahun 2017. Pendapatan tumbuh sebesar 5,6% dari Rp5.053,1 miliar menjadi Rp5.337,9 miliar sementara EBITDA tumbuh sebesar 4,7% dari Rp4.398,0 miliar menjadi Rp4.604,7 miliar. Pertumbuhan ini dicapai bahkan dengan dampak negatif tidak diperpanjangnya lebih dari 500 lokasi oleh salah satu dari 5 operator telekomunikasi teratas.

Dengan pertumbuhan pendapatan yang solid, langkah efisiensi biaya dan pengelolaan neraca yang lebih baik, Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp2.107,5 miliar pada tahun 2017. Manajemen neraca keuangan mencakup pencocokan kewajiban Perseroan dengan pendapatan yang lebih baik, dengan meningkatkan utang dalam mata uang lokal sebagai bagian dari total utang, dan membayar utang valuta asing dan sekaligus memanfaatkan peringkat *credit rating* internasional Perseroan untuk mengurangi biaya pembiayaan.

We are pleased to report that 2017 was another successful year for the Company. After a period of relatively low organic growth in 2015 and 2016, we enjoyed a strong increase in new co-location orders in 2017 that we believe indicates a new cycle of expansion by the major telco operators.

Steady growth in new business throughout the year led to the Company operating a total 14,854 tower sites with 25,011 tenancies at year end 2017. Revenue grew by 5.6% from IDR5,053.1 billion to IDR5,337.9 billion while EBITDA grew by 4.7% from IDR4,398.0 billion to IDR4,604.7 billion. This growth was achieved even with the negative impact of the non-renewal of more than 500 sites by one of the top 5 telco operators.

With solid revenue growth, cost efficiency measures and better balance sheet management, the Company booked net income of IDR2,107.5 billion in 2017. Balance sheet management included better matching of Company liabilities with revenues by increasing local currency debt as a portion of the total debt and paying down foreign exchange debt and while capitalizing on the Company's international investment grade ratings to reduce the cost of financing.

Sepanjang tahun 2017, Protelindo mempertahankan posisi Perseroan sebagai perusahaan menara independen terkemuka di Indonesia dengan portofolio menara terbesar, neraca keuangan tersehat dan peringkat kredit terkuat di antara kalangan industri. Protelindo tetap menjadi satu-satunya perusahaan menara di Indonesia yang menerima *investment grade credit ratings* dari ketiga lembaga pemeringkat internasional utama dengan peringkat BBB-/Stabil dari peringkat Standard & Poor's, Fitch International dan Fitch Indonesia masing-masing BBB- dan AAA, dan peringkat kredit korporasi Moody's yaitu Baa3. Selain itu, rasio *leverage* Perseroan, yang diukur dengan *net debt to annualized EBITDA*, turun dari 1,6x di tahun 2016 menjadi 1,4x pada akhir 2017 sebagai hasil pelunasan pinjaman AS\$.

Sebagai bagian dari komitmen manajemen terhadap strategi 'Buy, Build, Return', kami merencanakan untuk meningkatkan total pembayaran dividen untuk tahun 2017 menjadi Rp1,2 triliun, sebuah peningkatan yang kuat dari Rp700 miliar yang disalurkan perusahaan untuk tahun buku 2016. Kami mengumumkan pembayaran dividen interim sebesar Rp306 miliar untuk tahun buku 2017 yang dibagikan kepada para pemegang saham pada bulan Desember 2017. Dividen akhir tahun 2017 mencakup dividen interim yang dibayarkan pada bulan Desember dan akan dibagikan setelah persetujuan pemegang saham pada RUPS 2018.

Perseroan terus berfokus pada praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik ("GCG") sesuai dengan standar GCG Indonesia. Perseroan berada di garis depan dalam mengimplementasikan perubahan terbaru dalam arahan OJK untuk memperbaiki penerapan GCG di Indonesia. Hasilnya, Perseroan diakui sebagai perusahaan yang memiliki tingkat kepatuhan tertinggi terhadap prinsip-prinsip GCG dari 50 besar kapitalisasi pasar saham terbesar di Indonesia oleh Indonesian Institute of Corporate Directorship pada bulan November 2017.

Kami di Protelindo mendukung mitra Perseroan di industri telekomunikasi dengan menyediakan layanan jaringan nirkabel dan data untuk bisnis mereka. Dalam kapasitas ini, Perseroan bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi

Throughout 2017, Protelindo maintained the Company's position as the leading independent tower company in Indonesia with the largest tower portfolio, healthiest balance sheet and strongest credit rating amongst the industry peers. Protelindo remains the only tower company in Indonesia to receive investment grade credit ratings from all three major international rating agencies with a BBB-/Stable rating from Standard & Poor's, Fitch International and Fitch Indonesia ratings of BBB- and AAA, respectively, and a Moody's corporate credit rating of Baa3. In addition, the Company's leverage ratio, as measured by net debt to annualized EBITDA, declined from 1.6x in 2016 to 1.4x at the end of 2017 as a result of the repayment of USD loans.

As part of management's commitment to our 'Buy, Build, Return' strategy, we plan to increase the total dividend payment for 2017 to IDR1.2 trillion, a strong increase from the IDR700 billion that the company distributed for financial year 2016. We announced an interim dividend payment of IDR306 billion for financial year 2017 that was distributed to shareholders in December 2017. The final total 2017 dividend includes the interim dividend paid in December and will be distributed after shareholder approval at the 2018 AGM.

The Company continues to focus on Good Corporate Governance ("GCG") practices in accordance with Indonesian GCG standards. The Company is in the forefront of implementing the recent changes in OJK's directives to improve implementation of GCG in Indonesia. As a result, the Company was recognized as a having the highest levels of adherence to GCG principles of the top 50 biggest market capitalization publicly listed companies by the Indonesian Institute of Corporate Directorship in November 2017.

We at Protelindo support the Company's partners in the telecommunications industry by providing wireless and data network services for their businesses. In this capacity, the Company works closely with telco companies to plan and

untuk merencanakan dan melaksanakan perluasan dan peningkatan jaringan nirkabel mereka. Kami percaya bahwa ada dua pendorong pertumbuhan telekomunikasi organik di Indonesia; pertama adalah kebutuhan operator untuk memperluas jangkauan mereka ke daerah yang kurang terlayani di luar pulau Jawa, dan kedua adalah kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas industri untuk menangani peningkatan permintaan data terutama di daerah perkotaan. Selain peluang pertumbuhan organik, kami mencatat bahwa kami telah melakukan dua akuisisi signifikan dalam 3 tahun terakhir dan kami percaya ada peluang lebih lanjut untuk melakukan konsolidasi di industri menara di Indonesia. Kami berniat untuk menjadi peserta aktif dalam peluang bisnis ini.

Dengan senang hati kami melaporkan bahwa strategi diversifikasi model bisnis kami menjadi pertanda baik bagi pertumbuhan Perseroan di masa yang akan datang. Dengan akuisisi iForte pada tahun 2015, kami menangkap potensi pertumbuhan di sektor infrastruktur telekomunikasi yang lebih luas dengan menawarkan layanan serat optik dan VSAT kepada beragam pelanggan. Kami percaya potensi pertumbuhan mereka yang kuat di pasar yang lebih luas mengingat demografi Indonesia dan penyebaran geografis nusantara. Untuk mencerminkan strategi bisnis baru kami, kami telah memperkenalkan sebuah pernyataan misi yang direvisi dari "*Indonesia's Premier Tower Company*" menjadi "*Indonesia's Premier Telecommunications Infrastructure Company*". Dengan Protelindo dan iForte, Perseroan merupakan satu kesatuan terpadu yang dapat menyediakan layanan terlengkap dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur telekomunikasi yang beragam dari klien kami.

Sebagai penutup, sebagai hasil dari pemulihan yang solid dalam bisnis organik yang dialami pada 2017, kami telah mencapai target pendapatan dan EBITDA yang kami tetapkan untuk tahun ini. Ke depan, kami akan terus memperkuat posisi kami sebagai pemimpin pasar dalam industri infrastruktur telekomunikasi dengan mempertahankan tujuan kami pada investasi dan ekspansi. Strategi kami untuk 2018 dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Mempertahankan posisi kami sebagai perusahaan infrastruktur telekomunikasi terkemuka di Indonesia;

execute the expansion and improvement of their wireless networks. We believe that there are two drivers of organic telecommunications growth in Indonesia; firstly is the operator's need to expand their coverage to underserved areas outside the island of Java, and secondly is the need to improve industry capacity to handle the huge increase in data demand particularly in urban areas. In addition to organic growth opportunities, we note that we have made two significant acquisitions in the last 3 years and believe there are further opportunities for consolidation in the tower industry in Indonesia. We intend to be an active participant in these business opportunities.

We are pleased to report that our strategy of diversification of our business model bodes well for the Company's future growth. With the iForte acquisition in 2015, we are capturing growth potential in the broader telecommunications infrastructure sector by offering fiber optic as well as VSAT services to a broad array of customers. We believe there is strong growth potential in the broader market given the demographics of Indonesia and the geographic spread of the archipelago. In order to reflect our new business strategy, we have introduced a revised mission statement from being "*Indonesia's Premier Tower Company*" to becoming "*Indonesia's Premier Telecommunications Infrastructure Company*". With Protelindo and iForte, the Company is a unified single entity that can provide the most complete and innovative services to meet the diverse telecommunication infrastructure needs of our clients.

In closing, as a result of the solid recovery in organic business experienced 2017, we have achieved the revenue and EBITDA targets that we set for the year. Going forward, we will continue to strengthen our position as the market leader in the telecommunication infrastructure industry by maintaining our disciplined approach to investing and expansion. Our strategies for 2018 can be summarized as follows:

- a. To maintain our position as the leading telecommunications infrastructure company in Indonesia;

- b. Mempertahankan peringkat investasi Protelindo dari ketiga lembaga pemeringkat global sehingga memungkinkan fleksibilitas finansial dan efisiensi biaya;
- c. Memanfaatkan neraca keuangan kami yang kuat untuk peluang pertumbuhan organik dan anorganik; dan
- d. Melanjutkan pengembalian modal kepada pemegang saham melalui dividen dan kemungkinan cara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham, Dewan Komisaris, Komite Audit, tim manajemen dan karyawan Perseroan dan anak perusahaan atas semua dukungan mereka yang menjadikan tahun 2017 sebagai tahun yang hebat. Kami percaya bahwa dengan usaha dan dukungan terus menerus dari pemegang saham, manajemen, dan karyawan, kami akan mencapai misi kami: *"Great Infrastructure, Great Service"*.

- b. To maintain Protelindo's investment grade ratings from all three global rating agencies thereby allowing for financial flexibility and cost efficiency;
- c. To capitalize on our strong balance sheet for organic and inorganic growth opportunities; and
- d. To continue returning capital to shareholders through dividends and possible other means under the prevailing rules and regulations in Indonesia.

Finally, we would like to thank the shareholders, the Board of Commissioners, the Audit Committee, the management team and the employees of the Company and its subsidiaries for all their support in making 2017 a great year. We believe that with our solid effort and the continuous support of our shareholders, management, and employees, we will achieve our mission of: *"Great Infrastructure, Great Service"*.

Atas nama Direksi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia
On behalf of the Board of Directors of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

FERDINANDUS AMING SANTOSO

Direktur Utama | President Director





LOKASI

LOCATIONS



**LOKASI KAMI BERADA DI TEMPAT YANG
SESUAI KEINGINAN PELANGGAN KAMI**

OUR SITES ARE IN HIGHLY DESIRABLE LOCATIONS

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE



3 Januari January 2003

Perseroan didirikan di Bandung, Jawa Barat.
The Company was established in Bandung, West Java.



21 Agustus August 2008

SMN mengakuisisi 99,999% saham yang dikeluarkan oleh Protelindo.
SMN acquired 99.999% of the outstanding shares of Protelindo.



19 Desember December 2012

Anak perusahaan Protelindo yang baru dibentuk, Protelindo Towers B.V., telah menyelesaikan akuisisi atas 261 menara dari KPN di Belanda.

A newly formed subsidiary of Protelindo, Protelindo Towers B.V., completed the acquisition of 261 towers from KPN in the Netherlands.

Desember December 2012

Protelindo telah melakukan pembiayaan ulang atas utang bank yang ada yang menghasilkan struktur utang tanpa jaminan.
Protelindo refinanced its outstanding bank debt, resulting in an unsecured loan structure.



Mei May 2013

Protelindo dan anak perusahaannya, Protelindo Finance B.V. ("Protelindo Finance"), menandatangani Pinjaman Berjangka sebesar AS\$350.000.000 dan €40.000.000, dan AS\$125.000.000 Perjanjian Fasilitas Kredit Berulang dengan 33 bank yang diatur oleh Bank DBS, ING, dan Standard Chartered Bank.

Protelindo and its subsidiary, Protelindo Finance B.V. ("Protelindo Finance"), signed a US\$350,000,000 Term Loan, a €40,000,000 Term Loan and a US\$125,000,000 Revolving Credit Facilities Agreement with 33 banks arranged by DBS Bank, ING and Standard Chartered Bank.

Juli July 2013

Protelindo Finance mendapatkan pinjaman sebesar AS\$50 juta dengan tenor 10 tahun dari International Finance Corporation, sebuah unit investasi dari Bank Dunia.

Protelindo Finance secured a 10 year US\$50 million loan from the International Finance Corporation, an investment unit of the World Bank.



3 Maret March 2014

Protelindo mencatatkan Obligasi Protelindo I Tahun 2014 di Bursa Efek Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp1 triliun dengan bunga tetap sebesar 10,5% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2017.

Protelindo listed Protelindo Bonds I Year 2014 on the Indonesia Stock Exchange with a nominal value of IDR1 trillion with a fixed interest of 10.5% per annum maturing February 28, 2017.

19 November November 2014

Protelindo dan Protelindo Finance menandatangani perjanjian fasilitas sebagai berikut:

Protelindo and Protelindo Finance signed the following loan facility agreements:

1. Perjanjian Fasilitas Kredit Berulang sebesar AS\$50.000.000 dengan DBS Bank Ltd. ("Perjanjian Fasilitas DBS").
US\$50,000,000 Revolving Loan Facility Agreement with DBS Bank Ltd. (the "DBS Facility Agreement").
2. Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar EUR20.000.000 dengan ING Bank N.V., Cabang Singapura ("Perjanjian Fasilitas ING").
EUR20,000,000 Term Loan Facility Agreement with ING Bank N.V., Singapore Branch (the "ING Facility Agreement").
3. Perjanjian Pinjaman Berjangka sebesar EUR20.000.000 dan Perjanjian Fasilitas Kredit Berulang sebesar AS\$100.000.000 dengan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited ("Perjanjian Fasilitas-Fasilitas OCBC").
EUR20,000,000 Term Loan and a US\$100,000,000 Revolving Credit Facilities Agreement with Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (the "OCBC Facilities Agreement").
4. Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berulang sebesar AS\$100.000.000 dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura ("Perjanjian Fasilitas SMBC").
US\$100,000,000 Revolving Loan Facility Agreement with Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (the "SMBC Facility Agreement").
5. Perjanjian Fasilitas Kredit Berulang sebesar AS\$90.000.000 dengan grup kreditur yang terdiri dari BNP Paribas, bertindak melalui Cabang Singapura, Credit Suisse AG, Cabang Singapura, CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura, Standard Chartered Bank, Cabang Pusat Keuangan Internasional Dubai, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Cabang Jakarta, dan JPMorgan Chase Bank, N.A., Cabang Jakarta ("Perjanjian Fasilitas-Fasilitas Sindikasi").
US\$90,000,000 Revolving Loan Facilities Agreement with a lender group consisting of BNP Paribas, acting through its Singapore Branch, Credit Suisse AG, Singapore Branch, CIMB Bank Berhad, Singapore Branch, Standard Chartered Bank, Dubai International Financial Centre Branch, The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch, and JPMorgan Chase Bank, N.A, Jakarta Branch (the "Syndicated Facilities Agreement").

27 November November 2014

Protelindo Finance menerbitkan 3,25% Obligasi Senior Tanpa Jaminan dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar AS\$180.000.000 yang jatuh tempo pada tahun 2024.

Protelindo Finance issued US\$180,000,000 in principal amount of 3.25% Senior Unsecured Guaranteed Bonds due in 2024.



Juli July 2015

Protelindo mengakuisisi saham sebesar 100% di PT iForte Solusi Infotek ("iForte") dan secara tidak langsung memperoleh anak perusahaan dari iForte yaitu PT iForte Global Internet. Protelindo acquired 100% ownership interest in PT iForte Solusi Infotek ("iForte") and indirectly acquired iForte's subsidiary, PT iForte Global Internet.

Agustus August 2015

iForte dan Protelindo menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berulang sebesar Rp350 miliar dengan PT Bank DBS Indonesia.

iForte and Protelindo entered into a IDR350 billion Revolving Loan Facility Agreement with PT Bank DBS Indonesia.

Desember December 2015

Protelindo menandatangani Perjanjian Program Manajemen Insentif dan Perjanjian Pinjaman sebesar AS\$9.635.140 dengan Peter Djatmiko.

Protelindo signed a Management Incentive Program Agreement and a US\$9,635,140 Loan Agreement with Peter Djatmiko.



24 Juni June 2016

Protelindo dan iForte menandatangani perjanjian-perjanjian fasilitas pinjaman di bawah ini:

Protelindo and iForte signed the following loan facility agreements:

1. Perjanjian Fasilitas-Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar Rp500 miliar dan AS\$38.000.000 dengan The Bank of Tokyo-Mitsubishi, UFJ, LTD., Cabang Jakarta.
IDR500 billion and US\$38,000,000 Term Loan Facilities Agreement with The Bank of Tokyo-Mitsubishi, UFJ, LTD., Jakarta Branch.
2. Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar Rp1 triliun dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
IDR1 trillion Term Loan Facility Agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
3. Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar Rp1 triliun dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia.
IDR1 trillion Term Loan Facility Agreement with PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia.

30 Juni dan 1 Juli 2016 June 30 and July 1, 2016

1. Menyelesaikan penjualan seluruh saham Protelindo Luxembourg dalam Protelindo Netherlands kepada Cellnex Telecom S.A. ("Cellnex") berdasarkan Share Purchase Agreement tertanggal 27 Mei 2016.
Completed the sell of all Protelindo Luxembourg shares in Protelindo Netherlands to Cellnex Telecom S.A. ("Cellnex") as agreed in the Share Purchase Agreement, dated May 27, 2016.

2. Antara 30 Juni 2016 dan 1 Juli 2016, Protelindo, Protelindo Finance and iForte menandatangani perjanjian novasi dan perubahan atas Perjanjian Fasilitas DBS, Perjanjian Fasilitas ING, Perjanjian Fasilitas-Fasilitas OCBC, Perjanjian Fasilitas SMBC dan Perjanjian Fasilitas-Fasilitas Sindikasi, dimana Protelindo Finance sebagai debitur mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian-perjanjian fasilitas kepada Protelindo dan iForte sebagai penjamin.

Between June 30, 2016 and July 1, 2016, Protelindo, Protelindo Finance and iForte signed a novation and amendment agreement related to the DBS Facility Agreement, ING Facility Agreement, OCBC Facilities Agreement, SMBC Facility Agreement and Syndicated Facilities Agreement whereas Protelindo Finance as debtor assigned its rights and obligations under the facility agreements to Protelindo and iForte as guarantor.

3. Protelindo menyelesaikan pembelian 2.500 menara dari XL, dengan penyewaan kembali oleh XL terhadap 2.433 menara untuk jangka waktu 10 tahun.

Protelindo completed the purchase of 2,500 towers from XL, with the leaseback of space by XL on 2,433 of the towers for a period of 10 years.

3 Agustus August 2016

Protelindo telah menggantikan Protelindo Finance sebagai penerbit 3,25% dari Obligasi Senior Tanpa Jaminan dengan jumlah pokok sebesar AS\$180.000.000 yang akan jatuh tempo pada 2024.

Protelindo has replaced Protelindo Finance as the issuer of the US\$180,000,000 in principal amount of 3.25% Senior Unsecured Guaranteed Bonds due in 2024.

24 November November 2016

Protelindo mencatatkan Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 di Bursa Efek Indonesia dengan nilai nominal Rp800 miliar dan dikeluarkan dengan 3 seri, yaitu:

Protelindo listed Sustainable Bonds I of Protelindo Phase I Year 2016 on the Indonesia Stock Exchange with a nominal value of IDR800 billion and were issued with 3 series, namely:

- Seri A sebesar Rp661 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% per tahun, berjangka waktu tiga tahun, dan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2019;
Series A of IDR661 billion with a fixed interest rate of 7.90% per annum and a term of three years due on November 23, 2019;
- Seri B sebesar Rp36 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun, berjangka waktu lima tahun dan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2021; dan
Series B of IDR36 billion with a fixed interest rate of 8.25% per annum and a term of five years due on November 23, 2021; and
- Seri C sebesar Rp103 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu tujuh tahun dan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2023.
Series C of IDR103 billion with a fixed interest rate of 8.75% per annum and a term of seven years due on November 23, 2023.

21 Desember December 2016

Protelindo menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berulang sebesar Rp500 miliar dengan PT Bank Central Asia, Tbk.

Protelindo signed a IDR500 billion Revolving Loan Facility Agreement with PT Bank Central Asia, Tbk.

23 Maret March 2017

iForte menandatangani perjanjian amandemen perjanjian atas Perjanjian Fasilitas Kredit Berulang dengan nilai sebesar Rp350 miliar tertanggal 11 Agustus 2015 (sebagaimana diubah dengan *Amendment Agreement* tertanggal 1 Juli 2016 dan *Amendment Letter* tertanggal 1 Oktober 2016). iForte menambah jumlah fasilitas utang saat ini hingga Rp500 miliar untuk jangka waktu satu tahun sejak tanggal 23 Maret 2017. Protelindo sebagai perusahaan induk dari iForte menyediakan jaminan perusahaan dan menandatangani Surat Konfirmasi Jaminan untuk memastikan pemenuhan kewajiban iForte untuk perjanjian fasilitas pinjaman ini.

iForte signed an amendment agreement to the IDR350 billion Revolving Loan Facility Agreement with PT Bank DBS Indonesia dated 11 August 2015 (as amended with Amendment Agreement dated 1 July 2016 and Amendment Letter dated 1 October 2016). iForte increased the amount of the existing debt facilities to up to IDR 500 billion for one year term commencing from 23 March 2017. Protelindo as the parent company of iForte provided a corporate guarantee and signed a Guarantee Confirmation Letter to secure the fulfillment of iForte's liability in this loan facility agreement.

28 Februari February 2017

Protelindo telah sepenuhnya membayar kembali Obligasi Protelindo I Tahun 2014.

Protelindo has repaid Protelindo Bonds I Year 2014.

28 Februari February 2017

Protelindo menandatangani perjanjian-perjanjian fasilitas pinjaman berikut untuk modal kerja:

Protelindo signed the following working capital loan facility agreements:

- Perjanjian Kredit dengan nilai hingga Rp250 miliar atau setara AS\$17.000.000 dengan The Bank of Tokyo-Mitsubishi, U.F.J., Ltd., Cabang Jakarta; dan
Up to IDR250 billion Credit Agreement or equivalent to US\$17,000,000 with The Bank of Tokyo-Mitsubishi, U.F.J., Ltd., Jakarta Branch; and
- Perjanjian Kredit dengan nilai hingga Rp150 miliar dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
Up to IDR150 billion Facility Agreement with PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

iForte menyediakan jaminan perusahaan untuk mengamankan pemenuhan liabilitas Protelindo untuk perjanjian-perjanjian fasilitas pinjaman tersebut di atas.

iForte provided corporate guarantee to secure the fulfillment of Protelindo's liability for the above loan facility agreements.

5 Juni June 2017

Protelindo mengumumkan perubahan Komisaris Independen Protelindo yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Bacelius Ruru, digantikan oleh Bapak Kusmayanto Kadiman per tanggal 31 Mei 2017.

Protelindo announced the change of the Independent Commissioner of Protelindo formerly held by Mr. Bacelius Ruru, replaced by Mr. Kusmayanto Kadiman as of May 31, 2017.

6 Juni June 2017

Protelindo mengumumkan komposisi baru anggota Komite Audit efektif per tanggal 31 Mei 2017 yaitu sebagai berikut:

Protelindo announced the new composition of the members of the Audit Committee effectively as of May 31, 2017, as follows:

Ketua : Bapak Kusmayanto Kadiman (beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen);

Chairman : Mr. Kusmayanto Kadiman (who also serves as an Independent Commissioner);

Anggota : Bapak Anang Yudiansyah Setiawan; dan

Member : Mr. Anang Yudiansyah Setiawan; and

Anggota : Ibu Patricia Marina Sugondo.

Member : Mrs. Patricia Marina Sugondo.

19, 20 dan 21 Juni 2017 June 19, 20, and 21, 2017

Protelindo menandatangani amandemen perjanjian dengan DBS Bank Ltd (DBS); Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (SMBC); Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC) (bersama disebut, "Amandemen Perjanjian-Perjanjian Pinjaman Protelindo") dan perjanjian fasilitas dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sehubungan dengan Amandemen Perjanjian-Perjanjian Pinjaman Protelindo, iForte memberikan jaminan perusahaan dan menandatangani Surat Konfirmasi Jaminan dengan DBS Bank Ltd, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch dan Oversea-Chinese Banking Corporation.

Protelindo signed amendment agreements with DBS Bank Ltd (DBS); Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (SMBC); Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC) (together, "Protelindo Amendment Loan Agreements") and a new facility agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. In relation to the Protelindo Amendment Loan Agreements, iForte provided a corporate guarantee and signed guarantee confirmation with each of DBS Bank Ltd, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch and Oversea-Chinese Banking Corporation.

Informasi material terkait dengan Amandemen Perjanjian-Perjanjian Pinjaman Protelindo dan perjanjian fasilitas baru dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk:

Material information related to the Protelindo Amendment Loan Agreements and new facility Agreement with PT Bank Mandiri (Persero), Tbk:

1. DBS: mengubah marjin yang berlaku menjadi satu koma empat puluh (1,40%) per tahun.
2. SMBC: memperpanjang jangka waktu menjadi 6 tahun terhitung dari tanggal 20 Juni 2017 dan mengubah marjin yang berlaku menjadi satu koma lima puluh (1,50%) per tahun.
3. OCBC: memperpanjang jangka waktu menjadi 8 tahun terhitung dari tanggal 21 Juni 2017 dan mengubah marjin yang berlaku untuk masing-masing (a) Fasilitas Pinjaman A, satu koma lima puluh persen (1,50%) per tahun; dan (b) Fasilitas Pinjaman B, satu koma lima puluh persen (1,50%) per tahun.
4. Perjanjian Bank Mandiri:
 - a) Total komitmen hingga mencapai Rp1.000 miliar;
 - b) Jangka waktu: maksimal 5 tahun dari tanggal penandatanganan atau tanggal 19 Juni 2022;
 - c) Tujuan: Tujuan Umum Perusahaan, yang dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
 - d) Pembiayaan Perseroan secara umum, yang dapat dipergunakan antara lain untuk:
 - (i) Pembayaran utang Protelindo melalui pembiayaan kembali dan/atau skema *take over*; dan
 - (ii) Belanja modal;
 - e) Suku Bunga: (a) Jakarta Interbank Offered Rate (1 atau 3 bulan) dan (b) marjin yang berlaku adalah satu koma delapan persen (1,8%) per tahun.

1. DBS: amending the applicable margin to one point forty (1.40%) per annum.
2. SMBC: extending the term to 6 years commencing from June 20, 2017 and amending the applicable margin to one point fifty (1.50%) per annum.
3. OCBC: extending the term to 8 years commencing from June 21, 2017 and amending the applicable margin for each (a) Facility A Loan, one point fifty per cent (1.50%) per annum; and (b) Facility B Loan, one point fifty per cent (1.50%) per annum.
4. Bank Mandiri Agreement:
 - a) Total commitment up to IDR1,000 billion;
 - b) Term: maximum 5 years from the signing date or on June 19, 2022;
 - c) Purposes: General Corporate Purpose, which can be used for the following matters:
 - d) Pembiayaan Perseroan secara umum, yang dapat dipergunakan antara lain untuk:
 - (i) payments on existing Protelindo debts through refinancing and/or takeover schemes; and
 - (ii) capital expenditure;
 - e) Interest: (a) Jakarta Interbank Offered Rate (1 or 3 months) and (b) an applicable margin of one point eight percent (1.8%) per annum.

6 September September 2017

Protelindo menandatangani amandemen perjanjian untuk perjanjian pinjaman dengan PT Bank Central Asia, Tbk tertanggal 21 Desember 2016 untuk mengubah jumlah komitmen, periode ketersediaan dan tanggal jatuh tempo final.

Protelindo signed an amendment agreement to the loan agreement with PT Bank Central Asia, Tbk dated December 21, 2016 to change the commitment amount, availability period and final maturity date.

15 September 2017

Protelindo mengumumkan perubahan Sekretaris Perusahaan Protelindo yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Aditya Masno, digantikan oleh Bapak Haryo Dewanto efektif per tanggal 15 September 2017. Protelindo announced the change of the Corporate Secretary of Protelindo formerly held by Mr. Aditya Masno, replaced by Mr. Haryo Dewanto effective as of September 15, 2017.

15 September 2017

Protelindo mengumumkan perubahan Kepala Departemen Audit Internal Protelindo yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Johannes Edwin, digantikan oleh Bapak Haryo Dewanto efektif per tanggal 22 Agustus 2017. Protelindo announced the change of the Head of the Internal Audit Department of Protelindo formerly held by Mr. Johannes Edwin, replaced by Mr. Haryo Dewanto effective as of August 22, 2017.

1 November November 2017

Protelindo mengumumkan perubahan Sekretaris Perusahaan Protelindo yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Haryo Dewanto, digantikan oleh Ibu Maya Marcella Widjaja efektif per tanggal 1 November 2017.

Protelindo announced the change of the Corporate Secretary of Protelindo formerly held by Mr. Haryo Dewanto, replaced by Mrs. Maya Marcella Widjaja effective as of November 1, 2017.

30 November November 2017

Protelindo membagikan dividen tunai interim sejumlah Rp92,13 per saham untuk SMN, TMG dan CGS.

Protelindo distributed an interim cash dividend in the amount of IDR92.13 per share to SMN, TMG and CGS.

6 Desember December 2017

Protelindo mendapatkan fasilitas *bank guarantee* dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sejumlah Rp100 miliar yang dapat digunakan oleh PT iForte Global Internet ("IGI"). Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk jaminan pembayaran, menawarkan obligasi, atau kinerja obligasi Perseroan dan/atau aktivitas bisnis IGI.

Protelindo obtained a bank guarantee facility from PT Bank Mandiri (Persero), Tbk in the amount of IDR100 billion which can be used by PT iForte Global Internet ("IGI"). The purposes of this facility are for payment guarantee, bid bond, or performance bond of the Company and/or IGI's business activities.

14 Desember December 2017

iForte menandatangani amandemen perjanjian untuk Perjanjian Fasilitas Kredit Berulang sebesar Rp500 miliar dengan PT Bank DBS Indonesia pada tanggal 11 Agustus 2015. Protelindo sebagai perusahaan induk dari iForte memberikan jaminan perusahaan untuk memastikan pemenuhan kewajiban iForte dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini.

iForte signed an amendment agreement to the IDR 500 billion Revolving Loan Facility Agreement with PT Bank DBS Indonesia dated August 11, 2015. Protelindo as the parent company of iForte provided a corporate guarantee to secure the fulfillment of iForte's liability in this loan facility agreement.



Nama Perusahaan Company's Name

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Bidang Usaha Line of Business

Jasa Penunjang Telekomunikasi
Telecommunications Supporting Services

Alamat Perusahaan Company's Address

Kantor Pusat

Head Office

Jl. PHH. Mustopa, Surapati
Core Blok AB (Anggrek
Boulevard) No. 16,
Kelurahan Pasirlayung,
Kecamatan Cibeunying
Kidul Bandung 40192
Telp : +62 22 87240220
Fax : +62 22 87242652

Kantor Cabang

Branch Office

Menara BCA, 53rd & 55th Floor
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Telp : +62 21 23585500
Fax : +62 21 23586446

Hubungan Investor Investor Relations

Menara BCA, 55th Floor
Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310
Telp : +62 21 23585500
Fax : +62 21 23586446
Email : investor.relations@protelindo.net
Website : www.protelindo.co.id / www.ptsmn.co.id

Nama Obligasi Bonds Name

OBLIGASI PROTELINDO I TAHUN 2014
PROTELINDO BONDS I YEAR 2014

OBLIGASI BERKELANJUTAN I PROTELINDO TAHAP I
TAHUN 2016
SUSTAINABLE BONDS I OF PROTELINDO PHASE I
YEAR 2016

OBLIGASI SENIOR TANPA JAMINAN JATUH TEMPO
TAHUN 2024
THE SENIOR UNSECURED GUARANTEED BONDS
DUE 2024

Tempat Pencatatan Saham Stock Listing

PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange

Singapore Exchange Securities Trading Limited

SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN

BRIEF COMPANY HISTORY

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Perseroan") didirikan pada tahun 2003 di Bandung, Jawa Barat. Perseroan merupakan pemilik dan operator menara independen terbesar untuk perusahaan-perusahaan komunikasi nirkabel di Indonesia.

Didirikan pada tahun 2003, Protelindo merupakan pemilik dan operator menara independen terbesar untuk perusahaan-perusahaan komunikasi nirkabel di Indonesia. Sampai dengan 31 Desember 2017, Protelindo telah memiliki dan mengoperasikan sekitar 14.854 lokasi menara. Kegiatan usaha utama Protelindo adalah penyewaan ruang untuk lokasi menara yang dapat digunakan bersama kepada seluruh operator nirkabel besar di Indonesia dengan perjanjian sewa jangka panjang. Tempat yang disewakan terdiri dari ruang vertikal pada menara dimana para pelanggan kami dapat memasang antena frekuensi radio dan antena *microwave*, dan juga ruang lahan untuk setiap lokasinya untuk penempatan *shelter* dan kabinet milik para pelanggan yang merupakan tempat penyimpanan perangkat elektronik dan penyediaan listrik. Portofolio menara kami yang baru merupakan yang terbesar di Indonesia dan terluas secara geografis.

Grup memiliki komitmennya untuk menjadi perusahaan menara terkemuka di Indonesia. Pada akhir 2017, kami memiliki dan mengoperasikan sekitar 14.854 lokasi menara di Indonesia, terutama di area Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi. Pertumbuhan portofolio menara kami mendorong Perseroan untuk mencapai capaian signifikan di dalam industri, dikarenakan kami telah menjadi perusahaan menara independen pertama di Indonesia yang memiliki dan mengoperasikan portofolio lebih dari 14.800 lokasi menara dengan lebih dari 25.000 penyewa. Portofolio menara kami yang tersebar secara geografis memberikan cakupan di seluruh kepulauan Indonesia, sehingga memperkuat posisi kami sebagai penyedia menara yang diutamakan mampu memenuhi kebutuhan nasional, regional, lokal dan perusahaan telekomunikasi nirkabel yang sedang berkembang.

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (the "Company") was established in Bandung, West Java in 2003. The Company is the largest independent owner and operator of towers for wireless communications companies in Indonesia.

Established in 2003, Protelindo is the largest independent owner and operator of towers for wireless communications companies in Indonesia. As of December 31, 2017, Protelindo owned and operated approximately 14,854 tower sites. Protelindo's primary business is leasing space on its multi-tenant tower sites to major wireless operators in Indonesia pursuant to long term lease agreements. This leased space consists of both vertical space on the tower, on which our customers can install radio frequency antennas and microwave antennas, as well as ground space at each site for our customers' shelters and cabinets that house electronic equipment and power supplies. Our tower portfolio is the largest in Indonesia among independent tower operators with the broadest geographic footprint.

The Group is committed to be the leading tower company in Indonesia. At the end of 2017, we owned and operated approximately 14,854 tower sites in Indonesia, primarily in Sumatra, Java, Bali, Kalimantan and Sulawesi. The growth in our tower portfolio propelled the Company to achieve another industry milestone as we became the first independent tower company in Indonesia to own and operate a portfolio in excess of 14,800 tower sites with more than 25,000 tenants. Our geographically diversified tower portfolio offers coverage across the entire Indonesia archipelago, thereby strengthening our position as the preferred tower provider able to address the needs of national, regional, local and emerging wireless communication company operators.

Protelindo beroperasi secara independen dari operator komunikasi nirkabel dan memiliki pelanggan yang beragam dan para pelanggan kami yang penting mencakup para operator telekomunikasi besar di Indonesia: PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel"), PT XL Axiata Tbk ("XL Axiata"), PT Indosat Tbk ("Indosat"), dan PT Hutchison 3 Indonesia ("H3I").

Protelindo operates independently of the wireless communication operators and has a diversified customer base. Our key customers include the major telecommunications operators in Indonesia such as: PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel"), PT XL Axiata Tbk ("XL Axiata"), PT Indosat Tbk ("Indosat"), and PT Hutchison 3 Indonesia ("H3I").



PETER DJATMIKO

Pendiri dan Direktur Utama iForte
Founder and President Director of iForte

Sebagai hasil dari akuisisi iForte, kami memiliki lebih dari 888 menara *micro-cell* dan 6 hotel BTS yang beroperasi dengan lebih dari 4.500 kilometer jaringan *fiber optic* dan lebih dari 250 *Points-of Presence* ("PoP") di kota metropolitan seperti Jakarta dan Surabaya. Kami telah memasang jaringan *fiber optic* sepanjang Koridor Busway di Jakarta dengan menawarkan pelayanan 3G *WiFi-offload* di daerah dengan lalu lintas yang padat ini. Selain itu, kami memberikan pelayanan *Very Small Aperture Terminal* ("VSAT") di seluruh Indonesia. Pada bulan Juni 2016, kami menyelesaikan pembelian sekitar 2.500 menara dari XL, dengan penyewaan kembali oleh XL sejumlah 2.433 menara untuk jangka waktu 10 tahun. 2.500 menara ini merupakan bagian dari 14.854 portofolio menara kami.

As a result of the acquisition of iForte, we have over 888 micro-cell towers and 6 BTS hotels in operation with more than 4,500 kilometres of fiber optic network and over 250 Points-of-Presence ("PoP") locations in metropolitan Jakarta and Surabaya. We have installed our fiber optic network along the Busway Corridors in Jakarta to offer 3G WiFi-offload services in these heavily trafficked areas. In addition, we provide Very Small Aperture Terminal ("VSAT") satellite services across Indonesia. In June 2016, we completed the purchase of approximately 2,500 towers from XL, with a leaseback of space by XL on 2,433 of the towers for a period of 10 years. These 2,500 towers are included in our 14,854 towers portfolio.

BIDANG USAHA

LINES OF BUSINESS

Bidang usaha utama Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi.

The Company's primary line of business is engaging in telecommunication supporting services.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maka Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha berikut ini:

Based on its Articles of Association, the Company may engage in the following business activities:

- a. Pembangunan, penyediaan, pembelian dan pengelolaan sarana telekomunikasi; dan
- b. Menyewakan menara untuk kepentingan khusus sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi.

- a. To construct, provide, purchase and operate telecommunication infrastructures; and
- b. To lease towers for specific interest as infrastructure to install telecommunication equipment.

LAYANAN KAMI

OUR SERVICES

- Program *Build-to-Suit*
Build-to-Suit Program
- Sewa Lokasi
Site Rental
- Desain Jaringan dan Pengembangan Lokasi
Network Design and Site Development
- Akuisisi Lokasi
Site Acquisition
- Pengembangan dan Konstruksi Lokasi
Site Development and Construction
- Layanan M-WIFO (*Metropolitan Wireless Fiber Optic*)
M-WIFO (Metropolitan Wireless Fiber Optic) services
- Layanan VSAT
VSAT services

VISI VISION

MENJADI PENYEDIA MULTI LAYANAN TELEKOMUNIKASI DAN INFRASTRUKTUR TERKEMUKA DAN INOVATIF.

TO BE INDONESIA'S PREMIER AND MOST INNOVATIVE TELECOMMUNICATIONS MULTI-SERVICE AND INFRASTRUCTURE PROVIDER.

MISI MISSION

BERKOLABORASI DENGAN PELANGGAN KAMI UNTUK MEMBERIKAN NILAI TAMBAH LAYANAN YANG UNGGUL.

COLLABORATE WITH OUR CUSTOMERS TO PROVIDE EXCELLENT VALUE ADDED SERVICES.

NILAI-NILAI INTI CORE VALUES

KENALI PELANGGAN KNOW YOUR CUSTOMER

- Hubungan yang baik dengan pelanggan
Relations with customer
- Mengerti kebutuhan pelanggan
Understand the customer needs
- Berorientasi pada layanan
Service Oriented

INOVASI INNOVATION

- Peningkatan secara berkelanjutan
Continuous improvement
- Informasi dan teknologi yang *up-to-date*
Up-to-date information and technology

PROFESIONALISME PROFESSIONALISM

- Akuntabilitas
Accountability
- Dapat diandalkan
Reliability
- Beretika
Ethics
- Disiplin
Discipline

INTEGRITAS INTEGRITY

- Jujur dan dapat dipercaya
Honest and trustworthy
- Bertindak sesuai dengan nilai inti dan kode etik
Act in accordance to the values and code of conduct

KERJASAMA TIM TEAM WORK

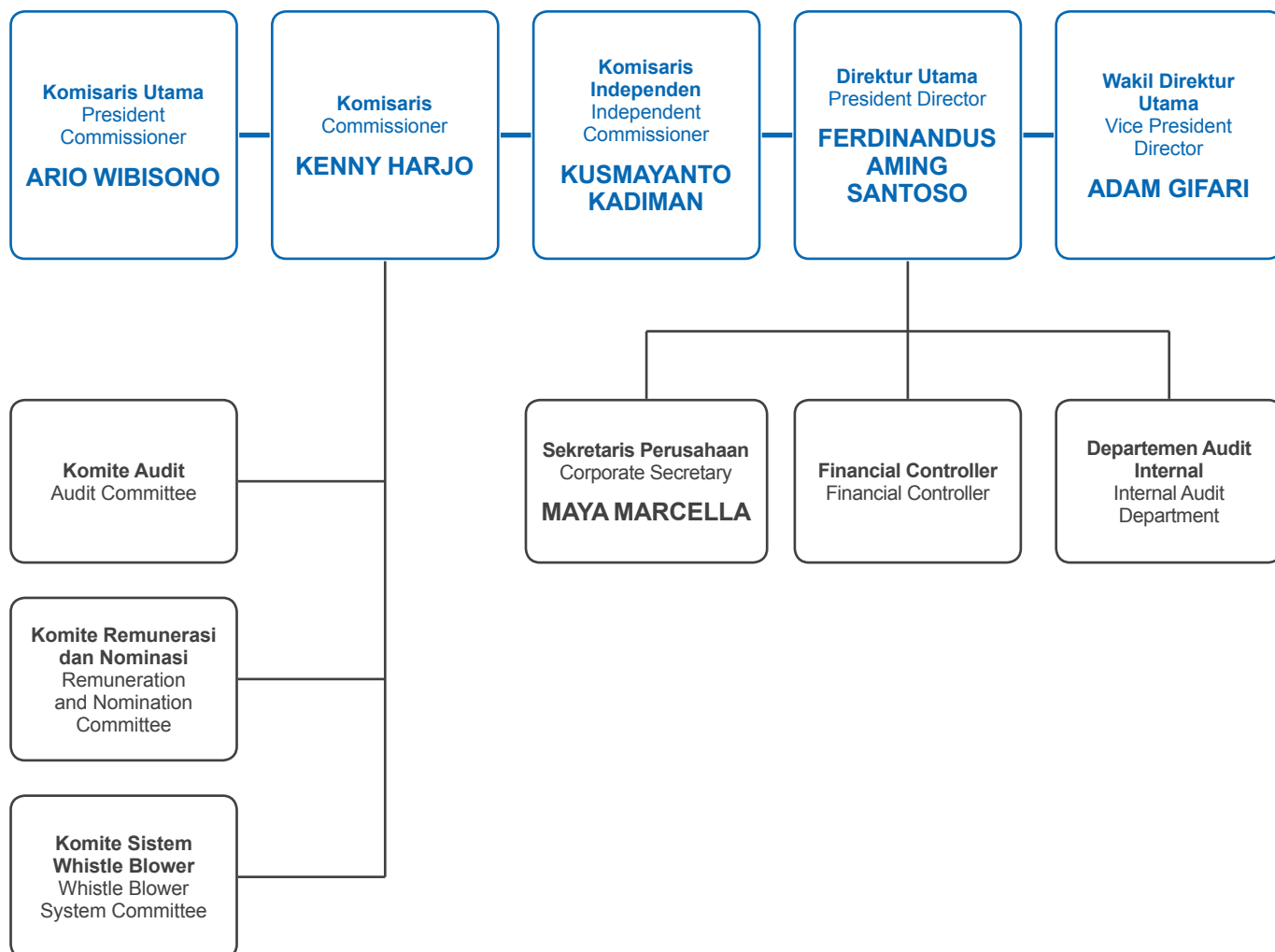
- Peran individu dalam tim
Individual role within team
- Mengelola pekerjaan dalam tim
Managing work in teams

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah meninjau dan menyimpulkan bahwa Visi, Misi, dan Nilai Inti Perusahaan masih sangat sejalan dengan budaya dan semangat dari Grup.

The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company have reviewed and concluded that the Company's existing Vision, Missions, and Core Values remain suitable with the culture and spirit of the Group.

STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATIONAL STRUCTURE





PROFIL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILES



ARIO WIBISONO

Komisaris Utama | President Commissioner

Bapak Wibisono, 55 tahun, Warga Negara Indonesia, meraih gelar Magister pada tahun 1986 dari Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dan Sarjana Teknik Sipil pada tahun 1985 dari Institut Teknologi Bandung.

Bapak Wibisono ditunjuk sebagai Komisaris SMN pada Juni 2011 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan SMN tertanggal 20 Juni 2011. Pengangkatan terakhir beliau sebagai Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tertanggal 27 Juni 2014 untuk masa jabatan lima tahun. Beliau juga merupakan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 10 November 2014. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama di Protelindo sejak Juni 2014. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Protelindo dari tahun 2009–2014, Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari tahun 2006–2007, Direktur PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari tahun 1999–2006, Direktur Peregrine Sewu Securities sekaligus menjabat sebagai Asisten Direktur Peregrine Fixed Income Limited - Hongkong dari tahun 1996–1999.

Mr. Wibisono, 55 years old, Indonesian citizen, earned a Masters Degree in 1986 from the PPM School of Management and earned a Civil Engineering Degree in 1985 from Bandung Institute of Technology.

Mr. Wibisono has also served as the Commissioner of SMN since June 2011 based on resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of the SMN dated June 20, 2011. His latest appointment as a Commissioner is based on resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company dated June 27, 2014 for a five year term. He has also been a member of the Remuneration and Nomination Committee since November 10, 2014. He also served as the President Commissioner of Protelindo since June 2014. Previously, he served as a Commissioner of Protelindo from 2009–2014, the President Director of PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas from 2006–2007, a Director of PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas from 1999–2006, a Director of Peregrine Sewu Securities and at the same time served as an Assistant Director of Peregrine Fixed Income Limited - Hong Kong from 1996–1999.



KENNY HARJO

Komisaris | Commissioner

Bapak Harjo, 60 tahun, Warga Negara Indonesia, telah ditunjuk sebagai Komisaris Perseroan sejak Juni 2014 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tertanggal 27 Juni 2014 untuk masa jabatan lima tahun. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Agustus 2008–2011 dan Komisaris Utama Perseroan sejak Juni 2011–2014. Bapak Harjo juga menjabat sebagai Komisaris PT Ecogreen Oleochemichals sejak tahun 2004. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Direktur SMN.

Sebelumnya, Bapak Harjo menjabat sebagai Auditor di PricewaterhouseCoopers di Pittsburgh, Amerika Serikat sejak 1981–1983; Akuntan Senior PT Marathon Petroleum Indonesia di Jakarta sejak 1985–1987; Deputy Kontroler di PT Kalimantan Plantation Development, Jakarta sejak 1988–1989; Deputy Direktur Dharmala Group di Jakarta sejak 1990–2001; dan sebagai *Business Development Manager* PT Djarum di Jakarta sejak 2002–2004.

Bapak Harjo memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada tahun 1980 dari University of Southern California di Amerika Serikat. Beliau memperoleh izin sebagai Akuntan Publik yang tersertifikasi pada tahun 1984 dari negara bagian Colorado dan negara bagian Montana di Amerika Serikat.

Mr. Harjo, 60 years old, Indonesian Citizen, was appointed as Commissioner of the Company since June 2014 based on on resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company dated June 27, 2014 for a five-year term. He served as a Director of the Company from August 2008–2011, and as the President Commissioner of the Company from June 2011–2014. Mr. Harjo has been a Commissioner of PT Ecogreen Oleochemichals since 2004. Currently, he also serves as a Director of SMN.

Previously, Mr. Harjo served as an Auditor with PricewaterhouseCoopers in Pittsburgh, USA from 1981–1983; Senior Accountant of PT Marathon Petroleum Indonesia, Jakarta from 1985–1987; Deputy Controller of PT Kalimantan Plantation Development, Jakarta from 1988–1989; Deputy Director of the Dharmala Group, Jakarta from 1990–2001; and Business Development Manager of PT Djarum, Jakarta from 2002–2004.

Mr. Harjo graduated with a degree in Accountancy in 1980 from the University of Southern California, USA. He earned the designation as a Certified Public Accountant in 1984 from the State of Colorado and the State of Montana, USA.



KUSMAYANTO KADIMAN

Komisaris Independen | Independent Commissioner

Bapak Kadiman, 63 tahun, warga negara Indonesia, meraih gelar Doktor Filsafat (PhD) pada tahun 1998 dari Australian National University dan juga meraih gelar Sarjana Teknik Fisika pada tahun 1977 dari Institut Teknologi Bandung.

Bapak Kadiman ditunjuk menjadi Komisaris Independen Protelindo pada bulan Juni 2017 berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Protelindo tanggal 2 Juni 2017.

Bapak Kadiman telah menjabat beberapa posisi di bidang politik dan akademis. Bapak Kadiman menjabat sebagai Direktur PT Alas Buana Raya pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1995, Direktur Pusat Penelitian Teknologi di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1999 dan Sekretaris Rektor di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2004. Bapak Kadiman juga menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Indonesia pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2009.

Beliau telah aktif dalam berbagai organisasi, termasuk menjadi anggota Asian Control Professor Association (ACPA), International Federation of Automatic Control (IFAC) dan Institute of Electrical Engineering (IEEE).

Mr. Kadiman, 63 years old, Indonesian citizen, earned his Doctor of Philosophy (PhD) in 1988 from Australian National University and earned a Physics Engineering Degree in 1977 from Bandung Institute of Technology.

Mr. Kadiman was appointed as the Independent Commissioner of Protelindo in June 2017 based on Resolutions of the Shareholders of Protelindo dated 2 June 2017.

Mr. Kadiman has held several government and academic positions. Mr. Kadiman served as Director of PT Alas Buana Raya in 1992 to 1995, Director of Technology Research Center at Bandung Institute of Technology in 1996 to 1999, Rector Secretary at Bandung Institute of Technology in 1999 to 2000 and Rector at Bandung Institute of Technology in 2001 until 2004. Mr. Kadiman also served as the Minister of Research and Technology of the Republic of Indonesia in 2004 to 2009.

He has been active in several organizations, including a member of Asian Control Professor Association (ACPA), International Federation of Automatic Control (IFAC) and Institute of Electrical Engineering (IEEE).

HUBUNGAN AFILIASI

AFFILIATE RELATIONS

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama Perseroan.

All members of the Board of Commissioners of the Company have no affiliate relations with other members of the Board of Commissioners or the ultimate shareholder of the Company.

PERNYATAAN INDEPENDENSI

KOMISARIS INDEPENDEN

STATEMENT OF INDEPENDENCE OF INDEPENDENT COMMISSIONER

Komisaris Independen Perseroan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

The Independent Commissioner of the Company has no financial, management, stock ownership and/or family relationships to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or Controlling Shareholders, or a relationship with the Company that may affect their ability to act independently.

PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS' PROFILES



FERDINANDUS AMING SANTOSO

Direktur Utama | President Director

Bapak Santoso, 52 tahun, Warga Negara Indonesia, telah ditunjuk sebagai Direktur Utama Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 20 November 2015 untuk masa jabatan lima tahun dan juga Direktur Utama SMN sejak November 2015. Beliau bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional Perseroan. Beliau juga menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris di beberapa perusahaan dalam Grup Djarum, termasuk PT Unitras Energy sebagai Direktur, PT Cipta Karya Bumi Indah sebagai Direktur Utama, PT BCA Sekuritas sebagai Komisaris Utama dan PT Grand Indonesia sebagai Komisaris. Sebelumnya beliau pernah bekerja di Divisi Keuangan Perusahaan Ernst & Young, Jakarta dan *Business Advisor* pada Arthur Andersen Global Corporate Finance, Jakarta.

Bapak Santoso memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Tarumanegara Jakarta pada tahun 1988 dengan jurusan Akuntansi.

Mr. Santoso, 52 years old, Indonesian Citizen, was appointed as President Director of the Company based on resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company dated November 20, 2015 for a five-year term as well as the President Director of SMN since November 2015. He is responsible for the operational activities of the Company. He serves as a member of the Board of Directors and Board of Commissioners of several companies within the Djarum Group, including PT Unitras Energy as a Director, PT Cipta Karya Bumi Indah as the President Director, PT BCA Sekuritas as the President Commissioner and PT Grand Indonesia as a Commissioner. He previously worked in the Corporate Finance division of Ernst & Young, Jakarta, and as a Business Advisor of Arthur Andersen Global Corporate Finance, Jakarta.

Mr. Santoso graduated from the University of Tarumanegara, Jakarta in 1988 with a degree in Accounting.



ADAM GIFARI

Wakil Direktur Utama | Vice President Director

Bapak Gifari, 40 tahun, Warga Negara Indonesia, telah ditunjuk sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 20 November 2015 untuk masa jabatan lima tahun dan juga Wakil Direktur Utama SMN sejak November 2015. Beliau bertanggung jawab terhadap bidang keuangan perusahaan (*corporate finance*) dan hubungan investor Perseroan. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak April 2007–2015 dan juga Direktur Utama SMN sejak November 2009–2015. Sebelum menjabat di Perseroan, beliau bekerja pada Divisi *Investment Banking* di PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas pada tahun 2003–2007 dan sebelumnya beliau menjabat sebagai *Research Analyst* di PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari 1999–2002.

Bapak Gifari, memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Indonesia pada tahun 1999 dengan jurusan Manajemen Keuangan.

Mr. Gifari, 40 years old, Indonesian Citizen, was appointed as Vice President Director of the Company based on resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company dated November 20, 2015 for a five-year term as well as a Vice President Director of SMN since November 2015. He is responsible for corporate finance and investor relations for the Company. He served as the President Director of the Company from April 2007–2015, and as the President Director of SMN from November 2009–2015. Prior to the Company, Mr. Gifari served in the Investment Banking Division of PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas from 2003–2007 and as a Research Analyst for PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas from 1999–2002.

Mr. Gifari graduated from the University of Indonesia in 1999 with a degree in Financial Management.



STEPHEN DUFFUS WEISS

Wakil Direktur Utama | Vice President Director

Bapak Weiss, 63 tahun, Warga Negara Amerika Serikat, telah ditunjuk sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 20 November 2015 untuk masa jabatan lima tahun dan *Chief Financial Officer* Perseroan dan juga Wakil Direktur Utama dan *Chief Financial Officer* SMN sejak November 2015. Beliau bertanggung jawab terhadap bidang keuangan perusahaan (*corporate finance*) dan hubungan investor Perseroan. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Independen SMN sejak Juni 2014–2015. Sebelum bergabung dengan Perseroan, Bapak Weiss memiliki pengalaman di industri perbankan selama 15 tahun dengan jabatan terakhir sebagai kepala *TMT and Renewable Energy Sector* untuk The Royal Bank of Scotland di Asia. Sebelumnya, Bapak Weiss pernah bekerja di First Interstate Bank, Standard Chartered Bank, dan ABN Amro Bank di bidang perbankan dan Indosat di Indonesia dan Tele2 di Swedia untuk bidang korporasi. Sebelumnya, Bapak Weiss merupakan *Foreign Service Officer* di US Department of State untuk Turki dan Mesir. Beliau meraih gelar *Bachelors of Science Degree in Economics* dari Stanford University dan *Masters of Business Administration* dari Anderson School of Management di University of California, Los Angeles.

Mr. Weiss, 63 years old, American Citizen, was appointed as Vice President Director of the Company based on resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company dated November 20, 2015 for a five-year term and Chief Financial Officer of the Company as well as a Vice President Director and Chief Financial Officer of SMN from November 2015. He is responsible for corporate finance and investor relations of the Company. He served as an Independent Director of SMN from June 2014–2015. Prior to joining the Company, Mr. Weiss was in the banking industry for 15 years with his last position as head of the TMT and Renewable Energy Sector for The Royal Bank of Scotland in Asia. Mr. Weiss has also worked for First Interstate Bank, Standard Chartered Bank, and ABN Amro Bank and for Indosat in Indonesia and Tele2 in Sweden in corporate roles. Before that, Mr. Weiss was a Foreign Service Officer with the US Department of State serving in Turkey and Egypt. He earned his Bachelors of Science Degree in Economics from Stanford University and his Masters of Business Administration from the Anderson School of Management at University of California, Los Angeles.



RINALDY SANTOSA

Direktur | Director

Bapak Santosa, 49 tahun, Warga Negara Indonesia, telah ditunjuk sebagai Direktur Perseroan sejak Juli 2010 berdasarkan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan tertanggal 14 Juli 2010. Pengangkatan terakhir beliau sebagai Direktur berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tertanggal 27 Juni 2014 untuk masa jabatan lima tahun. Beliau bertanggung jawab terutama untuk mengawasi operasional keuangan dan akuntansi Perseroan. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur SMN sejak Juni 2010–2014.

Sebelumnya, beliau bekerja dengan PricewaterhouseCoopers selama 9 tahun dari tahun 1993–2002; Direktur di Indopacific Public Relation dari tahun 2002–2003; Financial Specialist di Conoco Philips dari tahun 2003–2004; Kepala Konsultan untuk LM Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dari tahun 2004–2005; CFO Eye Corp Media Indonesia dari tahun 2005–2007; dan VP Keuangan Perseroan dari tahun 2007–2009.

Bapak Santosa meraih gelar Sarjana Akuntansi pada tahun 1993 dari Universitas Trisakti dan gelar Pasca Sarjana di bidang Finance pada tahun 1997 dari University of Technology, Sydney, Australia.

Mr. Santosa, 49 years old, Indonesian Citizen, was appointed as Director of the Company since July 2010 based on resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company dated July 14, 2010. His latest appointment as a Director is based on resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company dated June 27, 2014 for a five-year term. He is primarily responsible for overseeing the Company's finance and accounting operation. He served as a Director of SMN from June 2010-2014.

Previously, he worked with PricewaterhouseCoopers for 9 years from 1993–2002; a Director for Indopacific Public Relation from 2002–2003; Financial Specialist for Conoco Phillips from 2003–2004; a Principal Consultant for LM Faculty of Economics Universitas Indonesia from 2004–2005; CFO for Eye Corp Media Indonesia from 2005–2007; and VP of Finance for the Company from 2007–2009.

Mr. Santosa earned his Bachelor's Degree in 1993 in Accounting from Trisakti University and earned a Master's Degree in Finance in 1997 from the University of Technology, Sydney, Australia.



ONGGO WIJAYA

Direktur | Director

Bapak Wijaya, 41 tahun, Warga Negara Indonesia, telah ditunjuk sebagai Direktur Perseroan sejak April 2012 berdasarkan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan tertanggal 2 April 2012. Pengangkatan terakhir beliau sebagai Direktur berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tertanggal 27 Juni 2014 untuk masa jabatan lima tahun. Beliau bertanggung jawab atas operasional proyek Perseroan. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak Mei 2008 sebagai *Project Director* lalu dipromosikan menjadi *Vice President of Development* pada April 2010. Sebelum bergabung dengan Perseroan, Bapak Wijaya bekerja di PT Siemens Indonesia dari tahun 2001-2007 dengan jabatan terakhir sebagai *Project Control Manager*; PT Nokia Siemens Network sebagai *Cost and Progress Manager* pada tahun 2007; dan PT Mobile-8 Telecom Tbk sebagai *Senior Project Manager* dari tahun 2007-2008.

Bapak Wijaya lulus dengan gelar Teknik Elektro pada tahun 2000 dari Universitas Brawijaya.

Mr. Wijaya, 41 years old, Indonesian Citizen, was appointed as Director of the Company since April 2012 based on Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company dated April 2, 2012. His latest appointment as a Director is based on resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company dated June 27, 2014 for a five-year term. He is responsible for project operations of the Company. He joined the Company in May 2008 as a Project Director and was then promoted to Vice President of Development in April 2010. Prior to joining the Company, Mr. Wijaya worked at PT Siemens Indonesia from 2001-2007 with his last position as Project Control Manager; PT Nokia Siemens Network as Cost and Progress Manager in 2007; and PT Mobile-8 Telecom Tbk from 2007-2008 as Senior Project Manager.

Mr. Wijaya graduated with a degree in Electrical Engineering in 2000 from the University of Brawijaya.



EKO SANTOSO HADIPRODJO

Direktur | Director

Bapak Hadiprodjo, 46 tahun, Warga Negara Indonesia, telah ditunjuk sebagai Direktur Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 20 November 2015 untuk masa jabatan lima tahun dan juga Direktur SMN sejak November 2015. Beliau bertanggung jawab atas bidang keuangan, sumber daya manusia dan teknologi informasi Perseroan. Sebelumnya, beliau bekerja pada PT Lippo Karawaci Tbk sebagai Kepala Bagian Pajak, PT Grand Indonesia sebagai General Manager Keuangan & Akuntansi, dan Pricewaterhouse Coopers, Jakarta.

Bapak Hadiprodjo memperoleh gelar Sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YKPN, Yogyakarta pada tahun 1994 dan gelar Magister di bidang Manajemen dari Prasetya Mulya Graduate School of Management, Jakarta pada tahun 1996.

Mr. Hadiprodjo, 46 years old, Indonesian Citizen, was appointed as Director of the Company based on resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated November 20, 2015 for a five-year term as well as a Director of SMN since November 2015. He is responsible for finance, human resource and information technology of the Company. Previously, he worked with PT Lippo Karawaci Tbk as Head of Tax, PT Grand Indonesia as Finance & Accounting General Manager, and Pricewaterhouse Coopers, Jakarta.

Mr. Hadiprodjo graduated from Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YKPN, Yogyakarta in 1994 and earned his Master's Degree in Management from Prasetya Mulya Graduate School of Management, Jakarta in 1996.



INDRA GUNAWAN

Direktur independen | Independent Director

Bapak Gunawan, 43 tahun, telah ditunjuk sebagai Direktur Independen Perseroan sejak Mei 2013 berdasarkan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan tertanggal 31 Mei 2013. Pengangkatan terakhir beliau sebagai Direktur Independen berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tertanggal 27 Juni 2014 untuk masa jabatan lima tahun. Beliau bertanggung jawab atas bidang perizinan dan pengembangan bisnis Perseroan.

Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2012. Pada Agustus 2003, beliau memulai karirnya di Perseroan sebagai *General Manager of Operations*, lalu *Vice President of Operations* dan kemudian dipromosikan menjadi *Vice President of Inter-Carrier and External Relations*. Sebelum bergabung dengan Perseroan, Bapak Gunawan bekerja untuk Siemens Indonesia dari tahun 1997-2003 di berbagai jabatan manajer seperti *Project Controller*, *Group Leader of Product Management*, *Project Coordinator*, dan *Siemens Wireless Java Coordinator*.

Bapak Gunawan lulus dengan gelar Sarjana Teknik Elektro pada tahun 1997 dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya dan mendapatkan gelar Magister di bidang Ekonomi pada tahun 2005 dari Universitas Indonesia, Depok. Bapak Gunawan juga telah meraih gelar Doktor di bidang Bisnis dan Manajemen di tahun 2013 dari Universitas Padjadjaran, Bandung. Beliau saat ini juga aktif mengajar sebagai Dosen pada Program Magister Manajemen.

Mr. Gunawan, 43 years old, Indonesian Citizen, was appointed as Independent Director of the Company since May 2013 based on resolutions of the Extraordinary Meeting of Shareholders of the Company dated May 31, 2013. His latest appointment as an Independent Director is based on resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company dated June 27, 2014 for a five-year term. He is responsible for licensing aspects and business development of the Company.

Previously, he served as a Director of the Company in 2012. In August 2003, he started his career with the Company as the General Manager of Operations, then Vice President of Operations and then was promoted to the Vice President of Inter-Carrier and External Relations. Prior to joining the Company, Mr. Gunawan worked for Siemens Indonesia from 1997-2003 in several managerial roles as Project Controller, Group Leader of Product Management, Project Coordinator, and Siemens Wireless Java Coordinator.

Mr. Gunawan graduated with a degree in Electrical Engineering in 1997 from the Sepuluh Nopember Institute of Technology (ITS), Surabaya and earned his Master's Degree in Economics in 2005 from the Universitas Indonesia, Depok. Mr. Gunawan earned his Doctoral Degree in Business and Management in 2013 from the University of Padjadjaran, Bandung. He is currently also actively teaching as a Lecturer in a Management Magister Program.

HUBUNGAN AFILIASI

AFFILIATE RELATIONS

Seluruh anggota Direksi Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Utama Perseroan.

All members of the Board of Directors of the Company have no affiliate relations with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the ultimate shareholder of the Company.

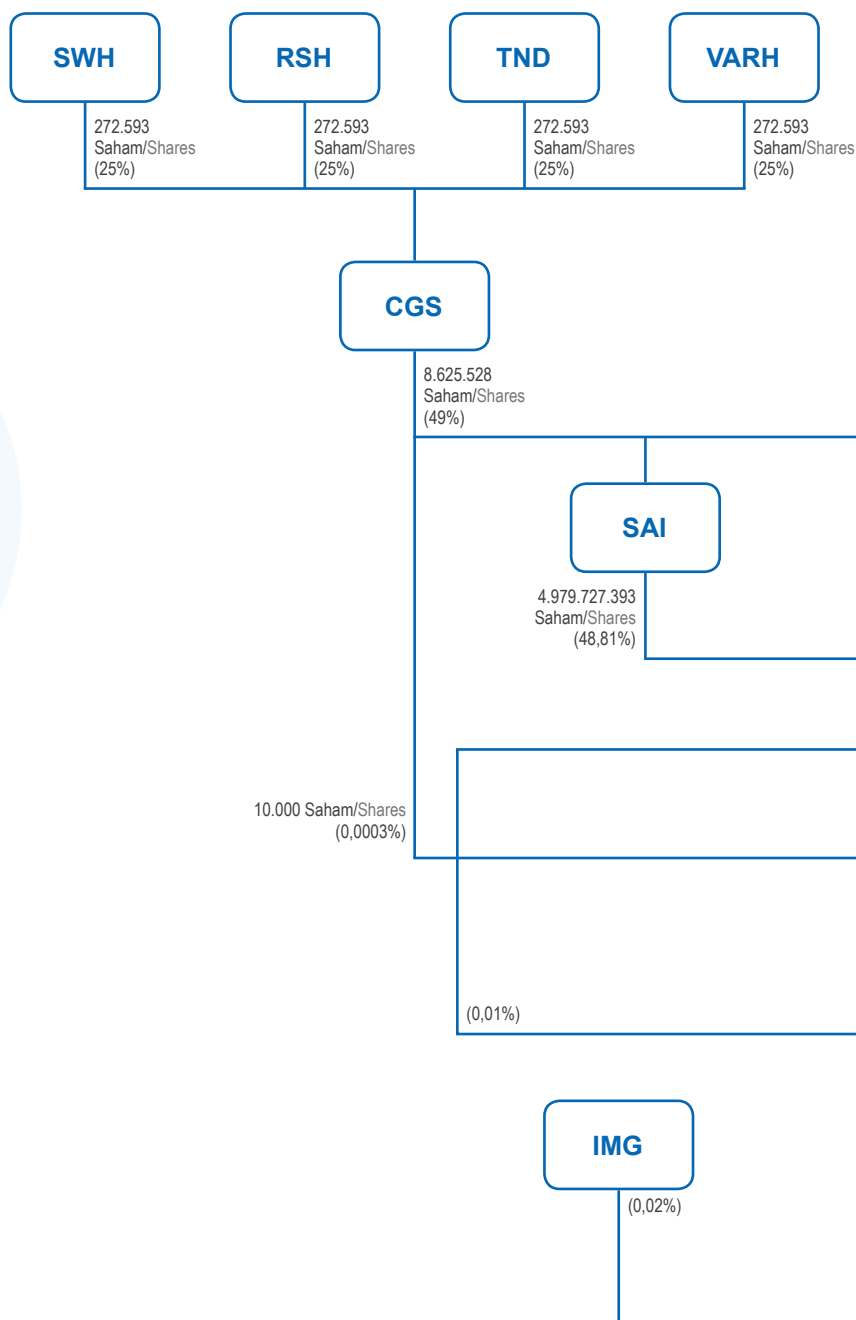


DAFTAR PEMEGANG SAHAM

LIST OF SHAREHOLDERS

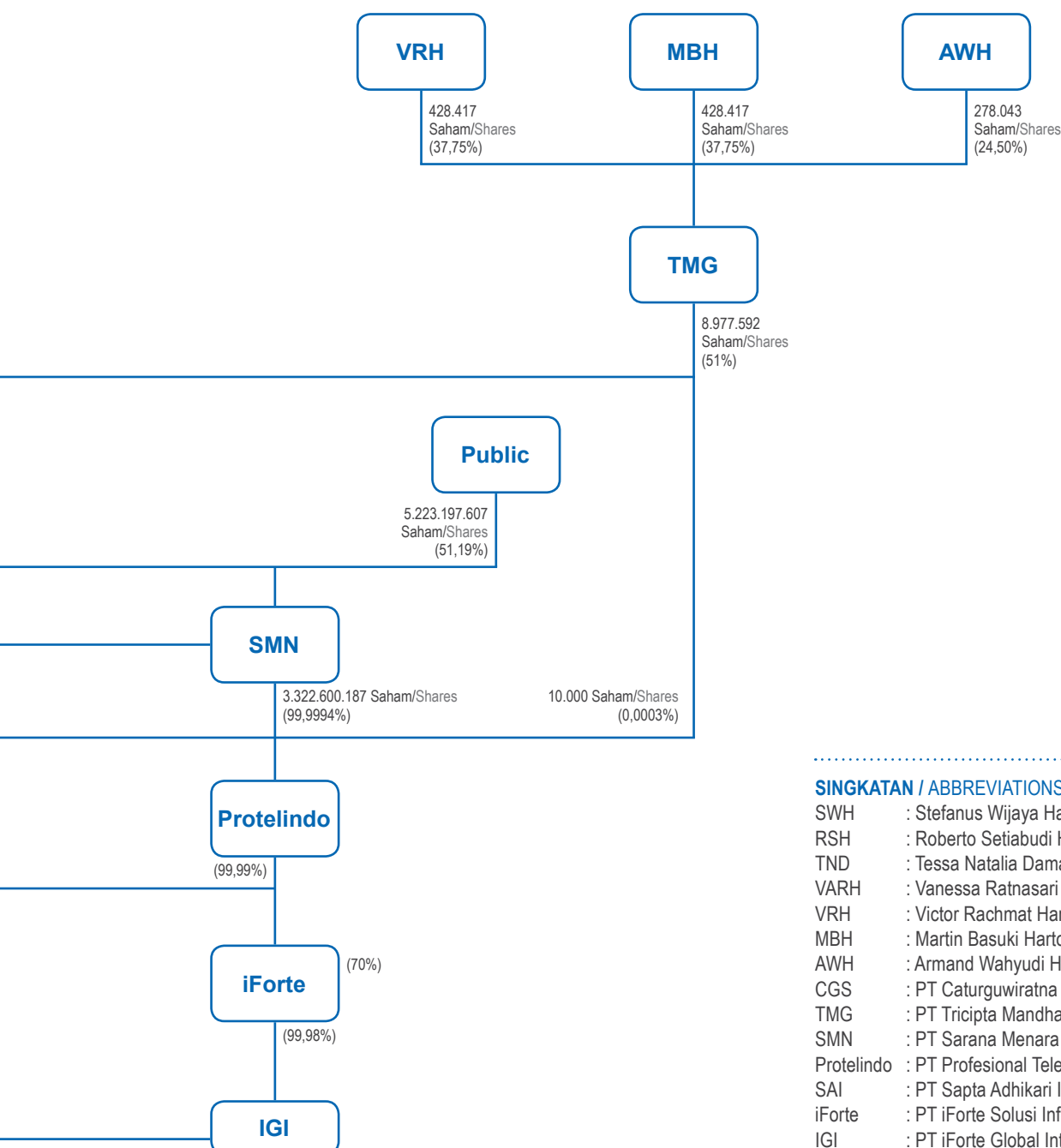
Struktur kepemilikan saham Perseroan per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

The share ownership structure of the Company as of December 31, 2016 is as follow:



Struktur Bagan per 31 Desember 2017

Structure Chart as of December 31, 2017



SINGKATAN / ABBREVIATIONS:

SWH	: Stefanus Wijaya Hartono
RSH	: Roberto Setiabudi Hartono
TND	: Tessa Natalia Damayanti Hartono
VARH	: Vanessa Ratnasari Hartono
VRH	: Victor Rachmat Hartono
MBH	: Martin Basuki Hartono
AWH	: Armand Wahyudi Hartono
CGS	: PT Caturguwiratna Sumapala
TMG	: PT Tricipta Mandhala Gumilang
SMN	: PT Sarana Menara Nusantara Tbk
Protelindo	: PT Profesional Telekomunikasi Indonesia
SAI	: PT Sapta Adhikari Investama
iForte	: PT iForte Solusi Infotek
IGI	: PT iForte Global Internet
IMG	: PT iForte Mitra Gemilang

INFORMASI ANAK PERUSAHAAN

INFORMATION ON SUBSIDIARIES

Alamat Perusahaan Company's Address	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership	Jenis Usaha Nature of Business
PT iForte Solusi Infotek ("iForte")		
Menara BCA, 41 st Floor, Suite 4103, Grand Indonesia Shopping Town, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310	Protelindo - 99,99%	Penyelenggara Jaringan Tertutup Berbasis VSAT dan <i>Fiber Optic</i> Closed Fixed Network Provider with Vsat and Fiber Optic Basis
PT iForte Global Internet ("IGI")		
Menara BCA, 41 st Floor, Suite 4103, Grand Indonesia Shopping Town, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310	iForte - 99,98%	Layanan Telekomunikasi Telecommunication Services

Profil Perusahaan Company's Profile	Total Aset (dalam miliar Rupiah) Total Assets (in billion IDR)	Status Operasi Operational Status
Pada tanggal 1 Juli 2015, Protelindo telah mengakuisisi seluruh saham dan kepemilikan modal di iForte, sehingga perusahaan tersebut dimiliki sepenuhnya oleh Protelindo. On July 1, 2015, Protelindo acquired all of the shares and capital interests in iForte, making it a wholly-owned subsidiary of Protelindo.	940,4	Beroperasi Operating
Protelindo memiliki saham dan hak suara secara tidak langsung sebesar 99,98% di IGI. Protelindo has an indirect capital and voting interest of 99.98% in IGI.	399,5	Beroperasi Operating

KRONOLOGI PENCATATAN OBLIGASI

BONDS LISTING CHRONOLOGY

PENERBITAN OBLIGASI PROTELINDO I TAHUN 2014

Pada tanggal 20 Februari 2014, Protelindo mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui surat No. S-95/D.04/2014 dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Protelindo I Tahun 2014 ("Obligasi") dengan nilai nominal sebesar Rp1 triliun yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Maret 2014. Obligasi ini dikeluarkan dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,5% per tahun, berjangka waktu tiga tahun, yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2017. PT Bank Permata Tbk adalah Wali Amanat dalam penawaran umum ini. Pada tanggal 28 Januari 2014, Obligasi mendapat peringkat AA- (idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia dan pada tanggal 13 Mei 2015, peringkat tersebut ditingkatkan menjadi AA+ (idn).

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi ini dipergunakan untuk pembayaran sebagian lebih awal saldo utang Protelindo kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

PENERBITAN OBLIGASI SENIOR TANPA JAMINAN YANG JATUH TEMPO TAHUN 2024

Pada tanggal 27 November 2014, Protelindo Finance menerbitkan Obligasi Senior Tanpa Jaminan dengan jumlah pokok sebesar-besarnya S\$180.000.000 dengan bunga 3,25%, yang jatuh tempo pada tahun 2024 ("Obligasi Senior"). Kewajiban pembayaran Protelindo Finance sehubungan dengan Obligasi Senior akan ditanggung tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali oleh CGIF, sebuah lembaga dana amanat dari Asian Development Bank, sesuai dengan syarat dalam Jaminan CGIF. Sehubungan dengan Obligasi Senior tersebut, Protelindo, Protelindo Finance, dan CGIF telah menandatangani suatu perjanjian penggantian dan ganti rugi yang mana, antara lain, mengatur tentang pembayaran biaya penjaminan dan jumlah lain sehubungan dengan Jaminan CGIF dan dasar dari biaya yang dibayarkan oleh CGIF berdasarkan

ISSUANCE OF PROTELINDO BONDS I YEAR 2014

On February 20, 2014, Protelindo received an effective statement from Indonesia Financial Services Authority ("OJK") based on its letter No. S-95/D.04/2014 in conjunction with the Public Offering of Protelindo Bonds I Year 2014 (the "Bonds") with a nominal value of IDR1 trillion that were listed on the Indonesia Stock Exchange on March 3, 2014. The Bonds were issued with a fixed interest rate of 10.5% per annum and a term of three years, and will be due on February 28, 2017. PT Bank Permata Tbk is the trustee in connection with this public offering. On January 28, 2014, the Bonds were rated AA- (idn) by PT Fitch Ratings Indonesia and on May 13, 2015, the rating was upgraded to AA+ (idn).

The proceeds from the Bonds were used for early partial repayment of Protelindo's outstanding loans from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

ISSUANCE OF THE SENIOR UNSECURED GUARANTEED BONDS DUE IN 2024

On November 27, 2014, Protelindo Finance issued S\$180,000,000 in an aggregate principal amount of 3.25% Senior Unsecured Guaranteed Bonds, that are due in 2024 (the "Senior Bonds"). The payment obligations of Protelindo Finance with respect to the Senior Bonds will be unconditionally and irrevocably guaranteed by CGIF, a trust fund of the Asian Development Bank, subject to the terms of the CGIF Guarantee. In relation to the Senior Bonds, Protelindo, Protelindo Finance, and CGIF have entered into a reimbursement and indemnity agreement which, among other things, specifies the payment of guarantee fees and other amounts with respect to the CGIF Guarantee and the basis on which amounts paid by CGIF under the CGIF Guarantee are to be reimbursed and indemnified by Protelindo Finance and Protelindo. DB Trustees

Jaminan CGIF akan diganti dan dijamin oleh Protelindo Finance dan Protelindo. DB Trustees (Hong Kong) Limited bertindak sebagai wali amanat dalam Obligasi Senior. Obligasi Senior ini tercatat dan diperdagangkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited pada tanggal 28 November 2014.

Obligasi Senior tersebut mendapatkan bunga sebesar 3,25% per tahun sejak tanggal 27 November 2014, yang dibayarkan setiap semester pada tanggal 27 Mei dan 27 November, setiap tahunnya, terhitung dari tanggal 27 Mei 2015.

Pada tanggal 13 November 2014, Standard and Poor's Ratings Services memberikan peringkat 'AA' untuk Obligasi Senior tersebut. Protelindo Finance menggunakan dana hasil penerbitan Obligasi Senior, setelah dikurangi biaya manajemen, komisi dan pengeluaran lainnya terkait dengan penawaran dan penerbitan Obligasi Senior, untuk melunasi sebagian dari pinjamannya yang ada.

PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I PROTELINDO TAHAP I TAHUN 2016

Pada tanggal 17 November 2016, Protelindo memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan surat No. S-375/D.01/2016 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 ("Obligasi 2016") dengan nilai nominal sebesar Rp800 miliar yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 November 2016. Obligasi 2016 diterbitkan dalam tiga seri, yaitu:

- (a) seri A sebesar Rp661 miliar dengan tingkat bunga tetap 7,90% per tahun dan berjangka waktu tiga tahun jatuh tempo pada tanggal 23 November 2019;
- (b) seri B sebesar Rp36 miliar dengan tingkat bunga tetap 8,25% per tahun dan berjangka waktu lima tahun jatuh tempo pada tanggal 23 November 2021; dan
- (c) seri C sebesar Rp103 miliar dengan tingkat bunga tetap 8,75% per tahun dan berjangka waktu tujuh tahun jatuh tempo pada tanggal 23 November 2023.

PT Bank Permata, Tbk adalah wali amanat sehubungan dengan penawaran umum berkelanjutan ini. Pada tanggal 8 September 2016, Obligasi 2016 mendapat peringkat AAA(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan Obligasi 2016 telah dipergunakan sebagian sebagai modal kerja Protelindo untuk pembayaran perpanjangan biaya sewa lahan menara, biaya tenaga ahli, pemeliharaan dan pengoperasian menara.

(Hong Kong) Limited is acting as the trustee with respect to the Senior Bonds. The Senior Bonds were listed on the Singapore Exchange Securities Trading Limited on November 28, 2014.

The Senior Bonds bear interest starting from November 27, 2014 at the rate of 3.25% per annum, payable semiannually in arrears on May 27 and November 27 of each year, commencing on May 27, 2015.

On November 13, 2014, Standard and Poor's Ratings Services rated the Senior Bonds 'AA'. Protelindo Finance used the proceeds from the Senior Bonds, after deducting management fees, commissions and other expenses associated with the offering and issuance of the Senior Bonds, to refinance a portion of its existing debt.

ISSUANCE OF SUSTAINABLE BONDS I OF PROTELINDO PHASE I YEAR 2016

On November 17, 2016, Protelindo received an effective statement from OJK based on its letter No. S-375/D.01/2016 in conjunction with the Sustainable Public Offering of Sustainable Bonds I of Protelindo Phase I Year 2016 (the "Bonds 2016") with a nominal value of Rp800 billion which were listed on the Indonesia Stock Exchange on November 24, 2016. The Bonds 2016 were issued in three series, namely:

- (a) series A of Rp661 billion with a fixed interest rate of 7.90% per annum and a term of three years due on November 23, 2019;
- (b) series B of Rp36 billion with a fixed interest rate of 8.25% per annum and a term of five years due on November 23, 2021; and
- (c) series C of Rp103 billion with a fixed interest rate of 8.75% per annum and a term of seven years due on November 23, 2023.

PT Bank Permata, Tbk is the trustee in connection with this sustainable public offering. On September 8, 2016, the Bonds 2016 were rated AAA(idn) by PT Fitch Ratings Indonesia.

The proceeds from the Bonds 2016 issuance have been used partially as working capital for Protelindo for the payment of renewal fees of tower ground leases, the fees of the experts, a maintenance and operation of the tower.

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

NAMES AND ADDRESSES OF CAPITAL MARKET INSTITUTIONS AND PROFESSIONALS

KONSULTAN HUKUM LEGAL CONSULTANT

Makes & Partners Law Firm

Menara Batavia, 7th Floor
Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220
Tel : (62-21) 5747181
Fax : (62-21) 5747180

AKUNTAN PUBLIK PUBLIC ACCOUNTANT

Purwantono, Sungkoro & Surja

(Member firm of Ernst & Young Global Limited)
Indonesian Stock Exchange Building Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
Tel : (62-21) 52895000
Fax : (62-21) 52894100

NOTARIS NOTARY

Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2, Komp.
Ketapang Indah Blok B-2 No. 4-5
Jakarta 11140, Indonesia
Tel : (62-21) 6301511
Fax : (62-21) 6337851

WALI AMANAT TRUSTEE

PT Bank Permata, Tbk.

World Trade Center II Building, 28th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12290
Tel : (62-21) 5237788
Fax : (62-21) 2500259



AKUNTAN INDEPENDEN

Perseroan telah menunjuk auditor eksternal sesuai dengan keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 2017, yang menunjuk kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja yang merupakan anggota firma dari Ernst & Young Global Limited, untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017. Purwantono, Sungkoro & Surja merupakan kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Adapun total biaya untuk Audit Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun 2017 sebesar Rp2,0 miliar.

Purwantono, Sungkoro & Surja, telah menjadi auditor Perseroan sejak 2015. Kantor Akuntan Publik ini telah menyelesaikan tugas-tugas secara independen sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik, kontrak jasa dan lingkup audit yang telah disepakati. Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyediakan jasa konsultasi lainnya kepada Perseroan. Adapun akuntan yang menandatangani Laporan Auditor Independen untuk periode 2017 adalah Feniwati Chendana, CPA.

INDEPENDENT ACCOUNTANT

The Company has appointed an external auditor in line with the resolutions adopted at the Annual General Meeting of the Shareholders held on June 7, 2017, which approved the appointment of Public Accountants Purwantono, Sungkoro & Surja, a member firm of Ernst & Young Global Limited, to audit the Company's Consolidated Financial Statements for fiscal year 2017. Purwantono, Sungkoro & Surja is registered with the Financial Services Authority ("OJK"). The total fee for the Audit of the Consolidated Financial Statements for 2017 was IDR2.0 billion.

Purwantono, Sungkoro & Surja, has been the Company's auditor since 2015. They have completed their tasks independently and in accordance with the professional standards for Public Accountants, the service contract and the agreed audit scope. Purwantono, Sungkoro & Surja does not provide any other consultancy services to the Company. The accountant who signed the Independent Auditor's Report for 2017 was Feniwati Chendana, CPA.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

AWARDS AND CERTIFICATIONS



PT Sarana Menara Nusantara Tbk sebagai **Best 10 Fastest Growing Companies 2017** berdasarkan pertumbuhan laba dari Infobank

PT Sarana Menara Nusantara Tbk as Best 10 Fastest Growing Companies 2017 based on profit growth from Infobank



PT Sarana Menara Nusantara Tbk sebagai **Perusahaan Tbk Terbaik di Indonesia - 2017**, sektor Konstruksi Non Bangunan dari **Economic Review**

PT Sarana Menara Nusantara Tbk as Indonesia Good Corporate Governance - 2017, Non Building Construction from Economic Review



PT Sarana Menara Nusantara Tbk - **Top 50 of The Biggest Market Capitalization Public Listed Companies** Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)

PT Sarana Menara Nusantara Tbk - Top 50 of The Biggest Market Capitalization Public Listed Companies from IICD



PT Sarana Menara Nusantara Tbk - **Most Powerful Company 2017 Kategori Konstruksi Non Bangunan** Warta Ekonomi

PT Sarana Menara Nusantara Tbk - Most Powerful Company 2017 Category Nonbuilding Construction from Warta Ekonomi



PT Profesional Telekomunikasi Indonesia -
Perusahaan Menara Telekomunikasi Terbaik Tahun 2017
Frost & Sullivan Indonesia

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia - 2017 Frost & Sullivan
Indonesia Telecoms Tower Company of the Year



**THE ASSET: BEST EQUITY FOR SARANA MENARA NUSANTARA
US\$405MILLION SECONDARY PLACEMENT**

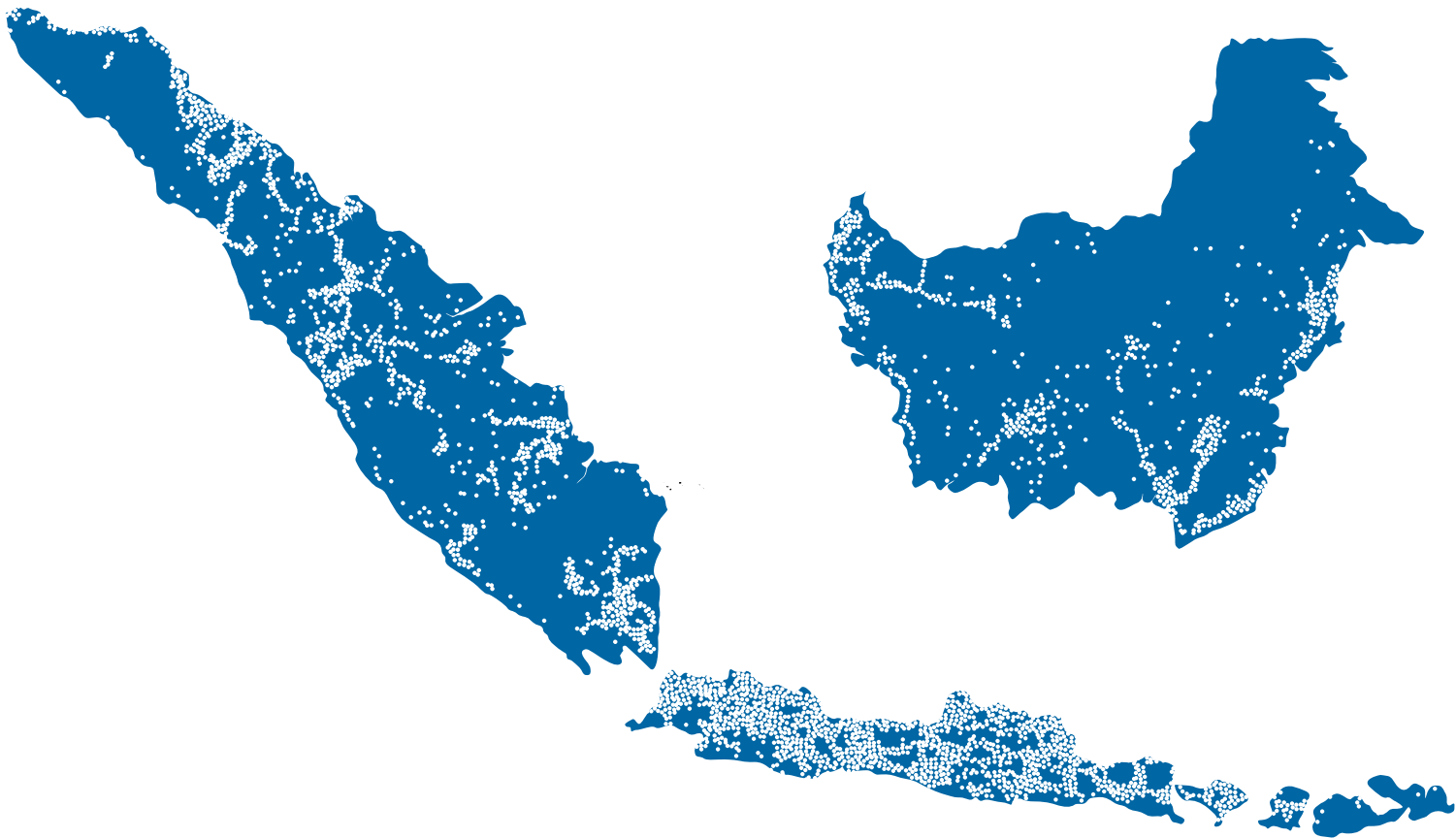
The Asset: Best Equity for Sarana Menara Nusantara
US\$405million secondary placement

PERINGKAT RATINGS

Lembaga Pemeringkat Rating Agency	Uraian Description
Fitch Ratings Singapore Pte. Ltd. 6 Temasek Boulevard #35-05 Suntec City Tower 4 Singapore 03898	Fitch Ratings telah mengafirmasi peringkat Jangka Panjang Mata Uang Asing <i>Issuer Default Rating</i> (IDR) dari operator menara independen terbesar di Indonesia, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) di 'BBB-'. Fitch Ratings has affirmed the Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating of Indonesia's largest independent tower operator, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), at 'BBB-'.
Fitch Rating Indonesia DBS Bank Tower, 24 th Floor, Suite 2403 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5 Jakarta Selatan 12940	Pada saat yang bersamaan, Fitch Ratings Indonesia juga telah mengafirmasi Peringkat Nasional Jangka Panjang dan peringkat Nasional Senior Tanpa Jaminan di 'AAA(idn)'. Outlook untuk peringkat adalah Stabil. Simultaneously, Fitch Ratings Indonesia affirmed the National Long-Term Rating and national senior unsecured rating at 'AAA(idn)'. The Outlook on the ratings is Stable.
Moody's Investors Service SingaporePte. Ltd. 50 Raffles Place #23-08 Singapore Land Tower Singapore 048623	Moody's mengafirmasi Protelindo di Baa3, <i>outlook</i> stabil. Moody's affirmed Protelindo at Baa3, The outlook is stable.
Standard & Poor's Singapore Pte. Ltd. 12 Marina Boulevard #23- 01, Marina Bay Financial Centre Tower 3 Singapore 018982	S&P mengafirmasi Peringkat Kredit Jangka Panjang Protelindo 'BBB-'; <i>outlook</i> tetap stabil. S&P affirmed Protelindo's long term Corporate Credit Rating at BBB-; outlook remains stable.

PORTOFOLIO MENARA KAMI

OUR TOWER PORTFOLIO







KOLABORASI

COLLABORATION



**KAMI MEMBERIKAN SOLUSI BAGI PELANGGAN
DAN JUGA MASYARAKAT**

WE PROVIDE SOLUTIONS TO OUR CUSTOMERS
AND THE COMMUNITY

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

Karyawan kami merupakan salah satu aset kami yang sangat berharga. Keberhasilan Grup kami bergantung pada produktivitas dan kegiatan operasional yang dilakukan oleh karyawan. Oleh karena itu, salah satu kebijakan utama tim manajemen adalah untuk terlibat dalam pengembangan sumber daya manusia dan untuk memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan situasi kerja yang baik.

Grup menyediakan paket tunjangan dan kesejahteraan yang kompetitif kepada seluruh karyawannya. Paket tunjangan termasuk asuransi kesehatan, asuransi melahirkan, asuransi gigi, asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan perorangan, dan juga program pelatihan dan pengembangan internal dan eksternal untuk fungsi tugas tertentu.

Grup telah melakukan 33 pelatihan formal/kursus yang berbeda dengan 583 peserta pada tahun 2017. Grup berkomitmen untuk terus menyediakan kegiatan pelatihan, baik internal maupun eksternal, untuk karyawan di masa mendatang. Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah karyawan Grup adalah 1.001. Sebagian besar karyawan kami adalah karyawan permanen.

Berikut adalah jumlah dan status komposisi karyawan Grup pada 31 Desember 2017:

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN BIDANG

Number of Employees by Area

Bidang Area	2017		2016		2015	
	Permanen Permanent	Kontrak Contract	Permanen Permanent	Kontrak Contract	Permanen Permanent	Kontrak Contract
Keuangan, Legal & Administrasi Finance, Legal & Admin	238	28	257	24	241	42
Operasional & Penjualan Operations & Sales	548	187	517	130	508	157
Jumlah / Total	786	215	774	154	749	199

Our employees are one of our most valuable assets. The success of the Group depends on the productivity and operational skill of our employees. One of management's core policies is to engage in human resources development and to ensure strict compliance with all government regulations pertaining to manpower and proper working conditions.

The Group provides competitive benefits and welfare packages to all employees. The benefits package includes health insurance, maternity insurance, dental insurance, life insurance and personal accident insurance, as well as internal and external training and development programs for specific job functions.

The Group conducted 33 different formal training/courses with 583 participants in 2017. The Group is committed to continue providing training activities, both internally and externally, for its employees. As of December 31, 2017, the Group employed 1,001 individuals. The vast majority of our employees are permanent employees.

Following is a breakdown of the Group's employee composition as of December 31, 2017:



JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN PENDIDIKAN

Number of Employees by Education

Pendidikan Education	2017	2016	2015
Pasca Sarjana Master's Degree	33	37	33
Sarjana Bachelor's Degree	611	564	590
Sarjana Muda Associates Degree	175	168	168
SMA atau setara Senior High School or equivalent	182	159	157
Jumlah / Total	1.001	928	948

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN USIA

Number of Employees By Age

Usia Age	2017
20 - 30	309
31 - 40	513
> 41	179
Jumlah / Total	1.001

PELATIHAN PADA TAHUN 2017

Training Events Held in 2017

Program Pelatihan Training Program	Keuangan, Legal & Administrasi Finance, Legal & Administration	Operasional & Penjualan Operasional & Sales	Total Peserta Total Participants
Excel Workshop For Accountants	2	0	2
Management Training	13	17	30
Tax Refresher dan Update	1	0	1
SQL Server 2014 Performance Tuning and Optimization	1	0	1
Smart Lobbying Training - Operations	0	30	30
Smart Lobbying - Training Non Operations	17	8	25
Pengelolaan Komprehensif Compliance dan Pemeriksaan PPh Output Comprehensive Compliance and Tax Management Study	1	0	1
Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) & Workshop Special Professional Education for Legal	1	0	1
MS. Excel Intermediate	38	30	68
MS. Excel Basic	4	7	11
MS. Excel Advance	12	16	28
Merger and Acquisition, Contract Drafting & Negotiation Skill	13	20	33
L.E.A.D (Leadership Exploration and Development) Training - Batch 2	11	12	23
L.E.A.D (Leadership Exploration and Development) Training - Batch 1	4	21	25
L.E.A.D (Leadership Exploration and Development) Training - Sr. Manager up	6	14	20
L.E.A.D (Leadership Exploration and Development) Training - GM Level	8	7	15
Kiat-kiat Sukses Penanganan Perkara Pidana Perdata Keys to Success in Trial Law	1	0	1

Program Pelatihan Training Program	Keuangan, Legal & Administrasi Finance, Legal & Administration	Operasional & Penjualan Operasional & Sales	Total Peserta Total Participants
Kepastian Hukum Akta PPAT Terkait dengan Penentuan Harga Transaksi Legal Aspects of Tax for Transactions	0	5	5
IT Infrastructure Library 2011 Foundation Training	1	0	1
Internal Auditor ISO 9001:2015	9	20	29
Installing and Configuring Windows 10 Training	1	0	1
Indonesia Human Resources Forum 2017	1	0	1
Impactful Communication - Batch 2	31	30	61
Impactful Communication - Batch 1	13	47	60
Financial Modelling	3	0	3
Embracing Change, Managing The Future	23	21	44
ELO Index Server Training	1	0	1
Effective Cost Management	2	0	2
Cara Mudah Pahami Perpajakan Internasional dan Aplikasinya International Tax	1	0	1
14 th New Hire Orientation Program	8	14	22
Memenangkan Tender Pemerintah Melalui Penguasaan Aplikasi Spse. 4 dan Praktek Simulasi Tender Cepat dengan Aplikasi Spse.4 serta Apendo V.4.2.0	3	0	3
Pengenalan Software Business Process Management - IBM Introduction to Business Process Management - IBM	4	0	4
JUMLAH / TOTAL			583



KEUNGGULAN

EXCELLENCE



**KAMI BANGGA MEMBERIKAN PELAYANAN
TERBAIK KEPADA PELANGGAN KAMI**

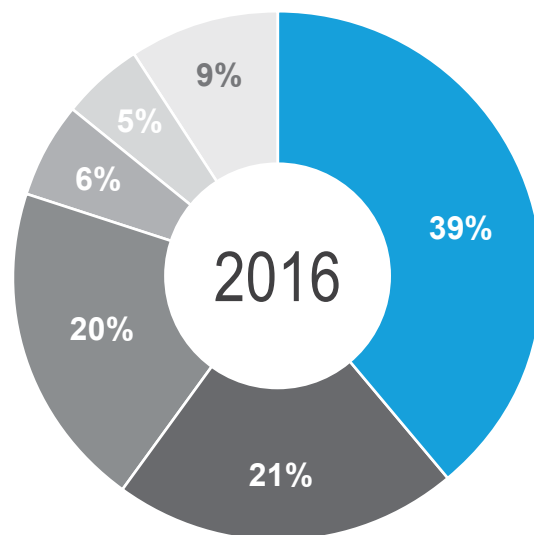
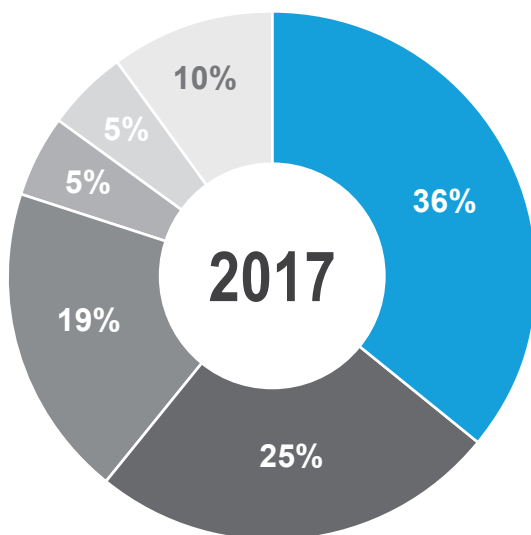
WE ARE PROUD TO PROVIDE THE BEST
SERVICE FOR OUR CUSTOMERS

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS

Pendapatan kami meningkat sebesar Rp284,8 miliar, atau 5,6%, dari Rp5.053,1 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp5.337,9 miliar pada tahun 2017. Portofolio menara kami meningkat sebesar 292 menara, atau 2,0%, dari 14.562 menara pada tahun yang berakhir 31 Desember 2016 menjadi 14.854 menara pada tahun yang berakhir 31 Desember 2017. Jumlah sewa lokasi menara kami meningkat sebesar 867 sewa lokasi, atau 3,6%, dari 24.144 pada tahun yang berakhir 31 Desember 2016 menjadi 25.011 pada tahun yang berakhir 31 Desember 2017. Jumlah sewa lokasi menurun dikarenakan sebesar 724 sewa lokasi tidak diperpanjang di tahun 2017. Peningkatan pendapatan berasal dari peningkatan sewa lokasi, peningkatan sewa peralatan tambahan, dan peningkatan pendapatan dari iForte. Peningkatan pendapatan iForte berasal dari peningkatan pendapatan dari VSAT sebesar Rp104,3 miliar, atau 98,6% dari Rp105,8 miliar di tahun 2016 menjadi Rp210,1 miliar dan peningkatan pendapatan dari MWIFO sebesar Rp65,9 miliar, atau 105,4% dari Rp62,5 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp128,4 miliar pada tahun 2017.

Our revenues increased by IDR284.8 billion, or 5.6%, from IDR5,053.1 billion in 2016 to IDR5,337.9 billion in 2017. Our tower portfolio grew by 292 towers, or 2.0%, from 14,562 towers as of December 31, 2016 to 14,854 towers as of December 31, 2017. The number of tenancies on our towers grew by 867 tenancies, or 3.6%, from 24,144 tenancies as of December 31, 2016 to 25,011 tenancies as of December 31, 2017. The number of tenancies was reduced by the non-renewal of 724 site leases that came due in 2017. The increase in revenue was driven by the increase in tenancy, the increase in additional equipment leases, and an increase in revenue from iForte. iForte revenue growth resulted from an increase in revenue from VSAT by IDR104.3 billion, or 98.6% from IDR105.8 billion in 2016 to IDR210.1 billion and an increase in revenue from MWIFO by IDR65.9 billion, or 105.4% from IDR62.5 billion in 2016 to IDR128.4 billion in 2017.



- PT Hutchison 3 Indonesia
- PT XL Axiata Tbk.

- PT Telekomunikasi Selular
- PT Smartfren Telecom Tbk.

- PT Indosat Tbk.
- Others

BEBAN POKOK PENDAPATAN LAINNYA

Beban pokok pendapatan lainnya kami meningkat sebesar Rp68,0 miliar, atau 32,4%, dari Rp209,5 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp277,4 miliar pada tahun 2017. Kenaikan beban pokok pendapatan lainnya terutama disebabkan oleh peningkatan sewa *transponder*, yang meningkat sebesar Rp14,3 miliar, atau 62,4%, dari Rp22,9 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp37,2 miliar pada tahun 2017 dan sewa *local link*, yang meningkat sebesar Rp16,2 miliar, atau 237,4% dari Rp6,8 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp23,0 miliar pada tahun 2017, peningkatan ini seiring dengan pertumbuhan bisnis fiber optik dan VSAT dari iForte.

DEPRESIASI DAN AMORTISASI

Beban depresiasi dan amortisasi menurun sebesar Rp290,1 miliar, atau 24,5%, dari Rp1.184,3 miliar di tahun 2016 menjadi Rp894,2 miliar di tahun 2017. Penurunan ini terutama disebabkan oleh perubahan estimasi umur ekonomis menara dari 20 tahun menjadi 30 tahun, efektif 1 Januari 2017.

LABA BRUTO

Laba bruto meningkat sebesar Rp506,9 miliar, atau 13,9%, dari Rp3.659,3 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp4.166,3 miliar pada tahun 2017.

BEBAN PENJUALAN DAN PEMASARAN

Beban penjualan dan pemasaran meningkat sebesar Rp31,6 miliar, atau 64,7%, dari Rp48,8 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp80,4 miliar pada tahun 2017, kenaikan beban penjualan dan pemasaran ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban penjualan dan pemasaran lainnya, yang meningkat sebesar Rp13,4 miliar, atau 2.458,0% dari Rp0,5 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp13,9 miliar pada tahun 2017. Beban gaji dan kesejahteraan karyawan meningkat sebesar Rp8,2 miliar, atau 25,1% dari Rp33,0 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp41,2 miliar pada tahun 2017 yang disebabkan oleh biaya komisi, bonus dan teknisi lapangan *outsourcing* sehubungan dengan bisnis VSAT dan MWIFO.

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Beban umum dan administrasi menurun sebesar Rp21,4 miliar, atau 5,4%, dari Rp396,8 miliar di tahun 2016 menjadi Rp375,4 miliar di tahun 2017. Penurunan terutama disebabkan oleh perubahan peraturan regional pemerintah untuk tarif retribusi menara dan penundaan implementasi retribusi menara di daerah tersebut.

OTHER COST OF REVENUES

Our other cost of revenues increased by IDR68.0 billion, or 32.4%, from IDR209.5 billion in 2016 to IDR277.4 billion in 2017. The increase in cost of revenues was primarily due to an increase in transponder rentals, which increased by IDR14.3 billion, or 62.4%, from IDR22.9 billion in 2016 to IDR37.2 billion in 2017 and local link rentals, which increased by IDR16.2 billion, or 237.4% from IDR6.8 billion in 2016 to IDR23.0 billion in 2017, this increase was due to the growth of the fiber optic and VSAT businesses from iForte.

DEPRECIATION AND AMORTIZATION

Depreciation and amortization decreased by IDR290.1 billion, or 24.5%, from IDR1,184.3 billion in 2016 to IDR894.2 billion in 2017. This decrease was primarily due to a change in the economic useful life of towers from 20 years to 30 years effective January 1, 2017.

GROSS INCOME

Gross income increased by IDR506.9 billion, or 13.9%, from IDR3,659.3 billion in 2016 to IDR4,166.3 billion in 2017.

SELLING AND MARKETING EXPENSES

Selling and marketing expenses increased by IDR31.6 billion, or 64.7%, from IDR48.8 billion in 2016 to IDR80.4 billion in 2017. The increase in selling and marketing expense was primarily due to an increase in other selling and marketing expense, which increased by IDR13.4 billion, or 2,458.0% from IDR0.5 billion in 2016 to IDR13.9 billion in 2017. Salaries and employee welfare expenses increased by IDR8.2 billion, or 25.1% from IDR33.0 billion in 2016 to IDR41.2 billion in 2017 mostly due to commission, bonuses and outsourcing field technician expenses related to the VSAT and MWIFO businesses.

GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Our general and administration expenses decreased by IDR21.4 billion, or 5.4%, from IDR396.8 billion in 2016 to IDR375.4 billion in 2017. This decrease was primarily due to a change in regional government regulations on the tower retribution tariff and a delay in the implementation of a revised regional tower retribution plan.

LABA USAHA

Laba usaha meningkat sebesar Rp322,4 miliar, atau 10,4%, dari Rp3.101,5 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp3.423,9 miliar pada tahun 2017.

BIAYA KEUANGAN

Biaya keuangan meningkat sebesar Rp18,4 miliar, atau 2,8%, dari Rp668,9 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp687,3 miliar pada tahun 2017 disebabkan oleh peningkatan beban bunga sebesar Rp43,3 miliar, atau 11,2%, dari Rp386,1 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp429,4 miliar pada tahun 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan suku bunga efektif untuk pinjaman utang dalam mata uang asing.

BEBAN USAHA LAINNYA, NETO

Beban usaha lainnya, neto meningkat sebesar Rp174,4 miliar, atau 155,5%, dari Rp112,1 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp286,5 miliar pada tahun 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh pada tahun 2016 kami mencatat keuntungan selisih kurs sebesar Rp186,5 miliar dibandingkan dengan pada tahun 2017 kami mencatat kerugian selisih kurs sebesar Rp2,4 miliar sebagai akibat fluktuasi nilai tukar USD terhadap Rupiah.

LABA DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Laba dari operasi yang dilanjutkan sebelum beban pajak penghasilan meningkat sebesar Rp313,8 miliar, atau 12,6%, dari Rp2.488,7 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp2.802,5 miliar pada tahun 2017.

BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Beban pajak penghasilan menurun sebesar Rp35,2 miliar, atau 4,8% dari Rp730,3 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp695,1 miliar pada tahun 2017. Penurunan beban pajak penghasilan sebagian besar dikarenakan kurs di tahun 2017 dan keuntungan dari penjualan bisnis kami di Belanda pada tahun 2016.

OPERATING INCOME

Operating income increased by IDR322.4 billion, or 10.4%, from IDR3,101.5 billion in 2016 to IDR3,423.9 billion in 2017.

FINANCE COSTS

Finance costs increased by IDR18.4 billion, or 2.8%, from IDR668.9 billion in 2016 to IDR687.3 billion in 2017 due to an increase in interest expense by IDR43.3 billion, or 11.2%, from IDR386.1 billion in 2016 to IDR429.4 billion in 2017. The increase was primarily due to increases in floating interest rates for loans denominated in foreign currencies.

OTHER OPERATING EXPENSES, NET

Other net operating expenses increased by IDR174.4 billion, or 155.5%, from IDR112.1 billion in 2016 to IDR286.5 billion in 2017. This was primarily due to a foreign exchange gain recorded in 2016 of IDR186.5 billion as compared to a loss in 2017 of IDR2.4 billion due to fluctuation in the USD to Rupiah exchange rate.

INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX EXPENSE FROM CONTINUING OPERATIONS

Income before corporate income tax expense from continuing operations increased by IDR313.8 billion, or 12.6%, from IDR2,488.7 billion in 2016 to IDR2,802.5 billion in 2017.

CORPORATE INCOME TAX EXPENSE

Corporate income tax expense decreased by IDR35.2 billion, or 4.8% from IDR730.3 billion in 2016 to IDR695.1 billion in 2017. The reduction in tax expense came largely from an exchange loss in 2017 and gains from the sale of our business in the Netherlands in 2016.

LABA TAHUN BERJALAN

Laba tahun berjalan Perseroan di tahun 2017 tercatat sebesar Rp2.107,5 miliar, dibandingkan dengan laba tahun berjalan tahun 2016 sebesar Rp2.131,3 miliar.

PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN, SESUDAH PAJAK PENGHASILAN

Penghasilan (rugi) komprehensif lain, sesudah pajak penghasilan meningkat dari kerugian Rp8,9 miliar pada tahun 2016 menjadi keuntungan Rp47,9 miliar pada tahun 2017.

TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, SESUDAH PAJAK

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan, sesudah pajak meningkat sebesar Rp32,9 miliar, atau 1,6%, dari Rp2.122,4 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp2.155,3 miliar pada tahun 2017.

INCOME FOR THE YEAR

The Company had income for the year of IDR2,107.5 billion in 2017 compared to income for the year of IDR2,131.3 billion in 2016.

OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS), NET OF TAX

Other comprehensive income (loss), net of tax increased from IDR8.9 billion loss in 2016 to IDR47.9 billion gain in 2017.

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OF TAX

Total comprehensive income for the year, net of tax increased by IDR32.9 billion, or 1.6%, from IDR2,122.4 billion in 2016 to IDR2,155.3 billion in 2017.



KINERJA KEUANGAN KOMPREHENSIF

COMPREHENSIVE FINANCIAL PERFORMANCE

TOTAL ASET LANCAR

Aset lancar menurun sebesar Rp572,2 miliar, atau 15,9%, dari Rp3.593,0 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp3.020,8 miliar pada tahun 2017. Penurunan aset lancar didorong oleh penurunan kas dan setara kas dari Rp2.904,0 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp2.339,0 miliar pada tahun 2017 sehubungan dengan pembayaran dividen, pembayaran kembali obligasi, dan pembayaran kembali utang bank.

TOTAL ASET TIDAK LANCAR

Aset tidak lancar meningkat sebesar Rp521,2 miliar, atau 3,4%, dari Rp15.187,6 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp15.708,8 miliar pada tahun 2017. Peningkatan aset tidak lancar terutama didorong oleh peningkatan aset tetap dari Rp12.269,4 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp12.600,6 miliar pada tahun 2017 dan peningkatan sewa lokasi jangka panjang dari Rp1.858,8 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp2.064,3 miliar pada tahun 2017. Meningkatnya aset tetap dan sewa lokasi jangka panjang disebabkan oleh meningkatnya ukuran portofolio menara kami dari 14.562 menara pada tahun 2016 menjadi 14.854 menara pada tahun 2017 dan meningkatnya sewa lokasi dari 24.144 pada tahun 2016 menjadi 25.011 pada tahun 2017.

TOTAL ASET

Total aset menurun sebesar Rp50,9 miliar, atau 0,3%, dari Rp18.780,5 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp18.729,6 miliar pada tahun 2017. Penurunan ini didorong oleh menurunnya aset lancar dari Rp3.593,0 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp3.020,8 miliar pada tahun 2017 sebagai akibat dari pembayaran dividen, pembayaran kembali obligasi, dan utang bank.

TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK

Liabilitas jangka pendek menurun sebesar Rp1.113,2 miliar, atau 33,5%, dari Rp3.328,0 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp2.214,8 miliar pada tahun 2017, sehubungan dengan penurunan yang signifikan pada bagian obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas jangka panjang menurun sebesar Rp86,9 miliar, atau 0,9%, dari Rp9.518,1 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp9.431,2 miliar pada tahun 2017, disebabkan oleh penurunan

TOTAL CURRENT ASSETS

Current assets decreased by IDR572.2 billion, or 15.9%, from IDR3,593.0 billion in 2016 to IDR3,020.8 billion in 2017. The decrease in current assets was driven by a decrease in cash and cash equivalents from IDR2,904.0 billion in 2016 to IDR2,339.0 billion in 2017 due to the payment of dividends, repayment of bonds, and the repayment of bank loans.

TOTAL NON-CURRENT ASSETS

Non-current assets increased by IDR521.2 billion, or 3.4%, from IDR15,187.6 billion in 2016 to IDR15,708.8 billion in 2017. The growth in non-current assets was driven by an increase in fixed assets from IDR12,269.4 billion in 2016 to IDR12,600.6 billion in 2017 and an increase in long term site rentals from IDR1,858.8 billion in 2016 to IDR2,064.3 billion in 2017. The increase in fixed assets and long term site rentals was due to an increase in the size of our portfolio from 14,562 towers in 2016 to 14,854 towers in 2017 and an increase of our number in tenancies from 24,144 tenancies in 2016 to 25,011 tenancies in 2017.

TOTAL ASSETS

Total assets decreased by IDR50.9 billion, or 0.3%, from IDR18,780.5 billion in 2016 to IDR18,729.6 billion in 2017. This slight decrease was driven by the decrease in current assets from IDR3,593.0 billion in 2016 to IDR3,020.8 billion in 2017 as a result of the payment of dividends, repayment of bonds, and bank loans.

TOTAL CURRENT LIABILITIES

Current liabilities decreased by IDR1,113.2 billion, or 33.5%, from IDR3,328.0 billion in 2016 to IDR2,214.8 billion in 2017, due to the significant decrease in the current portion of long term bonds coming due.

TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES

Non-current liabilities decreased by IDR86.9 billion, or 0.9%, from IDR9,518.1 billion in 2016 to IDR9,431.2 billion in 2017, due to the decrease of long-term debt. Long-term debt

utang jangka panjang. Utang jangka panjang menurun sebesar Rp446,0 miliar, atau 8,2%, dari Rp5.471,3 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp5.025,3 miliar pada tahun 2017, dikarenakan pembayaran kembali pinjaman Dolar.

TOTAL LIABILITAS

Total liabilitas menurun Rp1.200,2 miliar, atau 9,3%, dari Rp12.846,1 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp11.645,9 miliar pada tahun 2017, berdasarkan penurunan liabilitas jangka pendek dari Rp3.328,0 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp2.214,8 miliar pada tahun 2017, disebabkan dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo.

TOTAL EKUITAS

Total ekuitas meningkat sebesar Rp1.149,2 miliar, atau 19,4%, dari Rp5.934,4 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp7.083,7 miliar pada tahun 2017, yang disebabkan oleh hasil tahun berjalan.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI

Model operasional kami memberikan proteksi kredit yang kuat. Operator telekomunikasi pada umumnya membayar di awal, baik secara bulanan, kuartalan maupun tahunan. Kami memiliki mekanisme yang efektif dan terbukti kuat untuk memastikan para pelanggan membayar secara tepat, termasuk kemampuan untuk memutuskan peralatan dan terminasi sewa lokasi dan menagih seluruh sisa pembayaran sebagai ganti rugi. Semua mekanisme ini secara efektif menyebabkan bisnis kami berada pada prioritas teratas pada pembayaran dari pelanggan, dimana kami percaya hal ini membantu kami didalam mempertahankan arus kas yang stabil.

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi kami adalah Rp3.455,0 miliar pada tahun 2017 dibandingkan dengan Rp3.832,1 miliar pada tahun 2016. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya penerimaan kas dari pelanggan, sebesar Rp5.498,4 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp5.367,4 miliar pada tahun 2017, dikarenakan adanya penerimaan dari pelanggan sesudah tanggal laporan dibuat, yang mana tercermin pada peningkatan piutang usaha dari Rp351,7 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp606,9 miliar pada tahun 2017. Jumlah pembayaran kas kepada karyawan juga meningkat dari Rp211,0 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp404,7 miliar pada tahun 2017, yang disebabkan oleh peningkatan pembayaran beban gaji dan kesejahteraan karyawan.

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp3.725,2 miliar pada tahun 2016 dibandingkan dengan Rp1.304,5 miliar pada tahun 2017. Penurunan ini disebabkan

decreased by IDR446.0 billion, or 8.2%, from IDR5,471.3 billion in 2016 to IDR5,025.3 billion in 2017, due to the repayment of US Dollar loans.

TOTAL LIABILITIES

Total liabilities decreased by IDR1,200.2 billion, or 9.3%, from IDR12,846.1 billion in 2016 to IDR11,645.9 billion in 2017, based on the decrease in current liabilities from IDR3,328.0 billion in 2016 to IDR2,214.8 billion in 2017, from the decrease in long-term debt coming due.

TOTAL EQUITY

Total equity increased by IDR1,149.2 billion, or 19.4%, from IDR5,934.4 billion in 2016 to IDR7,083.7 billion in 2017, due to current year results.

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

Our operational model provides us with strong credit protection. Telecommunications operators typically pay in advance on a monthly, quarterly or annual basis. We have effective and proven enforcement mechanisms to ensure timely payment, including the ability to disconnect equipment or terminate site lease and collect remaining revenue streams as liquidated damages. These mechanisms effectively result in our business being a priority for payment, which we believe will assist us in maintaining stable cash flows.

Our net cash provided by operating activities was IDR3,455.0 billion in 2017 compared with IDR3,832.1 billion in 2016. This decrease was primarily due to the decrease in cash received from customers, from IDR5,498.4 billion in 2016 to IDR5,367.4 billion in 2017, due to received from customer after report date is made, which reflected in the increase of account receivable from IDR351.7 billion and an increase in 2016 to IDR606.9 billion in 2017. The amount of cash paid to employee also increased from IDR211.0 billion in 2016 to IDR404.7 billion in 2017 due to an increase in salaries and employee welfare payments.

Net cash used in investing activities was IDR3,725.2 billion in 2016 as compared to IDR1,304.5 billion in 2017. This decrease was primarily due to a decrease in spending on acquisition

oleh pengeluaran untuk akuisisi aset tetap dari Rp3.866,6 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp740,8 miliar pada tahun 2017, terutama sehubungan dengan kas yang dibayarkan untuk pembelian menara XL pada tahun 2016.

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah Rp2.752,8 miliar pada tahun 2017, dibandingkan dengan Rp125,7 miliar pada tahun 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh pembayaran obligasi sebesar Rp1.000,0 miliar dan pembayaran dividen sebesar Rp1.006,1 miliar pada tahun 2017.

RASIO UTANG

Rasio lancar meningkat dari 1,1 pada tahun 2016 menjadi 1,4 pada tahun 2017. Selama periode yang sama, kami berhasil mengurangi utang neto terhadap EBITDA LQA dari 1,6x menjadi 1,4x walaupun terdapat pertumbuhan portofolio menara kami sebesar 2,0%.

KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Kolektibilitas piutang dipengaruhi oleh Perseroan dalam menagih piutangnya. Pada akhir tahun 2017, *collection period* Perseroan memperlihatkan peningkatan menjadi 33,4 hari dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 29,7 hari. Perseroan menerapkan pembayaran dimuka untuk semua pelanggan dengan kontrak sewa menara jangka panjang.

of fixed assets from IDR3,866.6 billion in 2016 to IDR740.8 billion in 2017, primarily due to cash paid in connection with our purchase of towers from XL in 2016.

Net cash used in financing activities was IDR2,752.8 billion in 2017, compared to IDR125.7 billion in 2016. This increase was due to the payment of bonds amounting to IDR1,000.0 billion and payment of dividends amounting to IDR1,006.1 billion in 2017.

DEBT RATIOS

The current ratio increased from 1.1 in 2016 to 1.4 in 2017. Over the same period, we successfully reduced Net Debt to LQA EBITDA from 1.6x to 1.4x despite growing our tower portfolio by 2.0%.

RECEIVABLES COLLECTABILITY

The Company receivables collectability is influenced by the ability of the Company to collect receivables. At the end of 2017, the Company collection period declined to 33.4 days in 2017 from 29.7 days in 2016. The Company has implemented advance payment plans for all customers with long-term site lease agreements.

Uraian Description	Satuan Unit	2017	2016
<i>Collection Period</i> / Collection Period	Hari / Day	33,4	29,7

SEGMENT BISNIS

Di bawah ini adalah rincian hasil keuangan berdasarkan segmen bisnis untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017:

BUSINESS SEGMENTS

A breakdown of financial results by business segment is presented below for the year ended December 31, 2017:

Uraian Description	Sewa Menara Tower Rental	Jasa Lainnya Others Services	Jumlah Total
Pendapatan sewa pada pihak ketiga Rental/leasing revenue from third parties	4.998,2	339,7	5.337,9
Laba bruto Gross income	3.922,6	243,7	4.166,3
Laba usaha Operating income	3.260,9	163,0	3.423,9
Laba neto Net income	2.018,5	89,0	2.107,5

STRUKTUR MODAL

CAPITAL STRUCTURE

Uraian Remarks	2017 *dalam miliar Rupiah in billion IDR	Kontribusi (%) Contribution (%)	2016 *dalam miliar Rupiah in billion IDR	Kontribusi (%) Contribution (%)
Total Pinjaman* Total Loan*	8.998,7	56,0	9.918,9	62,6
Jangka Pendek* Short-Term*	633,8	7,0	1.515,4	15,3
Jangka Panjang* Long-Term*	8.364,9	93,0	8.403,5	84,7
Ekuitas Equity	7.083,7	44,0	5.934,4	37,4
Total Modal yang Diinvestasikan Total Invested Capital	16.082,4	100,0	15.853,3	100,0

* Setelah dikurangi Biaya Pinjaman / Net of Unamortized of Costs of Loan

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

Per 31 Desember 2017, Perseroan memiliki portofolio terbesar diantara penyedia menara independen di Indonesia. Hal ini menempatkan Perseroan pada posisi untuk memanfaatkan kebutuhan akan menara baru di daerah perkotaan dan pedesaan di seluruh negeri. Melalui anak perusahaannya, iForte, Perseroan memiliki kemampuan menyediakan *microcell sites*, *fiberization* dan *BTS hotel solution* untuk mendukung dari meningkatnya permintaan kapasitas jaringan.

Per 31 Desember 2017, kami telah menggunakan Rp1.304,5 miliar untuk merampungkan BTS baru dan Colo, MWIFO dan VSAT, sewa lahan dan aset lainnya selain menara. Beberapa proyek didanai oleh arus kas internal perusahaan.

KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL

Kebijakan atas Struktur Modal adalah melaksanakan ketentuan-ketentuan finansial dari perjanjian pinjaman bank dan untuk menjaga komponen-komponen dalam neraca keuangan kami dengan dasar yang konservatif. Total pinjaman per tanggal 31 Desember 2017 berjumlah sebesar Rp8.998,7 miliar dengan rasio utang neto terhadap LQA EBITDA (seperti yang tertera dalam perjanjian pinjaman bank kami) sebesar 1,4x. Rasio pinjaman ini merupakan perbaikan dari tahun 2015 dan 2016 ketika utang neto untuk LQA EBITDA masing-masing sebesar 1,7x dan 1,6x. Kami terus mencari peluang guna memperpanjang masa jatuh tempo utang kami, mendapatkan biaya bunga yang lebih rendah dan meningkatkan fleksibilitas usaha.

REALIZATION OF INVESTMENT EXPENDITURES

As of December 31, 2017, the Company has the largest tower portfolio among independent tower providers in Indonesia. This puts the Company in the position to capitalize on the need for new towers in both urban and rural areas across the nation. Through its subsidiary, iForte, the Company has the ability to deploy microcell sites, fiberization and BTS hotel solutions to support the increased demand for network capacity.

As of December 31, 2017, we have made IDR1,304.5 billion in investments to build new towers and prepare existing towers for colocations, expand MWIFO utilization and VSAT capacity, renew ground leases and invest in other non tower assets. Several of these projects were funded by the Company's internal cash flow.

CAPITAL STRUCTURE POLICY

The Capital Structure Policy is to operate within the financial covenants of the bank loan agreements and to manage the balance sheet on a conservative basis. Total debt was IDR8,998.7 billion as of December 31, 2017 with a Net Debt to Last Quarter Annualized (LQA) EBITDA (as defined in our bank loan agreements) of 1.4x. This leverage ratio was an improvement the ratio in 2015 and 2016 when the Net Debt to LQA EBITDA was 1.7x and 1.6x, respectively. We continue to look for opportunities to extend our debt maturities, lower interest costs and increase operating flexibility.

INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

MATERIAL INFORMATION OR FACTS SUBSEQUENT TO THE ACCOUNTANT'S REPORT

Pada tanggal 2 Februari 2018, Protelindo dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD., Cabang Jakarta (BTMU) telah menandatangani Surat Perubahan Perjanjian Fasilitas ("Surat Perubahan") untuk mengubah ketentuan mengenai margin Fasilitas Pinjaman BTMU. Fasilitas Pinjaman BTMU dikenakan tingkat suku bunga yang sama dengan JIBOR ditambah margin yang berlaku yaitu sebesar 1,25% per tahun dan diperpanjang untuk periode 12 (dua belas) bulan.

Pada tanggal 14 Februari 2018, Protelindo telah melunasi seluruh utangnya dengan DBS berdasarkan Perjanjian Fasilitas DBS pada tahun 2014.

Pada tanggal 20 Februari 2018, Protelindo telah melunasi seluruh utangnya dengan OCBC berdasarkan Perjanjian Fasilitas OCBC pada tahun 2014 dan telah melunasi sebagian utangnya dengan SMBC berdasarkan Perjanjian Fasilitas SMBC pada tahun 2014.

Pada tanggal 22 Maret 2018, Protelindo telah menandatangani perjanjian-perjanjian di bawah ini sehubungan dengan rencana pengambilalihan saham PT Komet Infra Nusantara ("KIN") ("Rencana Transaksi"): (i) *Agreement For The Sale and Purchase of Call Option Interest in KIN* dengan PEPVII HKCO 1 LIMITED; (ii) *Agreement For The Sale and Purchase of Shares in KIN* dengan PT Telekom Infranasantara ("TI") dan PT Menara Telekomunikasi Indonesia; (iii) *Settlement and Release Agreement* dengan FYPM Management Pte. Ltd. ("FYPM"), TI, dan KIN untuk pengakhiran *call option agreement* tanggal 3 Juli 2017 yang dibuat oleh FYPM dan TI, dan *warrant agreement* tanggal 3 Juli 2017 yang dibuat oleh FYPM dan

On February 2, 2018, Protelindo and The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD., Jakarta Branch (BTMU) entered into an Amendment Letter of Facility Agreement to amend the terms of margin at the BTMU Loan Facility. The BTMU Loan Facility is subject to an interest rate equal to JIBOR plus an applicable margin of 1.25% per annum and the extension of the final maturity date for 12 (twelve) months.

On February 14, 2018, Protelindo has fully repaid its debt to DBS based on the DBS Facility Agreement first arranged in 2014.

On February 20, 2018, Protelindo fully repaid its debt to OCBC based on the OCBC Facility Agreement of 2014 and has partially repaid its debt to SMBC based on the SMBC Facility Agreement of 2014.

On March 22, 2018, Protelindo entered into the following agreements related to the proposed acquisition of shares in PT Komet Infra Nusantara ("KIN") ("Proposed Transaction"): (i) Agreement for the Sale and Purchase of Call Option Interests in KIN with PEPVII HKCO 1 LIMITED; (ii) Agreement for the Sale and Purchase of Shares in KIN with PT Telekom Infranasantara ("TI") and PT Menara Telekomunikasi Indonesia; (iii) Settlement and Release Agreement with FYPM Management Pte. Ltd. ("FYPM"), TI, and KIN for the termination of the call option agreement dated July 3, 2017 made between FYPM and TI, and the warrant agreement dated July 3, 2017 made between FYPM and KIN; and (iv) Settlement and Release Agreement

KIN; dan (iv) *Settlement and Release Agreement* dengan KIN dan masing-masing pemegang waran KIN untuk pengakhiran *warrant agreements* yang dibuat oleh KIN dan masing-masing pemegang waran. Setelah terlaksananya Rencana Akuisisi, Protelindo akan menguasai 100% saham dalam KIN. Penyelesaian dari Rencana Akuisisi tetap tunduk kepada pemenuhan atau perolehan sejumlah syarat pendahuluan antara lain, termasuk perolehan persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan persetujuan perusahaan yang diperlukan. Masing-masing dari Perseroan dan Protelindo bukan merupakan afiliasi dari masing-masing pihak dalam dokumen-dokumen tersebut di atas.

with KIN and each of the warrant holders of KIN for the termination of the warrant agreements between KIN and each warrant holder. Following the completion of the Proposed Transaction, Protelindo will hold 100% of the shares in KIN. The completion of the Proposed Acquisition remains subject to the fulfillment or obtainment of certain conditions precedent which among others, include obtaining approval from the Investment Coordinating Board (*Badan Koordinasi Penanaman Modal*) and the necessary corporate approval. Each of the Company and Protelindo are not an affiliate of each of the other parties under the above-mentioned documents.



PROSPEK BISNIS

BUSINESS PROSPECTS

Protelindo adalah pemilik dan operator menara telekomunikasi independen. Protelindo tidak dimiliki oleh atau terafiliasi dengan perusahaan komunikasi nirkabel manapun. Independensi merupakan keuntungan yang signifikan, karena pelanggan Protelindo mungkin merasa enggan untuk memberikan pendapatan sewa untuk lokasi sewa kepada kompetitor dalam industri komunikasi nirkabel dan lebih memilih untuk menyewa menara dari operator menara independen. Selain itu, Protelindo yakin dapat menyediakan pelanggannya dengan layanan yang lebih terarah dan jasa dengan spesialisasi tanpa memihak terhadap perusahaan komunikasi nirkabel tertentu. Seluruh menara Protelindo tersedia untuk penyewaan dan memiliki kapasitas untuk penambahan kolokasi. Grup yakin bahwa portofolio Protelindo yang ada merupakan sebuah sarana untuk pengembangan bisnisnya lebih lanjut. Portofolio menara kami merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia dari semua operator menara independen dan tersebar secara geografis. Hal ini menciptakan skala ekonomi terkait dengan operasi kami, seperti pemeliharaan menara dan beban operasional lainnya, dan juga menawarkan apa yang diyakini Grup bahwa jumlah menara yang sangat besar dapat mendukung kebutuhan jaringan operator nirkabel Indonesia.

Menara yang kami miliki telah ditempatkan di area-area dengan kepadatan populasi yang tinggi. Sebagian besar menara Protelindo berlokasi di empat wilayah dengan kepadatan tertinggi di Indonesia, yaitu: Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Sekitar 54% menara berada di pulau Jawa yang penting dan strategis dimana kami berharap bahwa para operator telekomunikasi mungkin akan menambah kenaikan kapasitasnya untuk mendukung permintaan atas jaringannya dengan meningkatkan perangkat, pembangunan menara baru atau kolokasi menara.

Sebagian besar dari menara yang dimiliki oleh Grup baru saja dibangun, dengan rata-rata usia menara sekitar 6,97 tahun. Menara tersebut dibangun sebagai menara yang bisa disewakan ke banyak pihak untuk mendukung kolokasi dari beberapa penyewa. Sebagian besar menara kami dirancang

Protelindo is an independent owner and operator of telecommunication towers. Protelindo is not owned by or affiliated with any wireless communications companies. Independence is a significant advantage as Protelindo's customers may be reluctant to provide rental income for site leases to competitors in the wireless communications industry and may prefer to lease towers from an independent tower operator. In addition, Protelindo believes it provides its customers with more targeted and specialized services without bias towards any particular wireless communications company. All of Protelindo's towers are available for lease and have the capacity for up to four colocations. The Group believes that Protelindo's existing portfolio of towers is a platform from which it can further grow its business. Our young tower portfolio is the largest in Indonesia among independent tower companies and is geographically diverse. This creates economies of scale with respect to our operations, such as tower maintenance and other operating expenses, and offers what the Group believes is a critical mass of towers to support the network requirements of Indonesia's wireless operators.

Our towers are generally well placed in areas of high population density. Most of Protelindo's towers are located in Indonesia's four most populated regions: Java, Sumatera, Kalimantan and Sulawesi. Approximately 54% of the Company's towers are located in Java which is strategically important and where we expect telecommunications operators will be likely to add incremental capacity to support capacity demand on their networks through upgrades of equipment, new builds or colocations.

The vast majority of our towers have been recently built, with an average tower age of approximately 6.97 years. The towers were constructed as multi-tenant towers to support co-locations from multiple tenants. The majority of our towers are designed for multiple tenants with medium to heavy equipment loading

untuk menampung beberapa penyewa dan dipasang perangkat yang sedang maupun berat, dan oleh sebab itu mampu menampung empat penyewa atau lebih. Menara-menara tersebut dirancang agar lebih mudah untuk diperkuat untuk menampung tambahan penyewa dengan biaya yang kecil.

Protelindo memiliki *Master Lease Agreements* yang telah dinegosiasikan sebelumnya dan sewa lokasi terkait dengan semua perusahaan operator telekomunikasi besar di Indonesia termasuk Telkomsel, Indosat, XL Axiata, dan H3I. Prinsip Protelindo hanya membangun atau mengakuisisi menara yang sudah memiliki penyewa. Protelindo merupakan pemilik sekaligus operator menara independen pertama di Indonesia dengan skala yang besar yang memiliki sewa lokasi jangka panjang dengan setiap perusahaan komunikasi nirkabel besar. Perseroan secara aktif memasarkan ketersediaan ruang di menaranya baik kepada pelanggan baru maupun pelanggan yang sudah ada dan memiliki permintaan tetap dari para penyewa kolokasi baru.

Sebagai pemain awal dalam industri menara di Indonesia, Grup percaya bahwa Protelindo memiliki keuntungan dalam menghadapi hambatan untuk masuk dalam industri menara di Indonesia. Hambatan untuk masuk ke industri ini cukup besar dan termasuk:

- pembatasan peraturan, termasuk pembatasan mengenai investasi asing dan proses dalam mendapatkan ijin dan lisensi;
- jumlah modal awal yang besar untuk membangun atau mengakuisisi menara;
- beban keuangan yang tinggi dan risiko operasional dan gangguan yang mungkin dihadapi para operator telekomunikasi dalam memindahkan peralatan ke lokasi menara yang berbeda;
- kebutuhan untuk membangun portofolio menara dengan skala besar dan keragaman geografis untuk menarik operator telekomunikasi; dan
- lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membangun hubungan dan kepercayaan, dan negosiasi MLA dengan operator-operator telekomunikasi.

and are therefore capable of accommodating four or more tenants. The towers are designed to make it easier to upgrade to accommodate additional tenants at minimal expense.

Protelindo has negotiated Master Lease Agreements and associated site leases with all the major telecommunications operators in Indonesia including Telkomsel, Indosat, XL Axiata, and H3I. Protelindo's principle is to only build or acquire towers for which an anchor tenant has already been secured. Protelindo was the first significant-scale independent owner and operator of towers in Indonesia with long-term site leases with every major wireless communication company. The Company actively markets its existing tower space to new and current customers and has experienced steady demand from new colocation tenants.

As an early mover in the Indonesian tower industry, the Group believes that Protelindo benefits from the barriers to entry in the Indonesian tower industry. These barrier to entry are significant and include:

- regulatory restrictions, including restrictions on foreign investment and the process required to obtain relevant permits and licenses;
- the significant amount of initial capital required to build or acquire towers;
- the high financial cost and operational risks and disruptions telecommunications operators may face when moving their equipment to different towers;
- the necessity of building a portfolio of towers with substantial scale and geographic diversity in order to attract telecommunications operators; and
- the significant amount of time required to build relationships and trust, and negotiate MLAs, with telecommunications operators.

PENCAPAIAN KAMI BERHASIL DARI KEAHLIAN KAMI BAIK LOKAL MAUPUN GLOBAL DAN MANAJEMEN SENIOR YANG BERPENGALAMAN

Grup dipimpin oleh manajemen yang berpengalaman, yang ahli di bidang industri menara. Sebagian besar dari anggota manajemen adalah pelopor dalam bisnis menara di Indonesia dan telah berhasil memperoleh, mengembangkan dan mengoperasikan portofolio besar menara di seluruh Indonesia. Protelindo mulai beroperasi pada tahun 2003 sebagai salah satu perusahaan menara independen pertama di Indonesia. Sebagian besar manajemen bergabung dengan Protelindo pada Maret 2007 dan telah melakukan pengembangan bisnis menara di Indonesia. Selama lebih dari sebelas tahun menjalankan usahanya, Protelindo telah menerima dan memberi pelatihan kepada lebih dari 1.589 karyawan penuh waktu dan kontrak. Para Manajer dan karyawan lokal juga memiliki pengetahuan yang mendalam terkait peraturan pemerintah Indonesia dan juga tentang kebiasaan-kebiasaan dan praktik yang berkaitan dengan akuisisi, konstruksi, operasi dan pemeliharaan menara di seluruh Indonesia.

KONTRAKTOR

Protelindo memperkerjakan kontraktor dalam jumlah besar yang melakukan pembangunan, konsultasi, sambungan listrik, akuisisi lokasi, teknik, perkuatan menara, *shelter*, pelayanan pemeliharaan dan jasa keamanan. Kontraktor tersebut berasal dari seluruh wilayah Indonesia, dan kami yakin bahwa hubungan dengan kontraktor tersebut memberikan akses kepada sebagian besar pekerja dengan kualifikasi terbaik di Indonesia. Setiap kontraktor Protelindo menjalani proses seleksi yang ketat yang mencakup evaluasi teknis, finansial, dan hukum sebelum mereka diperkerjakan. Ketika dipekerjakan, setiap kontraktor mendapatkan tinjauan secara berkala selama para kontraktor terus bekerja sama dengan Protelindo. Berdasarkan pengalaman yang luas kami dalam bisnis menara, kami telah membuat ruang lingkup kerja sesuai dan serangkaian prosedur pengendalian mutu yang harus diikuti oleh setiap kontraktornya. Semua kontraktor menandatangani kontrak standar kami yang berisi pekerjaan-pekerjaan yang diberikan dan harga yang disepakati dalam pesanan pembelian masing-masing.

PROPERTI DAN PERIZINAN

Protelindo bertanggung jawab untuk mendapatkan sewa lahan, yang memberikan hak untuk menggunakan lahan bagi setiap menaranya dimanapun menara tersebut berada. Jangka waktu awal dari sewa lahan standar kami umumnya

GLOBAL AND LOCAL EXPERTISE OF OUR ACCOMPLISHED AND EXPERIENCED MANAGEMENT

The Group is led by an experienced management team who are experts in the tower industry. Many members of the management are pioneers in the tower business in Indonesia and have successfully acquired, developed and operated a large portfolio of towers throughout Indonesia. Protelindo started operations in 2003 as one of the first independent tower companies in Indonesia. Most of the current management joined Protelindo in March 2007 and have developed the tower business in Indonesia. Over the past eleven years of operations, Protelindo has hired and trained over 1,589 fulltime and contract employees. The local managers and employees have an in-depth knowledge of Indonesian regulations and the customs and practices relating to the acquisition, construction, operation and maintenance of towers throughout Indonesia.

CONTRACTORS

Protelindo hires a large number of contractors who perform construction, consultancy, electrical connection, site acquisition, engineering, tower reinforcement, shelter, maintenance and security services. These contractors are based throughout Indonesia. We believe that our contractor relationships give us access to some of the most qualified workers in Indonesia. Each of Protelindo's contractors undergoes a strict screening process that involves technical, financial and legal evaluations before a contractor is hired. Once hired, each contractor further undergoes periodic reviews as they continue to work with Protelindo. Based on our extensive experience in the tower business, we have established a proprietary scope of work and a set of quality control procedures for each of our contractors to follow. All contractors sign our standard form contract under which specific assignments and prices are agreed to on individual purchase orders.

PROPERTIES AND LICENSES

Protelindo is responsible for obtaining a ground lease, which establishes the right to use the land on which a tower is located, for each of its towers. The initial term of our standard ground lease is generally up to 20 years (divided into 5-10 year initial

hingga 20 tahun (terdiri dari 5-10 tahun untuk jangka waktu awal dengan perpanjangan selama 5-10 tahun sesuai dengan keinginan kami setelah jangka waktu awal berakhir). Kami biasanya melakukan pembayaran dimuka atas perjanjian sewa lahan untuk periode 5 hingga 10 tahun, dengan pilihan untuk memperbarui sesuai dengan keinginan kami. Pada tanggal 31 Desember 2017, Protelindo memiliki 14.204 sewa lahan dan sisa jangka waktu sewa rata-rata (termasuk syarat jangka waktu perpanjangan sesuai dengan keinginan kami) yaitu sekitar 10,74 tahun. Rata-rata luas ruang lahan yang tercakup dalam sewa lahan adalah 168 meter persegi. Protelindo juga bertanggung jawab untuk memastikan perizinan setiap menara yang dimilikinya. Sebagian besar menara telekomunikasi di Indonesia memerlukan izin konstruksi. Kami memiliki tim yang didedikasikan untuk memperoleh dan mempertahankan izin ini.

ASURANSI

Pada tanggal 31 Desember 2017, seluruh aset tetap Perseroan (kecuali untuk tanah dan aset dalam penyelesaian) telah diasuransikan kepada PT AIG Insurance Indonesia (dahulu PT Chartis Insurance Indonesia), PT Asuransi ASEI Indonesia, PT Asuransi FPG Indonesia (dahulu PT Asuransi Indrapura) terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya. Jumlah pertanggungan, masing-masing, sebesar Rp9.301,2 miliar. Kami beranggapan cakupan asuransi atas aset tetap sudah mencukupi dan sesuai dengan praktek industri.

INDUSTRI

Prospek usaha yang dimiliki oleh emiten masih akan terus tumbuh dalam beberapa tahun kedepan. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan industri telekomunikasi (operator) dan perkembangan teknologi terbaru (5G).

Menurut Nidhi Dhruv analis Moody's, dalam peningkatan dan penguatan teknologi 3G dan 4G oleh operator akan meningkatkan kebutuhan menara telekomunikasi. Langkah operator ini dinilai akan memberikan pertumbuhan pendapatan 8%-10% bagi pelaku industri menara telekomunikasi dalam satu hingga dua tahun ke depan.

Wacana "network sharing" akan memberikan dampak negatif dalam jangka pendek, namun dalam kurun waktu tiga hingga lima tahun ke depan akan memberikan banyak kesempatan bagi perusahaan menara telekomunikasi untuk berekspansi khususnya di daerah luar pulau Jawa. Saat ini, Perseroan memiliki sekitar 46% dari menaranya di luar pulau Jawa.

terms with 5-10 year extension terms at our option following the expiration of the initial term). We generally prepay the land contract for a period of 5 to 10 years with the option to renew within the ground lease parameters. As of December 31, 2017, Protelindo had 14,204 ground leases with an average remaining term (including the renewal terms at our option) of approximately 10.74 years. The average ground space covered by each ground lease is approximately 168 square meters. Protelindo is also responsible for securing licenses for each of its towers. Most telecommunications towers in Indonesia require a construction permit. We have a team dedicated to obtaining and maintaining these permits.

INSURANCE

As of December 31, 2017, all the Company's fixed assets (except for land and construction in progress) are insured with PT AIG Insurance Indonesia (formerly PT Chartis Insurance Indonesia), PT Asuransi ASEI Indonesia, and PT Asuransi FPG Indonesia (formerly PT Asuransi Indrapura) against fire, theft and other possible risks. The value of the insurance came to IDR9,301.2 billion. We consider insurance coverage on all of fixed assets as adequate and in accordance with industry practice.

INDUSTRY

Business prospects at the listed companies will continue to grow over the next few years. This is in line with the growth of the telecom industry (operators) and technological developments (5G).

According to Moody's analyst Nidhi Dhruv, in building out and strengthening their third and fourth-generation (3G and 4G) footprints, the telecom operators will seek to lease tower space and sell more of their own towers. In this context, we expect overall year-on-year revenue growth of about 8%-10% for tower operators during the next one to two years.

Network sharing, if any, would likely be negative in the near term – but positive on a three to five-years view for the tower operators to extend their networks outside Java. The Company has approximately 46% of its towers outside Java.

STRATEGI USAHA

BUSINESS STRATEGIES

Perseroan berkeyakinan bahwa perlu ada diversifikasi usaha dalam rangka menumbuhkan bisnis dengan pelanggannya. Perseroan melalui anak perusahaannya Protelindo dan iForte sudah terkenal dengan jaringan menara yang luas, jaringan serat optik dan VSAT yang luas, yang menghasilkan arus kas yang kuat. Mulai tahun 2015, dengan akuisisi iForte, aset menara dan serat optik yang penting telah digabungkan untuk memungkinkan Perseroan memperkuat posisinya di industri infrastruktur telekomunikasi Indonesia. Kami memperkirakan bahwa komunikasi akan berlanjut kepada jaringan 4G dan 5G dengan komunikasi data yang lebih cepat, bahwa kami akan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kami, yaitu infrastruktur komunikasi.

Kesuksesan Perseroan saat ini adalah hasil dari memahami kebutuhan industri dan kebutuhan pelanggan. Menara Perseroan berada pada posisi yang baik dan memiliki kapasitas untuk menangkap sejumlah besar penyewa kolokasi. Jaringan serat optik kami yang luas juga penting untuk menangkap tren kolokasi yang terus berlanjut serta pelanggan baik perbankan maupun di kategori UKM (Usaha Kecil Menengah). Aset utama Protelindo yaitu menara diperkirakan akan tetap penting bagi penerapan teknologi dan kebutuhan jaringan yang lebih tinggi dan kompleks di masa depan. Selain itu, Perseroan bermaksud memanfaatkan beberapa strategi bisnis untuk memperkuat posisinya di industri dan memperluas jaringan menara dan serat optik melalui konstruksi dan akuisisi.

MEMAKSIMALKAN SEWA KOLOKASI PADA MENARA PERSEROAN

Perseroan percaya bahwa usahanya dapat dikembangkan secara substansial melalui konsep kolokasi, atau menyewakan ruang yang tersedia di menara yang ada ke beberapa penyewa. Biaya pengoperasian menara sebagian besar tetap, meskipun Perseroan menghadapi biaya yang relatif rendah untuk menambahkan penyewa. Strategi "*asset-light*" yang dituju oleh operator telekomunikasi mendukung penambahan kolokasi. Dengan demikian, penyewaan ruang yang tersedia

The Company believes that it has to differentiate in order to diversify and grow the business. The Company, through its subsidiaries Protelindo and iForte, is known for its extensive network of towers, its vast fiber optics network and VSAT capacity. These varied business lines result in strong cash flow generation capacity. Starting in 2015, with the acquisition of iForte, tower and fiber optic assets, have been combined to allow the Company to strengthen its position in the Indonesian telecommunication infrastructure industry. We envisage communication will continue to move towards faster 4G and 5G networks that we will have the ability to meet our customers, communication infrastructure needs.

The Company's success today is a result of an understanding of industry trends and customer's need. The Company's towers are well positioned and have the capacity to capture large numbers of colocation tenants. Our vast fiber optics network is vital to capture this improving communication capacity and serving customers in banking and other industries (particularly SME businesses). Protelindo's asset base will be important for the implementation of higher and more complex technologies and network requirements in the future. In addition, the Company intends to utilize several business strategies to strengthen its position in the industry and expand its network of towers and fiber optics through both construction and acquisition opportunities.

MAXIMIZE COLOCATIONS ON OUR EXISTING TOWERS

The Company believes that it can grow its business substantially through colocations, or leasing available space on its existing towers to multiple tenants. The costs of operating a tower are largely fixed while the Company faces relatively low costs for adding tenants. The "*asset-light*" strategy that telecommunications operators are focusing on supports increasing colocations. Accordingly, leasing available space to additional telecommunications operators will significantly

untuk operator telekomunikasi tambahan akan secara signifikan memperbaiki marjin operasi dan laba atas modal yang diinvestasikan. Perusahaan secara aktif memasarkan kolokasi ke operator telekomunikasi dan terus mengedukasi pasar mengenai manfaat yang ditawarkan kolokasi kepada operator telekomunikasi.

PERTUMBUHAN MELALUI PEMBANGUNAN

Secara historis, operator telekomunikasi telah membangun menara untuk penggunaan sendiri. Namun sejak 2010, operator telekomunikasi Indonesia semakin banyak mengontrak operator menara independen, seperti Protelindo, untuk membangun dan memiliki menara serta menyewakan ruang operator di menara tersebut berdasarkan perjanjian sewa jangka panjang daripada membangun dan mengoperasikan portofolio menara mereka sendiri. Pengaturan ini dikenal sebagai pengaturan "*build-to-suit*". Sejak 31 Maret 2007, kami telah membangun 6.418 menara dengan pengaturan sesuai kebutuhan. Perseroan percaya bahwa faktor pertumbuhannya sampai saat ini timbul dari pembangunan menara *build-to-suit* yang dapat diandalkan.

Perseroan telah mengembangkan bisnisnya dengan berfokus pada proyek-proyek yang sesuai dengan kriteria *minimum return*. Dengan pengaturan ini, Perseroan biasanya setuju untuk bekerja sama dengan operator telekomunikasi untuk membangun dan memiliki jaringan lokasi menara yang dibangun di lokasi yang dipilih oleh operator telekomunikasi sesuai dengan spesifikasi desain jaringannya. Operator telekomunikasi kemudian menjadi *anchor tenant* di menara ini berdasarkan perjanjian sewa situs jangka panjang. Perseroan akan terus memasarkan menara tersebut ke operator lain untuk mendapatkan pendapatan kolokasi. Perseroan tidak membangun menara tanpa mengamankan sewa lokasi dengan *anchor tenant* terlebih dahulu.

Perseroan terus membangun bagian yang signifikan dari menara barunya berdasarkan pengaturan tersebut. Perseroan telah menunjukkan bahwa mereka memiliki sistem dan proses untuk membangun beberapa ratus menara per bulan. Dengan menyediakan layanan ini, Perseroan bertujuan untuk meningkatkan jumlah portofolio menara dan menciptakan aliran pendapatan tambahan dari *anchor tenant* dan penyewa kolokasi.

improve our operating margins and return on invested capital. The Company actively markets for colocations to telecommunications operators and works to educate the market on the benefits that colocation offers to telecommunications operators.

GROWTH BY BUILDING INFRASTRUCTURE

Historically, telecommunications operators constructed towers for their own use. Since 2010, Indonesian telecommunications operators have increasingly contracted independent tower operators, such as Protelindo, to build and own towers and lease space on those towers under long-term lease agreements rather than building and operating their own tower portfolios. These arrangements are known as "*build-to-suit*" arrangements. Since March 31, 2007, we have constructed 6,418 towers under such build-to-suit arrangements. The Company believes that a factor in its growth to date arises from the reliable construction of build-to-suit towers.

The Company has grown its business by focusing on build-to-suit projects that meet its minimum return criteria. Under these arrangements, the Company typically agrees to work with a telecommunications operator to build and own a network of tower sites that are constructed in locations as designated by the telecommunications operator in accordance with their network design specifications. The telecommunications operator then becomes the anchor tenant on these towers under a long-term site lease agreement. The Company will continue to market such towers to other operators to secure colocation revenues. The Company does not construct towers without securing a site lease with an anchor tenant in advance.

The Company continues to build a significant portion of its new towers under the BTS arrangements. The Company has demonstrated that it has the systems and processes in place to build several hundred towers per month. By providing this service, the Company aims to increase the size of its tower portfolio and create additional revenue streams from both anchor tenants and colocation tenants.

PERTUMBUHAN MELALUI AKUISISI

Perseroan mencapai posisi terdepan di Indonesia terutama melalui akuisisi menara. Protelindo bermaksud mempertahankan posisi pasarnya dengan memanfaatkan akuisisi sebagai strategi utama. Dan akan terus mengeksplorasi akuisisi strategis yang memenuhi kriteria pengembalian minimum. Transaksi akuisisi biasanya terjadi dengan operator telekomunikasi besar dan perusahaan menara independen yang lebih kecil yang ingin menjual menara mereka. Seiring operator telekomunikasi bergerak menuju strategi "asset-light", kesempatan peluang akuisisi menara biasanya akan muncul.

Perseroan mengevaluasi peluang akuisisi dengan menggunakan beberapa kriteria, termasuk pengembalian modal yang diinvestasikan, potensi permintaan kolokasi, tingkat tumpang tindih/*overlap* dengan portofolio menara yang ada, lokasi menara, utilisasi kapasitas yang ada, kepadatan penduduk lokal dan potensi pertumbuhan, dan undang-undang dan peraturan yang berlaku terkait dengan hal baru pembangunan menara Kami akan terus mencari cara melaksanakan peluang akuisisi menara dengan opsi paling efisien, termasuk mengoptimalkan struktur permodalan.

FOKUS TERHADAP KUALITAS LAYANAN

Perseroan menggunakan teknik penjualan dan pemasaran yang ditargetkan untuk meningkatkan *tenancy ratio* di menaranya, yang sebagian besar dibangun untuk empat atau lebih penyewa. Protelindo percaya bahwa kunci keberhasilan strategi ini terletak pada kemampuannya untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan operator telekomunikasi dan secara konsisten memenuhi kebutuhan pelanggannya. Kami berusaha untuk diakui sebagai perusahaan yang membuat komitmen komersial yang masuk akal bagi pelanggannya dan kemudian memberikan komitmen ini dengan tepat waktu. Perseroan percaya bahwa kemampuannya untuk membantu operator telekomunikasi dengan cepat memasuki wilayah operasional baru dan memperluas jangkauan dan kapasitas jaringan mereka akan membantu meningkatkan *tenancy ratio*. Oleh karena itu, kami menargetkan operator telekomunikasi yang memperluas atau memperbaiki infrastruktur jaringan mereka yang ada dan juga meluncurkan teknologi baru dan berkembang secara geografis. Protelindo percaya bahwa pihaknya telah membangun basis menara yang cukup besar untuk mempertahankan pertumbuhan yang ditargetkan di masa yang akan datang terutama melalui kolokasi.

GROWTH BY ACQUISITION

The Company achieved its leading industry position in Indonesia primarily through tower acquisitions. Protelindo intends to maintain its market position by utilizing acquisitions as a principal strategy for growth. As such, the Company will continue to explore strategic acquisitions that meet its minimum return criteria. Transactions could be with large telecommunications operators or smaller independent tower companies who are seeking to sell their towers. As telecommunications operators move towards an "asset-light" strategy, potential acquisition opportunities are likely to arise.

The Company evaluates potential acquisitions using many criteria, including return on invested capital, potential colocation demand, degree of overlap with its existing tower portfolio, tower location, existing capacity utilization, local population density and potential growth. The Company also considered applicable laws and regulations relating to new tower development. The Company will continue to explore available cost-effective funding for new tower acquisitions, including optimizing management of its capital structure.

FOCUS ON QUALITY OF SERVICE

The Company utilizes targeted sales and marketing techniques to increase the *tenancy ratio* on its towers, the majority of which are built for four or more tenants. Protelindo believes that the key to the success of this strategy lies in its ability to develop long-term relationships with telecommunications operators and consistently meet its customers' needs. We seek to be recognized as a company that makes commercially reasonable commitments to its customers and then delivers on these commitments in a timely manner. The Company believes that its ability to help telecommunications operators quickly enter new geographic areas and expand their network coverage and capacity will increase the *tenancy ratio*. We therefore target telecommunications operators that are expanding or improving their existing network infrastructure as well as those deploying new technologies and expanding geographically. Protelindo believes that it has established a large enough tower base to sustain its targeted growth in the foreseeable future primarily through colocations.



KENALI PELANGGAN ANDA

Kami percaya bahwa dengan memperdalam pemahaman atas pelanggan kami (*know your customer*), kami telah memahami pentingnya diversifikasi dan kekuatan finansial untuk mendukung kebutuhan pelanggan kami. Penggabungan pengetahuan pasar dan kemampuan pemasaran Protelindo dan iForte terbukti dengan menghubungkan situs menara dengan serat optik untuk mencapai transmisi yang lebih optimal untuk implementasi 4G-LTE. Implementasi strategis disertai jangkauan layanan kami yang luas memungkinkan kami untuk memperdalam pemahaman atas kebutuhan pelanggan kami dan memenuhi kebutuhan bisnis mereka yang dinamis.

KEBIJAKAN KEUANGAN YANG BERKELANJUTAN

Perseroan ingin terus memberikan penekanan yang kuat pada penerapan kebijakan keuangan dan sosial yang ditujukan untuk keberlanjutan jangka menengah sampai jangka panjang. Ini termasuk pengelolaan utang pada tingkat yang wajar dan menerapkan investasi modal yang disiplin. Kami berencana untuk terus mengelola *leverage* seiring dengan peningkatan jumlah menara dan pengelolaan seluruh aset Perseroan. Protelindo akan berusaha untuk beroperasi dengan efisien, mengelola modal kerjanya dan meningkatkan margin dan profitabilitasnya. Kami juga akan menjadi bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab dan menjalankan kegiatan operasional yang berkelanjutan.

KNOW YOUR CUSTOMER

We believe by knowing our customer we have come to understand the importance of diversification and financial strength to support the needs of our customers. The combination of Protelindo and iForte market knowledge and capacity including connecting tower sites with fiber optics to reach a more optimal state of transmission for 4G-LTE implementation, is indicative of this strategy. Our broad approach and range of services allows us to know our customers and meet their changing business needs.

FINANCIAL POLICIES AIMED AT SUSTAINABILITY

The Company intends to continue to place strong emphasis on implementing financial and social policies aimed at medium to long term sustainability. This includes managing indebtedness at a reasonable level, and exercising disciplined capital investments. We plan to continue to manage leverage while simultaneously increasing the number of towers and managing all Company's assets. Protelindo will work to reduce costs, manage its working capital and enhance its margins and profitability. We will also work to be a responsible member of the community and operate in an environmentally sustainable manner.

PERBANDINGAN ANTARA PROYEKSI DENGAN PENCAPAIAN DI TAHUN 2017

COMPARISON OF 2017 OUTLOOK AND ACTUAL RESULTS

Uraian Description	Perkiraan Proyeksi 2017 2017 Outlook Range	Aktual 2017 2017 Actual	Aktual 2016 2016 Actual
Pendapatan Revenue	Rp5,31 – 5,48 triliun / trillion	Rp5,34 triliun / trillion	Rp5,05 triliun / trillion
EBITDA EBITDA	Rp4,62 – 4,77 triliun / trillion	Rp4,60 triliun / trillion	Rp4,40 triliun / trillion

TARGET KAMI DI TAHUN 2018

OUR TARGET FOR 2018

Pendapatan
Revenue

RP5,568
TRILIUN / TRILLION

EBITDA
EBITDA

RP4,727
TRILIUN / TRILLION

ASPEK PEMASARAN

MARKETING OVERVIEW

PANGSA PASAR

Kami berada dalam pasar yang kompetitif dan mungkin menghadapi tekanan harga pada industri penyewaan menara. Para pelanggan kami memiliki alternatif untuk menyewa ruang menara, termasuk dari operator telekomunikasi besar di Indonesia seperti Telkomsel, Dayamitra Telekomunikasi (anak perusahaan Telkom), Indosat dan XL, penyedia menara independen seperti PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk, PT Solusi Tunas Pratama, Tbk dan sejumlah perusahaan menara independen yang beroperasi dengan portofolio lokasi yang lebih kecil. Kami yakin bahwa persaingan di industri penyewaan menara Indonesia didorong oleh, antara lain, lokasi menara, hubungan dengan operator telekomunikasi, kualitas menara, harga sewa, ukuran portofolio menara, dan kecepatan untuk memasarkan menara-menara baru.

Selain itu, operator telekomunikasi besar di Indonesia mungkin memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar dan juga mengoperasikan portofolio menara besar. Operator telekomunikasi di Indonesia telah mulai berbagi menara dengan operator telekomunikasi Indonesia lainnya atau afiliasi mereka masing-masing daripada menyewa ruang menara dari menara independen seperti kami. Sebagai contoh, Telkomsel, Indosat dan XL menyewakan ruang menaranya kepada operator telekomunikasi lainnya. Setiap perubahan yang merugikan dalam permintaan ruang menara dari operator menara independen dapat berdampak negatif pada kondisi bisnis, prospek, hasil dari operasional dan kondisi keuangan kami.

STRATEGI PEMASARAN

Grup juga memasarkan kolokasi yang tersedia pada menara kami untuk pelanggan potensial yang ada dengan tujuan untuk memaksimalkan jumlah pelanggan yang menggunakan jasa ini di setiap menaranya dan mendapatkan pendapatan tambahan. Kami mengumpulkan data dari setiap jaringan operator telekomunikasi mengenai rencana perluasan mereka dan, menggunakan perangkat lunak kami yang sesuai guna menentukan mana diantara menara kami yang ada berlokasi di area yang sesuai jaringan rencana perluasan dan kemudian menyediakan operator tersebut dengan informasi yang relevan. Kami mengembangkan strategi pemasaran yang spesifik untuk

MARKET SHARE

We are in a competitive market and in of industry tha is subject to pricing presure. Our customers have numerous alternatives for leasing tower space, including from major Indonesian telecommunications operators such as Telkomsel, Dayamitra Telekomunikasi (a subsidiary of Telkom), Indosat and XL and independent tower providers such as PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk, PT Solusi Tunas Pratama, Tbk and a significant number of smaller independent tower companies. We believe competition in the Indonesian tower leasing industry is driven by, among others, tower location, relationships with telecommunications operators, tower quality, pricing, size of tower portfolio, and speed to market of new towers.

In addition, the major telecommunications operators in Indonesia have solid financial resources and can operate large tower portfolios. Indonesian telecommunications operators or their respective affiliates can lease tower space as an alternative to an operator leasing tower space from independent tower operators such as Protelindo. For example, Telkomsel, Indosat and XL can lease space on their towers to other telecommunications operators. Any adverse change in the demand for tower space managed by independent tower operators could adversely affect our business, prospects, results of operations and financial condition.

MARKETING STRATEGY

The Group markets available colocation on towers to potential customers in order to maximize the number of customers installed on each tower and earn additional revenues. The Company gathers data for each telecommunication operator's network expansion plans and, using our proprietary software, determine which of our existing towers are located in areas that meet their network expansion plans. The Company searches for the best fit to possible colocations and subsequently provides the operators with the relevant information. The Company develops marketing strategies that are specific to each telecommunications operator and regularly meet with

masing-masing operator telekomunikasi dan secara teratur bertemu dengan tim desain jaringan masing-masing operator telekomunikasi untuk memahami kebutuhan mereka dan memasarkan ketersediaan ruang pada menara kami. Kami menyajikan batas waktu untuk pelaksanaan kolokasi dan pemasangan peralatan kepada para operator telekomunikasi dan berusaha untuk memenuhi batas waktu tersebut dan mengungguli para pesaing kami. Kami memiliki tujuan untuk menyewakan ruang menara yang sesuai untuk menindaklanjuti setiap permintaan perangkat yang kami terima dari operator nirkabel.

each telecommunication operator's network design teams to understand their requirements and explore opportunities for our towers. We present each telecommunications operator with competitive timelines for implementing co-locations or the installation of new equipment. We aim to provide the most suitable tower space to service the needs of our clients. We view the ability to adhere to this timeline as one of our competitive advantages.

INFORMASI MATERIAL TERKAIT DENGAN INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI ATAU RESTRUKTURISASI UTANG ATAU MODAL

MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITION OR RESTRUCTURING OF DEBT OR CAPITAL

Informasi material terkait dengan investasi, ekspansi, akuisisi maupun restrukturisasi atas utang atau modal dari Grup sepanjang periode tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Pembiayaan Kembali Utang Bank

Pada tanggal 28 Februari 2017, Protelindo menandatangani (i) Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berulang dengan nilai Rp250 miliar dengan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ LTD., Jakarta Branch dan (ii) Perjanjian Fasilitas Pinjaman berulang Rp150 miliar dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia. iForte menyediakan jaminan perusahaan untuk memastikan pemenuhan liabilitas Protelindo untuk kedua fasilitas tersebut.

The material information related to investment, expansion, acquisition or restructuring of debt or capital of the Group during 2017 is as follows:

Bank Debt Refinancing

On February 28, 2017, Protelindo entered into an (i) IDR250 billion Revolving Loan Facility Agreement with The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ LTD., Jakarta Branch and (ii) IDR150 billion Revolving Loan Facility Agreement with PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia. iForte provided a corporate guarantee to secure the fulfillment of Protelindo's liabilities for both facilities.

Pada tanggal 20 Juni 2017, Protelindo menandatangani Perjanjian Pinjaman Transaksi Spesifik Rp1.000 miliar dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tujuan dari Perjanjian Pinjaman Mandiri adalah untuk tujuan umum perusahaan, yang dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut: (i) untuk membayar utang yang dimiliki saat ini berdasarkan satu atau lebih Perjanjian Fasilitas Bank atau perjanjian fasilitas bank lainnya (jika ada) melalui pembiayaan kembali dan/atau skema *take over*; dan (ii) untuk pendanaan belanja modal dan kebutuhan lain Perseroan.

On June 20, 2017, Protelindo entered into IDR1,000 billion Specific Transaction Loan Agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The purposes of the Mandiri Loan Agreement are for general corporate purposes, which can be used for the following matters: (i) to pay existing debts through refinancing and/or take over scheme; and (ii) to fund capital expenditure and other needs of the Company.

KEBIJAKAN DIVIDEN

DIVIDEND POLICY

Direksi Perseroan saat ini bermaksud untuk meminta persetujuan pemegang saham untuk membayar dividen senilai Rp1,2 triliun sehubungan dengan laba yang dihasilkan di 2017. Berdasarkan kebijakan dividen kami, kami bermaksud untuk mempertahankan jumlah ini sebagai dasar tahunan untuk dividen kami kedepannya. Setiap rekomendasi, jumlah dan pembayaran dividen akan mengacu pada kebijaksanaan dari Direksi dengan syarat mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dan berdasarkan faktor-faktor sebagai contoh pendapatan Perseroan, arus kas, liabilitas, kondisi keuangan, rencana investasi dan peluang pertumbuhan. Perseroan juga dapat mempertimbangkan untuk membayar dividen khusus dari waktu ke waktu. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mengumumkan dan membagikan dividen atau mempertahankan setiap besaran dividen. Direksi memiliki kewenangan untuk menyesuaikan kebijakan dividen Perseroan setiap waktu.

The Company's Board of Directors currently intends to seek shareholders approval to pay a dividend of IDR1.2 trillion with respect to profits generated in 2017. Pursuant to our dividend policy, we aim to maintain this amount as an annual baseline for our dividends going forward. Any actual future, amount and payment of dividends will be at the discretion of the Board of Directors and subject to shareholders approval and will be subject to factors such as the Company's revenues, cash flows, liabilities, financial condition, investment plan and growth opportunities. The Company may also consider paying special dividends from time to time. There is no guarantee that the Company will declare and distribute any dividends or maintain any level of dividends. The Board of Directors has the authority to adjust the Company's dividend policy at any given time.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Realization of the Use of Proceeds from Public Offering

Tanggal Laporan ke OJK Reporting Date to OJK	Tanggal Efektif Effective Date	Tipe Penawaran Umum Type of Public Offering	Jumlah Hasil Penawaran Umum Amount of Public Offering	Hasil Bersih Penawaran Umum Net Results of Public Offering
4 Juli 2014 July 4, 2014	20 Februari 2014 February 20, 2014	Penawaran Umum Obligasi Protelindo I Tahun 2014 Public Offering of Protelindo Bonds I Year 2014	1.000.000	987.629
13 Januari 2017 January 13, 2017	17 November 2016 November 17, 2016	Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 Sustainable Public Offering of Sustainable Bonds I of Protelindo Phase I Year 2016	800.000	789.601

TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DAN DENGAN PIHAK BERELASI

CONFLICT OF INTEREST AND RELATED PARTY TRANSACTIONS

Perseroan tidak terlibat dalam transaksi benturan kepentingan di tahun 2017. Transaksi dengan Pihak Berelasi (afiliasi) diantaranya:

- SMN memberikan jasa pemasaran dan perizinan kepada Protelindo sesuai dengan perjanjian pemasaran dan perizinan;
- PT Grand Indonesia ("GI") menyewakan ruang perkantoran kepada Perseroan dan Protelindo di Menara BCA, Jakarta;
- BCA memberikan fasilitas pinjaman dalam jumlah Rp750 miliar kepada Protelindo dengan menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berulang;
- Protelindo memberikan program insentif kepada Peter Djatmiko, Presiden Direktur iForte, dengan menandatangani *Management Incentive Program Agreement*, dan memberikan pinjaman sebesar AS\$9.635.140 kepada Peter Djatmiko dengan menandatangani Perjanjian Pinjaman; dan
- Protelindo melakukan kerjasama dengan PT Hartono Plantation Indonesia ("HPI") sehubungan dengan penyediaan infrastruktur menara ke HPI.

Semua transaksi di atas dilakukan secara wajar tanpa benturan kepentingan antara kedua belah pihak yang dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang sewajarnya.

The Company was not involved in any transaction that created a conflict of interest in 2017. Transactions with Related Parties (affiliates) include:

- SMN renders marketing and licensing services to Protelindo pursuant to a marketing and licensing agreement;
- PT Grand Indonesia ("GI") leases office spaces to the Company and Protelindo at Menara BCA, Jakarta;
- Bank Central Asia Tbk ("BCA") extended a loan facility in the amount of IDR750 billion to Protelindo;
- The Company has provided an incentive program to Peter Djatmiko, the President Director of iForte, by signing a Management Incentive Program Agreement. Protelindo also provided a loan in the amount of US\$9,635,140 to Peter Djatmiko by signing a Loan Agreement; and
- Protelindo entered into cooperation with PT Hartono Plantation Indonesia ("HPI") with regard to the provision of tower infrastructure to HPI.

All the transactions above were conducted fairly and in arm's length transactions, and in line with normal business practices.

Rencana Penggunaan Dana Plan Uses of Funds	Realisasi Penggunaan Dana Realization of Uses of Funds	Sisa Dana Hasil Penawaran Umum Remaining Amount of Public Offering Result	Laporan ke RUPS Tahunan Report to Annual GMS
1.000.000	1.000.147	-	Telah dilaporkan pada RUPS Tahunan yang diadakan pada tanggal 26 Juni 2015 Has been reported to Annual GMS held on June 26, 2015
800.000	800.000	-	Telah dilaporkan pada RUPS Tahunan yang diadakan pada tahun 2017 Has been reported to Annual GMS held on 2017

PERUBAHAN PADA KEBIJAKAN AKUNTANSI CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

Pada tanggal 1 Januari 2017, Perseroan dan entitas anaknya menerapkan PSAK baru dan revisi yang efektif pada tahun 2017. Perubahan kebijakan akuntansi Perseroan dan entitas anaknya telah diterapkan seperti yang disyaratkan dan sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar.

As of January 1, 2017, the Company and its subsidiaries have applied revised PSAK directives which are effective in 2017. The changes in the Company and its subsidiaries' accounting policies have been applied as required and according to the transition policy on each standard.

Berikut adalah standar baru, perubahan atas standar dan interpretasi standar yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") dan berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017.

The following is a summary of changes in accounting policies issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board ("DSAK") effective January 1, 2017.

- Amandemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan. Amandemen ini mengklarifikasi, bukan mengubah secara signifikan, persyaratan PSAK No. 1, antara lain, mengklarifikasi mengenai materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan.
- Amendment to PSAK No. 1: Presentation of Financial Statements on Disclosures Initiative. This amendment clarifies, rather than significantly changes, the existing PSAK No. 1 requirements, among others, to clarify the level of flexibility as to the order in which an entity presents the notes to financial statements and identification of significant accounting policies.

- ISAK No. 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13: Properti Investasi. ISAK ini memberikan interpretasi atas karakteristik bangunan yang digunakan sebagai bagian dari definisi properti investasi dalam PSAK No. 13: Properti Investasi. Bangunan sebagaimana dimaksud dalam definisi properti investasi mengacu pada struktur yang memiliki karakteristik fisik yang umumnya diasosiasikan dengan suatu bangunan yang mengacu pada adanya dinding, lantai, dan atap yang melekat pada aset.
- PSAK 3 (Penyesuaian 2016): Laporan Keuangan Interim. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pengungkapan interim yang dipersyaratkan harus dicantumkan dalam laporan keuangan interim atau melalui referensi silang dari laporan keuangan interim seperti komentar manajemen atau laporan risiko yang tersedia untuk pengguna laporan keuangan interim dan pada saat yang sama.
- PSAK 24 (Penyesuaian 2016): Imbalan Kerja. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pasar obligasi korporasi berkualitas tinggi dinilai berdasarkan denominasi mata uang obligasi tersebut dan bukan berdasarkan negara di mana obligasi tersebut berada.
- PSAK 58 (Penyesuaian 2016): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa perubahan dari satu metode pelepasan ke metode pelepasan lainnya dianggap sebagai rencana awal yang berkelanjutan dan bukan sebagai rencana pelepasan baru. Penyesuaian ini juga mengklarifikasi bahwa perubahan metode pelepasan ini tidak mengubah tanggal klasifikasi sebagai aset atau kelompok pelepasan.
- PSAK 60 (Penyesuaian 2016): Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa entitas harus menilai sifat dari imbalan kontrak jasa untuk menentukan apakah entitas memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset keuangan dan apakah persyaratan pengungkapan terkait keterlibatan berkelanjutan terpenuhi.
- ISAK No. 31: Interpretation on the Scope of PSAK No. 13: Investment Property. This ISAK provides an interpretation of the characteristics of the building used as part of the definition of investment property in PSAK No. 13: Investment Property. The building as investment property refers to structures that have physical characteristics generally associated as a building with the walls, floors and roofs attached to the assets.
- PSAK 3 (2016 Improvement): Interim Financial Reporting. This improvement clarifies that the interim disclosures required should be included in the interim financial statements or through cross-references of the interim financial statements, such as management commentary or risk management report, available to users of the interim financial statements in a timely manner.
- PSAK 24 (2016 Improvement): Employee Benefits. This improvement clarifies that the market of high quality corporate bonds is valued by the currency denomination of the bonds and not based on the country where the bonds are issued.
- PSAK 58 (2016 Improvement): Non-Current Assets. This improvement clarifies that a change from one disposal method to the other disposal methods is considered as the beginning of a sustainable plan and not as a new disposal plan. This improvement also clarifies that the change in the disposal method does not change the date of classification as an asset or disposal group.
- PSAK 60 (2016 Improvement): Financial Instruments. This improvement clarifies that an entity must assess the nature of the service contract benefits to determine whether the entity has a continuing involvement in financial assets and whether the disclosure requirements related to the continuing involvement are met.

Standar akuntansi tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan atas laporan keuangan konsolidasian.

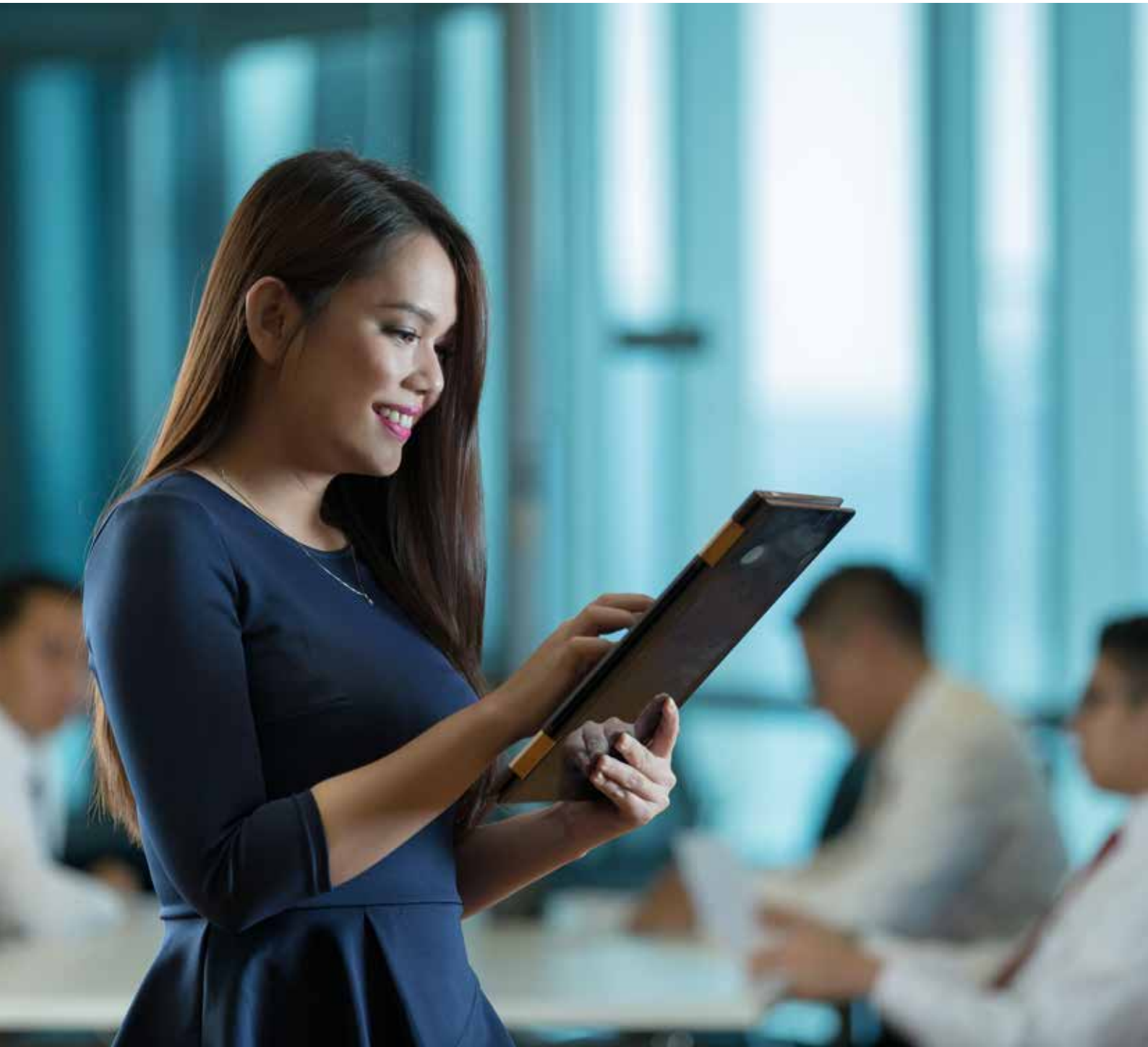
Those accounting standards have no significant impact to the consolidated financial statements.

PERISTIWA PENTING 2017

EVENT HIGHLIGHTS IN 2017

Tanggal Date	2017
28 Februari 2017 February 28, 2017	Protelindo menandatangani perjanjian-perjanjian fasilitas pinjaman sebagai berikut untuk keperluan modal kerja: Protelindo signed the following working capital loan facility agreements: 1. Perjanjian Kredit dengan nilai hingga Rp250 miliar atau setara dengan AS\$17.000.000 dengan The Bank of Tokyo-Mitsubishi, UFJ, Ltd., Jakarta Branch; dan Up to IDR250 billion Credit Agreement or equivalent to US\$17,000,000 with The Bank of Tokyo-Mitsubishi, UFJ, Ltd., Jakarta Branch; and 2. Perjanjian Fasilitas dengan nilai hingga Rp150 miliar dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia. Up to IDR150 billion Facility Agreement with PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia. iForte memberikan jaminan perusahaan untuk memastikan pemenuhan kewajiban Protelindo untuk kedua perjanjian fasilitas pinjaman tersebut. iForte provided a corporate guarantee to secure the fulfillment of Protelindo's liability for the above loan facility agreements.
23 Maret 2017 March 23, 2017	iForte menandatangani amandemen perjanjian untuk Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berulang Rp350 miliar dengan PT Bank DBS Indonesia pada tanggal 11 Agustus 2015 (sebagaimana diamandemen dengan Perjanjian Amandemen tanggal 1 Juli 2016 dan Surat Amandemen pada tanggal 1 Oktober 2016). iForte menambah jumlah fasilitas debitnya hingga Rp500 miliar untuk jangka waktu satu tahun terhitung dari tanggal 23 Maret 2017. Protelindo sebagai induk perusahaan iForte menyediakan jaminan perusahaan dan menandatangani Surat Konfirmasi Jaminan untuk memastikan pemenuhan liabilitas iForte dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini. iForte signed an amendment agreement to the IDR350 billion Revolving Loan Facility Agreement with PT Bank DBS Indonesia dated August 11, 2015 (as amended with Amendment Agreement dated July 1, 2016 and Amendment Letter dated October 1, 2016). iForte increased the amount of the existing debt facilities to up to IDR500 billion for a one year term commencing from March 23, 2017. Protelindo as the parent company of iForte provided a corporate guarantee and signed a Guarantee Confirmation Letter to secure the fulfillment of iForte's liability in this loan facility agreement.
6 Juni 2017 June 6, 2017	Protelindo mengumumkan komposisi baru anggota Komite Audit efektif per tanggal 31 Mei 2017 sebagai berikut: Protelindo announced the new composition of the members of the Audit Committee effectively as of May 31, 2017, as follows: Ketua : Bapak Kusmayanto Kadiman (beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen); Chairman : Mr. Kusmayanto Kadiman (who also serves as an Independent Commissioner); Anggota : Bapak Anang Yudiansyah Setiawan; dan Member : Mr. Anang Yudiansyah Setiawan; and Anggota : Ibu Patricia Marina Sugondo. Member : Mrs. Patricia Marina Sugondo.

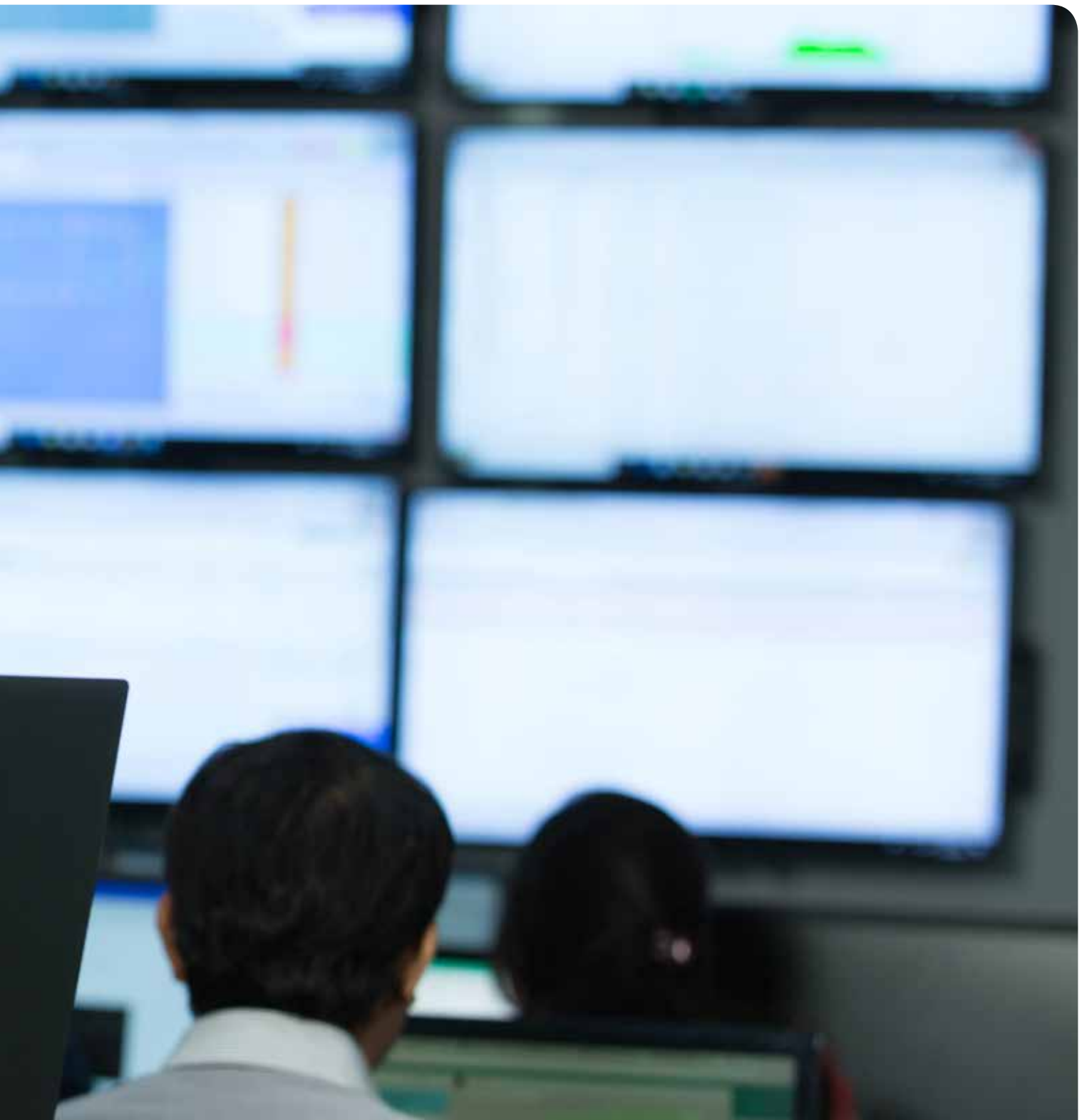
Tanggal Date	2017
20 Juni 2017 June 20, 2017	Protelindo menandatangani Perjanjian Fasilitas dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan total komitmen hingga Rp1.000 miliar (bunga 1,8% per tahun) untuk 5 tahun hingga 19 Juni 2022. Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk membayar utang yang dimiliki Protelindo dan belanja modal Protelindo. Protelindo signed Facility Agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with total commitment up to IDR1,000 billion (interest 1.8% per annum) for 5 years until June 19, 2022. The purposes of this facility are paying the existing Protelindo debts and Protelindo's capital expenditure.
15 September 2017 September 15, 2017	Pengumuman informasi berikut: Announcement of the following information: - Perubahan Sekretaris Perusahaan Protelindo dari Bapak Aditya Masno, digantikan oleh Bapak Haryo Dewanto efektif per tanggal 15 September 2017 Change of the Corporate Secretary of Protelindo from Mr. Aditya Masno to Mr. Haryo Dewanto effective as of September 15, 2017 - Perubahan Kepala Departemen Audit Internal Protelindo dari Bapak Johannes Edwin, digantikan oleh Bapak Haryo Dewanto efektif per tanggal 22 Agustus 2017 Change of the Head of the Internal Audit Department of Protelindo from Mr. Johannes Edwin to Mr. Haryo Dewanto effective as of August 22, 2017
1 November 2017 November 1, 2017	Protelindo mengumumkan perubahan Sekretaris Perusahaan Protelindo yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Haryo Dewanto, digantikan oleh Ibu Maya Marcella Widjaja efektif per tanggal 1 November 2017. Protelindo announced a change of the Corporate Secretary of Protelindo from Mr. Haryo Dewanto and replaced by Mrs. Maya Marcella Widjaja effective as of November 1, 2017.
8 Desember 2017 December 8, 2017	Protelindo membagikan dividen tunai interim sebesar Rp306 miliar atau Rp92,13 per saham kepada SMN, TMG dan CGS. Protelindo distributed an interim cash dividend in the amount of IDR306 billion or IDR92.13 per share to the parent companies.





TATA KELOLA

GOVERNANCE



KAMI PERCAYA ASAS 'THE COMPANY COMES FIRST' ADALAH SELARAS DENGAN KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM DAN SEMUA *STAKEHOLDERS*

A 'THE COMPANY COMES FIRST' MINDSET IS IN THE BEST INTERESTS OF SHAREHOLDERS AND ALL *STAKEHOLDERS*

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Perseroan dan entitas anak berkomitmen untuk mematuhi lebih dari standar dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik ("GCG"), sesuai dengan yang diatur dalam hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Grup percaya bahwa dengan melaksanakan kebijakan yang ketat atas Tata Kelola Perusahaan yang Baik, maka akan memberikan nilai tambah dan perlindungan, juga keterbukaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan. Kerangka kerja Tata Kelola Perusahaan Grup memberikan saran dan masukan serta fleksibilitas manajemen dalam pengambilan keputusan yang tepat di dalam kegiatan bisnis pada umumnya.

Di samping semata-mata hanya untuk mematuhi persyaratan peraturan dan hukum, Grup berusaha untuk menerapkan secara optimal prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai kunci utama untuk meningkatkan daya tarik dan persaingan di pasar saham dan pasar utang baik dalam skala domestik maupun luar negeri. Untuk memenuhi akuntabilitas dan transparansi kepada para pemegang saham dan kreditur, Grup menyampaikan laporan keuangan secara rutin sebagaimana disyaratkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan dan hukum yang berlaku di pasar modal. Laporan-laporan tersebut termasuk di dalamnya laporan keuangan secara periodik yang disampaikan kepada institusi regulator pasar modal yaitu OJK dan BEI, dan juga laporan-laporan lainnya yang terkait yang diatur secara spesifik dalam peraturan pasar modal.

Perseroan terus memantau kepatuhannya terhadap Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana telah diatur dalam peraturan serta ketentuan OJK dan BEI.

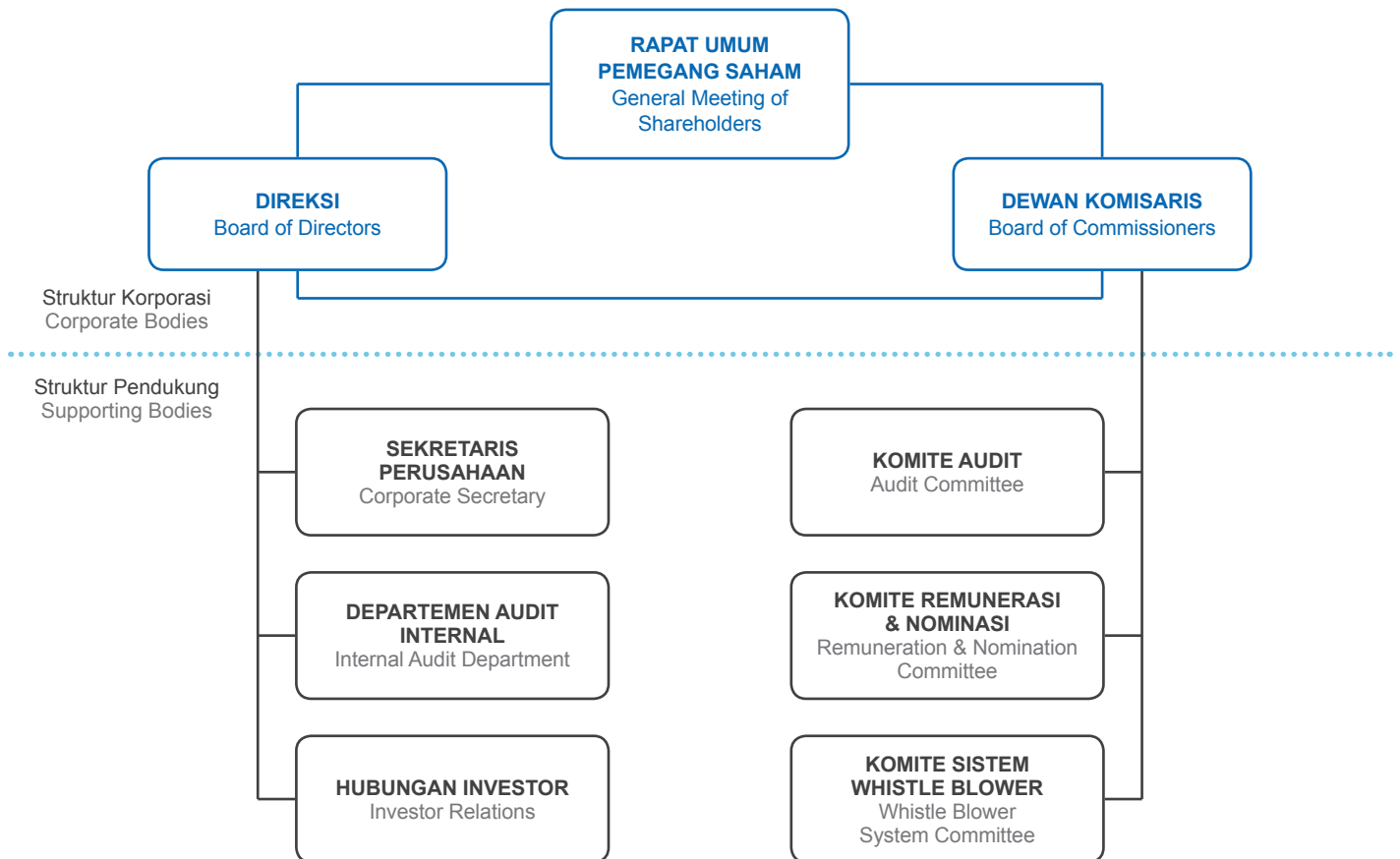
The Company and its subsidiaries are committed to complying with, and surpassing, the Good Corporate Governance ("GCG") standards and principles as prescribed by the prevailing laws and regulations in Indonesia. The Group believes that operating under GCG policies provides added value and protection, as well as transparency, for the shareholders and stakeholders. The Group's corporate governance framework provides for checks and balances while allowing management flexibility for prompt decision making during the ordinary course of business.

Apart from simply complying with all legal and regulatory requirements, the Group endeavours to apply optimal GCG principles as a key element to enhance its attractiveness and competitiveness in the domestic and foreign equity and debt markets. To provide accountability and transparency to the shareholders and lenders, the Group delivers financial reports regularly as required by its Articles of Association and capital markets laws and regulations. These reports include periodic financial reports delivered to the capital markets regulatory bodies, OJK and IDX, as well as other relevant reports as specified in the capital markets regulations.

The Company continues to monitor compliance with the principles of GCG as stipulated in the OJK and IDX rules and regulations.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN GRUP

Corporate Governance Structure of the Group



Dalam rangka menerapkan Prinsip GCG dalam praktik bisnis Perseroan dan mematuhi peraturan BEI dan OJK yang berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan telah menunjuk dan membentuk sebagai berikut:

- Direktur Independen: Indra Gunawan
- Komisaris Independen: Kusmayanto Kadiman
- Sekretaris Perusahaan: Maya Marcella
- Komite Audit
- Departemen Audit Internal
- Komite Whistle Blower System
- Komite Remunerasi dan Nominasi

In connection with the implementation of GCG Principles in the Company's business practices and in accordance with the rules and regulations issued by the IDX and OJK, the Company has appointed and established the following:

- Independent Director: Indra Gunawan
- Independent Commissioner: Kusmayanto Kadiman
- Corporate Secretary: Maya Marcella
- Audit Committee
- Internal Audit Department
- Whistle Blower System Committee
- Remuneration and Nomination Committee

DEWAN KOMISARIS

THE BOARD OF COMMISSIONERS

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris terdiri dari tiga anggota yang meliputi satu Komisaris Utama, satu Komisaris dan satu Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Komposisi Dewan Komisaris per Desember 2017 sebagai berikut:

1. Ario Wibisono (Komisaris Utama)
2. Kenny Harjo (Komisaris)
3. Kusmayanto Kadiman (Komisaris Independen)

DIVERSITAS DEWAN KOMISARIS

Perseroan dan Protelindo mengakui dan mendapatkan keuntungan dengan memiliki Dewan Komisaris yang beragam dan melihat peningkatan keragaman pada tingkat anggota dewan sebagai satu bagian penting dalam menjaga suatu keunggulan yang kompetitif. Keragaman keahlian, latar belakang dan pengetahuan, pengalaman industri, di antara faktor-faktor lain akan menjadi pertimbangan saat akan memilih seorang anggota baru dari Dewan Komisaris. Kami yakin bahwa untuk menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang efektif dan untuk mempertahankan tingginya tingkat keberhasilan kami, kami harus memastikan Dewan Komisaris kami ini terdiri dari orang-orang yang tepat dan berkualitas dengan pengalaman dan latar belakang pendidikan yang luas, seperti ekonomi, hukum dan teknologi yang terkait dengan bisnis kami.

KEBIJAKAN TENTANG PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana disyaratkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Publik ("POJK No. 21"), dimana POJK No.21 lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 ("SE No. 32") Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Perseroan telah

COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners has three members consisting of a President Commissioner, a Commissioner and an Independent Commissioner. The total number of members of the Board of Commissioners are in compliance with OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuer or Public Company.

The composition of the Board of Commissioners as of December 2017 is as follows:

1. Ario Wibisono (President Commissioner)
2. Kenny Harjo (Commissioner)
3. Kusmayanto Kadiman (Independent Commissioner)

BOARD OF COMMISSIONERS DIVERSITY

The Company and Protelindo recognize and embrace the benefits of having a diverse Board of Commissioners and see increasing diversity at the Board level as an essential element in maintaining a competitive advantage. Diversity of skills, backgrounds, knowledge, and industry experience, among other factors, will be taken into consideration when seeking to appoint new members of the Board of Commissioners. We believe that to effectively implement GCG principles and to sustain our high level of success, we must ensure our Board of Commissioners is composed of appropriately qualified people with a broad range of experience and educational backgrounds, such as economics, law and technology, that are relevant to our business.

THE POLICY ON PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In line with the requirements of Good Corporate Governance as stipulated in Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Public Company ("POJK No. 21"), which POJK No. 21 further stipulated in Circular Letter of Financial Services Authority No.32/SEOJK.04/2015 ("SE No. 32") Concerning the Code of the Corporate Governance of

menyusun Kebijakan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Perseroan ("Kebijakan Penilaian"). Kebijakan Penilaian telah diperiksa dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 1 Desember 2016.

Kebijakan Penilaian akan menjadikan setiap anggota Dewan Komisaris untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris. *Self-assessment* atau penilaian sendiri yang dilakukan oleh masing-masing Dewan Komisaris untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing Dewan Komisaris. Dengan demikian Kebijakan Penilaian ini adalah pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris. *Self-assessment* ini diharapkan dapat mengajak masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan.

Pelaksanaan penilaian kinerja oleh Dewan Komisaris Perseroan akan dilakukan dengan mengacu kepada aspek-aspek berikut ini:

1. Mengawasi pengurusan Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi;
2. Meninjau, memeriksa, dan menyetujui rencana kerja tahunan Perseroan;
3. Melakukan tugas khusus yang diberikan kepadanya sesuai dengan Anggaran Dasar, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
4. Melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
5. Mematuhi Anggaran Dasar serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran, antara lain melaksanakan Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Setiap anggota Dewan Komisaris harus dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi demi kepentingan dan tujuan Perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung

a Public Company, the Company has prepared a Policy On Performance Assessment of the Board of Commissioners of the Company ("Assessment Policy"). The assessment Policy was reviewed and approved by the Board of Commissioners of the Company on December 1, 2016.

The Assessment Policy requires that each member of the Board of Commissioners is able to perform a self-assessment of the performance of the Board of Commissioners. The self-assessment which is performed by each member of the Board of Commissioners is intended to assess the implementation of the performance of the Board of Commissioners collegially, and not to assess the individual performance of each member of the Board of Commissioners. The Assessment Policy is a guideline that is used as a form of accountability for performance assessment of the Board of Commissioners as a whole. Self-assessment is expected to encourage the Board of Commissioners to continuously improve the performance of the Board of Commissioners.

The implementation of the self-assessment by the Board of Commissioners of the Company shall be based on the following aspects:

1. Supervise the management of the Company as performed by the Board of Directors;
2. Review, examine, and approve the annual work plan of the Company;
3. Perform special duties assigned to each of the members pursuant to the Articles of Association, the prevailing laws and regulations and/or the resolutions of the General Meeting of Shareholders;
4. Perform their duties, authorities, and responsibilities pursuant to the provisions of the Articles of Association and the resolutions of the General Meeting of Shareholders;
5. Comply with the Articles of Association and the prevailing laws and regulations which oblige the member to perform the principles of professionalism, efficiency, transparency, independency, accountability, responsibility and fairness in their work and to convey the meetings of the Board of Commissioners in accordance with the applicable regulations.

RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Every member of the Board of Commissioners must, with good intentions and full responsibility, exercise supervision over and provide advice to the Board of Directors to further the best interests and objectives of the Company. Each member of the

jawab atas kerugian yang diderita Perseroan jika anggota tersebut terbukti bersalah melakukan pelanggaran dan lalai dalam melakukan tanggung jawabnya.

Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas pengawasan Perseroan yang sejalan dengan kepentingan dan tujuan Perseroan.

Dewan Komisaris juga memiliki tanggung jawab untuk memantau efektivitas prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memberikan masukan untuk peningkatan sistem Tata Kelola Perusahaan yang Baik beserta implementasinya.

JUMLAH RAPAT

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, jumlah minimal rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris adalah sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi secara bersama-sama minimal diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah rapat dan kehadiran Dewan Komisaris termasuk rapat bersama dengan Direksi sepanjang tahun 2017:

Nama Name	Frekuensi Frequency	Kehadiran Attendance
Ario Wibisono	8	8
Kenny Harjo	8	8
Kusmayanto Kadiman	8	8

TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DEWAN KOMISARIS APABILA TERLIBAT KEJAHATAN KEUANGAN

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Peraturan OJK No.33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No.33") mengatur salah satu persyaratan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yaitu tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Sejalan dengan UUPT dan POJK No. 33, OJK mengeluarkan POJK No. 21, dimana POJK No. 21 lebih lanjut diatur dalam SE No. 32. POJK No. 21 dan SE No. 32 isinya antara lain memberikan rekomendasi kepada perusahaan publik untuk memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota

Board of Commissioners is liable for any loss to the Company if the member is found to be guilty of fraud or negligent in the performance of his or her duties.

The Board of Commissioners is fully responsible for the supervision of the Company in line with the Company's interests and objectives.

The Board of Commissioners also has the responsibility to monitor the effectiveness of GCG principles and to provide suggestions for the improvement of GCG systems and their implementation.

FREQUENCY OF MEETINGS

Based on the Articles of Association of the Company, meetings of the Board of Commissioners must be held at least once every 2 (two) months. The Board of Commissioners shall convene the Board of Commissioners together with the Board of Directors regularly at least 1 (one) time every 4 (four) months. The table below shows the meeting activities conducted by the Board of Commissioners during 2017, and include joint meetings conducted with the Board of Directors:

RESIGNATION PROCEDURE FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS WHO ARE INVOLVED IN FINANCIAL CRIME

Law No. 40 of 2007 concerning a Limited Liability Company (the "Company Law") and OJK Regulation No.33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of an Issuer or Public Company ("POJK No. 33") stipulates that one of the requirements to be appointed as a member of the Board of Commissioners is having never been convicted for commission of a criminal offense that damages the state finance and/ or the relevant financial sector. In accordance with the Company Law and POJK No. 33, OJK issued POJK No. 21, which POJK No. 21 further stipulated in SE No. 32. POJK No. 21 and SE No. 32 among other things provides recommendation to the public company to have a

Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan. Kejahatan keuangan yang dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta tindakan pidana pencucian uang.

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam POJK No. 21 dan SE No. 32 tersebut, Perseroan telah menyusun kebijakan pengunduran diri bagi anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan. Kebijakan pengunduran diri tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada 1 Desember 2016.

Tata cara pengunduran diri bagi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran dirinya kepada Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
2. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sehubungan dengan pengunduran diri tersebut dan menyampaikannya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat pengunduran diri tersebut.
3. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") untuk memutuskan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam RUPS.
4. Perseroan wajib mengumumkan hasil RUPS tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS tersebut.

PENILAIAN KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Sistem *Whistle Blower*. Komite-komite tersebut bekerja dengan menjunjung standar kompetensi dan kualitas terbaik.

policy regarding the resignation procedure for members of the Board of Commissioners who may be involved in a financial crime. Such financial crimes are considered to be manipulation and various forms of corruption in financial service activities as well as money laundering.

Following the POJK No. 21 and SE No. 32, the Company has prepared the policy of resignation for the members of the Board of Commissioners who are involved in financial crimes. The policy of resignation was reviewed and approved by the Board of Commissioners on December 1, 2016.

The resignation procedure for the members of the Board of Commissioners are as follows:

1. A member of the Board of Commissioners shall resign from their position and submit a resignation letter to the Company no later than 60 (sixty) days before the effective date of the resignation;
2. The Company shall publish the disclosure information to the public regarding such resignation and submit the information to OJK no later than 2 (two) working days after receiving the resignation letter;
3. The Company shall convey a General Meeting of Shareholders ("GMS") to approve the resignation of such Commissioner within a maximum period of 90 (ninety) days after receiving his resignation letter;

The members of the Board of Commissioners who resigned shall be held liable from the date of their appointment to their position until the date of resignation as approved by the GMS.

4. The Company shall disclose the result of the GMS and submit it to the OJK no later than 2 (two) working days after the GMS.

PERFORMANCE REVIEW OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

In performing its duties and responsibilities, the Board of Commissioners was supported by the Audit Committee, the Remuneration and Nomination Committee, as well as the Whistle Blower System Committee. These committees uphold the highest quality and standard of competencies.

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang tahun 2017, Komite Audit telah menyelenggarakan 4 kali rapat, sementara itu Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan 3 kali rapat. Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki peran penting dalam melakukan evaluasi kebijakan remunerasi dan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara keseluruhan.

Dewan Komisaris menghargai dukungan dan upaya dari ketiga komite tersebut, sehingga Dewan Komisaris dapat melakukan fungsi pengawasan secara efektif terhadap area bisnis yang dijalankan oleh Perseroan dan entitas anak.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan 2017, RUPS Tahunan 2017 telah memberikan wewenang kepada pemegang saham pengendali Perseroan, yaitu PT Sapta Adhikari Investama untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris ("Remunerasi") dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan, yang mana Dewan Komisaris Perseroan akan mendasarkan usulannya pada rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Laporan dari konsultan tenaga kerja independen;
2. Perusahaan lain yang memiliki bisnis yang sama atau mirip dengan Perseroan;
3. Klasifikasi dan porsi kerja dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
4. Biaya hidup untuk saat ini di Jakarta yang didasarkan pada, namun tidak terbatas pada, tingkat inflasi nasional.

The Audit Committee assists the Board of Commissioners in the effective implementation of the tasks and functions of supervision on matters related to financial reporting, internal audit and external audit as well as compliance with prevailing laws and regulations. Throughout 2017, the Audit Committee held 4 meetings, while for the Remuneration and Nomination Committee held 3 meetings. The Remuneration and Nomination Committee has an important role in evaluating the remuneration policy and assess the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors as a whole.

The Board of Commissioners appreciates all support and efforts made by these three committees, allowing for effective supervision across all business area of the Company and its subsidiaries.

PROCEDURE OF DETERMINING THE REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Based on the decision of the 2017 AGMS, the Board of Commissioners was granted the authority by the controlling shareholder of the Company, PT Sapta Adhikari Investama, to determine the remuneration and/or allowance of the members of the Board of Commissioners ("Remuneration") by taking into account the proposals of the Board of Commissioners of the Company, based upon the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee of the Company. Some factors that need to be considered in determining the Remuneration are as follows:

1. A report from an independent manpower consultant;
2. Other companies that have the same or similar business with the Company;
3. Classification and area of work of each member of the Board of Directors and Board of Commissioners; and
4. Current cost of living in Jakarta based on, but not limited to, the national inflation indicators.

**STRUKTUR REMUNERASI
DEWAN KOMISARIS**

Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen Remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh anggota Dewan Komisaris selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Type of Remuneration and Other Facilities	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun Amount Received in 1 Year (dalam jutaan Rupiah / in million IDR)
Gaji, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura Salary, bonus, routine allowance, and other non natura facilities	6.142
Fasilitas lain dalam bentuk natura Other natura facilities	2.108
Jumlah / Total	8.250

Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun adalah di atas Rp2,7 miliar yang diterima secara tunai selama tahun 2017.

**THE REMUNERATION STRUCTURE OF THE
BOARD OF COMMISSIONERS**

The remuneration structure shows the components of Remuneration and nominal amount per component for the Board of Commissioners in 2017, is as follows:

The amount of remuneration received in cash throughout 2017 is in excess of IDR2.7 billion for each member of the Board of Commissioners in 1 (one) year.



DIREKSI

THE BOARD OF DIRECTORS

KOMPOSISI DIREKSI

Direksi terdiri dari tujuh anggota yang meliputi satu Direktur Utama, dua Wakil Direktur Utama, tiga Direktur dan satu Direktur Independen. Jumlah anggota Direksi telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Komposisi Direksi per Desember 2017 adalah sebagai berikut:

1. Ferdinandus Aming Santoso (Direktur Utama)
2. Adam Gifari (Wakil Direktur Utama)
3. Stephen Duffus Weiss (Wakil Direktur Utama)
4. Rinaldy Santosa (Direktur)
5. Onggo Wijaya (Direktur)
6. Eko Santoso Hadiprodjo (Direktur)
7. Indra Gunawan (Direktur Independen)

DIVERSITAS DIREKSI

Perseroan dan Protelindo mengakui dan mendapatkan keuntungan dengan memiliki Direksi yang beragam, dan melihat peningkatan keragaman pada tingkat anggota dewan sebagai satu bagian penting dalam menjaga suatu keunggulan yang kompetitif. Keragaman keahlian, latar belakang dan pengetahuan, pengalaman industri, di antara faktor-faktor lain akan menjadi pertimbangan saat akan memilih seorang anggota baru dari Direksi. Kami yakin bahwa untuk menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang efektif dan untuk mempertahankan tingginya tingkat keberhasilan kami, kami harus memastikan Direksi kami ini terdiri dari orang-orang yang tepat dan berkualitas dengan pengalaman dan latar belakang pendidikan yang luas, seperti ekonomi, hukum dan teknologi yang terkait dengan bisnis kami.

KEBIJAKAN TENTANG PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana disyaratkan melalui POJK No. 21 dimana POJK No.21 lebih lanjut diatur dalam SE No. 32 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Perseroan telah menyusun Kebijakan Penilaian Kinerja Direksi Perseroan ("Kebijakan

COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors has seven members consisting of one President Director, two Vice President Directors, three Directors and one Independent Director. The total number of members of the Board of Directors are in compliance with OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of an Issuer or Public Company.

The composition of the Board of Directors as of December 2017 is as follows:

1. Ferdinandus Aming Santoso (President Director)
2. Adam Gifari (Vice President Director)
3. Stephen Duffus Weiss (Vice President Director)
4. Rinaldy Santosa (Director)
5. Onggo Wijaya (Director)
6. Eko Santoso Hadiprodjo (Director)
7. Indra Gunawan (Independent Director)

BOARD OF DIRECTORS DIVERSITY

The Company and Protelindo recognize and embrace the benefits of having a diverse Board of Directors and see increasing diversity at the Board level as an essential element in maintaining a competitive advantage. Diversity of skills, backgrounds, knowledge, and industry experience, among other factors, will be taken into consideration when seeking to appoint a new member of the Board of Directors. We believe that to effectively implement GCG principles and to sustain our high level of success, we must ensure our Board of Directors is composed of appropriately qualified people with a broad range of experience and educational backgrounds such as economics, law and technology that are relevant to our business.

THE POLICY ON PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

In line with the requirements of Good Corporate Governance as stipulated in POJK No. 21, which POJK No. 21 further stipulated in SE No. 32 Concerning the Code of the Corporate Governance for a Public Company, the Company has prepared the Policy On Performance Assessment of the Board of Directors of

Penilaian"). Kebijakan Penilaian telah diperiksa dan disetujui oleh Direksi Perseroan pada tanggal 1 Desember 2016.

Kebijakan Penilaian akan menjadikan setiap anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi. *Self-assessment* atau penilaian sendiri yang dilakukan oleh masing-masing Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolektif, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing Direksi, dengan demikian Kebijakan Penilaian ini menjadi pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi. Dengan adanya *self-assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan.

Pelaksanaan penilaian kinerja oleh Direksi Perseroan akan dilakukan dengan mengacu kepada aspek-aspek berikut ini:

1. Memimpin, mengelola, dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan;
2. Melakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
3. Mengendalikan, memelihara dan mengelola aset Perseroan;
4. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan sebelum awal tahun buku berikutnya.

TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi merupakan organ dari perusahaan yang dengan kuasa dan tanggung jawab penuh mengelola Perseroan sehari-hari berdasarkan kepentingan Perseroan dan sejalan dengan tujuan akhir dan target Perseroan. Direksi juga mewakili Perseroan baik di pengadilan maupun diluar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar. Anggota Direksi juga dipilih dan diberhentikan oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

LINGKUP KERJA DIREKSI

1. Memimpin dan mengambil tindakan yang terkait dengan manajemen Perseroan demi mencapai kepentingan terbaik Perseroan dan sasaran Perseroan yang terdiri dari:

the Company ("Assessment Policy"). The Assessment Policy was reviewed and approved by the Board of Directors of the Company on December 1, 2016.

The Assessment Policy requires that each member of the Board of Directors is able to perform a self-assessment on the performance of the Board of Directors. The self-assessment which is performed by each member of the Board of Directors is intended to be an evaluation of the performance of the Board of Directors collegially, and not to assess the individual performance of any one member of the Board of Directors. The Assessment Policy is a guideline that is used as a form of accountability for the performance assessment of the Board of Directors of the Company. Self-assessment is expected to encourage the member of the Board of Directors to contribute to improve the performance of the Board of Directors.

The implementation of self-assessment by the Board of Directors of the Company shall be based on the following aspects:

1. Lead, manage, and control the Company in accordance with the business of the Company;
2. Make effort to increase the efficiency and effectiveness of the Company;
3. Control, maintain and manage the assets of the Company;
4. Draw up an annual work plan containing the annual budget of the Company which should be submitted to the Board of Commissioners to obtain approval before the beginning of the following fiscal year.

RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is the corporate body with the authority and full responsibility for managing the day to day affairs of the Company in the best interests of the Company and in line with its corporate goals and objectives. The Board of Directors also represents the Company both in a Court of Law or out of court in accordance with the Articles of Association. Members of the Board of Directors are appointed and terminated by the shareholders at the General Meeting of Shareholders.

SCOPE OF WORK OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. To lead and take actions in relation to the management of the Company in the best interests of the Company and to further the Company's objectives, which include:

- a. Menjaga dan mengelola aset Perseroan; dan
 - b. Berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas karyawan dan operasional Perseroan.
2. Secara sah mewakili dan mengikat Perseroan, termasuk dalam pengadilan yang telah tercantum dalam hukum dan peraturan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan-keputusan yang disepakati oleh pemegang saham.

TANGGUNG JAWAB PRIBADI DAN BERSAMA DIREKSI

Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan intensi yang baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota Direksi baik secara pribadi maupun bersama-sama bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Perseroan jika dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran atau lalai atas pekerjaannya selama menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Salah satu anggota Direksi ditunjuk oleh Direksi sebagai individu yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan dan pemantauan terhadap prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk Perseroan.

JUMLAH RAPAT

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, rapat Direksi wajib diselenggarakan minimal 12 (dua belas) kali dalam setahun dan dapat dilakukan setiap waktu tergantung dengan tingkat kebutuhan. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah rapat dan kehadiran Direksi sepanjang tahun 2017, termasuk rapat bersama dengan Dewan Komisaris.

- a. Maintaining and managing the Company's assets; and
 - b. Seeking to improve the efficiency and effectiveness of the Company's employees and operations.
2. To officially represent and bind the Company, including in a court of law, as provided for in the laws and regulations, the Articles of Association and/or resolutions adopted by the shareholders.

JOINT AND INDIVIDUAL RESPONSIBILITY OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors must undertake its tasks with good intentions and with full responsibility. Each member of the Board of Directors is individually and collectively liable for any loss to the Company if the individuals concerned are found to be guilty of fraud or negligent in the performance of their duties in accordance with the provisions of the law.

One of the members of the Board of Directors is appointed by the Board of Directors as the person responsible for the application and monitoring of GCG for the Company.

FREQUENCY OF MEETINGS

Based on the Articles of Association of the Company, meetings of the Board of Directors must be held at least 12 (twelve) times in a year and may be convened at anytime as deemed necessary. The table below shows the meeting activities conducted by the Board of Directors during 2017, including joint meetings conducted with the Board of Commissioners.

Nama Name	Frekuensi Frequency	Kehadiran Attendance
Ferdinandus Aming Santoso	19	19
Adam Gifari	19	19
Stephen Duffus Weiss	19	19
Rinaldy Santosa	19	19
Onggo Wijaya	19	19
Eko Santoso Hadiprodjo	19	19
Indra Gunawan	19	19

TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DIREKSI APABILA TERLIBAT KEJAHATAN KEUANGAN

UUPT dan POJK No. 33 mengatur salah satu persyaratan pengangkatan anggota Direksi yaitu tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Sejalan dengan UUPT dan POJK No. 33, OJK mengeluarkan POJK No. 21, dimana POJK No. 21 lebih lanjut diatur dalam SE No. 32. POJK No. 21 dan SE No. 32 isinya antara lain memberikan rekomendasi kepada perusahaan publik untuk memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan. Kejahatan keuangan yang dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta tindakan pidana pencucian uang.

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam POJK No. 21 dan SE No. 32 tersebut, Perseroan telah menyusun kebijakan pengunduran diri bagi anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan. Kebijakan pengunduran diri tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh Direksi Perseroan pada 1 Desember 2016.

Tata cara pengunduran diri bagi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran dirinya kepada Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;
2. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sehubungan dengan pengunduran diri tersebut dan menyampaikannya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat pengunduran diri tersebut;
3. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") untuk memutuskan pengunduran diri anggota Direksi tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut;
Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam RUPS.
4. Perseroan wajib mengumumkan hasil RUPS tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS tersebut.

RESIGNATION PROCEDURE FOR THE BOARD OF DIRECTORS WHO ARE INVOLVED IN A FINANCIAL CRIME

The Company Law and POJK No. 33 stipulates that one of the requirements to be appointed as a member of the Board of Directors is having never been convicted for the commission of a criminal offense that damages the state finance and/or the relevant financial sector. In accordance with the Company Law and POJK No. 33, OJK issued POJK No. 21, which POJK No. 21 further stipulated in SE No. 32. POJK No. 21 and SE No. 32 among other things provide recommendation to a public company to have a policy regarding the resignation procedure for members of the Board of Directors who are involved in financial crimes. Such financial crimes are considered to be manipulation and various forms of corruption in financial service activities as well as money laundering.

Following the POJK No. 21 and SE No. 32, the Company has prepared policy for the resignation for the members of the Board of Directors who are involved in the financial crimes. The policy of resignation was reviewed and approved by the Board of Directors on December 1, 2016.

The resignation procedure for the members of the Board of Directors are as follows:

1. The member of the Board of Directors shall resign from his position and submit a resignation letter to the Company no later than 60 (sixty) days before the effective date of the resignation;
2. The Company shall publish the disclosure information to the public regarding such resignation and submit the information to OJK no later than 2 (two) working days after receiving the resignation letter;
3. The Company shall convey a General Meeting of Shareholders ("GMS") to approve the resignation of such Director within a maximum period of 90 (ninety) days after receiving the resignation letter;

Members of the Board of Directors who resign still be held liable since the appointment of position until the date of the resignation and approved by the GMS.
4. The Company shall disclose the result of the GMS and submit the result to the OJK no later than 2 (two) working days after the GMS.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI BAGI DIREKSI

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan 2017, RUPS Tahunan 2017 telah memberikan kuasa dan wewenang kepada pemegang saham pengendali Perseroan, yaitu PT Sapta Adhikari Investama untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Direksi ("Remunerasi") dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan, yang mana Dewan Komisaris Perseroan akan mendasarkan usulannya pada rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Laporan dari konsultan tenaga kerja independen;
2. Perusahaan lain yang memiliki bisnis yang sama atau mirip dengan Perseroan;
3. Klasifikasi dan porsi kerja dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
4. Biaya hidup untuk saat ini di Jakarta yang didasarkan pada, namun tidak terbatas pada, tingkat inflasi nasional.

STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI

Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen Remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh anggota Direksi selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Type of Remuneration and Other Facilities	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun Amount Received in 1 Year (dalam jutaan Rupiah / in million IDR)
Gaji, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura Salary, bonus, routine allowance, and other non natura facilities	26.414
Fasilitas lain dalam bentuk natura: Other natura facilities:	20.125
- Asuransi Kesehatan Health Insurance	454
Jumlah / Total	46.993

Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Direksi dalam 1 (satu) tahun adalah di atas Rp9,3 miliar yang diterima secara tunai selama tahun 2017.

PROCEDURE OF DETERMINING THE REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Based on the decision of the 2017 AGMS, the AGMS has granted the authority to the controlling shareholder of the Company, PT Sapta Adhikari Investama to determine the remuneration and/or allowance for the members of the Board of Directors ("Remuneration") by taking into account the proposals of the Board of Commissioners of the Company, based on the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee of the Company. Factors that should be considered in determining the Remuneration are as follows:

1. A report from an independent manpower consultant;
2. Other companies that have the same or similar business with the Company;
3. Classification and division of work of each member of the Board of Directors and Board of Commissioners; and
4. Current cost of living in Jakarta based on, but not limited to, the national inflation indicators.

THE REMUNERATION STRUCTURE OF THE BOARD OF DIRECTORS

The remuneration structure shows the components of Remuneration and nominal amount per component for the Board of Directors in 2017, as follows:

The amount of remuneration received in cash throughout 2017 is in excess of IDR9.3 billion for each member of the Board of Directors in 1 (one) year.

PIAGAM DEWAN

BOARD CHARTER

Berdasarkan peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, juga untuk meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyusun Piagam Dewan untuk menentukan peran dan tugas utama Direksi dan Dewan Komisaris ("Piagam"). Piagam Direksi dan Dewan Komisaris telah diperiksa dan disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2015.

Based on the Indonesian Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Listed or Public Companies, and to enhance the implementation of good corporate governance principles, the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company prepared a Board Charter to specify the main roles and duties of the Board of Directors and the Board of Commissioners (the "Charter"). The Charter of the Board of Directors and the Board of Commissioners was reviewed and approved by the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company on August 31, 2015.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui resolusi yang beredar sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 31 Mei 2017 ("Resolusi").

The Company conducted the Annual General Meeting of Shareholders through a circular resolution in lieu of Annual General Meeting of Shareholders, dated May 31, 2017 (the "Resolutions").

AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2017

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2017 ("RUPS Tahunan 2017") adalah:

1. Perseroan bermaksud untuk:
 - (i) memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2016, yang antara lain, memuat: (1) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2016, rincian yang ditetapkan dalam butir (ii) di bawah; (2) laporan tentang urusan dan manajemen Perseroan untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2016; (3) laporan tentang fungsi pengawasan Dewan Komisaris

AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2017

The agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of 2017 ("2017 AGMS") was:

1. The Company intends to:
 - (i) seek an approval from the Shareholders of the Company's Annual Report for the year of 2016, which, among other things, contains the: (1) Company's Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2016, details of which are set out in item (ii) below; (2) a report on the affairs and management of the Company for the fiscal year ended December 31, 2016; (3) a report on the Board of Commissioners'

untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2016; dan (4) hasil yang telah dicapai selama tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2016;

(ii) memperoleh pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi per 31 Desember 2016 dan Laporan Konsolidasi Laba Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasi untuk tahun keuangan sebagaimana dimaksud, sebagaimana diaudit oleh akuntan publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young); dan

(iii) memperoleh pelepasan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari semua kewajiban yang timbul dari hal-hal yang dilaporkan dalam Laporan Tahunan 2016 dan dimuat dalam Laporan Keuangan yang mengacu pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016;

2. Perseroan mengusulkan untuk mengumumkan dan membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun keuangan yang berakhir 31 Desember 2016, untuk mengalokasikan Rp100.000.000 sebagai dana cadangan dan sisa laba Perseroan sebagai saldo laba ditahan yang tidak dicadangkan;
3. Perseroan dan para pemegang saham telah diberitahu secara tertulis mengenai pengunduran diri Bapak Bacelius Ruru sebagai Komisaris Independen Perseroan;
4. Perseroan bermaksud untuk menunjuk Bapak Kusmayanto Kadiman sebagai Komisaris Independen Perseroan dan mengumumkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris saat ini setelah pengangkatan Bapak Kusmayanto Kadiman sebagai Komisaris Independen Perseroan, yaitu:

Direksi:

Direktur Utama	: Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Direktur Utama	: Adam Gifari
Wakil Direktur Utama	: Stephen Duffus Weiss
Direktur	: Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur	: Rinaldy Santosa
Direktur	: Onggo Wijaya
Direktur Independen	: Indra Gunawan

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Ario Wibisono
Komisaris	: Kenny Harjo
Komisaris Independen	: Kusmayanto Kadiman

supervisory function for the fiscal year ended December 31, 2016; and (4) the results that have been achieved during the fiscal year ended December 31, 2016;

(ii) seek the ratification of the Consolidated Statements of Financial Position as of December 31, 2016 and Consolidated Statements of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2016 as contained in the Consolidated Financial Statements for the financial year referred to, as audited by the public accounting firm Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young); and

(iii) seek a release and discharge of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners from all liabilities arising from the matters that were reported in the 2016 Annual Report and were contained in the Financial Statements referring to the year ended December 31, 2016;

2. The Company proposes to declare and distribute dividends to the shareholders for the financial year ended December 31, 2016, to allocate IDR100,000,000 as a reserve fund and the remaining Company profits as unappropriated retained earnings;
3. The Company and the Shareholders have been informed in writing of the resignation of Mr. Bacelius Ruru as an Independent Commissioner of the Company;
4. The Company intends to appoint Mr. Kusmayanto Kadiman as an Independent Commissioner of the Company and to confirm the present members of the Board of Directors and the Board of Commissioners following the appointment of Mr. Kusmayanto Kadiman as an Independent Commissioner of the Company, namely:

Board of Directors:

President Director	: Ferdinandus Aming Santoso
Vice President Director	: Adam Gifari
Vice President Director	: Stephen Duffus Weiss
Director	: Eko Santoso Hadiprodjo
Director	: Rinaldy Santosa
Director	: Onggo Wijaya
Independent Director	: Indra Gunawan

Board of Commissioners:

President Commissioner	: Ario Wibisono
Commissioner	: Kenny Harjo
Independent Commissioner	: Kusmayanto Kadiman

5. Perseroan bermaksud menunjuk kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) sebagai auditor Perseroan untuk tahun fiskal 2017, dan untuk memberi wewenang kepada Direksi untuk menentukan remunerasi auditor;
6. Perseroan bermaksud untuk memperoleh persetujuan dan ratifikasi atas jumlah remunerasi dan honorarium yang telah diberikan kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2016 sampai tanggal Resolusi ini;
7. Perseroan bermaksud untuk memperoleh persetujuan (i) atas remunerasi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi, efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya dan (ii) bonus (tantiem) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun keuangan 2016;
8. Perseroan bermaksud untuk memperoleh persetujuan atas anggaran Perseroan untuk tahun fiskal 2017; dan
9. Perseroan bermaksud untuk melaporkan penggunaan aktual hasil dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 ("Penawaran Umum") per 31 Desember 2016, yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada 13 Januari 2017, dengan detail sebagai berikut:

Jumlah Penawaran Umum Amount of Public Offering	800.000
Hasil Bersih dari Penawaran Umum Net Results of Public Offering	791.834
Rencana Penggunaan Dana Plan Use of Funds	800.000
Realisasi Penggunaan Dana Realization of Uses of Funds	99.960
Sisa Hasil dari Penawaran Umum Remaining Amount of Public Offering result	700,040

Dalam jutaan Rupiah / Expressed in millions of Rupiah

HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2017

1. Agenda Pertama:

- (i) Memutuskan, untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2016, yang, antara lain, memuat: (1) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2016, sebagaimana diaudit oleh kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young); (2) laporan tentang urusan dan manajemen Perseroan untuk tahun fiskal

RESOLUTIONS APPROVED BY THE SHAREHOLDERS AT THE 2017 AGMS

1. First Agenda:

- (i) Resolved, to approve the Company's Annual Report for the year of 2016, which, among other things, contains the: (1) Company's Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2016, as audited by the public accounting firm Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young); (2) a report on the affairs and management of the Company for the fiscal year

yang berakhir 31 Desember 2016; (3) laporan tentang fungsi pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2016; dan (4) hasil yang telah dicapai selama tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2016, dan sehubungan dengan itu, untuk meratifikasi semua hal yang terkandung dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2016, termasuk laporan tentang fungsi pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2016;

- (ii) Memutuskan, untuk mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi per 31 Desember 2016 dan Laporan Konsolidasi Laba Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasi untuk tahun keuangan sebagaimana dimaksud, yang diaudit oleh kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young); dan
- (iii) Memutuskan, untuk memberikan pembebasan dan pelepasan sepenuhnya dari setiap dan semua tanggung jawab kepada anggota Direksi untuk semua tindakan manajemen urusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk semua tindakan pengawasan atas urusan Perseroan untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2016, karena tindakan manajemen atau tindakan pengawasan tersebut dilaporkan dalam Laporan Tahunan 2016 dan dimuat dalam Laporan Keuangan Konsolidasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016.

2. Agenda Kedua:

- (i) Memutuskan, bahwa laba bersih Perseroan untuk tahun 2016, yang berjumlah Rp3.306.677.000.000 (tiga triliun tiga ratus enam miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah), akan disesuaikan sebagai berikut:
 - a. sejumlah Rp700,004,213,567 (tujuh ratus miliar empat juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh tujuh Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun keuangan yang berakhir 31 Desember 2016 kepada para pemegang saham, dengan rincian sebagai berikut:
 - i. SMN akan menerima dividen tunai dalam jumlah Rp700.000.000.000;
 - ii. TMG akan menerima dividen tunai dengan jumlah Rp2.106.784;
 - iii. CGS akan menerima dividen tunai dengan jumlah Rp2.106.784;

ended December 31, 2016; (3) a report on the Board of Commissioners' supervisory function for the fiscal year ended December 31, 2016; and (4) the results that have been achieved during the fiscal year ended December 31, 2016, and in connection therewith, to ratify all matters contained in the Company's Annual Report for the year 2016, including the report on the Board of Commissioners' supervisory function for the fiscal year ended December 31, 2016;

- (ii) Resolved, to ratify the Consolidated Statements of Financial Position as of December 31, 2016 and Consolidated Statements of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2016 as contained in the Consolidated Financial Statements for the financial year referred to, as audited by the public accounting firm Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young); and
- (iii) Resolved, to grant a full release and discharge of any and all liability to the members of the Board of Directors for all act(s) of management of the affairs of the Company undertaken by the Board of Directors and to the Board of Commissioners for all act(s) of supervision of the affairs of the Company for the fiscal year ended December 31, 2016, as such acts of management or such act of supervision were reported in the 2016 Annual Report and were contained in the Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2016.

2. Second Agenda:

- (i) Resolved, that the Company's net profits for 2016, which amounted to IDR3,306,677,000,000 (three trillion three hundred six billion six hundred seventy seven million Rupiah), will be appropriated as follows:
 - a. an amount of IDR700,004,213,567 (seven hundred billion four million two hundred thirteen thousand five hundred sixty seven Rupiah) will be distributed as cash dividends for the financial year ended December 31, 2016 to the shareholders, with the following details:
 - i. SMN will receive cash dividends in an amount of IDR700,000,000,000;
 - ii. TMG will receive cash dividends in an amount of IDR2,106,784;
 - iii. CGS will receive cash dividends in an amount of IDR2,106,784;

- b. untuk tahun keuangan yang berakhir 31 Desember 2016, untuk mengalokasikan Rp100.000.000 sebagai dana cadangan dan sisa laba Perseroan sebagai saldo laba yang tidak dicadangkan.

3. Agenda Ketiga:

- (i) Memutuskan, untuk menyetujui pengunduran diri Bapak Bacelius Ruru sebagai Komisaris Independen Perseroan dan untuk melepaskan dan membebaskannya dari semua tanggung jawab untuk semua tindakan yang sah yang diambil dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Independen yang telah diungkapkan secara adil dan benar dalam pembukuan dan catatan Perseroan;
- (ii) Memutuskan, untuk melepaskan semua hak yang mungkin dimiliki Perseroan dan Pemegang Saham berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan untuk menerima pengunduran diri Bapak Bacelius Ruru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya untuk pengunduran dirinya;

4. Agenda Keempat:

- (i) Memutuskan, untuk menyetujui pengangkatan Bapak Kusmayanto Kadiman sebagai Komisaris Independen Perseroan; dan
- (ii) Memutuskan, untuk menegaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris saat ini setelah pengangkatan Bapak Kusmayanto Kadiman sebagai Komisaris Independen Perseroan, yaitu:

Direksi:

Direktur Utama	: Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Direktur Utama	: Adam Gifari
Wakil Direktur Utama	: Stephen Duffus Weiss
Direktur	: Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur	: Rinaldy Santosa
Direktur	: Onggo Wijaya
Direktur Independen	: Indra Gunawan

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Ario Wibisono
Komisaris	: Kenny Harjo
Komisaris Independen	: Kusmayanto Kadiman

- b. for the financial year ended December 31, 2016, to allocate IDR100,000,000 as a reserve fund and the remaining Company profits as unappropriated retained earnings.

3. Third Agenda:

- (i) Resolved, to approve the resignation of Mr. Bacelius Ruru as an Independent Commissioner of the Company and to release and discharge him from all liabilities for all lawful actions taken in his capacity as an Independent Commissioner that have been fairly and properly disclosed in the books and records of the Company;
- (ii) Resolved, to waive all of the rights that the Company and the Shareholders may have under Article 11 paragraph (6) of the Company's Articles of Association to receive the resignation of Mr. Bacelius Ruru at the latest 30 (thirty) days prior to his resignation;

4. Fourth Agenda:

- (i) Resolved, to approve the appointment of Mr. Kusmayanto Kadiman as an Independent Commissioner of the Company; and
- (ii) Resolved, to confirm the present members of the Board of Directors and the Board of Commissioners following the appointment of Mr. Kusmayanto Kadiman as an Independent Commissioner of the Company, namely:

Board of Directors:

President Director	: Ferdinandus Aming Santoso
Vice President Director	: Adam Gifari
Vice President Director	: Stephen Duffus Weiss
Director	: Eko Santoso Hadiprodjo
Director	: Rinaldy Santosa
Director	: Onggo Wijaya
Independent Director	: Indra Gunawan

Board of Commissioners:

President Commissioner	: Ario Wibisono
Commissioner	: Kenny Harjo
Independent Commissioner	: Kusmayanto Kadiman

5. Agenda Kelima:

Memutuskan, untuk menunjuk kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) sebagai auditor Perseroan untuk tahun fiskal 2017, dan untuk mengesahkan Direksi untuk menentukan remunerasi auditor.

6. Agenda Keenam:

Memutuskan, untuk menyetujui dan mengesahkan jumlah remunerasi dan honorarium yang telah diberikan kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2016 hingga tanggal Resolusi ini.

7. Agenda Ketujuh:

Memutuskan, untuk mendelegasikan wewenang kepada pemegang saham pengendali Perseroan, yaitu PT Sarana Menara Nusantara Tbk. untuk: (a) menetapkan honorarium dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, di mana Dewan Komisaris akan mendasarkan usulannya dari saran Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan; (b) menentukan pembayaran bonus (tantiem) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan memperhatikan kinerja mereka dan masukan dari Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari remunerasi dan Komite Nominasi.

8. Agenda Kedelapan:

Memutuskan, untuk menyetujui anggaran Perseroan untuk tahun fiskal 2017.

9. Agenda Kesembilan:

Memutuskan, untuk menyetujui penggunaan aktual hasil dari Penawaran Umum per 31 Desember 2016, yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada 13 Januari 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Penawaran Umum Amount of Public Offering	800.000
Hasil Bersih dari Penawaran Umum Net Results of Public Offering	791.834
Rencana Penggunaan Dana Plan Use of Funds	800.000
Realisasi Penggunaan Dana Realization of Uses of Funds	99.960
Sisa Hasil dari Penawaran Umum Remaining Amount of Public Offering result	700,040

Dalam jutaan Rupiah / Expressed in millions of Rupiah

5. Fifth Agenda:

Resolved, to appoint the public accounting firm of Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) as the Company's auditor for the 2017 fiscal year, and to authorize the Board of Directors to determine the auditor's remuneration.

6. Sixth Agenda:

Resolved, to approve and ratify the amount of remuneration and honorarium that has been given to each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners for year 2016 until the date of these Resolutions.

7. Seventh Agenda:

Resolved, to delegate authority to the controlling shareholders of the Company, namely PT Sarana Menara Nusantara Tbk. to: (a) determine the honorarium and remuneration of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, where the Board of Commissioners will base its proposal from the Company's Remuneration and Nomination Committee's suggestion; (b) determine the payment of bonuses (tantieme) to the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company upon taking into account their performances and the inputs from the Board of Commissioners with due regard for the recommendations from the remuneration and Nomination Committee.

8. Eighth Agenda:

Resolved, to approve the Company's budget for the 2017 fiscal year.

9. Ninth Agenda:

Resolved, to approve the actual use of proceeds from the Public Offering as of December 31, 2016, which has been reported to Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") on January 13, 2017, with the following details:

KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE

Sesuai dengan peraturan OJK dan BEI yang berlaku, Perseroan telah membentuk Komite Audit dan menyusun Piagam Komite Audit. Komite Audit adalah sebuah komite yang independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Fungsi utama dari komite tersebut adalah untuk membantu tugas Dewan Komisaris sehubungan dengan tugas pengawasan atas metodologi dan proses dari pelaporan keuangan, manajemen risiko, audit dan kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku.

Pembentukan Komite Audit sudah sesuai dengan Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pada tanggal 31 Mei 2017, Dewan Komisaris mengangkat kembali individu-individu berikut sebagai anggota Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan dan untuk mendukung dan mengarahkan Perseroan yang akan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip GCG. Anggota Komite Audit adalah:

In compliance with OJK and IDX regulations, the Company has established an Audit Committee and an Audit Committee Charter. The Audit Committee is an independent committee established by the Board of Commissioners. The primary function of the committee is to assist the Board of Commissioners' duties on oversight responsibilities over the methodology and process of financial reporting, risk management, audit and compliance with the prevailing laws and regulations.

Establishment of the Audit Committee is based on Regulation of OJK No.55/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 concerning the Establishment and Work Implementation Guidelines of Audit Committee.

On May 31, 2017, the Board of Commissioners reappointed the following individuals as members of the Audit Committee to assist the Board of Commissioners in conducting its supervisory function and to direct the Company to be managed based upon the GCG principles. The Audit Committee members are:

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Menjabat Sejak Position Held Since
Kusmayanto Kadiman	Ketua Komite Audit Head of Audit Committee	63	Mei 2017 May 2017
Anang Yudiansyah Setiawan	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	48	Juni 2013 June 2013
Patricia Marina Sugondo	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	50	Juni 2013 June 2013

KEWAJIBAN KOMITE AUDIT

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan, seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;

DUTIES OF THE AUDIT COMMITTEE

1. Reviewing the financial information that will be issued by the Company, such as financial statements, projections, and other financial information;
2. Reviewing the Company's compliance with Indonesian laws and regulations related to the capital markets and other rules related to the business activities of the Company;

3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
 4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan dan biaya;
 5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
 6. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik Perseroan;
 7. Melaporkan kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan berbagai resiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh Direksi;
 8. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
 9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;
 10. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi yang dapat dilakukan oleh Komite Audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit atas biaya Perseroan; dan
 11. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Providing independent opinions in the event of dissenting opinions between the management and the Accountant for services provided.
 4. Providing recommendation to the Board of Commissioners concerning the appointment of the Accountant based on independency, scope of work, assignment and fee;
 5. Reviewing the implementation of audit by internal auditor and supervising the follow up actions performed by the Board of Directors on the findings of the internal auditor;
 6. Reviewing the independency and objectivity of the public accountant of the Company;
 7. Reporting to the Board of Commissioners with regard to various risks faced by the Company and the implementation of risk management by the Board of Directors;
 8. Reviewing and report to the Board of Commissioners on complaints relating to the Company including but not limited to complaints relating to process of accounting and financial reporting of the Company;
 9. Maintaining confidentiality of documents, data and information of the Company;
 10. Conducting examination upon any alleged fault in the meeting decision of the Board of Directors or deviation in the implementation of the meeting decision of the Board of Directors which can be performed by the Audit Committee or an independent party appointed by the Audit Committee at the expense of the Company; and
 11. Reviewing and provide suggestions to the Board of Commissioners in relation with potential conflict of interests of Issuer of Public Company.

WEWENANG KOMITE AUDIT

1. Komite Audit memiliki akses yang tidak terbatas informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawabnya;
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite Audit dapat meminta bantuan tenaga ahli dan/atau konsultan untuk membantu Komite Audit;
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

AUTHORITY OF THE AUDIT COMMITTEE

1. Unlimited access to the information on employees, funds, assets and other Company resources that are related to its tasks;
2. Communicating directly to employees, including the Board of Directors and those who perform the function of Internal Audit, risk management, and accountant relating to its duties and responsibilities;
3. If necessary, with the written approval of the Board of Commissioners, the committee may request assistance from experts and/or consultants to assist the Audit Committee; and
4. Performing other authorities provided by the Board of Commissioners.

JUMLAH RAPAT
FREQUENCY OF MEETINGS

Nama Name	Frekuensi Frequency	Kehadiran Attendance
Kusmayanto Kadiman	4	4
Anang Yudiansyah Setiawan	4	4
Patricia Marina Sugondo	4	4

PROFIL ANGGOTA KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE MEMBER PROFILES**KUSMAYANTO KADIMAN**

Bapak Kadiman telah menjadi Ketua Komite Audit sejak Mei 2017 berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 31 Mei 2017. Pengangkatan terakhir beliau sebagai Ketua Komite Audit berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 31 Mei 2017 untuk masa jabatan yang berakhir tahun 2019. Bapak Kadiman menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, profil beliau dapat dilihat pada bagian "Profil Dewan Komisaris".

Mr. Kadiman has been the Head of the Audit Committee since May 2017 based on resolutions of the Board of Commissioners of the Company dated May 31, 2017. His latest appointment as head of the Audit Committee is based on resolutions of the Board of Commissioners of the Company dated May 31, 2017 for the term ended in 2019. Mr. Kadiman also serves as an Independent Commissioner of the Company and his profile can be found in the section entitled "Board of Commissioners' Profiles".



ANANG YUDIANSYAH SETIAWAN

Bapak Setiawan, 48 tahun, Warga Negara Indonesia, telah menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak Februari 2014 berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 28 Februari 2014. Pengangkatan terakhir beliau sebagai anggota Komite Audit berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 27 Juni 2014 untuk masa jabatan yang berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2019. Beliau memperoleh gelar Akuntan dan Sertifikasi Auditor Internal dan dia adalah anggota dari The Institute of Internal Auditor dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Beliau telah berpengalaman lebih dari 26 tahun melakukan konsultasi dan audit di bidang berbagai industri. Beliau adalah anggota dari Komite Audit SMN dari September 2010–Juni 2013; Senior Manager di Ernst & Young dari Maret 2000–April 2009; dan Kepala Audit Internal PT Semen Cibinong, Tbk dari Maret 1996–Maret 2000. Saat ini beliau adalah Penasehat Senior PT DEX Solutions Indonesia. Beliau memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Indonesia pada tahun 1994.

Mr. Setiawan, 48 years old, Indonesian Citizen, has been a member of the Company's Audit Committee since February 2014 based on resolutions of the Board of Commissioners of the Company dated February 28, 2014. His latest appointment as member of the Audit Committee based on resolutions of the Board of Commissioners of the Company dated June 27, 2014 for the term ended at the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2019. He holds an Accountant and Internal Auditor Certification and he is a member of The Institute of Internal Auditor and Indonesian Institute of Accountants (IAI). He has spent over 26 years performing consulting and auditing work in the fields of various industries. He was a member of the Audit Committee of SMN from September 2010–June 2013; Senior Manager at Ernst & Young from March 2000–April 2009; and the Head of Internal Audit of PT Semen Cibinong, Tbk from March 1996–March 2000. Currently, he is a Senior Advisor of PT DEX Solutions Indonesia. He obtained a Bachelor's degree from the Universitas Indonesia in 1994.

**PATRICIA MARINA SUGONDO**

Ibu Sugondo, 50 tahun, Warga Negara Indonesia, telah menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak Februari 2014 berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 28 Februari 2014. Pengangkatan terakhir beliau sebagai anggota Komite Audit berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 27 Juni 2014 untuk masa jabatan yang berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2019. Sebelumnya, Ibu Sugondo adalah anggota Komite Audit SMN dari September 2010–Juni 2013. Beliau adalah seorang ahli di bidang Akuntansi, Keuangan, dan Audit dan memiliki pengalaman sebagai auditor/akuntan publik di PricewaterhouseCoopers selama 12 tahun dari tahun 1990–2002. Saat ini, beliau adalah penasihat senior di PT GNV Solution sejak tahun 2008. Ibu Sugondo memperoleh gelar Sarjana jurusan Akuntansi dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta pada tahun 1990 dan telah Bersertifikat Akuntan Publik. Saat ini Ibu Sugondo juga menjabat antara lain sebagai anggota Komite Audit di PT Samudera Indonesia, Tbk. dan PT Elang Mahkota Teknologi, Tbk.

Ms. Sugondo, 50 years old, Indonesian Citizen, has been a member of the Company's Audit Committee since February 2014 based on resolutions of the Board of Commissioners of the Company dated February 28, 2014. Her latest appointment as member of the Audit Committee based on resolutions of the Board of Commissioners of the Company dated June 27, 2014 for the term ended at the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2019. Previously, Ms. Sugondo was a member of the Audit Committee of SMN from September 2010–June 2013. She is an expert in Accounting, Finance, and Auditing and has experience as an auditor/public accountant in PricewaterhouseCoopers for 12 years from 1990–2002. Currently, she is a senior advisor to PT GNV Solution since 2008. She earned a Bachelor's degree majoring in Accounting from Atmajaya Catholic Universitas Indonesia, Jakarta in 1990 and is an Indonesian Certified Public Accountant. Currently, Ms. Sugondo is a member of Audit Committee in PT Samudera Indonesia, Tbk. and PT Elang Mahkota Teknologi, Tbk.

AKTIVITAS KOMITE AUDIT

Aktivitas Komite Audit sepanjang tahun 2017 antara lain:

1. Melakukan evaluasi atas kinerja, kompetensi, independensi dan obyektivitas akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan 2016;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan akuntan publik dalam rangka melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017;
3. Mendiskusikan metodologi audit dan memantau hasil audit Laporan Keuangan untuk tahun buku 2017 yang dilakukan oleh auditor eksternal;
4. Memeriksa hasil audit yang dilakukan oleh Departemen Audit Internal selama tahun 2017 dan memberikan catatan kepada Dewan Komisaris terkait hal-hal yang perlu diperhatikan;
5. Memformulasikan rencana, kerja, dan mempersiapkan laporan rutin atas implementasi pelaksanaan tugas Komite Audit;
6. Berdasarkan laporan manajemen, memeriksa kepatuhan Perseroan terhadap peraturan pasar modal dan peraturan lainnya, dan mengingatkan Dewan Komisaris terkait isu-isu tertentu yang membutuhkan perhatian mereka; dan memeriksa dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pengaduan yang berkaitan dengan proses laporan akuntansi dan keuangan Perseroan.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

ACTIVITIES OF THE AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee's activities in 2017 included the following:

1. Evaluating the performance, competence, independence and objectivity of the public accountants in auditing the 2016 financial statement;
2. Giving recommendations for the Board of Commissioners for the appointment of public accountant to conduct the audit of the Company's financial statements for fiscal year 2017;
3. Discussing the audit methodology and monitoring the progress of the audit of the Financial Statements for fiscal year 2017 by the external auditor;
4. Reviewing the results of the audits by the Internal Audit Department during 2017 and notifying the Board of Commissioners of any matters that required its attention;
5. Formulating the work plan and preparing regular reports on the implementation of the Audit Committee's tasks;
6. Based on management report, reviewing the Company's compliance with capital markets regulations and other applicable laws, and alerting Board of Commissioners to certain issues that required its attention; and review and report to the Board of Commissioners on complaints relating to the Company including but not limited to complaints relating to process of accounting and financial reporting of the Company.

STATEMENT OF INDEPENDENCE OF AUDIT COMMITTEE

All members of the Audit Committee are independent parties, not having financial, management, share ownership and/or family relationships with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or Controlling Shareholders or business relationships with the Company that may affect the ability to act independently.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 mengenai Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, dan untuk meningkatkan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan untuk mendukung efektifitas Dewan Komisaris terkait dengan fungsi nominasi dan remunerasi, Perseroan telah mengesahkan dan membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi serta Piagamnya berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris pada tanggal 10 Desember 2014. Per tanggal 31 Desember 2017, komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Based on Indonesian Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 on the Remuneration and Nomination Committee of Listed or Public Companies, and to enhance the implementation of GCG principles and to support the effectiveness of the Board of Commissioners related to the functions of nomination and remuneration, the Company has formalized and established a Remuneration and Nomination Committee and its Charter based on Resolutions of the Board of Commissioners dated December 10, 2014. As of December 31, 2017, the composition of the Remuneration and Nomination Committee of the Company is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Menjabat Sejak Position Held Since
Kusmayanto Kadiman	Ketua (saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan) Chairman (concurrently also holds a position as an Independent Commissioner of the Company)	63	2017
Ario Wibisono	Anggota (saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Perseroan) Member (concurrently also holds a position as a Commissioner of the Company)	55	2014
Doni Kusuma	Anggota Member	39	2014

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan, besaran, dan struktur atas remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang akan menjadi bagian dari Laporan Dewan Komisaris untuk kemudian disampaikan dan kemudian ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (i) komposisi jabatan Direksi dan Dewan Komisaris, (ii) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris,

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Remuneration and Nomination Committee has the following duties and responsibilities:

- Providing recommendations to the Board of Commissioners with regards to policies, amount, and structure of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, which will be a part of the Board of Commissioners' Report to be submitted to, and further determined in, the General Meeting of Shareholders;
- Assisting the Board of Commissioners with conducting a performance review for each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners;
- Providing recommendations to the Board of Commissioners concerning: (i) composition of the Board of Directors and Board of Commissioners, (ii) policies and criteria that are needed for the nomination process for members of the

dan (iii) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

- d. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- f. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dan disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain, selain yang disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

Komite Remunerasi dan Nominasi melaporkan kepada Dewan Komisaris dan harus bertindak secara independen dalam menjalankan tugasnya.

KEGIATAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Selama tahun 2017, Komite Remunerasi dan Nominasi membuat program kerja yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan berikut:

1. Meninjau skema remunerasi yang ada untuk Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan, besaran, dan struktur remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan laporan yang dipersiapkan oleh konsultan tenaga kerja eksternal;
3. Merumuskan prinsip dasar dalam menentukan kebijakan remunerasi dengan mempertimbangkan:
 - Posisi dan persaingan dalam industri Perseroan;
 - Klasifikasi dan kompleksitas tugas yang dilaksanakan oleh Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - Biaya hidup saat ini termasuk indikator inflasi nasional.
4. Merumuskan prinsip dasar untuk menentukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan:

Board of Directors and Board of Commissioners, and (iii) performance evaluation policies for members of the Board of Directors and Board of Commissioners;

- d. Assisting the Board of Commissioners to assess the performance of members of the Board of Directors and Board of Commissioners based on established benchmarks;
- e. Providing recommendations to the Board of Commissioners on the competency development program for members of the Board of Directors and Board of Commissioners;
- f. Providing suggestions to the Board of Commissioners on the candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors and Board of Commissioners and further to be submitted for approval to the General Meeting of Shareholders; and
- g. Conducting other tasks, in addition to those mentioned above, that shall be given by the Board of Commissioners in accordance with their functions and duties from time to time as needed.

The Remuneration and Nomination Committee reports to the Board of Commissioners and is required to act independently in performing its duties.

ACTIVITIES OF THE REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

During 2017, the Remuneration and Nomination Committee outlined a work program focusing on the following activities:

1. Reviewed the existing remuneration scheme of the Board of Commissioners and Board of Directors;
2. Provided recommendations to the Board of Commissioners with regards to policies, amount, and structure of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners by considering a report the external manpower consultant;
3. Formulated basic principles in setting remuneration policy by considering:
 - Positioning and competitiveness in the Company's industry;
 - Classification and complexity of work performed by the Board of Directors and the Board of Commissioners; and
 - Current cost of living including the national inflation indicators.
4. Formulated the basic principles for nominating members of the Board of Directors and the Board of Commissioners by considering:

- Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Kualifikasi personal dari para kandidat; dan
 - Persyaratan dari Perseroan.
5. Memberikan rencana pengembangan profesional untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- The Articles of Association of the Company and prevailing laws and regulations;
 - Personal qualifications of the candidates; and
 - Requirements of the Company.
5. Provided a professional development plan for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

JUMLAH RAPAT

Kehadiran rapat anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

FREQUENCY OF MEETINGS

Meeting attendance of the members of the Remuneration and Nomination Committee was as follows:

Nama Name	Frekuensi Frequency	Kehadiran Attendance
Kusmayanto Kadiman	3	3
Ario Wibisono	3	3
Doni Kusuma	3	3

PROFIL ANGGOTA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE MEMBER PROFILES

KUSMAYANTO KADIMAN

Bapak Kadiman telah menjadi Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sejak Juni 2017 berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 5 Juni 2017. Pengangkatan terakhir beliau sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 21 Mei 2015 untuk masa jabatan yang berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2019. Bapak Kadiman juga menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, profil beliau dapat dilihat pada bagian "Profil Dewan Komisaris".

Mr. Kadiman has been the Head of the Remuneration and Nomination Committee since June 2017 based on resolutions of the Board of Commissioners of the Company dated June 5, 2017. His latest appointment as the Head of the Remuneration and Nomination Committee is based on resolutions of the Board of Commissioners of the Company dated May 21, 2015 for the term ended at the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2019. Mr. Kadiman also serves as an Independent Commissioner of the Company and his profile can be found in the section entitled "Board of Commissioners' Profiles."

ARIO WIBISONO

Bapak Wibisono telah menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak November 2014 berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 10 Desember 2014. Pengangkatan terakhir beliau sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 21 Mei 2015 untuk masa jabatan yang berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2019. Bapak Wibisono juga menjabat sebagai Komisaris Perseroan dan profil beliau dapat dilihat pada bagian "Profil Dewan Komisaris".

Mr. Wibisono has been a member of the Remuneration and Nomination Committee since November 2014 based on resolutions of the Board of Commissioners of the Company dated December 10, 2014. His latest appointment as a member of the Remuneration and Nomination Committee is based on resolutions of the Board of Commissioners of the Company dated May 21, 2015 for the term ended at the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2019. Mr. Wibisono also serves as a Commissioner of the Company and his profile can be found in the section entitled "Board of Commissioners' Profiles".

DONI KUSUMA

Bapak Kusuma, 39 tahun, Warga Negara Indonesia, menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak bulan November 2014 berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 10 Desember 2014. Pengangkatan terakhir beliau sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 21 Mei 2015 untuk masa jabatan yang berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2018. Beliau memiliki lebih dari 17 tahun pengalaman dalam kompensasi, remunerasi, tunjangan, dan hubungan industrial. Beliau bergabung dengan Protelindo pada tahun 2008 sebagai Asisten Sumber Daya Manusia (2008–2009). Bapak Kusuma saat ini menjabat sebagai General Manager Sumber Daya Manusia Perseroan dan Protelindo. Beliau bertanggung jawab dalam penerapan kompensasi dan tunjangan, sistem personalia, Peraturan Perusahaan, dan program pengembangan serta program tanggung jawab sosial perusahaan. Sebelum bergabung dengan Protelindo, beliau bekerja dengan General Electric Finance Indonesia selama enam tahun (2000–2006), dan dari tahun 2006 hingga 2008, beliau bekerja pada beberapa perusahaan lokal dan multinasional di Indonesia.

Bapak Kusuma meraih gelar Sarjana Manajemen Sumber Daya Manusia pada tahun 2008 dari Asian Banking Finance & Informatics (ABFI) Institute PERBANAS.

Mr. Kusuma, 39 years old, Indonesian Citizen, has been a member of the Remuneration and Nomination Committee since November 2014 based on resolutions of the Board of Commissioners of the Company dated December 10, 2014. His latest appointment as a member of the Remuneration and Nomination Committee is based on resolutions of the Board of Commissioners of the Company dated May 21, 2015 for the term ended at the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2018. He has over 17 years experience in compensation remuneration, benefit, and industrial relationships. He joined Protelindo in 2008 as Human Resources Assistant (2008–2009). Mr. Kusuma's current position is the General Manager for Human Resources of the Company and Protelindo. He is responsible for the implementation of compensation and benefits programs, HR systems, Company Regulations, and development programs. His role also includes corporate social responsibility programs. Prior to joining Protelindo, he worked with General Electric Finance Indonesia for six years (2000–2006). From 2006 to 2008, he worked in several local and multinational companies in Indonesia.

Mr. Kusuma earned his Bachelor's Degree in Human Resources Management in 2008 from Asian Banking Finance & Informatics (ABFI) Institute PERBANAS.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

STATEMENT OF INDEPENDENCE OF REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

All members of the Remuneration and Nomination Committee are independent parties, not having financial, management, share ownership and/or family relationships with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or Controlling Shareholders or business relationships with the Company that may affect the ability to act independently.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY

Sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 mengenai Sekretaris Perusahaan untuk Emiten atau Perusahaan Publik ("Peraturan No. 35/2014"), perusahaan publik tercatat wajib menunjuk Sekretaris Perusahaan. Peran dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan disesuaikan dengan Peraturan No. 35/2014 yang terdiri dari:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

As determined by OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014, dated December 8, 2014 on the Corporate Secretary of a Listed or Public Company ("Regulation No. 35/2014"), a publicly listed Company must appoint a Corporate Secretary. The roles and responsibilities of a Corporate Secretary pursuant to Regulation No. 35/2014 comprise the following:

1. To follow capital markets developments, especially the prevailing capital markets regulations;
2. To provide input to the Board of Directors and the Board of Commissioners to comply with the prevailing capital markets regulations;
3. To assist the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company in applying GCG principles; and
4. To act as the primary communication intermediary between the Company and its shareholders, OJK and other stakeholders.



MAYA MARCELLA

Sekretaris Perusahaan Protelindo adalah Ibu Maya Marcella, domisili di Indonesia. Ibu Maya Marcella telah ditunjuk menjadi Sekretaris Perusahaan sejak bulan November 2017 menggantikan Bapak Aditya Masno berdasarkan keputusan Direksi Perseroan tanggal 1 November 2017.

Sebelum bergabung dengan Protelindo, Ibu Maya Marcella adalah konsultan hukum di Hiswara Bunjamin & Tandjung dengan pengalaman lebih dari enam tahun di bidang pasar modal, dimana kemudian beliau juga bekerja di Herbert Smith Freehills LLP (kantor hukum internasional yang merupakan asosiasi Hiswara Bunjamin & Tandjung) untuk *secondment* di kantor Singapura pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016.

Ibu Maya Marcella menyelesaikan sarjana hukum di Universitas Katolik Atma Jaya Indonesia pada tahun 2010, dan beliau adalah anggota dari PERADI (Asosiasi Advokat Indonesia).

Untuk selalu update mengenai informasi dan peraturan di bidang pasar modal, Ibu Maya Marcella telah menjadi anggota Asosiasi Sekretaris Perusahaan Indonesia (ICSA), dan juga berpartisipasi aktif dalam seminar dan pelatihan pasar modal yang dilakukan oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia.

The Corporate Secretary of Protelindo is Mrs. Maya Marcella, domiciled in Indonesia. Mrs. Maya Marcella has been appointed as the Corporate Secretary since November 2017 replacing Mr. Aditya Masno based on resolutions of the Board of Directors of the Company dated November 1, 2017.

Prior to joining Protelindo, Mrs. Maya Marcella was working as a lawyer at Hiswara Bunjamin & Tandjung with more than six years of experience in capital law practice, during which she also worked in Herbert Smith Freehills LLP (the international associated law firm of Hiswara Bunjamin & Tandjung) on a secondment at Singapore office in 2015 until 2016.

Mrs. Maya Marcella completes her Bachelor of Law degree at the Atma Jaya Catholic University of Indonesia in 2010 and she is a member of PERADI (Indonesian Advocates Association).

In order to keep up with the updated information and regulations in capital markets, Mrs. Maya Marcella has become a member of the Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA), and has also actively participated in capital market training courses and trainings held by OJK and the Indonesia Stock Exchange.

TUGAS-TUGAS YANG DILAKSANAKAN OLEH SEKRETARIS PERUSAHAAN DI TAHUN 2017

Selain pemantauan harian atas implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan pemantauan kepatuhan Perseroan atas peraturan dan hukum yang berlaku, aktivitas utama yang dijalankan oleh Sekretaris Perusahaan pada tahun 2017 meliputi:

1. Mengatur pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa;
2. Menyusun panduan dan aktivitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilaksanakan Perseroan;
3. Mengelola komunikasi dengan: Kementerian Keuangan, BKPM, OJK, Self-Regulatory Organization (BEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Biro Administrasi Efek (BAE) dan institusi lainnya yang terkait;
4. Mengorganisir dan turut serta dalam penyusunan Laporan Tahunan Perseroan;
5. Mengorganisir semua rapat yang dilakukan untuk Direksi dan Dewan Komisaris serta membuat risalah rapat;
6. Membantu dalam proyek pembiayaan utang, transaksi akuisisi perusahaan dan menara, dan transaksi obligasi;
7. Membuat dan mempersiapkan prosedur dan kebijakan yang relevan sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang dikeluarkan oleh OJK; dan
8. Mengelola situs web Perseroan guna mematuhi peraturan OJK yang baru.

TASK PERFORMED BY CORPORATE SECRETARY IN 2017

In addition to day-to-day monitoring of GCG principles and monitoring the Company's compliance with applicable laws and regulations, key activities implemented by the Corporate Secretary in 2017 included:

1. Organizing the Annual and Extraordinary General Meetings of Shareholders;
2. Organizing Corporate Social Responsibility guidelines and activities of the Company;
3. Maintaining communication with the Ministry of Finance, BKPM, OJK, Self-Regulatory Organization (IDX, the Indonesian Central Securities Deposit (also known as KSEI), and the Indonesian Securities Clearing and Guarantee (also known as KPEI), Share Registrar (also known as BAE) and other related institutions;
4. Organizing and preparing the Annual Report of the Company;
5. Organizing all Board meetings and drafting the Minutes of Meetings;
6. Assisting in debt refinancing projects, company acquisitions, tower acquisition transactions and bond transactions;
7. Drafting and preparing relevant procedures and policies as stipulated in Corporate Governance Guidelines issued by OJK; and
8. Adjusting the Company's website to comply with the new OJK regulation.

WORKSHOP ATAU SEMINAR YANG DIKUTI OLEH SEKRETARIS PERUSAHAAN DI TAHUN 2017**WORKSHOP OR SEMINAR PARTICIPATED BY CORPORATE SECRETARY IN 2017**

Tanggal Date	Workshop atau Seminar Workshop or Seminar
8 Maret 2017 March 8, 2017	Workshop Penilaian <i>Asian Corporate Governance Scorecard</i> tahun 2017 Evaluation of Asian Corporate Governance Scorecard year 2017
13 April 2017 April 13, 2017	Sosialisasi POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan POJK No. 32/pojk.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham untuk Perusahaan Terbuka dan POJK No. 11/POJK.04/2014 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Socialization of OJK Rule No. 10/POJK.04/2017 on the amendment of the OJK Rule No. 32/POJK.04/2014 on the Plan and Procedures to Conduct General Meetings of Shareholders (GMS) for Public Companies and OJK Rule No. 11/POJK.04/2014 on Reporting of Substantial Shareholdings in Public Companies
17 Mei 2017 May 17, 2017	Sosialisasi Penerapan Registrasi secara Elektronik kepada OJK Socialization on the Implementation of the Electronic Registration to OJK
20 Juli 2017 July 20, 2017	Registrasi secara Elektronik untuk Pernyataan Pendaftaran dan Aksi Korporasi Electronic Registration for the Registration Statement and Corporate Action

Tanggal Date	Workshop atau Seminar Workshop or Seminar
16 Agustus 2017 August 16, 2017	Sosialisasi POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Socialization of the OJK Rule No. 21/POJK.04/2015 on the Implementation of the Corporate Governance of Public Companies
27 September 2017 September 27, 2017	Dialog untuk Sekretaris Perusahaan tentang POJK No. 51/POJK.02/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan Dialogue for Corporate Secretary on the OJK Rule No. 51/POJK.02/2017 regarding Financial Sustainability
5 Oktober 2017 October 5, 2017	Konversi dan Revisi terhadap Peraturan BAPEPAM menjadi Peraturan OJK Conversion and Revision on the BAPEPAM Rule to OJK Rule
19 Oktober 2017 October 19, 2017	Permasalahan Pajak Sehubungan dengan Perusahaan Terbuka di Indonesia dan Sosialisasi Perubahan Klasifikasi Sektor di Bursa Efek Indonesia Tax Issues Related to Public Companies in Indonesia and socialization on the Change of Sector Classification in the Indonesia Stock Exchange
20 November 2017 November 20, 2017	Indonesia 2018: Berlayar Mengarungi Pasang Surut Ekonomi dan Politik Indonesia 2018: Sailing Through Economic and Political Tide

DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL

INTERNAL AUDIT DEPARTMENT

Berdasarkan peraturan OJK dan BEI yang berlaku, Perseroan telah melakukan formalisasi atas Departemen Audit Internal dan Piagam Audit Internal. Departemen Audit Internal dipimpin oleh Kepala Audit Internal, yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Direktur Utama, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Departemen Audit Internal memiliki fungsi yang penting dalam Perseroan, terutama dalam mendukung fungsi pengendalian internal dan manajemen risiko.

KEPALA DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL

Kepala Departemen Audit Internal Bapak Haryo Dewanto, yang ditunjuk untuk posisi ini pada 22 Agustus 2017. Kepala Departemen Audit Internal didampingi oleh lima karyawan dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Based on the prevailing OJK and IDX regulations, the Company has formalized its Internal Audit Department and its charter. The Internal Audit Department is led by the Head of the Internal Audit Department, who is appointed by the President Director, and approved by the Board of Commissioners.

The Internal Audit Department serves an important role within the Company, especially on supporting internal control and risk management function.

HEAD OF THE INTERNAL AUDIT DEPARTMENT

The Head of the Internal Audit Department is Mr. Haryo Dewanto, who was appointed to this position in August 22, 2017. The Head of the Internal Audit Department is assisted by five employees in carrying out his duties.

PROFIL KEPALA AUDIT INTERNAL

Bapak Dewanto menerima gelar akuntansi dari Universitas Diponegoro. Sebelum bergabung dengan Protelindo, Beliau adalah *Finance Controller* di Grup Ascott, yang bergerak di bidang manajemen properti yang berpusat di Singapura dari 1999–2005. Beliau bergabung dengan Perseroan di 2007 dan dipromosikan sebagai *VP Controller & Reporting* pada 2010–Agustus 2017. Beliau ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan pada 2010–2011. Beliau berpengalaman lebih dari 20 tahun di perusahaan multinasional di bagian perencanaan, akuntansi dan pengawasan. Tanggung jawab beliau di bagian akuntansi, *external reporting* dan *internal control*. Beliau adalah akuntan terdaftar di Indonesia.

PIAGAM AUDIT INTERNAL

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Departemen Audit Internal berpedoman pada Piagam Audit Internal mengacu pada peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Piagam Audit Internal ini secara umum mencakup misi, ruang lingkup, struktur, posisi, tanggung jawab, kewajiban, wewenang dan kode etika Departemen, serta persyaratan untuk anggota Departemen Audit internal.

TANGGUNG JAWAB DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL

Departemen Audit Internal bertanggung jawab untuk membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan dengan melakukan operasional perencanaan perusahaan dan implementasi serta pemantauan akan hasil audit yang dilaksanakan melalui aktivitas-aktivitas berikut ini:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal (*Audit Plan*) tahunan. Rencana ini harus konsisten dengan Piagam Internal Audit dan tujuan bisnis Perseroan, serta disetujui Direktur Utama dan dilaporkan ke Dewan Komisaris;
2. Melaksanakan rencana audit yang telah mendapat persetujuan tersebut diatas, termasuk penugasan audit khusus (*special audit*) atas permintaan Direktur Utama maupun Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
3. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;

HEAD OF INTERNAL AUDIT'S PROFILE

Mr. Dewanto received his degree in accounting from Diponegoro University. Prior to joining Protelindo, he was a Finance Controller at the Ascott Group, a property management business headquartered in Singapore from 1999–2005. He joined the Company in 2007 and was promoted in 2010–August 2017 as VP Controller & Reporting. He was also appointed as Corporate Secretary during 2010–2011. He has over 20 years of experience working for large multinational companies in planning, accounting and controller positions. His responsibility is to oversee accounting, external reporting and internal control areas. He is a Registered Indonesian Accountant.

INTERNAL AUDIT CHARTER

In fulfilling its duties and responsibilities, the Internal Audit Department is guided by the Internal Audit Charter pursuant to OJK regulation No. 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Work Implementation Guidelines of Internal Audit Charter. The Internal Audit Charter broadly outlines the, mission, scope, structure, position, responsibilities, duties, authority and code of ethics of the Department, as well as the requirements for members of the Internal Audit Department.

RESPONSIBILITIES OF THE INTERNAL AUDIT DEPARTMENT

The Internal Audit Department is responsible for assisting the President Director and the Board of Commissioners in their supervisory functions by operationally planning, implementing and monitoring the audit results conducted through the following activities:

1. Formulating and implementing the yearly internal audit (Audit Plan). This plan must be consistent with the Internal Audit Charter and the Company's business objectives and also approved by the President Director and reported to the Board of Commissioners;
2. Implementing above approved audit plan, including special audit assignment (special audit) as requested by the President Director and Board of Commissioners, through the Audit Committee;
3. Testing and evaluating the implementation of internal controls and risk management systems in accordance with the Company's policies;

4. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya. Termasuk membuat analisis dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas melalui pemeriksaan langsung (*on-site audit*) dan pengawasan secara tidak langsung (*off-site audit*);
 5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen. Serta mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. Memberikan informasi dan saran perbaikan yang obyektif tentang kegiatan yang diaudit pada semua tingkatan manajemen;
 6. Membuat laporan hasil audit (*audit report*) dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Membuat laporan berkala mengenai ringkasan hasil kegiatan audit yang ditujukan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit;
 7. Memantau, menganalisis dan melaporkan atas kecukupan tindak lanjut hasil audit termasuk didalamnya melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan (*audit recommendation*) yang telah disarankan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
 8. Berperan sebagai konsultan internal (*internal consultant*) bagi pihak-pihak internal Perseroan yang membutuhkan. Antara lain, dengan memberikan tanggapan atas usulan kebijakan atau sistem dan prosedur untuk dapat memberikan opini bahwa dalam kebijakan ataupun sistem dan prosedur telah terkandung prosedur pengendalian internal yang memadai. Dengan keterlibatan ini tidak berarti atas hal-hal tersebut dikecualikan dari ruang lingkup audit (*audit work scope*);
 9. Bekerja sama dengan Komite Audit dengan mengacu kepada kode etik dan kepentingan Perseroan;
 10. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal;
 11. Melakukan evaluasi secara berkesinambungan terhadap mutu kualitas audit (*quality assurance*) yang dilaksanakan;
 12. Melakukan pemeriksaan khusus (*special audit*) apabila diperlukan;
 13. Memelihara sikap mental yang independen dalam melakukan audit yang tercermin dari laporan yang lengkap, obyektif serta berdasarkan analisis yang cermat tidak memihak; dan
4. Conducting examination and assessment of the efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities. Including making analysis and assessment of the efficiency and effectiveness through direct examination (*on-site audit*) and indirect supervision (*off-site audit*);
 5. Providing recommendations and objective information about the activities under review at all levels of management. Identify possibilities to improve and enhance the efficient use of resources and funds. Provides information and suggestions for improvement on activities to be audited at all levels of management;
 6. Creating and submitting audit reports to the President Director and the Board of Commissioners. Providing periodic reports concerning the summary results of audit activities addressed to the President Director and the Board of Commissioners and with the copy to Audit Committee;
 7. Monitoring, analyzing and reporting on the adequacy of management's follow-up to result of the audit report, including implementation of corrective measures (*audit recommendation*) that have been reported to the President Director and the Board of Commissioners;
 8. Serving as an internal consultant to the Company's internal parties as requested. For example, reviewing proposed policies, procedures and systems to opine on the adequacy of internal controls. Such engagements do not exclude these areas from the audit work scope;
 9. Working together with the Audit Committee considering the code of ethics and the Company's interest;
 10. Establishing a program to evaluate the quality of internal audit activities;
 11. Continuously evaluating the quality of all audit activities (*quality assurance*) performed;
 12. Conducting special audit(s) as needed;
 13. Maintaining an independent mental attitude during performing the audit which is reflected in the complete audit report that is objective and based on careful analysis an impartial; and

14. Departemen Audit Internal dan Auditor Internal harus independen dari kegiatan audit dalam arti:
- Tidak memiliki kepentingan atas obyek atau kegiatan yang diaudit.
 - Tidak memiliki wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari Pihak yang Diaudit.
 - Tidak melakukan audit terhadap kegiatan yang sebelum (selama enam bulan terakhir) menjadi tanggung jawabnya.
 - Bagi Auditor Internal yang pernah terlibat aktif dalam pengembangan sistem (*System Development Life Cycle*) selama enam bulan terakhir dilarang melakukan audit terhadap sistem tersebut.

WEWENANG DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL

Dalam menjalankan fungsi audit Departemen Audit Internal berwenang untuk:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya seperti akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit tanpa campur tangan dari pihak manapun;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- Mewawancarai karyawan dan bilamana dianggap perlu dapat melakukan pengamanan terhadap dokumen, warkat (*voucher*) dan benda yang dianggap berkaitan dengan kegiatan yang diaudit;
- Melakukan inspeksi setempat terhadap Pihak yang Diaudit, pelanggan dan pemasok dalam rangka memastikan kebenaran data atau temuan hasil audit;
- Jika diperlukan dapat meminta pendapat dari tenaga ahli (profesional) dari dalam maupun luar Perseroan;
- Bekerja dengan bebas tanpa campur tangan ataupun tekanan dari pihak manapun; dan
- Memiliki kebebasan dalam menetapkan metodologi, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan.

14. Internal Audit Department and Internal Auditor should be independent in audit activities which means:
- Has no interest on the object or activity being audited.
 - Has no authority and responsibility to carry out operational activities of the Auditee.
 - Has no conduct an audit of activities before to his/her responsibilities (during the last six months).
 - For Internal Auditors who have been involved actively in the development of a system (*System Development Life Circle*) during the preceeding six months are prohibited from conduction an audit of that system.

AUTHORITY OF THE INTERNAL AUDIT DEPARTMENT

In carrying out internal audit functions, the Internal Audit Department is authorized to:

- Access all of the Company's relevant information (e.g., records, employees, resources, funds and other assets) relating to the audit without any interference from any party;
- Communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or the Audit Committee and it's respective members;
- Conduct periodic and ad hoc meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or the Audit Committee;
- To coordinate activities with the work of external auditors;
- Interview employees and when deemed necessary, secure documents, certificates (*voucher*) and the objects that are considered related to the activities being audited;
- Conduct on-site inspection of the Auditee, customers and suppliers in order to ensure the accuracy of the data or audit findings;
- If necessary, seek the advice of pertinent experts (professional) from inside and outside the Company;
- Work freely without interference or pressure from any party; and
- Having the free right in defining the methodology, techniques and approaches that audit will be conducted.

KEGIATAN DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL TAHUN 2017

Departemen Audit Internal melaksanakan kegiatan dibawah ini di tahun 2017:

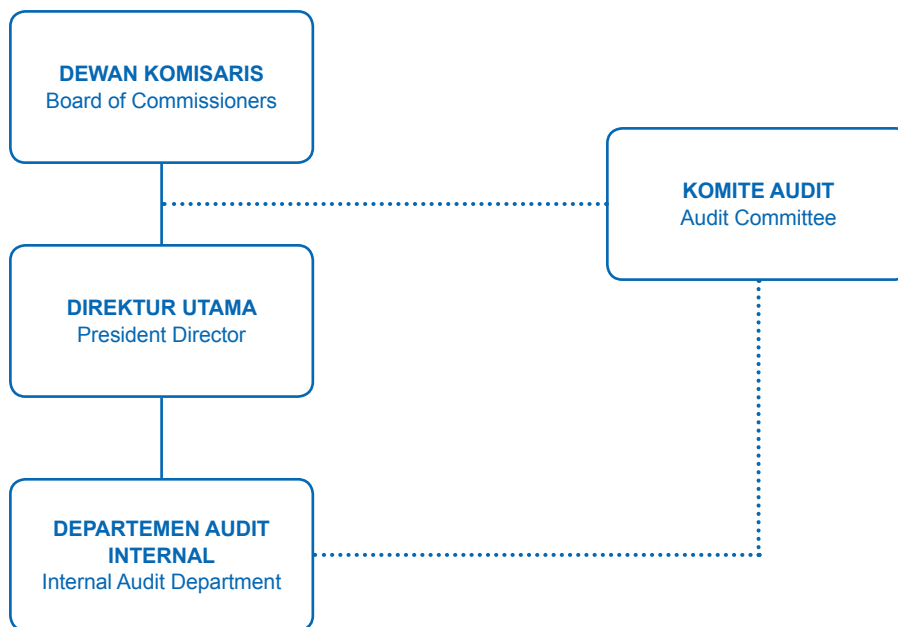
1. Melakukan audit terhadap simpanan kas dan penggunaan kas Perseroan;
2. Melakukan observasi atas inventarisasi fisik setiap triwulanan;
3. Bekerjasama dengan auditor eksternal mengenai hal-hal terkait audit;
4. Melakukan audit khusus sesuai permintaan Direksi;
5. Melakukan audit proyek kolokasi;
6. Melakukan audit terhadap aset perusahaan untuk kategori selain menara termasuk memeriksa proses bisnisnya, uang muka karyawan dan sewa lahan;
7. Memberikan tinjauan atas kebijakan, sistem dan prosedur dan memberikan rekomendasi atas kelayakanan pengendalian internal pada akun utang, *human resources*.

ACTIVITIES OF THE INTERNAL AUDIT DEPARTMENT IN 2017

The Internal Audit Department conducted the following activities in 2017:

1. Performed regular audit such cash usage of Company;
2. Observed the physical inventories taken on a quarterly basis;
3. Liaised with external auditors on audit related matters;
4. Performed special audit as requested by the Board of Director;
5. Performed an audit of colocation projects;
6. Performed an audit of ground lease, company asset for non-tower category including reviewing its business process, and advance employee;
7. Reviewed policies, systems and procedure and recommended the adequacy of company's internal controls for: account payable, human resources.

STRUKTUR DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL INTERNAL AUDIT DEPARTMENT STRUCTURE



.....
Garis Komunikasi
Communication Line

—————
Garis Tanggung Jawab dan/atau Otoritas
Responsibility and/or Authority Line

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Sistem Pengendalian Internal kami dirancang dan dijalankan oleh tim manajemen dan ditinjau kembali oleh Komite Audit yang independen. Bahwa dengan internal kontrol yang kuat, maka kami menerima laporan keuangan yang wajar dan tanpa pengecualian dari auditor eksternal.

Our internal control systems are designed and implemented by the management team and are reviewed by our Independent Audit Committee. Due to our solid internal control systems, we received a clean and unqualified audited financial report from our external auditor.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT SYSTEM

Sistem Manajemen Risiko Perseroan dijalankan oleh dua divisi yaitu: Financial Controller dan Sekretaris Perusahaan. Financial Controller mengatur tim yang mengevaluasi dan menangani risiko yang berasal dari aktivitas operasional dan keuangan. Sekretaris Perusahaan mengatur tim yang mengevaluasi dan menangani risiko terkait dengan hukum dan kepatuhan peraturan.

The Company's Risk Management System is operated by two divisions, the Financial Controller and the Company Secretary. The Financial Controller manages a team that evaluates and addresses risks arising from operational and financial activities. The Corporate Secretary manages a team that evaluates and addresses risks related to legal and regulatory compliance.

Untuk mencapai pertumbuhan, Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan jumlah dan cakupan dari basis pelanggan dengan melakukan akuisisi, pembangunan menara baru, dan menggalakan kolokasi. Untuk mengelola pertumbuhan secara efektif, Perseroan mengimplementasikan kebijakan untuk mengawasi dan mengendalikan sistem operasional, prosedur, dan manajemen menara secara tepat waktu. Dalam melakukan mitigasi akan adanya kendala dalam pembiayaan, ketersediaan atau kemampuan untuk menyewa tanah atau ruang, dan kualitas kontraktor. Perseroan melakukan studi kelayakan terkait dengan kebutuhan pendanaan, target akuisisi dan pemilihan kontraktor. Perseroan memiliki persyaratan yang komprehensif untuk melaksanakan akuisisi maupun pembangunan menara baru. Untuk memastikan proses yang lancar dalam melakukan perpanjangan sewa lahan, Perseroan

In supporting growth, the Company seeks to increase the number and scope of customer base sites by acquiring and constructing towers and encouraging colocations. To manage growth effectively, the Company has implemented policies to monitor and control operational systems, procedures and tower management on a timely basis. To mitigate the risk of difficulties in financing, availability or ability to lease land or space, and risks related to the quality of contractors, the Company conducts feasibility studies related to the funding needs, the feasibility of the sites acquisition targets, and the selection of contractors. The Company has comprehensive requirements to implement the acquisition and construction of new towers. To assure a smooth process for land lease renewals, the Company has a policy to begin negotiations as early as possible for the terms and conditions of the ground

mempunyai kebijakan untuk memulai negosiasi sedini mungkin syarat dan kondisi perpanjangan masa sewa lahan untuk lokasi menara sebelum masa sewa lahan berakhir. Dengan kebijakan ini, maka Perseroan memiliki waktu yang cukup untuk melihat lokasi lain yang dapat menggantikan lokasi tersebut, dan karenanya, memastikan bahwa Perseroan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa ada gangguan yang berarti terhadap operasional Perseroan.

Dalam melakukan mitigasi risiko terkait dengan pelanggan, Perseroan senantiasa fokus dalam menjalin hubungan yang baik dan melakukan tinjauan berkala atas kemampuan finansial dari operator, dimana Perseroan juga terus mengusahakan peningkatan jumlah penyewa kolokasi untuk meminimalisir dampak negatif yang disebabkan oleh ketidakmampuan finansial dari setiap pelanggan. Selain itu, Perseroan berusaha tanggap untuk menyediakan lokasi menara sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan memastikan bahwa kami mampu menyediakan menara dengan kualitas terbaik di pasar. Perseroan berharap kebijakan ini akan dapat mencapai diversifikasi pelanggan yang dapat mengurangi ketergantungan pelanggan. Perseroan juga telah memiliki kontrak jangka panjang dengan para pelanggan/operator sehingga jika terjadi merger atau konsolidasi operator, pendapatan Perseroan akan tetap terjaga.

Pemeliharaan dari lokasi menara milik Perseroan dilakukan dengan lingkup kerja yang telah diawasi oleh personel-personel manajemen kunci. Pemeliharaan sehari-hari dari lokasi menara milik Perseroan, yang meliputi tindakan pemeliharaan dan perbaikan, dibantu oleh penyedia-penyedia jasa pihak ketiga. Perseroan juga melakukan audit secara periodik untuk tujuan menjaga kualitas dan untuk memastikan bahwa lokasi menara milik Perseroan berfungsi dengan baik dan dipelihara sesuai dengan standar.

Perseroan menerapkan kebijakan mengenai kepentingan karyawan-karyawannya termasuk dengan pemberian remunerasi, fasilitas dan tunjangan yang kompetitif, memberikan kesempatan pengembangan karir serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi para karyawan. Perseroan yakin bahwa hal tersebut dapat menciptakan *corporate culture* dengan rasa memiliki yang dapat meminimalisasi risiko kehilangan manajemen kunci maupun tenaga ahli. Perseroan juga memberikan kesempatan peningkatan kemampuan karyawan melalui pemberian program pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu Perseroan juga menerapkan prinsip

lease renewals of telecommunication towers before the ground lease expires. With this policy, the Company has sufficient time to look at other locations that can replace those locations, thereby assuring that the Company can meet customer's needs without any significant interference to Company operations.

To mitigate the risks associated with customers, the Company focuses on maintaining good relationships with costumers and conducts periodic reviews of the customer's financial capacity. The Company continues to seek to increase the number of colocation tenants to minimize the adverse effects caused by financial incapacity of any single customer. In addition, the Company strives to be responsive in providing tower sites in accordance with the needs of the customer and assuring that we provide the highest quality towers in the market. The Company expects that this policy will achieve customer diversification and reduce customer dependence. The company has long-term contracts with customers/operators so that if a merger or consolidation of the operator occurs, the Company's revenue will remain intact.

Maintenance of tower sites which are owned by the Company is performed under a scope of work that is monitored by management personnel. The day-to-day maintenance of the Company's tower sites, encompassing both preventive and corrective maintenance, is outsourced. The Company conducts site audits on a periodic basis for quality control purposes and to ensure that the Company's tower sites are functioning properly and maintained to its standards.

The Company implements policies with regard to the interests of its employees, including competitive remuneration, allowances and benefits. Protelindo provides career development opportunities and creates a conducive working environment for employees. The Company believes that it can create a corporate culture with a sense of belonging that can help minimize the risk of loss of key management and technical experts. The Company also provides opportunities to increase the knowledge base of employees through the provision of ongoing training programs. The Company places strong emphasis on implementing prudent financial principles,

keuangan secara hati-hati, termasuk melakukan perencanaan keuangan yang matang, dan konsisten serta tetap menjaga rasio keuangan yang kuat. Perseroan dapat menjaga pertumbuhan dan mendukung cadangan kas dan posisi arus kas yang kuat dan mampu untuk menjalankan kegiatan usaha secara efisien.

Dalam mengatasi risiko terkait regulasi dan perizinan, Perseroan memantau perkembangan lokasi menara yang akan dibangun, diakuisisi maupun yang telah ada. Selain itu, Perseroan menjaga, membina dengan regulator dan masyarakat setempat agar kelangsungan sewa tanah, pembangunan lokasi menara, dan akuisisi lahan Perseroan secara aktif bertemu dengan masyarakat untuk melakukan sosialisasi manfaat ekonomis dari menara kepada masyarakat sekitarnya.

Kinerja keuangan Perseroan secara umum dipengaruhi risiko pasar seperti risiko tingkat suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko harga komoditas. Dalam mengelola risiko nilai tukarnya, Perseroan dan entitas anak memiliki lindung nilai sebagian melalui pendapatan berdenominasi dalam Rupiah dan Dolar Amerika Serikat. Perseroan dan entitas anak belum pernah mengalami ketidakseimbangan yang signifikan antara pendapatan yang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan kebutuhan pembayaran. Perseroan juga menggunakan utang untuk membiayai kegiatan operasional dan meminimalisir eksposur risiko tingkat suku bunga dengan menandatangani kontrak lindung nilai dengan menukar tingkat suku bunga pinjaman mengambang menjadi tingkat suku bunga tetap selama durasi pinjaman. Sejak tanggal diterbitkannya Laporan Tahunan ini, Perseroan dan entitas anak belum menggunakan lindung nilai untuk seluruh pinjaman, risiko suku bunga atau komoditas. Kedepannya Perseroan akan mempertimbangkan untuk melakukan kebijakan lindung nilai untuk memitigasi risiko tingkat suku bunga, nilai tukar, dan komoditas.

including financial planning, consistent with maintaining solid financial performance. The Company's goal is to maintain growth and support Protelindo's cash reserves as a strong cash flow position enables the Company to conduct business efficiently.

In order to mitigate regulatory and licensing-related risks, the Company monitors developments related to existing sites or sites that will be used for construction or to be acquired. In addition, the Company maintains a good relationship with regulators and local communities to support the continuity of the land lease, the construction of tower sites, and the acquisition of land leases. The Company proactively meets with the community to socialize the economic benefits of the tower to the surrounding community.

The Company's results are affected by general market risks such as interest rate risk, exchange rate risk and commodity price risk. In managing its exchange rate risk, the Company and subsidiaries have a partial natural hedge as the revenues are denominated in both Rupiah and US Dollars. The Company and subsidiaries have not experienced a significant imbalance between revenues denominated in US Dollars with US Dollars payment needs. The Company also uses debt to fund operations and minimizes interest rate risk exposure by entering into hedging contracts to swap floating interest rate loans into fixed interest rates for the duration of the loan. As of the date of this report, the Company and subsidiaries are not hedging the entire loan, interest rate or commodities risk. In the future the Company will consider revising hedging policy to mitigate interest rate risk, foreign exchange and commodities risk.

FAKTOR RISIKO

RISK FACTORS

RISIKO TERKAIT DENGAN INDONESIA

Perseroan dan Protelindo, keduanya didirikan di Indonesia. Hampir seluruh aset serta operasionalnya berada di Indonesia. Akibatnya, seluruh kebijakan pemerintah serta kondisi politik, ekonomi, hukum dan sosial di Indonesia dapat menimbulkan dampak material dan negatif terhadap bisnis kami, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan. Tim manajemen Perseroan dan Protelindo secara aktif memantau risiko-risiko tersebut dan potensi risiko lainnya yang berhubungan dengan Negara serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempersiapkan Perseroan dan Protelindo menghadapi risiko tersebut yang mungkin terjadi.

Risiko yang paling menonjol khusus untuk Indonesia yang secara langsung dapat mempengaruhi usaha, kondisi keuangan, operasional, dan prospek Perseroan dan Protelindo, meliputi:

1. Ketidakstabilan sosial dan politik di Indonesia;
2. Indonesia terletak di zona gempa bumi, dan terpengaruh risiko geologi dan bencana alam yang signifikan yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi;
3. Serangan teroris dan aktivitas teroris, serta gejolak peristiwa-peristiwa lainnya dapat menyebabkan gejolak sosial dan ekonomi yang dapat menimbulkan dampak material dan negatif terhadap bisnis kami;
4. Gerakan buruh dan tindakan anarkis yang dilakukan buruh dalam bisnis kami atau mitra usaha komersial kami dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja dan kondisi keuangan kami;
5. Perubahan ekonomi global atau regional dapat secara material dan negatif mempengaruhi keadaan ekonomi Indonesia dan pada akhirnya mempengaruhi bisnis kami; dan
6. Penurunan pemeringkatan kredit Indonesia dan perusahaan-perusahaan Indonesia dapat secara material dan negatif mempengaruhi bisnis kami dan kemampuan kami untuk memperoleh pembiayaan.

RISKS RELATED TO INDONESIA

The Company and Protelindo are both incorporated in Indonesia. Nearly all of our assets and operations are located in Indonesia. As a result, government policies and the political, economic, legal and social conditions in Indonesia could materially affect our business, financial condition, results of operations and prospects. The management teams of the Company and Protelindo actively monitor these risks and other potential country risks and take the necessary steps to prepare the Company and Protelindo for any country-related risks that may occur.

The most notable risks specific to Indonesia that may directly affect the business, financial condition, operations and prospects of the Company and Protelindo include the following:

1. Political and social instability;
2. Indonesia is located in an earthquake zone and is subject to geological risks and natural disasters that could lead to economic loss;
3. Terrorist attacks and terrorist activities and other destabilizing events could lead to economic and social volatility in Indonesia, which may materially and adversely affect our business;
4. Labor activism and labor unrest in our business or the business of our commercial partners may adversely affect our performance and financial condition;
5. Regional or global economic changes may materially and adversely affect the Indonesian economy and ultimately our business; and
6. Downgrades of the credit ratings of Indonesia and Indonesian companies could materially and adversely affect our business and our ability to obtain financing.

RISIKO YANG TERKAIT DENGAN PERSEROAN

Selain risiko yang terkait dengan Indonesia, di bawah ini adalah beberapa faktor risiko yang secara signifikan dan langsung dapat mempengaruhi bisnis dan dapat mempengaruhi kondisi keuangan kami. Kegiatan, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan dapat terpengaruh oleh salah satu risiko berikut ini:

1. Kelangsungan usaha Perseroan bergantung kepada kegiatan operasional dan kondisi keuangan anak perusahaan, Protelindo.

Investasi utama dari Perseroan yaitu akuisisi sebesar 99,999% kepemilikan saham Protelindo. Tidak terdapat jaminan bahwa Protelindo akan selalu memberikan kontribusi laba dan pengembalian investasi yang positif kepada Perseroan. Penurunan kinerja keuangan Protelindo akan dapat mengakibatkan dampak secara material dan negatif pada kinerja dan prospek Perseroan.

2. Risiko Investasi

Risiko investasi dapat timbul karena adanya fluktuasi tingkat suku bunga, biaya modal dan pembagian dividen terhadap nilai aset dalam portofolio perusahaan yang dimiliki Perseroan. Kegagalan dalam mengantisipasi risiko ini dapat menurunkan harga saham Perseroan.

3. Risiko Peraturan Pemerintah

Mengingat usaha Perseroan bergerak di bidang yang terpengaruh dengan adanya perubahan peraturan dan kebijakan Pemerintah, seperti peraturan baru dalam perpajakan, hukum yang membatasi investasi dan kepemilikan perusahaan pada sektor menara. Selain itu terdapat pula kemungkinan adanya perubahan pada hukum dan peraturan daerah yang mempengaruhi perizinan dan lisensi pada sektor menara. Adanya perubahan dalam peraturan atau kebijakan Pemerintah secara material dan negatif mempengaruhi kinerja usaha dan prospek Perseroan.

Akhir-akhir ini, beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia juga mengeluarkan peraturan tentang rencana lokasi menara dan pajak atas menara. Dengan mengimplementasikan rencana penempatan lokasi menara, Pemerintah dapat merelokasi menara yang ada dan membongkar menara lainnya yang tidak terdapat pada rencana tersebut. Berdasarkan Undang Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah dapat menarik pembayaran retribusi sebagai biaya jasa untuk IMB dan izin gangguan yang

RISKS RELATED TO THE COMPANY

In addition to the risks related to Indonesia, below are some of the significant risk factors that directly affect our business and could impact our financial condition. The activities, financial condition, results of operations and prospects of the Company could be materially and adversely affected by any of these risks:

1. The Company's business continuity depends on the operating activities and financial condition of our subsidiary, Protelindo.

The Company's main investment is its acquisition of 99.999% of the ownership interests in Protelindo. There is no guarantee that Protelindo will continue to deliver profitable results and positive investment returns to the Company. Any decline of financial performance of Protelindo will cause a material adverse effect on the Company's financial performance and prospects.

2. Investment Risk

Investment risk can arise due to fluctuations in interest rates, equity prices and dividend distributions against the value of the assets in the portfolio companies owned by the Company. The failure of anticipating such risk may result in a decrease in the Company's share value.

3. Government Regulation Risk

The Company's business investments operate in a sector that is prone to changes in government regulations and policies such as new tax regulations and laws limiting investment in and ownership of companies in the tower sector. There can also be changes in regional and local laws and regulations that affect permitting and licensing in the tower sector. Any changes in these government regulations or policies could have a material adverse effect on the Company's performance and prospects.

Recently, several regional governments in Indonesia issued regulations concerning tower location planning and tower taxes. By implementing the tower location plan, the government may relocate existing towers and dismantle others which are not accommodated in the plan. Under Law No. 28/2009 regarding Regional Taxes and Regional Retribution, local governments can collect retribution payments as a service payment for both building permits and nuisance permits issued to a private entity. Local governments calculate retribution payments for building

dikeluarkan untuk pihak swasta. Pemerintah daerah menghitung besaran pembayaran retribusi untuk IMB dan izin gangguan berdasarkan peraturan setempat. Rumus untuk menghitung pembayaran retribusi untuk IMB dan izin gangguan berbeda dari satu pemerintah daerah yang lain.

4. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Valuta Asing

Perseroan menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar valuta asing, terutama pada nilai tukar Rupiah ke Dolar Amerika Serikat karena Protelindo mempunyai utang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, sedangkan sebagian besar pendapatan Perseroan dalam mata uang Rupiah. Terlebih lagi, Perseroan melaporkan pembukuan keuangannya dalam Rupiah, sementara pendapatan secara signifikan didapat dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

permits and nuisance permits based on local regulations. The formula for calculating retribution payments for building permits and nuisance permits varies from one local government to another.

4. Foreign Exchange Rates Fluctuation Risk

The Company is exposed to fluctuations in foreign exchange rates, primarily in the exchange rate of the Indonesian Rupiah to the US Dollar. Protelindo has incurred US Dollar denominated debt while the majority of the Company's revenues are denominated in Indonesian Rupiah. In addition, the Company reports its financials in Indonesian Rupiah while it generates a significant amount of revenues in US Dollar.

RISIKO YANG TERKAIT DENGAN BISNIS DAN KEUANGAN PROTELINDO

Selain risiko yang terkait dengan Indonesia, di bawah ini adalah beberapa faktor risiko yang secara signifikan dan langsung mempengaruhi industri menara. Faktor risiko yang dijelaskan dibawah ini, antara lain dapat memberikan dampak. Kegiatan, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan dapat terpengaruh oleh salah satu risiko berikut ini:

1. Protelindo mungkin menghadapi kompetisi dan persaingan harga dalam industri penyewaan menara.
2. Porsi yang besar pendapatan Protelindo hanya berasal dari beberapa pelanggan dan Protelindo mungkin rentan terhadap risiko terkait kemampuan pelanggan, termasuk kemampuan kredit pelanggan.
3. Kami mungkin memiliki, dan mungkin menghadapi kesulitan untuk mendapatkan izin dan persetujuan yang diperlukan untuk beberapa menara, jaringan kabel serat optik dan VSAT serta lisensi dan izin-izin yang ada mungkin tidak memadai, diubah, dicabut atau tidak diperpanjang.
4. Kegiatan usaha Protelindo dapat terkena dampak negatif akibat perubahan maupun penafsiran atau implementasi atas peraturan perundangan yang berlaku.
5. Menurunnya permintaan atas komunikasi nirkabel atau menurunnya permintaan atas ruang menara atau tidak diperpanjangnya kontrak sewa menara mungkin dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Protelindo.
6. Merger atau konsolidasi antar pelanggan Protelindo mungkin dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Protelindo.

RISKS RELATED DIRECTLY TO THE BUSINESS AND FINANCE OF PROTELINDO

In addition to the risks related directly to the Company, below are some of the significant risk factors that directly affect the tower industry. The activities, financial condition, results of operations and prospects of Protelindo could be materially and adversely affected by any of these risks:

1. Protelindo may face substantial competition and pricing pressure in the tower leasing industry.
2. A large portion of Protelindo's revenue is derived from a small number of customers. Protelindo may be exposed to risks related to the creditworthiness of Protelindo's customers.
3. The Company may have difficulty obtaining the required licenses and permits for some of the towers, fiber optic cable network and VSATs. In addition, existing licenses and permits may be inadequate, amended, revoked or not renewed.
4. Protelindo's business activities may be negatively affected by any adverse changes in the interpretation and implementation of regional regulations and legislation.
5. A decrease in demand for wireless communications or a decrease in demand for tower space or the failure to renew tower lease agreements might materially and adversely affect Protelindo's business, prospects, results of operations and financial condition.
6. Merger or consolidation among Protelindo's customers might have a material adverse effect on Protelindo's business, prospects, results of operations and financial condition.

7. Protelindo mungkin tidak dapat mempertahankan atau menarik manajemen kunci dan tenaga ahli.
 8. Kegagalan untuk memperoleh pembiayaan dengan persyaratan yang wajar dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan strategi pertumbuhan Protelindo.
 9. Kemampuan Protelindo untuk membangun menara baru mungkin tergantung pada beberapa faktor yang berada di luar kendali Protelindo, seperti ketersediaan atau kemampuan untuk menyewa tanah atau ruang rooftop.
 10. Protelindo mungkin tidak dapat secara efektif mengelola pertumbuhan melalui peningkatan jumlah penyewa dan pembangunan dan akuisisi menara.
 11. Ketidakmampuan Protelindo untuk melindungi hak sewa lahan mungkin dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan hasil kinerja operasional.
 12. Bisnis Protelindo tunduk pada peraturan pemerintahan dan perubahan undang-undang yang sekarang atau yang akan datang, yang mungkin dapat menghambat kemampuan bisnis Protelindo pada saat ini.
 13. Pertumbuhan industri dan bisnis Protelindo dapat terkena dampak dari sejumlah kebijakan pemerintah.
 14. Protelindo memiliki kemungkinan menghadapi penolakan dari masyarakat setempat terhadap beberapa lokasi menara.
 15. Protelindo mungkin rentan terhadap risiko tingkat suku bunga.
 16. Entitas anak kemungkinan memiliki risiko terhambatnya pembangunan atau pengembangan jaringan kabel fiber optik atau risiko gangguan terhadap jaringan kabel fiber optiknya.
 17. Adanya dugaan risiko kesehatan yang berasal dari emisi radio dan beberapa perkara hukum dan publikasi terkait dugaan tersebut, terlepas dari benar tidaknya klaim tersebut, mungkin dapat berdampak negatif terhadap operasional Protelindo.
 18. Teknologi baru mungkin dapat mengakibatkan kegiatan usaha penyewaan ruang pada menara Protelindo kurang diminati oleh pelanggan potensial dan berakibat pada melambatnya pertumbuhan.
 19. Bisnis operasional Protelindo mungkin tergantung pada ketersediaan dari persediaan tenaga listrik yang cukup dan tidak terganggu.
 20. Jumlah utang Protelindo mungkin dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan.
 21. Depresiasi atau volatilitas nilai tukar mata uang Rupiah dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Protelindo.
7. Protelindo may be unable to retain and attract key management and skilled personnel.
 8. Failure to obtain financing on reasonable terms may adversely affect Protelindo's business and growth strategy.
 9. Protelindo's ability to construct new towers may depend on a number of factors beyond its control, such as the availability of, and its ability to lease, ground or rooftop space.
 10. Protelindo may be unable to effectively manage its growth, including through increasing the number of tenancies and the construction and acquisition of towers.
 11. Any inability to protect Protelindo's real property rights might adversely affect its business and operating results.
 12. Protelindo's business is subject to government regulations and any changes in current or future laws or regulations might restrict Protelindo's ability to carry on Protelindo's business.
 13. The growth of the industry and business may be affected by certain government policies.
 14. Protelindo may experience local community opposition to some of its tower sites.
 15. Protelindo may be exposed to interest rate risk.
 16. The subsidiaries may experience delays in construction or development of the fiber optic cable network or disruptions to its fiber optic cable network or downtime at Protelindo tower sites.
 17. Allegations of health risks from or related to radio emissions, and any lawsuits and publicity relating to such allegation, regardless of merit, might adversely affect Protelindo's operations.
 18. New technologies might make Protelindo's tower leasing business less desirable to potential tenants and result in slower growth.
 19. Protelindo's business operations may depend on the availability of an adequate and uninterrupted supply of electrical power.
 20. Protelindo's indebtedness might adversely affect its business, prospects, results of operations and financial condition.
 21. Depreciation or volatility in the value of the Rupiah may adversely affect Protelindo's business, prospects, results of operations and financial condition.

22. Protelindo mungkin rentan terhadap risiko terkait kinerja yang buruk dari kontraktor-kontraktor pihak ketiga yang menyediakan berbagai jasa bagi Protelindo.
23. Revaluasi kami atas properti investasi mungkin dapat berfluktuasi dan mempengaruhi laba bersih kami.
24. Menara dan infrastruktur terkait milik Protelindo dapat mengalami kerusakan akibat bencana alam dan kejadian yang tidak dapat diperkirakan oleh Protelindo dimana asuransi yang dimiliki Protelindo tidak memberikan perlindungan yang memadai.

22. Protelindo may be exposed to risks related to the non-performance of third-party contractors, who provide Protelindo with various services.
23. Revaluation of investment properties might fluctuate and adversely affect net profit.
24. Towers, database, operations center or computer systems may be affected by natural disasters and other unforeseen events for which insurance may not provide adequate coverage.

PERMASALAHAN HUKUM

LEGAL MATTERS

Kami secara berkala terlibat dalam permasalahan hukum yang muncul dari kegiatan bisnis sehari-hari. Sedangkan hasil dari masalah-masalah tersebut tidak dapat diprediksi dengan pasti, kami memperkirakan tidak ada hal-hal yang tertunda yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan operasional kami.

The Company is periodically involved in legal proceedings that arise in the ordinary course of business. While the outcome of these proceedings cannot be predicted with certainty, we do not expect any pending matters to have a material adverse effect on our financial condition or results of operations.

SANKSI ADMINISTRATIF

ADMINISTRATIVE SANCTIONS

Selama tahun 2017, tidak ada sanksi administratif yang material, yang dikenakan oleh pihak otoritas (Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Bursa Efek, dan otoritas lainnya) kepada Perseroan, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi.

Throughout 2017, there were no material administrative sanctions imposed by authorities (Financial Services Authority, Bank Indonesia, Stock Exchange, and other authorities) on the Company, or members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

SISTEM WHISTLE BLOWER

WHISTLE BLOWER SYSTEM

Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip GCG dan untuk mensosialisasikan praktik bisnis yang transparan berdasarkan nilai Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, kami telah membuat *Whistle Blower System* ("WBS") dan membentuk Komite WBS berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 9 November 2014.

WBS adalah suatu sistem independen yang memperbolehkan pelaporan bersifat rahasia mengenai dugaan tindakan yang salah seperti:

- Penipuan/kecurangan/penggelapan;
- Pelanggaran hukum dan peraturan; dan
- Pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan, perjanjian kerja, Kode Etik, dan kebijakan tertulis lainnya dari Perseroan;

dalam setiap kasus yang dilakukan oleh karyawan, Direktur, Komisaris, vendor dan pemangku kepentingan lainnya dari Grup.

PERLINDUNGAN WHISTLE BLOWER

Kami akan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor dan akan memberikan perlindungan dari pembalasan.

MENANGANI PENGADUAN

Untuk setiap pengaduan sehubungan dengan dugaan pelanggaran perusahaan atau kecurangan, pihak manapun dapat melaporkan pengaduan melalui email ke whistleblower.ptsmn@gmail.com atau surat ke PO Box: 4534 JKP 10035. Kami telah membuat sebuah prosedur pelaporan sebagai panduan untuk mendata laporan kepada Komite WBS. Setelah menerima pengaduan, Komite WBS akan melakukan sebagai berikut:

- Mencatat pengaduan;
- Mengidentifikasi dan mengklasifikasi jenis pengaduan;
- Melakukan investigasi untuk menentukan kebenaran dari pengaduan;
- Membuat rekomendasi untuk tindakan perbaikan;

In order to enhance the implementation of GCG principles and to promote transparent business practices based on the Company's ethics and prevailing laws and regulations, we have established a Whistle Blower System ("WBS") and formed a WBS Committee based on Resolutions of the Board of Commissioners of the Company dated November 9, 2014.

The WBS is an independent system that allows for confidential reporting of suspected misconduct such as:

- Fraud;
- Violations of laws and regulations; and
- Violations of the Company Regulations, employment agreements, the Code of Conduct, and other written policies of the Company;

in activities conducted by employees, Directors, Commissioners, vendors and other stakeholders of the Group.

PROTECTION OF WHISTLE BLOWERS

The identity of the Whistle Blowers will be confidential and they will be protected from retaliation.

DEALING WITH A COMPLAINT

For every complaint about suspected company's violations or fraud, any party may submit their complaints via email at whistleblower.ptsmn@gmail.com or letter to PO Box: 4534 JKP 10035. We have established a reporting procedure as a guideline to file a report to the WBS Committee. Upon receiving the complaint, the WBS Committee will do the following:

- Log the complaint;
- Identify and classify the type of complaint;
- Perform an investigation to determine validity of the complaint;
- Draft recommendations for corrective actions;

- e. Memberitahukan perkembangan setiap tiga bulan sekali kepada Direksi Perseroan mengenai pengaduan status investigasi, laporan akhir, dan rekomendasi; dan
- f. Menyampaikan Laporan Akhir kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan komentar mereka (jika ada).

Direksi akan mengevaluasi rekomendasi dari Komite WBS dan memutuskan mengenai tindakan perbaikan yang tepat (misalnya sanksi, peringatan, pemecatan) sesuai dengan Peraturan Perusahaan, serta hukum yang berlaku.

KOMITE WBS

Kami telah membentuk Komite WBS untuk memantau masalah-masalah yang muncul melalui WBS. Dalam menangani dugaan pelanggaran Komite WBS bertanggung jawab untuk:

- a. Menerima dan mendokumentasikan informasi mengenai dugaan pelanggaran;
- b. Mengidentifikasi dan mengklasifikasi jenis pelanggaran;
- c. Melakukan investigasi;
- d. Menjaga kerahasiaan identitas Pelapor;
- e. Melindungi Pelapor dari pembalasan; dan
- f. Melaporkan kepada Dewan Komisaris setelah mendiskusikan dengan Direksi untuk mendapatkan komentar mereka mengenai tuduhan yang dilaporkan, status investigasi dan rekomendasi.

Komite WBS dapat menggunakan sumber baik dari dalam ataupun dari luar dalam menerima dan mendokumentasikan informasi mengenai dugaan pelanggaran dan kemudian mengklasifikasinya menjadi prioritas Tinggi, Sedang, atau Rendah.

HASIL PENANGANAN KASUS

Selama tahun 2017, Komite WBS tidak menerima pengaduan atas dugaan pelanggaran perusahaan atau kecurangan.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE SISTEM WHISTLE BLOWER

Seluruh anggota Komite Sistem *Whistle Blower* adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

- e. Update the Board of Directors of the Company quarterly regarding any complaints, the status of investigations, and recommendations; and
- f. Present a Final Report to the Board of Commissioners for their comments (if any).

The Board of Directors will evaluate the WBS Committee's recommendation and decide on the appropriate corrective action (e.g., sanctions, warning, dismissal) pursuant to the Company Regulations and applicable law.

THE WBS COMMITTEE

We have formed a WBS Committee to oversee issues raised through the WBS. In dealing with alleged offenses, the WBS Committee is responsible for:

- a. Accepting and documenting information of alleged violations;
- b. Identifying and classifying the type of violation;
- c. Performing investigations;
- d. Maintaining the confidentiality of identity of the informer's identity;
- e. Protecting the informer from retaliation; and
- f. Reporting to the Board of Commissioners after discussing with the Board of Directors to obtain their comments on the alleged violations reported, the status of the investigations and recommendations.

The WBS Committee can use both internal and external resources in accepting and documenting information regarding alleged violations, and then it may classify them as High, Medium and Low priority.

RESULT OF THE HANDLING OF AN ALLEGATION

During 2017, the WBS Committee did not receive any complaint about suspected company's violations or fraud.

STATEMENT OF INDEPENDENCE OF WHISTLE BLOWER SYSTEM COMMITTEE

All members of the Whistle Blower System Committee are independent parties, not having financial, management, share ownership and/or family relationships with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or Controlling Shareholders or business relationships with the Company that may affect the ability to act independently.

PEDOMAN PERILAKU PERUSAHAAN

CORPORATE CODE OF CONDUCT

Sebagai perusahaan publik tercatat di Indonesia, Perseroan termasuk Protelindo, tunduk pada peraturan-peraturan yang tegas dan standar perilaku yang tinggi, termasuk perilaku keuangan, manajemen risiko dan pengendalian internal yang sangat dipatuhi oleh Perseroan. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya dengan kejujuran dan integritas dan sesuai dengan seluruh kriteria hukum dan standar etika yang tinggi. Perseroan berkomitmen pada perlakuan yang adil dan merata terhadap seluruh karyawannya yang berdedikasi. Perseroan beserta Direktur, Komisaris dan karyawan harus mematuhi seluruh undang-undang, peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

ISI PEDOMAN PERILAKU

a. Transaksi yang Wajar

Semua Karyawan harus melakukan transaksi yang wajar dengan pelanggan, pemasok, kompetitor dan karyawan lain. Tidak seorangpun dapat mengambil keuntungan secara tidak wajar dari siapapun dengan cara manipulasi, penyembunyian, penyalahgunaan informasi istimewa, penyajian yang keliru mengenai fakta material atau praktik transaksi yang tidak wajar lainnya.

b. Kerahasiaan

Rahasia bisnis dan informasi rahasia Perseroan atau mitranya secara kontraktual dan pelanggan harus diperlakukan secara rahasia dan tidak boleh diungkapkan kepada pihak yang tidak berwenang. Kewajiban ini terus berlangsung setelah hubungan kerja berakhir. Dalam hal informasi rahasia harus diungkapkan karena suatu keputusan pengadilan yang berwenang atau otoritas administratif, Departemen Legal dan Kepatuhan yang terkait akan membantu dalam menentukan pengungkapan apa yang diperlukan. Sehubungan dengan informasi non-publik, setiap karyawan atau anggota Direksi yang memiliki informasi non-publik tersebut atau informasi rahasia Perseroan, harus mengetahui aturan perdagangan oleh orang dalam. Berdasarkan aturan perdagangan oleh orang dalam, dengan memperhatikan persyaratan tertentu atau

As a publicly listed company in Indonesia, the Company including Protelindo is subject to strict regulations and high standards of behavior, including financial behavior, risk management and internal control, which the Company strictly complies with. The Company is committed to conducting its business with honesty and integrity and in accordance with all applicable legal requirements and the highest ethical standards. The Company is committed to fair and equitable treatment of all of its employees. The Company and its Directors, Commissioners and employees must comply with all applicable laws, rules and regulations in Indonesia.

CONTENT OF THE CODE OF CONDUCT

a. Fair Dealing

All employees shall deal fairly with customers, suppliers, competitors and other employees. No person may take unfair advantage of anyone through manipulation, concealment, abuse of privileged information, misrepresentation of material facts or any other unfair-dealing practices.

b. Confidentiality

Business secrets and confidential information of the Company or its contractual partners and customers must be treated as confidential and must not be disclosed to unauthorized persons. This obligation continues after termination of employment. In case confidential information has to be disclosed due to a decision of a court or administrative authority, the Legal and Compliance Department will assist in determining what disclosure is required. In connection with the non-public information, any employee or Director who possesses such non-public information or confidential information of the Company shall be aware of the insider trading rules. Based on the insider trading rules, subject to certain requirements or exemptions set out in the insider trading rules, any person who possesses such non-public information shall be

pengecualian yang ditetapkan dalam aturan perdagangan oleh orang dalam, setiap pihak yang memiliki informasi nonpublik tersebut dilarang melakukan perdagangan atas efek Perseroan. Aturan perdagangan oleh orang dalam ini akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

- c. Konflik Kepentingan, Hadiah dan Keuntungan Pribadi
Karyawan harus menghindari situasi dimana kepentingan pribadi atau keuangan mereka bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Manajemen harus menghindari menempatkan bawahan dalam situasi yang demikian. Dalam hal ini, manajemen harus mendorong prinsip pengungkapan secara sukarela untuk mendeteksi potensi situasi yang demikian sebelum hal itu terjadi.

d. Aset Perseroan

Seluruh karyawan, pejabat dan Direktur harus melindungi harta Perseroan dan memastikan penggunaan harta secara efisien. Pencurian, kecerobohan dan pemborosan mempunyai dampak negatif yang langsung terhadap profitabilitas Perseroan. Seluruh harta Perseroan hanya dapat digunakan untuk tujuan bisnis yang sah. Dana atau harta Perseroan tidak boleh digunakan untuk hadiah atau bantuan. Ini tidak menghalangi hadiah atau bantuan yang memenuhi seluruh persyaratan berikut: (a) hadiah atau bantuan diberikan untuk tujuan bisnis yang sah dan bukan untuk menerima keuntungan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang setempat atau untuk menghindari kewajiban yang dikenakan oleh undang-undang setempat, (b) hadiah atau bantuan tersebut tidak terlalu besar jumlahnya dan diberikan sesuai dengan kebiasaan setempat yang berlaku dan tidak dianggap sebagai jenis suap atau melanggar undang-undang setempat sebagaimana yang ditafsirkan dan diterapkan, (c) pengungkapan hadiah atau bantuan tersebut tidak akan mempermalukan Perseroan atau menyebabkan kerugian bagi Perseroan dan (d) hadiah atau bantuan tersebut disetujui oleh manajer atau supervisor yang bertanggung jawab. Jika, dalam penilaian manajer atau supervisor yang bertanggung jawab, jumlahnya dianggap tidak kecil, maka manajer atau supervisor tersebut harus meminta pengarahan dari atasannya. Dana atau harta Perseroan tidak boleh digunakan untuk sumbangan kepada partai politik.

e. Laporan mengenai Pelanggaran

Setiap karyawan yang saat ini berada dalam suatu situasi atau melihat suatu kegiatan atau mengetahui suatu kegiatan yang kelihatannya bertentangan dengan

prohibited from trading in the Company's securities. This insider rule will be described further below.

- c. Conflict of Interests, Gifts and Personal Benefits
Employees must avoid situations where their own personal or financial interests conflict with the interests of the Company. Management should avoid placing subordinates in such situations. In this respect, management should encourage the principle of voluntary disclosure in order to detect any such potential situation before it occurs.

d. Company Assets

All employees and Directors should protect the Company's assets and ensure their efficient use. Theft, carelessness and waste have a direct negative impact on the Company's profitability. All of the Company's assets shall only be used for legitimate business purposes. Funds or assets of the Company must not be used for gifts or favors. This does not preclude gifts or favors which meet all of the following requirements: (a) the gifts or favors are made for a legitimate business purpose and not to obtain benefits not permitted by local laws nor to escape obligations imposed by local laws, (b) the gifts or favors are modest in amount and are made in accordance with prevailing local custom and are not considered to be in the nature of bribery or be otherwise in violation of local laws, (c) disclosure of the gifts or favors would not embarrass the Company nor result in any disadvantage for the Company and (d) the gifts or favors are authorized by the responsible manager or supervisor. If, in the judgment of the responsible manager or supervisor, the amount may not be construed as modest in amount, the manager or supervisor shall seek guidance from his or her superior. Funds or assets of the Company must not be used for donations to political parties.

e. Reporting of Violations

Any employee who is presently in a situation or contemplates an activity or has knowledge of an activity which appears to be contrary to the Code of Conduct should immediately

Pedoman Perilaku ini harus segera memberitahukan fakta-fakta yang bersangkutan kepada Wakil Direktur Utama di areanya atau kepada Direktur. Laporan tersebut akan diperlakukan secara rahasia dan Perseroan tidak akan bertoleransi dengan segala bentuk pembalasan terhadap pihak manapun untuk keluhan atau laporan yang dibuat dengan itikad baik.

f. Konflik Kepentingan

Karyawan diharapkan untuk menghindari kegiatan pribadi dan kepentingan keuangan yang dapat bertentangan dengan tanggung jawabnya terhadap Perseroan. Karyawan tidak boleh mencari keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain melalui penyalahgunaan jabatan mereka. Keputusan bisnis harus dibuat untuk kepentingan yang terbaik dari Perseroan dan tidak dimotivasi oleh kepentingan atau keuntungan pribadi. Oleh karena itu, sebagai kebijakan Perseroan, seluruh Direktur dan karyawan harus menghindari setiap konflik kepentingan yang nyata atau yang dirasakan.

g. Larangan Terhadap Perdagangan oleh Orang Dalam/ Transaksi oleh Orang Dalam

Setiap Direktur atau karyawan yang memiliki akses kepada, atau mengetahui mengenai, informasi material non-publik dari atau mengenai Perseroan dilarang untuk membeli, menjual atau memperdagangkan saham atau efek lainnya milik Protelindo. "Informasi material non-publik" termasuk setiap informasi, positif atau negatif, yang belum tersedia atau diungkapkan kepada publik dan yang mungkin berarti bagi investor, sebagai bagian dari seluruh gabungan informasi, dalam menetapkan apakah akan membeli atau menjual saham atau efek lainnya milik Protelindo. Orang dalam tersebut juga dilarang memberikan "petunjuk" mengenai informasi material non-publik, yang secara langsung maupun tidak langsung mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain, termasuk anggota keluarga, sanak saudara atau teman, sehingga mereka dapat melakukan perdagangan saham atau efek lainnya milik Protelindo. Selanjutnya, jika, selama masa kerja dengan Perseroan, seorang Direktur atau karyawan mendapatkan informasi material non-publik mengenai perusahaan lain, misalnya salah satu dari pelanggan atau pemasok atau afiliasi kami, atau seorang Direktur atau karyawan mengetahui bahwa Perseroan merencanakan untuk melakukan suatu transaksi besar dengan perusahaan lain (misalnya suatu akuisisi), Direktur atau karyawan tersebut dilarang melakukan perdagangan efek perusahaan lain tersebut.

make all pertinent facts known to his or her area Vice President or to a Director. Any such report will be treated confidentially and the Company will not tolerate retaliation in any form against any person for complaints or reports made in good faith.

f. Conflicts of Interests

Employees are expected to avoid personal activities and financial interests that could conflict with his or her responsibilities to the Company. Employees must not seek gain for them selves or others through misuse of their positions. Business decisions must be made in the best interest of the Company and not motivated by personal interest or gain. Therefore, as a matter of Company policy, all Directors and employees must avoid any actual or perceived conflict of interest.

g. Prohibitions Against Insider Trading/Insider Dealing

Any Director or employee who has access to, or knowledge of, material non-public information from or about the Company is prohibited from buying, selling or otherwise trading in our shares or other securities. "Material non-public information" includes any information, positive or negative, that has not yet been made available or disclosed to the public and that might be of significance to an investor, as part of the total mix of information, in deciding whether to buy or sell shares or other securities of the Company. Such insiders also are prohibited from giving "tips" on material non-public information, that is, directly or indirectly disclosing such information to any other person, including family members, other relatives and friends, so that they may trade in the shares or other securities of the Company. Furthermore, if, during the course of service with the Company, any Director or employee acquires material non-public information about another company, such as one of our customers, suppliers or our affiliates, or any Director or employee learns that the Company is planning to have a major transaction with another company (such as an acquisition), the Director or employee is restricted from trading in the securities of the other company.

PEDOMAN PERILAKU INI BERLAKU DI SEMUA LEVEL ORGANISASI

Pedoman Perilaku ini berlaku bagi semua karyawan dan semua individu yang menjabat sebagai Direktur Perseroan, dan dalam hal karyawan atau Direksi harus membagi informasi-informasi tertentu ke penasihat profesional yang telah terikat dengan Perseroan, maka karyawan atau Direksi harus memberitahukan pihak tersebut terkait dengan peraturan yang berlaku. Hal ini ditujukan untuk memberikan arahan terkait dengan prinsip Pedoman Perilaku Perusahaan. Nilai yang ada dalam Pedoman Perilaku harus dapat diartikan secara sama dengan kerangka kerja aturan hukum ataupun Pedoman Perilaku yang berlaku dimanapun Perseroan menjalankan aktivitas operasionalnya. Akan tetapi, Pedoman Perilaku ini tidak mencakupi semua kebijakan Perseroan dalam hal etika atau hal hukum; karyawan bertanggung jawab untuk mengetahui dan mematuhi semua kebijakan Perseroan (salah satu contohnya adalah Peraturan Perseroan) dan hukum, kaidah dan peraturan yang berlaku pada pekerjaan maupun posisi mereka.

SOSIALISASI DAN PENERAPAN PEDOMAN PERILAKU

Sosialisasi atas Pedoman Perilaku Perseroan dilakukan melalui informasi yang diberikan lewat akses intranet dan salinan tertulis untuk karyawan. Pedoman Perilaku berlaku untuk semua level dalam organisasi Perseroan.

THE CODE OF CONDUCT APPLIES TO ALL LEVELS OF THE ORGANIZATION

The Code of Conduct applies to all employees and all individuals serving as a Director of the Company, and in the event that an employee or a Director has to share certain information to a professional advisor that has been engaged by the Company, then such employee or Director shall inform such professional on the applicability of the relevant regulations. The Code of Conduct is designed to provide guidance on the Company's ethical principles. The values presented in this Code of Conduct must be interpreted within the framework of the minimums established by the laws and ethics wherever the Company operates. However, the Code of Conduct does not include all of the Company's policies on ethical or legal matters; the employees are responsible for knowing and complying with all of the Company's policies (e.g., the Company Regulations) and laws, rules and regulations applicable to their job or position.

SOSIALIZATION AND APPLICATION OF THE CODE OF CONDUCT

The socialization of the Company's Code of Conduct is done by announcing via intranet access and providing written copies to the employees. The Code of Conduct is applied to all levels of the Company's organization.

KEBIJAKAN PERUSAHAAN UNTUK MEMENUHI HAK KREDITUR

COMPANY POLICY ON CREDITOR'S RIGHTS

Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana disyaratkan melalui POJK No. 21, Perseroan dengan ini menyusun Kebijakan Perusahaan untuk Memenuhi Hak Kreditur ("Kebijakan"). Perseroan berharap bahwa Kebijakan tersebut dapat menjadi pedoman bagi Perseroan dan entitas anak dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga dan pemenuhan atas hak-hak kreditur.

Following the requirement of Good Corporate Governance ("GCG") as stipulated in POJK No. 21, the Company has prepared the Policy of the Company On Fulfillment the Creditor's Rights (the "Policy"). The Company is expecting that the Policy will act as guidance for the Company and its subsidiaries on obtaining a loan from a third party and to protect the creditor's rights.

Perseroan harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini sebelum mendapatkan fasilitas pinjaman dari pihak ketiga, antara lain:

1. Mematuhi kewajiban Perseroan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku termasuk mempertahankan izin-izin yang diperlukan Perseroan dan entitas anak dalam menjalankan kegiatan usahanya;
2. Mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, seperti memperoleh persetujuan dari para pemegang saham;
3. Memperhatikan hak-hak kreditur dalam perjanjian pinjaman yang telah ada; dan
4. Memastikan kondisi keuangan Perseroan dalam kondisi yang sehat dengan memelihara Rasio atas Utang Bersih terhadap EBITDA yang Berjalan dan *Debt Services Coverage Ratio*.

Kami berharap Kebijakan ini dapat menjaga kepercayaan para kreditur, investor, dan pemangku kepentingan terhadap Perseroan sekaligus memenuhi hak-hak mereka.

The Company shall consider the following factors before obtaining a loan facility from a third party, among others:

1. Complying with applicable laws and regulations as well as maintaining necessary licenses which are required by the Company and its subsidiaries to conduct their business activities;
2. Complying with the provisions on the Articles of Association, such as to obtain approval from the shareholders when required;
3. Respecting the rights of the creditors on loans; and
4. Ensuring the financial conditions is in a healthy condition by maintaining the Ratio on Net Debt to Running EBITDA and the Debt Services Coverage Ratio.

This Policy is intended to maintain trust from our creditors, investors and stakeholders and to address their rights.

AKSES TERHADAP INFORMASI

ACCESS TO INFORMATION

Untuk memfasilitasi pemangku kepentingan terhadap akses informasi, maka Perseroan secara berkelanjutan terus memperbaharui sistem dan infrastruktur penyampaian informasi perusahaan. Di samping itu, Perseroan juga secara konsisten berupaya untuk memperkuat fondasi teknologi informasinya guna mengamankan dan meningkatkan keandalan dan memastikan penyediaan informasi yang sudah terintegrasi, tepat waktu dan akurat melalui situs yang dimiliki Perseroan yaitu www.protelindo.co.id/www.ptsmn.co.id.

Sesuai dengan persyaratan atas keterbukaan informasi, maka Perseroan juga melaporkan informasi material ke otoritas pasar modal baik secara tertulis ke OJK maupun melalui pelaporan secara elektronik ke BEI. Perseroan juga secara proaktif

To facilitate stakeholders' access to information, the Company continues to update its information delivery facilities and infrastructure. Additionally, the Company consistently strives to strengthen its information technology platform to safeguard and improve reliability and ensure the integrated, timely and accurate provision of information through its website www.protelindo.co.id/www.ptsmn.co.id.

In compliance with information disclosure requirements, the Company also reports material information to the capital markets authorities, both in writing to OJK and through electronic reporting to the IDX. The Company is proactive in

memberikan pemberitahuan dalam hal aksi korporasi melalui konferensi pers baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Keseluruhan informasi tersebut dapat dilihat dari situs web Perseroan.

Investor, analis dan pemegang saham dapat menghubungi Hubungan Investor secara langsung dengan mengirimkan surat elektronik ke investor.relations@protelindo.net atau telepon (62-21) 2358 5500.

Sama dengan bisnis lain, kegiatan usaha Perseroan tunduk pada beberapa faktor risiko dipengaruhi oleh kekuatan internal dan eksternal, banyak yang berada di luar kendali Perseroan. Perubahan ekonomi domestik, regional dan global dapat memiliki dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

giving notice of all corporate actions through press releases in Indonesian and English. These releases can also be seen on the Company's website.

Investors, analysts and shareholders can contact Investor Relations directly by sending an email to investor.relations@protelindo.net or calling (62-21) 2358 5500.

Similar to other businesses, the business activities of the Company are subject to several risk factors influenced by internal and external forces, many of which are beyond the control of the Company. Changes to the domestic, regional and global economies can have a material adverse effect on the business, financial condition, results of operations and prospects of the Company.



ANTHONY ELAM
Chief of Investor Relations

Departemen Hubungan Investor
Investor Relations Department

Menara BCA, Lantai 55
Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310
Tel : +62 21 2358 5500
Fax : +62 21 2358 6446
Email : investor.relations@protelindo.net
www.protelindo.co.id / www.ptsmn.co.id

KEBIJAKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI

POLICY ON THE UTILIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR INFORMATION TRANSPARENCY

Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana disyaratkan melalui POJK No. 21, Perseroan dengan ini menyusun Kebijakan Penggunaan Teknologi Informasi Untuk Keterbukaan Informasi ("Kebijakan"). Perseroan berharap dengan Kebijakan tersebut dapat memperluas pemberian informasi kepada para pemegang saham, pemangku kepentingan dan juga investor yang potensial sehubungan dengan kinerja dan kegiatan usaha Perseroan.

Sebagai sebuah perusahaan publik yang tercatat, Perseroan wajib menyampaikan informasi material Perseroan sesuai dengan hukum pasar modal yang berlaku di Indonesia, antara lain, menyediakan informasi tersebut pada situs web Perseroan. Selain dengan situs web Perseroan, Perseroan juga mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan dan juga investor yang potensial dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Mengirimkan surat elektronik sehubungan dengan kondisi dan rencana kegiatan Perseroan; dan
 2. Mengadakan pertemuan investor baik dalam bentuk tatap muka maupun konferensi telepon;
- paling lambat setiap 3 (tiga) bulan.

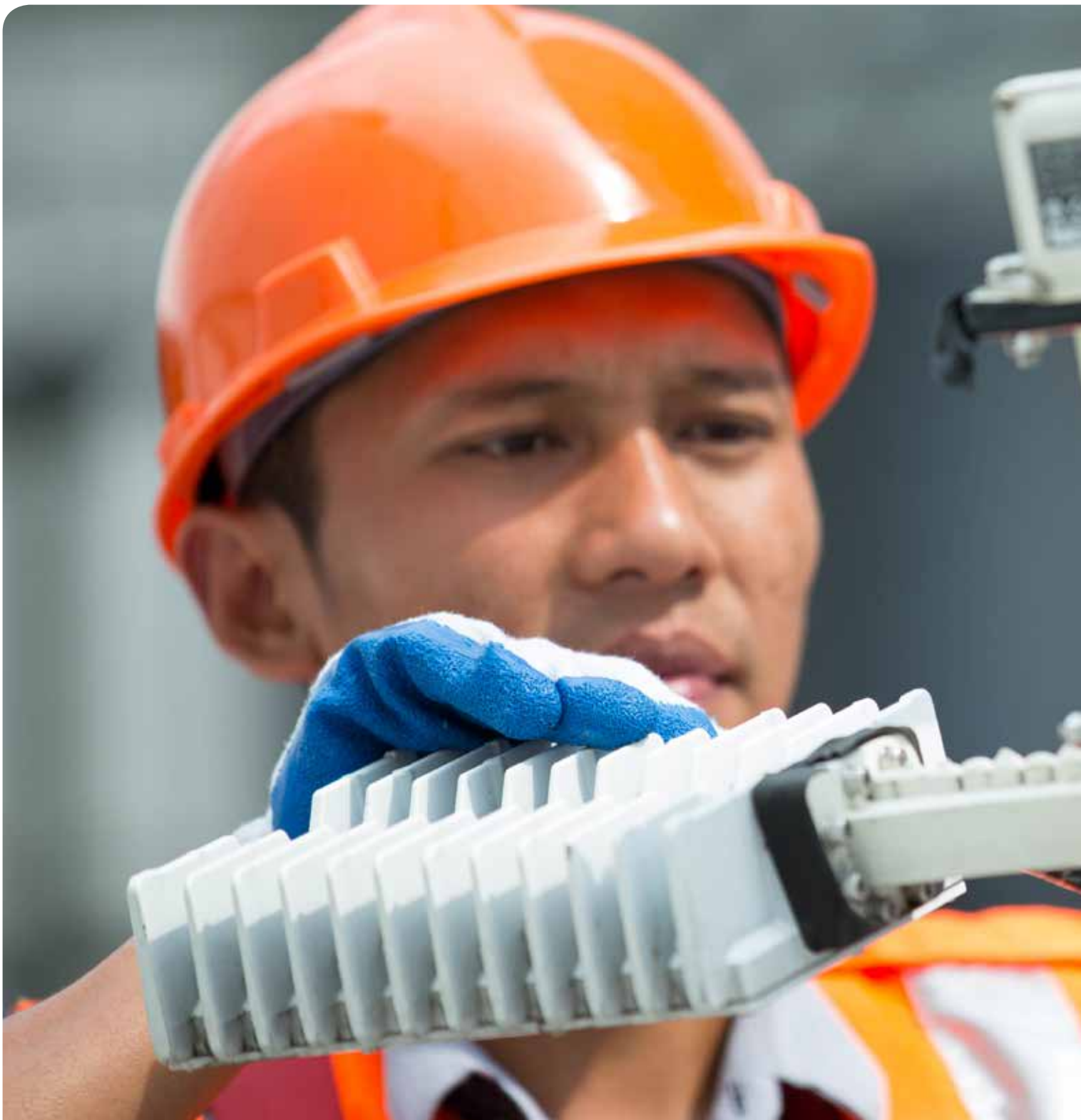
Kami berharap Kebijakan ini dapat menjaga kepercayaan para pemegang saham, investor, dan pemangku kepentingan terhadap Perseroan sekaligus memenuhi hak-hak mereka.

In line with requirements of Good Corporate Governance as stipulated in POJK No. 21, the Company has prepared the Policy on Utilization of Information Technology for Disclosure Information (the "Policy"). By this Policy, the Company makes it a priority to share information broadly to shareholders and stakeholders as well as potential investors regarding the performance and business plan of the Company.

As a publicly listed company, the Company must disclose its material information in accordance with the prevailing capital market laws in Indonesia, among others, by publishing its information to public on the Company's website. Other than the Company's website, the Company is optimizing the use of information technology to spread information to shareholders and stakeholders as well as potential investors, by using the following methods:

1. sending electronic mail regarding the Company's condition and business plan; and
 2. holding investor gatherings in the form of real meetings or conference calls;
- on at least a quarterly basis.

We believe that this Policy will maintain the trust from our shareholders, investors and stakeholders towards the Company and to fulfill their rights.



KOMUNITAS
COMMUNITY



**KAMI MEMBENTUK DAN BEKERJA SAMA DENGAN
KOMUNITAS DIMANA KAMI BERADA**

WE CREATE AND WORK WITH THE COMMUNITIES
WHERE WE ARE LOCATED

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

KEBIJAKAN KAMI

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR) mencakup aktivitas-aktivitas Grup yang memberikan dampak positif terhadap lingkungan, karyawan, dan masyarakat yang kami layani. Untuk memastikan implementasi yang sesuai dari program CSR yang bertanggung jawab, etis, dan efektif, Grup telah menunjuk Komite CSR berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan pada tanggal 1 Desember 2013.

Program Tanggung Jawab Sosial Perseroan telah berkembang dengan signifikan mulai di tahun 2014 dan difokuskan pada tiga bidang yaitu: (1) Pendidikan, (2) Pemulihan Pasca Bencana dan (3) Sosial dan Konservasi Alam. Sebagai bagian dari program-program tersebut, kami menyediakan dukungan finansial kepada para pelajar dan sekolah-sekolah, berkontribusi secara langsung kepada masyarakat yang terkena dampak banjir dan bencana alam serta membangun infrastruktur seperti fasilitas air bersih, jalan, taman dan perlindungan terhadap hutan.

OUR POLICY

Corporate Social Responsibility (or CSR) consists of the Group's activities to encourage a positive impact on the environment, employees, and communities that we serve. In order to ensure proper implementation of the CSR program in a responsible, ethical and effective manner, the Group has appointed a CSR Committee based on the Resolutions of the Board of Directors of the Company dated December 1, 2013.

Our Corporate Social Responsibility programs significantly expanded starting in 2014 and are focused on three main areas: (1) Education, (2) Disaster Relief and (3) Social and Nature Conservation. As part of these programs, we provide financial support to students and schools, contribute directly to communities impacted by flooding and natural disasters, build infrastructure such as clean water facilities, roads, parks, and contribute to park and forest protection.



Di tahun 2017, Perseroan aktif mendistribusikan pasokan di posko evakuasi (sembako, air bersih, perlengkapan sekolah, kebutuhan anak-anak, selimut, tenda, dan perlengkapan mandi) kepada korban bencana erupsi vulkanik di Bali, korban banjir bandang di Yogyakarta, dan korban banjir dan longsor di Pacitan.

In 2017, the Company actively distributed supplies (groceries, clean water, school supplies, children needs, blanket, tent, and toiletries) to people affected by the volcanic eruption in Bali, flooding in Yogyakarta, and flooding and landslide in Pacitan.

Kami juga menyediakan donasi bulanan untuk dua yayasan, yaitu Yayasan Kasih Mandiri Bersinar dan Yayasan Putri. Setiap tahun, kami memilih kota dan sekolah yang berbeda untuk program ini. Sesi pertama, kami membantu 257 siswa di 20 sekolah di Jepara, Semarang, Tangerang, Lampung, Makassar dan Solo dengan membantu pendanaan uang sekolah mereka tiga tahun di SMA atau SMK. Sesi kedua, 320 siswa di 39 sekolah di Malang, Pati, Semarang, Banjarmasin, Deli Serdang, Garut, Sukabumi dan Toraja. Sesi ketiga, 291 siswa di 25 sekolah di Banda Aceh, Bandung, Boyolali, Cirebon, Surabaya, Jambi, Banjar, Bogor, Garut, Bandar Lampung dan Sukabumi. Dan sesi keempat, 240 siswa di 8 sekolah di Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kota Semarang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kampar dan Lampung Utara. Total dari 4 grup tersebut mencakup 33 kota, 92 sekolah dan 1.108 siswa pada tahun 2017. Kami menerapkan rencana untuk mendukung 505 murid di sekolah menengah atas di tahun 2018.

Our main program is to support students who want to go to senior high school. Every year, we pick a different set of cities and schools for the program. In the first batch we supported 257 students in 20 schools in Jepara, Semarang, Tangerang, Lampung, Makassar and Solo by paying their tuition for three years at senior high or vocational school. In the second batch, we supported 320 students in 39 schools in Malang, Pati, Semarang, Banjarmasin, Deli Serdang, Garut, Sukabumi and Toraja. In the third batch, we supported 291 students in 25 schools in Banda Aceh, Bandung, Boyolali, Cirebon, Surabaya, Jambi, Banjar, Bogor, Garut, Bandar Lampung dan Sukabumi. And in the fourth batch 240 students in 8 schools in Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kota Semarang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kampar and Lampung Utara. The total of the 4 groups are 33 cities, 92 schools and 1,108 students as of 2017. We are currently implementing a plan to support 505 students in 2018.



Pemberian kebutuhan untuk lebih banyak insinyur di Indonesia, kami juga berkomitmen untuk menyediakan beasiswa untuk 76 mahasiswa dari 11 perguruan tinggi. Universitas-universitas ini adalah Universitas Indonesia, Akademi Telkom Jakarta, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Telkom, Universitas Malikussaleh di

Given the need for more engineers in Indonesia, we have also committed to providing scholarships in engineering to 76 students in 11 universities. These universities are the Universitas Indonesia, Academy of Telkom Jakarta, the Bandung Technology Institute, the Sepuluh Nopember Institute of Technology, Telkom University, University Malikussaleh in

Aceh, Universitas Khairun di Maluku, UKI di Toraja, Universitas Sains & Teknologi Jayapura di Papua, Universitas Musamus di Merauke dan Universitas Victory di Sorong.

Di Januari 2017, Perseroan meluncurkan Program Kompetisi CSR untuk mendorong keterlibatan dari semua karyawan di aktivitas sosial dan amal. Program Kompetisi CSR dilaksanakan setiap bulan sebanyak total 12 aktivitas CSR dari grup atau departemen berbeda. Empat grup memenangkan hadiah untuk kreatifitas dan dampak dari aktivitasnya. Aktivitas ini mencakup:

1. Renovasi MCK umum yang mana hanya satu tempat melayani untuk 420 orang.
2. Membangun sebuah sistem IT dan aplikasi untuk Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia.

Aceh, University Khairun in Maluku, UKI in Toraja, University Science & Technology Jayapura in Papua, University Musamus in Merauke and University Victory in Sorong.

In January 2017, Company launched the CSR Competition Program to encourage involvement of all employees in social and charitable activities. The CSR Competition Program was composed of 12 teams from different groups or departments. Four teams won prizes for the creativity and impact of their activities. These activities included:

1. Refurbishing a community washroom that serves as the only plumbed washroom for 420 people.
2. Building an IT system and applications for a foundation, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia.



3. Mengatur dan memberikan saran kepada wirausaha dalam memproses pembuatan "Keripik Singkong" sehingga mereka dapat menyokong usahanya sendiri.
4. Renovasi perpustakaan di sekolah kejuruan, SMK Triyasa; penyediaan buku, rak buku, karpet, dan perabotan sekolah.

3. Organizing and advising entrepreneurs producing "Keripik Singkong" so they can be self-supporting.
4. Refurbishing a library at a primary school, SMK Triyasa; providing books, shelves, carpet, and furniture.

DAMPAK KEUANGAN

Total dana untuk aktivitas CSR adalah sebesar Rp4.350 juta di tahun 2017 adalah sebagai berikut:

FINANCIAL IMPACT

Total amount spent on CSR activities in 2017 was IDR4,350 million, include the following:

Tanggal Date	Lokasi Location	Aktivitas Activities
Januari 2017 January 2017	Jakarta	Sumbangan Bulanan untuk Yayasan Putri dan Yayasan Kasih Mandiri Bersinar Monthly Donation for Yayasan Putri and Yayasan Kasih Mandiri Bersinar
Januari 2017 January 2017	Bandung, Jakarta Surabaya	Beasiswa - Universitas Batch 1 Scholarship - University Batch 1
Januari 2017 January 2017	Aceh, Jayapura, Merauke, Sorong, Toraja, Ternate	Beasiswa - Universitas Batch 2 Scholarship - University Batch 2
Januari 2017 January 2017	Malang, Pati, Semarang, Sukabumi, Garut, Toraja, Banjarmasin, Deli Serdang	Beasiswa - Sekolah Menengah Atas Batch 2 Scholarship - Senior High School Batch 2
Januari 2017 January 2017	Kota Banda Aceh, Kabupaten Bandung, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Cirebon, Kota Surabaya, Kota Jambi, Kota Banjar, Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandar Lampung, Kabupaten Sukabumi	Beasiswa - Sekolah Menengah Atas Batch 3 Scholarship - Senior High School Batch 3
Januari 2017 January 2017	Jakarta, Banten, Tangerang, Depok, Cianjur & Bekasi	Kompetisi CSR Competition yang dilaksanakan di 12 Area setiap bulan dari Januari sampai dengan Desember 2017 CSR Competition held by 12 Area per month from January until December 2017
Februari 2017 February 2017	Jakarta	Sponsor (Olimpiade Science & Robot yang diselenggarakan oleh SMA Thamrin) Sponsorship (Science & Robot Olimpiade held by Senior High School - SMA Thamrin)
Februari 2017 February 2017	Aceh, Cirebon, Boyolali, Bandung & Jakarta	Donasi printer bekas ke sekolah-sekolah Donate used printers to Schools
April 2017 April 2017	Larantuka - Kecamatan Flores Timur NTT	Pembangunan fasilitas untuk SMK Ancop Facilities of SMK Ancop
Mei 2017 May 2017	Hong Kong	Sponsor untuk Program Luar Negeri Pemerintah (Tema: Indonesian Society Meeting di Hong Kong) Sponsorship for Overseas Government Programs (Theme: Indonesian Society Meeting in Hong Kong)
Juli 2017 July 2017	Aceh, Jayapura, Merauke, Sorong, Toraja, Ternate	Beasiswa - Universitas Batch 2 Scholarship - University Batch 2
Juli 2017 July 2017	Malang, Pati, Semarang, Sukabumi, Garut, Toraja, Banjarmasin, Deli Serdang	Beasiswa - Sekolah Menengah Atas 2 Scholarship - Senior High School Batch 2

Tanggal Date	Lokasi Location	Aktivitas Activities
Juli 2017 July 2017	Kota Banda Aceh, Kabupaten Bandung, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Cirebon, Kota Surabaya, Kota Jambi, Kota Banjar, Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandar Lampung, Kabupaten Sukabumi	Beasiswa - Sekolah Menengah Atas 3 Scholarship - Senior High School Batch 3
Juli 2017 July 2017	Kalimantan	Donasi Konservasi Alam dan Orang Utan Nature Conservation and Orang Utan Donation
Agustus 2017 August 2017	Surabaya	Sponsor untuk ITS Golf Tournament dimana donasi akan digunakan untuk beasiswa Sponsorship for ITS Golf Tournament which the donation will be used for scholarship
Agustus 2017 August 2017	Yogyakarta	Sponsor untuk Seminar Komunitas Alumni Sponsors for Alumni Community Seminars
Agustus 2017 August 2017	Bandung	Beasiswa - Universitas Batch 1 Scholarship - University Batch 1
Oktober 2017 October 2017	Ketapang - Kalimantan Barat	<i>Teacher's Training</i> Teacher's Training
Oktober 2017 October 2017	Jakarta	Donasi Konservasi Hutan Bakau Mangrove Conservation Donation
Oktober 2017 October 2017	Ketapang - Kalimantan Barat	<i>Teacher's Training</i> Teacher's Training
Oktober 2017 October 2017	Yogyakarta	Donasi computer bekas (laptop) kepada Yayasan Kanker Donate used computers (laptop) to Cancer's Foundation
Desember 2017 December 2017	Aceh, Yogyakarta, Pacitan	Donasi Bencana Alam Natural Disaster Donation
Desember 2017 December 2017	Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kota Semarang	Beasiswa - Sekolah Menengah Atas Batch 4 Scholarship - Senior High School Batch 4
Desember 2017 December 2017	Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kota Semarang	Seremoni Beasiswa - Sekolah Menengah Atas Batch 4 Scholarship Ceremonial - Senior High School Batch 4
Desember 2017 December 2017	Jambi, Surabaya, Banjar - Jawa Barat, Sukabumi, Banjarmasin	Donasi computer (laptop) bekas ke sekolah-sekolah Donate used computers (laptops) to Schools



Kontak Kami

CONTACT US

DEPARTEMEN HUBUNGAN INVESTOR INVESTOR RELATIONS DEPARTMENT

Menara BCA, 55th Floor

Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310

Tel : +62 21 2358 5500

Fax : +62 21 2358 6446

Email : investor.relations@protelindo.net

www.protelindo.co.id / www.ptsmn.co.id



Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2017

STATEMENTS OF RESPONSIBILITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS REGARDING THE 2017 ANNUAL REPORT

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2017

STATEMENTS OF RESPONSIBILITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS REGARDING 2017 ANNUAL REPORT

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi material dalam Laporan Tahunan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Perseroan") tahun 2017 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We the undersigned hereby declare that all material information contained in this Annual Report of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (the "Company") year 2017 has been completely presented and we are fully responsible for the accuracy of the contents of the Company's annual report.

This statement is made truthfully.

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS



ARIO WIBISONO

Komisaris Utama | President Commissioner

KENNY HARJO

Komisaris | Commissioner

KUSMAYANTO KADIMAN

Komisaris Independen | Independent Commissioner

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS



FERDINANDUS AMING SANTOSO
Direktur Utama | President Director



ADAM GIFARI
Wakil Direktur Utama | Vice President Director



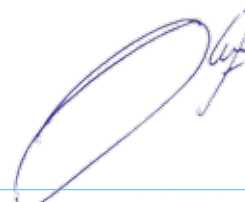
STEPHEN DUFFUS WEISS
Wakil Direktur Utama | Vice President Director



RINALDY SANTOSA
Direktur | Director



ONGGO WIJAYA
Direktur | Director



EKO SANTOSO HADIPRODJO
Direktur | Director



INDRA GUNAWAN
Direktur independen | Independent Director



Laporan Keuangan Konsolidasian PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan Anak Perusahaan

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES

**PT Profesional Telekomunikasi Indonesia
dan entitas anaknya/*and its subsidiaries***

Laporan keuangan konsolidasian
tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
***Consolidated financial statements
as of December 31, 2017
and for the year then ended
with independent auditors' report***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2017
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Direksi		Statement of Directors
Laporan Auditor Independen		Independent Auditor's Report
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1-2	Consolidated Statement of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian.....	3-5	Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	6	Consolidated Statement of Changes in Equity
Laporan Arus Kas Konsolidasian	7	Consolidated Statement of Cash Flows
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	8-142	Notes to the Consolidated Financial Statements



PROTELINDO

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2017,
SERTA UNTUK TAHUN BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017,
AND FOR THE YEAR ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned below:

1. Nama/Name
Alamat Kantor/Office Address

Alamat Domisi sesuai KTP atau kartu identitas lain/Domicile
Address according to KTP or other identity Card

Nomor Telepon/Telephone Number
Jabatan/Position
2. Nama/Name
Alamat Kantor/Office Address

Alamat Domisi sesuai KTP atau kartu identitas lain/Domicile
Address according to KTP or other identity Card

Nomor Telepon/Telephone Number
Jabatan/Position

- : Ferdinandus Aming Santoso
: Menara BCA Lantai 53 dan 55, Jl. M.H. Thamrin No. 1
: Jakarta 10310, Indonesia
: Jl. Karet Belakang No. 55, RT.002/RW.007,
: Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia Budi,
: Jakarta Selatan
: 021 - 2358 5500
: Direktur Utama/President Director
- : Rinaldy Santosa, CPA
: Menara UCA Lantai 53 dan 55, Jl. M.H. Thamrin No. 1
: Jakarta 10310, Indonesia
: Jl. Haji Samali Ujung no.17, RT. 009/RW. 004,
: Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu,
: Jakarta Selatan
: 021 - 2358 5500
: Direktur/Director

menyatakan bahwa:

confirm that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan
pervajian laporan keuangan konsolidasian PT
Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Perseroan") dan
entitas anaknya;
2. Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember
2017, serta untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut
telah disusun dan disajikan berdasarkan standar
akuntansi keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan
konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya telah
dimuat secara lengkap dan benar;

b. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan
entitas anaknya tidak mengandung informasi atau fakta
material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan
informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian
intern dalam Perseroan dan entitas anaknya.

1. *We are responsible for the preparation and presentation of
the consolidated financial statements of PT Profesional
Telekomunikasi Indonesia ("the Company") and its
subsidiaries;*
2. *The consolidated financial statements as of December 31,
2017, and for the year ended have been prepared and
presented in accordance with Indonesian Financial
Accounting Standards;*
3. a. *All information in the consolidated financial statements
of the Company and its subsidiaries has been fully
disclosed in a complete and truthful manner;*

b. *The consolidated financial statements of the Company
and its subsidiaries do not contain false material
information or facts, nor do they not omit material
information or facts; and*
4. *We are responsible for the internal control system of the
Company and its subsidiaries.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We certify the accuracy of this statement.

23 Maret/March 23, 2018

Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of the Directors

(Ferdinandus Aming Santoso)
Direktur Utama/President Director

(Rinaldy Santosa, CPA)
Direktur/Director



PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Menara BCA, 55th Floor
Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310 - Indonesia Phone: +62-21 2358 5500 Fax: +62-21 2358 6446



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-5949/PSS/2018

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Perseroan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditor's Report

Report No. RPC-5949/PSS/2018

**The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia**

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (the "Company") and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2017, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-5949/PSS/2018 (lanjutan)

Tanggung Jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. RPC-5949/PSS/2018 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

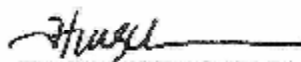
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia and its subsidiaries as of December 31, 2017, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Purwantono, Sungkoro & Surja



Feniwati Chendana, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0694/Public Accountant Registration No. AP. 0694

23 Maret 2018/March 23, 2018

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT
OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2017
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

		31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016 (Disajikan kembali - Catatan 41/ As restated - Note 41)	31 Desember/ December 31, 2015 (Disajikan kembali - Catatan 41/ As restated - Note 41)	
Catatan/ Note					
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2d,2e,2p,4,34	2.339.044	2.904.014	2.986.279	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	36,37,38				Trade receivables
Pihak ketiga	2p,5, 36,37,38	606.867	351.676	470.519	Third parties
Pihak berelasi	2d,2p,5 34,37,38	17.128	23	-	Related parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga	2p,38	3.024	1.345	804	Other receivables - third parties
Persediaan		-	-	11.076	Inventory
Beban dibayar dimuka	6	20.561	20.246	22.346	Prepaid expenses
Uang muka	2p,36,38	27.836	16.748	17.101	Advances
Pajak dibayar dimuka	2l,17a	6.325	298.903	24.497	Prepaid taxes
TOTAL ASET LANCAR		3.020.785	3.592.955	3.532.622	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap	2g,7,41	12.600.558	12.269.391	9.813.832	Fixed assets
Goodwill	2c,2h,2r,8	152.812	152.812	363.150	Goodwill
Estimasi pengembalian pajak	2l,17a	910	3.320	3.919	Estimated claims for tax refund
Aset takberwujud	2c,2s,9	589.631	666.157	1.186.775	Intangible assets
Sewa lokasi jangka panjang	2f,10	2.064.331	1.858.790	1.297.608	Long-term site rentals
Aset pajak tangguhan, neto	2l,17e,17f	-	-	18.293	Deferred tax assets, net
Piutang lain-lain - pihak berelasi	2d,2p,34,36,38	144.227	139.500	139.494	Other receivables - related parties
Piutang derivatif	2n,2p,32b,36,38	26.442	32.599	-	Derivative receivables
Aset imbalan kerja					
jangka panjang, neto	19	11.299	-	-	Net asset for employee benefits
Aset tidak lancar lainnya	2p,11,36,38	118.592	65.006	30.565	Other non-current assets
TOTAL ASET TIDAK LANCAR		15.708.802	15.187.575	12.853.636	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASET		18.729.587	18.780.530	16.386.258	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang pembangunan					Tower construction and
menara dan usaha lainnya					other trade payables
Pihak ketiga	2p,12,36,37,38	271.663	189.327	216.607	Third parties
Pihak berelasi	2d,34,37,38	27.207	34.243	31.630	Related parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	2p,18,36,37,38	4.112	21.298	20.167	Other payables - third parties
Utang pajak	2l,17b	40.945	334.230	60.933	Taxes payable
Pendapatan ditangguhkan	2k,20	927.171	953.352	820.858	Unearned revenue
Liabilitas imbalan kerja					Short-term employee benefits
jangka pendek	2i,2p,34,37,38	48.067	39.033	48.398	liability
Akrual	2p,13,36,37,38	261.782	241.062	355.270	Accruals
Bagian yang akan jatuh tempo					
dalam waktu satu tahun utang					Current portion of
jangka panjang-pihak ketiga	2p,14,36,37,38	633.821	516.745	446.139	long-term loans - third parties
Utang obligasi	2p,15,36,37,38	-	998.701	-	Bonds payable
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK		2.214.768	3.327.991	2.000.002	TOTAL CURRENT LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT
OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2017
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

		31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016 (Disajikan kembali - Catatan 41/ As restated - Note 41)	31 Desember/ December 31, 2015 (Disajikan kembali - Catatan 41/ As restated - Note 41)	
	Catatan/ Note				
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Pendapatan ditangguhkan	2k,20	80.598	60.752	113.000	Unearned revenue
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun					Long-term loans, net of current portion
Pihak ketiga	2p,14,36,37,38 2d,2p,14	5.025.292	5.471.255	6.741.254	Third parties
Pihak berelasi	34,36,37,38	750.000	500.000	-	Related party
Utang obligasi	2p,15,36,37,38	2.589.596	2.432.170	2.715.146	Bonds payable
Utang swap valuta asing	2p,2n,32,36,37,38	15.553	223.650	227.954	Cross currency swap payable
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	2i,3,19,34	20.517	85.659	58.301	Long-term employee benefits liability
Liabilitas pajak tangguhan, neto	2l,17e,17f,41	613.722	488.209	506.417	Deferred tax liabilities, net
Liabilitas rencana opsi manajemen	33m,34	87.446	30.000	-	Management option plan liability
Provisi jangka panjang	2q,3,16	248.455	226.417	208.638	Long-term provision
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG		9.431.179	9.518.112	10.570.710	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS		11.645.947	12.846.103	12.570.712	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS					EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk					Equity attributable to the owners of the parent entity
Modal saham					Share capital
Nilai nominal - Rp100 (angka penuh) per saham					Par value - Rp100 (full amount) per share
Modal dasar - 10.000.000.000 saham					Authorized - 10,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.322.620.187 saham	22	332.262	332.262	332.262	Issued and fully paid - 3,322,620,187 shares
Saldo laba					Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya	24	400	300	200	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	41	6.726.380	5.625.146	3.497.197	Unappropriated
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	23	24.594	(23.285)	(12.494)	Other comprehensive income (loss)
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		7.083.636	5.934.423	3.817.165	Total equity attributable to the owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	21	4	4	(1.619)	Non-controlling interests
TOTAL EKUITAS		7.083.640	5.934.427	3.815.546	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		18.729.587	18.780.530	16.386.258	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2017
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/
For the Year ended December 31,**

	2017	Catatan/ Notes	2016 (Disajikan kembali - Catatan 41/ As restated - Note 41)	
PENDAPATAN	5.337.939	2f,2k,25	5.053.112	REVENUES
DEPRESIASI DAN AMORTISASI	(894.245)	2g,2k,26,41	(1.184.319)	DEPRECIATION AND AMORTIZATION
BEBAN POKOK PENDAPATAN LAINNYA	(277.415)	2k,27	(209.455)	OTHER COST OF REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(1.171.660)		(1.393.774)	COST OF REVENUES
LABA BRUTO	4.166.279		3.659.338	GROSS INCOME
BEBAN PENJUALAN DAN PEMASARAN	(80.418)	2k,28	(48.824)	SELLING AND MARKETING EXPENSES
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	(375.438)	2k,29	(396.848)	GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
BEBAN USAHA LAINNYA, NETO	(286.523)	2k,31,41	(112.134)	OTHER OPERATING EXPENSES, NET
LABA USAHA	3.423.900		3.101.532	OPERATING INCOME
PENGHASILAN KEUANGAN, BRUTO	82.410		70.079	FINANCE INCOME, GROSS
PAJAK FINAL ATAS PENGHASILAN KEUANGAN	(16.482)	2i	(14.016)	FINAL TAX ON FINANCE INCOME
PENGHASILAN KEUANGAN, NETO	65.928		56.063	FINANCE INCOME, NET
BIAYA KEUANGAN	(687.309)	30	(668.868)	FINANCE COSTS
LABA DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2.802.519		2.488.727	INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX EXPENSE FROM CONTINUING OPERATIONS
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(695.068)	2l,17c,17d,41	(730.250)	CORPORATE INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	2.107.451		1.758.477	INCOME FOR THE YEAR FROM CONTINUING OPERATIONS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Year Ended December 31, 2017
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/
For the Year ended December 31,

	2017	Catatan/ Notes	2016 (Disajikan kembali - Catatan 41/ As restated - Note 41)	
LABA TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	2.107.451		1.758.477	INCOME FOR THE YEAR FROM CONTINUING OPERATIONS
OPERASI YANG DIHENTIKAN				DISCONTINUED OPERATIONS
Laba tahun berjalan dari operasi yang dihentikan	-		6.964	Profit for the year from discontinued operations
Laba dari penjualan operasi yang dihentikan	-		365.872	Profit from the sale of discontinued operations
Total laba tahun berjalan dari operasi yang dihentikan	-		372.836	Total profit for the year from discontinued operations
LABA TAHUN BERJALAN	2.107.451		2.131.313	INCOME FOR THE YEAR
Penghasilan (rugi) komprehensif lain:				Other comprehensive income (loss):
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will not be reclassified to profit or loss
Kerugian aktuarial	(9.443)		(6.363)	Actuarial loss
Pajak penghasilan tangguhan terkait	2.361		1.591	Related deferred income tax
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that may be reclassified to profit or loss
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan	-		(39.418)	Exchange rate difference from translation of financial statements
Keuntungan neto dari lindung nilai arus kas	73.282		33.870	Net gain on cash flow hedge
Pajak tangguhan terkait	(18.321)		1.387	Related deferred tax
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	47.879		(8.933)	OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2.155.330		2.122.380	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Year Ended December 31, 2017
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year ended December 31,			
	2017	Catatan/ Notes	2016 (Disajikan kembali - Catatan 41/ As restated - Note 41)
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	2.107.451		2.128.049
Kepentingan nonpengendali	-	21	3.264
	2.107.451		2.131.313
Total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	2.155.330		2.117.258
Kepentingan nonpengendali	-	21	5.122
	2.155.330		2.122.380
Laba tahun berjalan per saham (angka penuh)	634	20,39	640
Laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan (angka penuh)	634	20,39	528

Income for the year attributable to:
Owners of the parent entity
Non-controlling interests

Total comprehensive
income attributable to:
Owners of the parent entity
Non-controlling interests

Earnings per share (full amount)

Earnings per share from continuing
operations (full amount)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended
December 31, 2017
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

		Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to the owners of the parent entity						Penghasilan (rugi) komprehensif lain/ Other comprehensive income (loss)			
Catatan/ Notes	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/issued and fully paid share capital	Saldo laba/Retained earnings		Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan/ Exchange rate difference translation of financial statements	Keuntungan (kerugian) neto dari lindung nilai arus kas/ Net gain (loss) on cash flow hedge	Keuntungan (kerugian) aktuarial kumulatif/ Cumulative actuarial gains (losses)	Total/ Total	Kepentingan nonpengendali/ Non-controlling interests	Total ekuitas/ Total equity		
		Cadangan umum/ Appropriated for general reserve	Belum ditemukan penggunaannya/ Unappropriated								
Saldo 31 Desember 2015, disajikan kembali	41	332.262	200	3.497.197	31.420	10.314	3.817.165	(1.619)	3.815.546	Balance, December 31, 2015, as restated	
Laba tahun berjalan, disajikan kembali	41	-	-	2.128.049	-	-	2.128.049	3.264	2.131.313	Income for the year, as restated	
Penghasilan (rugi) komprehensif lain		-	-	-	(31.420)	(4.773)	(10.791)	1.858	(8.933)	Other comprehensive income (loss)	
Pembentukan cadangan wajib	24	-	100	(100)	-	-	-	-	-	Retained earnings appropriation	
Penjualan operasi yang dihentikan	1c	-	-	-	-	-	-	(3.499)	(3.499)	Sale of discontinued operations	
Saldo 31 Desember 2016, disajikan kembali	41	332.262	300	5.625.146	-	5.541	5.934.423	4	5.934.427	Balance, December 31, 2016, as restated	
Laba tahun berjalan		-	-	2.107.451	-	-	2.107.451	-	2.107.451	Income for the year	
Penghasilan (rugi) komprehensif lain		-	-	-	-	(7.082)	47.879	-	47.879	Other comprehensive income (loss)	
Dividen	24	-	-	(1.006.117)	-	-	(1.006.117)	-	(1.006.117)	Dividends	
Pembentukan cadangan wajib	24	-	100	(100)	-	-	-	-	-	Retained earnings appropriation	
Saldo 31 Desember 2017		332.262	400	6.726.380	-	(1.541)	7.083.636	4	7.083.640	Balance, December 31, 2017	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended
December 31, 2017
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the Year ended December 31,			
2017	Catatan/ Notes	2016	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	5.367.424	5.498.404	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada pemasok	(675.620)	(649.161)	Cash paid to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan	(404.714)	(211.041)	Cash paid to employees
Kas yang dihasilkan dari operasi	4.287.090	4.638.202	Cash flows from operations
Penghasilan bunga yang diterima	59.830	48.670	Interest received
Pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya	(920.136)	(866.870)	Income taxes and other taxes paid
Penerimaan pengembalian pajak	2.182	1.831	Tax refund received
Lain-lain	25.993	10.291	Others
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	3.454.959	3.832.124	Net cash provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembelian aset tetap	(740.751)	(3.866.597)	Acquisitions of fixed assets
Pembayaran sewa lokasi jangka panjang	(563.755)	(944.611)	Payments for long-term site rentals
Penerimaan atas penjualan entitas anak	-	1.105.807	Proceeds from sale of subsidiaries
Pembayaran biaya transaksi terkait penjualan entitas anak	-	(19.749)	Payments for transaction costs related to sale of subsidiaries
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(1.304.506)	(3.725.150)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran utang jangka panjang	(1.664.168)	(3.916.282)	Payments of long-term loans
Penerimaan dari utang jangka panjang	1.522.000	3.617.308	Proceeds from long-term loans
Pembayaran dividen	-	-	Payments of dividends
Pemilik entitas induk	(1.006.110)	-	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	(6)	-	Non controlling interest
Pembayaran pokok obligasi	(1.000.000)	-	Payments of bonds
Pembayaran utang bunga	(405.270)	(382.591)	Payments of interest on loans
Pembayaran bunga obligasi	(174.822)	(190.060)	Payments of interest on bonds
Pembayaran biaya penerbitan utang jangka panjang	(24.378)	(30.442)	Payments of loan issuance costs
Penerimaan dari penerbitan obligasi	-	800.000	Proceeds from bonds issuance
Pembayaran biaya penerbitan obligasi	-	(3.024)	Payments of bonds issuance costs
Pembayaran premi call spread	-	(38.133)	Payment for call spread premium
Penerimaan dari pinjaman lainnya	-	17.500	Proceeds from other loan
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(2.752.754)	(125.724)	Net cash used in financing activities
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS			NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
Pengaruh perubahan kurs mata uang pada kas dan setara kas	37.331	(63.515)	Effects of changes in foreign exchange rates on cash and cash equivalents
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	2.904.014	2.986.279	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	2.339.044	2.904.014	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Informasi mengenai aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan dalam Catatan 40.

Information on non-cash transactions are presented in Note 40.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Perseroan") adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 8 November 2002, dibuat di hadapan Hildayanti, S.H., Notaris di Bandung. Akta Pendirian Perusahaan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. C-00079/HT.01.01.TH.2003 tanggal 3 Januari 2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 21 tanggal 14 Maret 2003, Tambahan No. 2095 ("Anggaran Dasar"). Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 32 tanggal 4 Februari 2016, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan kewenangan Direksi Perseroan untuk bertindak atas nama Perseroan. Perubahan anggaran dasar tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0022828 tanggal 12 Februari 2016.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi di Indonesia. Perseroan memulai kegiatan usahanya pada tanggal 4 Juni 2003.

Kantor pusat Perseroan berlokasi di Surapati Core Blok AB (Anggrek Boulevard) No. 16, Jalan P.H.H Mustopa, Bandung, Indonesia dan kantor cabangnya berlokasi di Menara BCA lantai 53 dan 55, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

Entitas induk terakhir Perseroan adalah PT Sarana Menara Nusantara Tbk. ("SMN").

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (the "Company") is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 2 dated November 8, 2002 drawn up in the presence of Hildayanti, S.H., Notary in Bandung. The Company's Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights through Letter No. C-00079/HT.01.01.TH.2003 dated January 3, 2003 and was published in State Gazette No. 21 dated March 14, 2003, Supplement No. 2095 ("Articles of Association"). The Company's Articles of Association have been amended several times, the latest amendment was stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolutions No. 32 dated February 4, 2016, drawn up in the presence of Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notary in Jakarta, regarding the amendment of the authority of the Board of Directors of the Company to act on behalf of the Company. This amendment was notified to the Minister of Law and Human Rights under Letter of Receipt of Notification on Amendment to Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0022828 dated February 12, 2016.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities involves telecommunication supporting services in Indonesia. The Company started its commercial operations on June 4, 2003.

The Company's head office is located at Surapati Core Blok AB (Anggrek Boulevard) No. 16, Jalan P.H.H Mustopa, Bandung, Indonesia and its branch office is located at Menara BCA 53rd and 55th floors, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

The Company's ultimate parent company is PT Sarana Menara Nusantara Tbk. ("SMN").

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2017
Komisaris Utama	Ario Wibisono
Komisaris	Kenny Harjo
Komisaris Independen	Kusmayanto Kadiman
Direktur Utama	Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Direktur Utama	Adam Gifari
Wakil Direktur Utama	Stephen Duffus Weiss
Direktur	Rinaldy Santosa
Direktur	Onggo Wijaya
Direktur	Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur Independen	Indra Gunawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 tanggal 2 Juni 2017, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan tanggal 1 November 2017, Perseroan menunjuk Maya Marcella sebagai Sekretaris Perusahaan.

Komite Audit Perseroan dibentuk pada tanggal 28 Februari 2014. Susunan Komite Audit per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2017
Ketua	Kusmayanto Kadiman
Anggota	Anang Yudiantyah Setiawan
Anggota	Patricia Marina Sugondo

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 22 Agustus 2017, Dewan Komisaris memutuskan pengangkatan Haryo Dewanto sebagai Kepala Departemen Audit Internal.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan dan entitas anaknya memiliki 786 karyawan tetap dan 215 karyawan kontrak (31 Desember 2016: 767 karyawan tetap dan 154 karyawan kontrak) - (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

b. Boards of Commissioners, Directors and Employees

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2017 and 2016 was as follows:

	31 Desember/ December 31, 2016	
Ario Wibisono		President Commissioner
Kenny Harjo		Commissioner
Bacelius Ruru		Independent Commissioner
Ferdinandus Aming Santoso		President Director
Adam Gifari		Vice President Director
Stephen Duffus Weiss		Vice President Director
Rinaldy Santosa		Director
Onggo Wijaya		Director
Eko Santoso Hadiprodjo		Director
Indra Gunawan		Independent Director

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2017 was based on Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 6 dated June 2, 2017, drawn up in the presence of Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notary in Jakarta.

Based on the Directors' Resolution dated November 1, 2017, the Company appointed Maya Marcella as its Corporate Secretary.

The Company's Audit Committee was established on February 28, 2014. The compositions of the Audit Committee as of December 31, 2017 and 2016 were as follows:

	31 Desember/ December 31, 2016	
Bacelius Ruru		Chairman
Anang Yudiantyah Setiawan		Member
Patricia Marina Sugondo		Member

Based on the Board of Commissioners' Resolution dated August 22, 2017, the Board of Commissioners approved the appointment of Haryo Dewanto as the Head of Internal Audit Department.

As of December 31, 2017, the Company and its subsidiaries employed 786 permanent employees and 215 contract employees (December 31, 2016: 767 permanent employees and 154 contract employees) - (unaudited).

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak

Kepemilikan saham Perseroan pada entitas-entitas anak yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung yang dikonsolidasi adalah sebagai berikut:

Entitas anak/ <i>Subsidiaries</i>	Domisili/ <i>Domicile</i>	Jenis usaha/ <i>Nature of business</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i>		Dimulainya kegiatan komersial/ <i>Start of commercial operations</i>	Total aset sebelum eliminasi/ <i>Total assets before eliminations</i>	
			31 Des./ <i>Dec. 31,</i> 2017	31 Des./ <i>Dec. 31,</i> 2016		31 Des./ <i>Dec. 31,</i> 2017	31 Des./ <i>Dec. 31,</i> 2016
Pemilikan langsung/<i>Direct ownership</i>							
PT Iforte Solusi Infotek 99,997% dimiliki oleh Perseroan/ <i>99.997% owned by the Company</i>	Jakarta	Penyelenggara jaringan tetap tertutup berbasis VSAT dan fiber optik/ <i>Closed fixed network provider with VSAT and fiber optic</i>	99,997 %	99,997%	2001	1.013.871	554.657
Pemilikan tidak langsung/<i>Indirect ownership</i>							
PT Iforte Global Internet 99,998% dimiliki oleh PT Iforte Solusi Infotek/ <i>99.998% owned by PT Iforte Solusi Infotek</i>	Jakarta	Jasa Telekomunikasi/ <i>Telecommunication Services</i>	99,998%	99,998%	1 Januari/ <i>January 1, 2002</i>	487.708	188.630

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi strategis bagi Perseroan, pada tanggal 1 Juli 2015, Perseroan mengakuisisi 100% saham PT Iforte Solusi Infotek ("iForte") dan secara tidak langsung mengakuisisi entitas anak iForte, PT Iforte Global Internet ("IGI").

Pada tanggal 10 November 2015, SMN membeli 0,003% saham iForte dari Perseroan, sehingga kepemilikan saham Perseroan dalam iForte menurun menjadi 99,997%.

iForte adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 174, tanggal 16 Mei 1997, dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa, Ng, S.H., S.E., sebagai pengganti dari Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-7361.HT.01.01.Th.1997 tanggal 30 Juli 1997 dan akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara No. 12 tanggal 10 Februari 1998, Tambahan No. 889 ("Anggaran Dasar").

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries

The Company's share ownerships, directly or indirectly, in its consolidated subsidiaries are as follows:

To support the strategic vision and mission achievement of the Company, on July 1, 2015, it acquired 100% direct ownership interest in PT Iforte Solusi Infotek ("iForte") and indirectly acquired a subsidiary of iForte, PT Iforte Global Internet ("IGI").

On November 10, 2015, SMN purchased 0.003% ownership interest in iForte from the Company, so the share ownership of the Company in iForte decreased to 99.997%.

iForte is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 174, dated May 16, 1997 drawn up in the presence of Buntario Tigris Darmawa, Ng, S.H., S.E., as substitute of Rachmat Santoso, S.H., Notary in Jakarta. iForte's Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice through Letter No. C2-7361.HT.01.01.Th.1997 dated July 30, 1997 and was published in State Gazette No. 12 dated February 10, 1998, Supplement No. 889 ("Articles of Association").

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

Anggaran Dasar iForte telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 145, tanggal 28 Maret 2016, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan dan/atau penambahan ketentuan pada Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 17 Anggaran Dasar iForte, dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar iForte. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0007671.AH.01.02.TAHUN 2006 tanggal 21 April 2016 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0042299 tanggal 21 April 2016.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar iForte, ruang lingkup usaha iForte adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, transportasi darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

Kantor iForte berlokasi di Menara BCA lantai 41, Suite 4103, Grand Indonesia Shopping Town, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

iForte's Articles of Association have been amended several times, the latest amendment of which was stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 145, dated March 28, 2016, drawn up in the presence of Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notary in Jakarta, regarding the amendment and/or the additional provisions of Article 1, Article 4, Article 5, Article 7, Article 8, Article 9, Article 10, Article 11, Article 12, Article 14, Article 15 and Article 17 of Articles of Association of iForte, and the restatement the entire Articles of Association of iForte. This amendment of the Articles of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-0007671.AH.01.02.TAHUN 2006 dated April 21, 2016, and notified to the Minister of Law and Human Rights under Letter of Notification Acknowledgement No. AHU-AH.01.03-0042299 dated April 21, 2016.

In accordance with Article 3 of iForte's Articles of Association, the scope of its activities involves development, trade, industry, land transportation, agriculture, printing, workshop and services, except services in the field of law and taxes.

iForte's office is located at Menara BCA 41st floor Suite 4103, Grand Indonesia Shopping Town, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

IGI adalah perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 276, tanggal 21 November 1997, dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan dalam Surat Keputusan No. C-6160/HT.01.01.TH.2000 tanggal 13 Maret 2000 ("Anggaran Dasar"). Anggaran Dasar IGI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 257 tanggal 30 September 2016, dibuat di hadapan Ferry Sanjaya, S.H., sebagai pengganti Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha IGI. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat No. AHU-0019300.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 19 Oktober 2016.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar IGI, ruang lingkup usaha IGI adalah berusaha dalam bidang jasa perdagangan dan jasa telekomunikasi di Indonesia.

Kantor IGI berlokasi di Menara BCA lantai 41, Suite 4103, Grand Indonesia Shopping Town, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

IGI is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 276, dated November 21, 1997 drawn up in the presence of Rachmat Santoso, S.H., Notary in Jakarta. IGI's Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Legislation through Letter No. C-6160/HT.01.01.TH.2000 dated March 13, 2000 ("Articles of Association"). IGI's Articles of Association have been amended several times, the latest amendment of which was stated in Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 257 dated September 30, 2016, drawn up in the presence of Ferry Sanjaya, S.H., as a substitute of Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notary in Jakarta, regarding the amendment of objectives and purposes and business activities of IGI. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-0019300.AH.01.02.TAHUN 2016 dated October 19, 2016.

In accordance with Article 3 of IGI's Articles of Association, the scope of its activities involves trade and telecommunication services in Indonesia.

IGI's office is located at Menara BCA 41st floor, Suite 4103, Grand Indonesia Shopping Town, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

Aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih

Nilai wajar aset dan liabilitas iForte yang dapat diidentifikasi pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

Aset	
Aset lancar	80.094
Aset tidak lancar	21.351
Aset tetap	374.504
	475.949
Liabilitas	293.441
Jumlah aset neto teridentifikasi pada nilai wajar	182.508
Hubungan pelanggan (Catatan 9)	666.231
Liabilitas pajak tangguhan atas hubungan pelanggan	(166.558)
Goodwill yang timbul dari akuisisi (Catatan 8)	177.053
Biaya imbalan yang dialihkan	859.234

Hubungan pelanggan dan goodwill yang masing-masing sebesar Rp666.231 dan Rp177.053 merupakan nilai sinergi yang diharapkan timbul dari akuisisi melalui perolehan skala ekonomis bisnis entitas anak.

Kepentingan nonpengendali ("KNP") diukur berdasarkan proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi.

Untuk memperluas bisnis sewa menara, pada bulan Desember 2012, Perseroan secara tidak langsung mendirikan dan mengakuisisi beberapa entitas anak di Luxembourg dan Belanda yaitu Protelindo Luxembourg S.a.r.l., Protelindo Netherlands B.V., Protelindo Finance B.V. dan Protelindo Towers B.V.

Namun demikian, pada tahun 2016, Perseroan telah mengalihkan seluruh kepemilikannya di Protelindo Netherlands B.V. dan Protelindo Towers B.V. ke Cellnex Telecom S.A, sedangkan Protelindo Luxembourg S.a.r.l. dan Protelindo Finance B.V. dibubarkan tanpa likuidasi.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

Assets acquired and liabilities assumed

The fair value of the identifiable assets and liabilities of iForte as at the date of acquisition were as follows:

Assets
Current assets
Non-current assets
Fixed assets
Liabilities
Net identifiable assets at fair value
Customer relationships (Note 9)
Deferred tax liabilities on customer relationships
Goodwill arising from acquisition (Note 8)
Purchase price consideration transferred

The customer relationships and goodwill of Rp666,231 and Rp177,053, respectively, reflect the synergies value expected arising from the acquisition through economies scale of subsidiaries' business.

The non-controlling interest ("NCI") is measured using the proportion of NCI's ownership of net identifiable assets of the acquired entity.

To expand its business of tower leasing, in December 2012, the Company indirectly established and acquired several subsidiaries in Luxembourg and the Netherlands, namely Protelindo Luxembourg S.a.r.l., Protelindo Netherlands B.V., Protelindo Finance B.V. and Protelindo Towers B.V.

However, in 2016 the Company has transferred all of its ownership in Protelindo Netherlands B.V. and Protelindo Towers B.V. to Cellnex Telecom S.A while Protelindo Luxembourg S.a.r.l. and Protelindo Finance B.V. were dissolved without liquidation.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Penyelesaian laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 23 Maret 2018.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK") yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan-peraturan serta pedoman dan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang diterbitkan oleh BAPEPAM-LK No. Kep-347/BL/2012.

Kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan secara konsisten, kecuali dinyatakan lain, dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali laporan arus kas konsolidasian dan beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian dibulatkan menjadi jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

1. GENERAL (continued)

d. Completion of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements were completed and authorized for issuance by the Company's Board of Directors on March 23, 2018.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards in Indonesia ("SAK") comprise of the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation to Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and the regulations and the guidelines on financial statements and disclosures issued by the BAPEPAM-LK No. Kep-347/BL/2012.

The significant accounting policies were applied consistently, unless otherwise stated, in the preparation of the consolidated financial statements as of December 31, 2017 and 2016, and for the years then ended.

a. Basis of preparation of consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept, except for the consolidated statement of cash flows and certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

Amounts in the consolidated financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah, unless otherwise stated.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian pada setiap entitas anak Perseroan diukur dengan mata uang lingkungan ekonomi utama di mana Grup beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perseroan.

Perubahan kebijakan akuntansi

Pada tanggal 1 Januari 2017, Perseroan dan entitas anaknya menerapkan PSAK baru dan revisi yang efektif pada tahun 2017. Perubahan kebijakan akuntansi Perseroan dan entitas anaknya telah diterapkan seperti yang disyaratkan dan sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar.

Berikut adalah standar baru, perubahan atas standar yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") dan berlaku efektif dimulai pada tanggal 1 Januari 2017:

- Amandemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan. Amandemen ini mengklarifikasi, bukan mengubah secara signifikan, persyaratan PSAK No. 1, antara lain, mengklarifikasi mengenai materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan.
- ISAK No. 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13: Properti Investasi. ISAK ini memberikan interpretasi atas karakteristik bangunan yang digunakan sebagai bagian dari definisi properti investasi dalam PSAK No. 13: Properti Investasi. Bangunan sebagaimana dimaksud dalam definisi properti investasi mengacu pada struktur yang memiliki karakteristik fisik yang umumnya diasosiasikan dengan suatu bangunan yang mengacu pada adanya dinding, lantai, dan atap yang melekat pada aset.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of consolidated financial statements (continued)

Items included in the consolidated financial statements of each of the Company's subsidiaries are measured using the currency of the primary economic environment in which the Group operates ("the functional currency"). The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Company's functional and presentation currency.

Changes in accounting policies

As of January 1 2017, the Company and its subsidiaries have applied the new and revised PSAK which are effective in 2017. The changes in the Company and its subsidiaries' accounting policies have been applied as required and according to the transition policy on each standard.

The following are new standard, changes of standard issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board ("DSAK") and are effective starting January 1, 2017:

- Amendment to PSAK No. 1: Presentation of Financial Statements on Disclosures Initiative. This amendment clarifies, rather than significantly change, the existing PSAK No. 1 requirements, among others, to clarify the materiality, flexibility as to the order in which an entity presents the notes to financial statements and identification of significant accounting policies.
- ISAK No. 31: Interpretation on the Scope of PSAK No. 13: Investment Property. This ISAK provides an interpretation of the characteristics of the building used as part of the definition of investment property in PSAK No. 13: Investment Property. The building as investment property refers to structures that have physical characteristics generally associated as a building with walls, floors and roofs attached to the assets.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
konsolidasian (lanjutan)**

Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Penerapan standar akuntansi baru mempunyai pengaruh yang signifikan kepada kinerja keuangan Perseroan dan entitas anak disebabkan oleh depresiasi aset menara. Dengan penerapan standar akuntansi baru, aset menara akan diklasifikasikan sebagai bagian dari aset tetap menggunakan model biaya historis. Standar akuntansi ini berlaku untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017, dan diterapkan secara retrospektif (Catatan 41).

- PSAK 3 (Penyesuaian 2016): Laporan Keuangan Interim Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pengungkapan interim yang dipersyaratkan harus dicantumkan dalam laporan keuangan interim atau melalui referensi silang dari laporan keuangan interim seperti komentar manajemen atau laporan risiko yang tersedia untuk pengguna laporan keuangan interim dan pada saat yang sama.
- PSAK 24 (Penyesuaian 2016): Imbalan Kerja. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pasar obligasi korporasi berkualitas tinggi dinilai berdasarkan denominasi mata uang obligasi tersebut dan bukan berdasarkan negara di mana obligasi tersebut berada.
- PSAK 58 (Penyesuaian 2016): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa perubahan dari satu metode pelepasan ke metode pelepasan lainnya dianggap sebagai rencana awal yang berkelanjutan dan bukan sebagai rencana pelepasan baru. Penyesuaian ini juga mengklarifikasi bahwa perubahan metode pelepasan ini tidak mengubah tanggal klasifikasi sebagai aset atau kelompok lepasan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Basis of preparation of consolidated
financial statements (continued)**

**Changes in accounting policies
(continued)**

The application of this new accounting standard has significant impact to the Company's and its subsidiaries' financial performance due to the depreciation of tower assets. With the application of this new accounting standard, the tower assets were classified as part of fixed assets using historical cost model. This accounting standard becomes effective for annual periods beginning on or after January 1, 2017, and is to be applied retrospectively (Note 41).

- PSAK 3 (2016 Improvement): Interim Financial Reporting. This improvement clarifies that the interim disclosures required should be included in the interim financial statements or through cross-references of the interim financial statements, such as management commentary or risk management report, that available to users of the interim financial statements and at the same time.
- PSAK 24 (2016 Improvement): Employee Benefits. This improvement clarifies that the market of high quality corporate bonds is valued by denominated bonds and not based on the country where the bonds are.
- PSAK 58 (2016 Improvement): Non-Current Assets, Held for Sale and Discontinued Operation. This improvement clarifies that a change from one disposal method to the other disposal methods is considered as the beginning of a sustainable plan and not as a new disposal plan. This improvement also clarifies that the change in the disposal method does not change the date of classification as an asset or disposal group.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

- PSAK 60 (Penyesuaian 2016): Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa entitas harus menilai sifat dari imbalan kontrak jasa untuk menentukan apakah entitas memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset keuangan dan apakah persyaratan pengungkapan terkait keterlibatan berkelanjutan terpenuhi.
- ISAK No. 32: Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan. Memberikan interpretasi atas definisi dan hierarki antara PSAK, ISAK dan peraturan pasar modal terutama dalam situasi dimana terdapat ketidakkonsistenan antara PSAK/ISAK dan pernyataan yang dikeluarkan oleh pengatur pasar modal.

Selain untuk ISAK 31, standar akuntansi tersebut di atas tidak memiliki pengaruh signifikan atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali dinyatakan lain.

b. Prinsip-prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan keuangan Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Pengendalian didapat ketika Perseroan terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variable dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*.

Secara spesifik, Perseroan mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Perseroan memiliki seluruh hal berikut ini:

- Kekuasaan atas *investee* (misal, hak yang ada memberi kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan *investee*)
- Eksposur atau hak atas imbal hasil variable dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
- Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of consolidated financial statements (continued)

Changes in accounting policies (continued)

- PSAK 60 (2016 Improvement): Financial Instruments: Disclosures. This improvement clarifies that an entity must assess the nature of the service contract benefits to determine whether the entity has a continuing involvement in financial assets and whether the disclosure requirements related to the continuing involvement are met.
- ISAK No. 32: Definition and Hierarchy of Financial Accounting Standards. Provides clarity on the definition and hierarchy between PSAKS, ISAKs and capital market regulations especially in situations where there are inconsistencies between PSAKS/ ISAKs and pronouncements issued by the capital market regulators.

Except for ISAK 31, the aforementioned accounting standards have no significant impact to the consolidated financial statements, unless otherwise stated.

b. Principles of consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2017 and for the year then ended.

Control is achieved when the Company is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee.

Specifically, the Company controls an investee if and only if the Company has:

- Power over the investee (i.e., existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities of the investee)
- Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and
- The ability to use its power over the investee to affect its returns

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

Ketika Perseroan memiliki kurang dari hak suara mayoritas, Perseroan dapat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

- Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara yang lain
- Hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain
- Hak suara dan hak suara potensial Perseroan

Perseroan menilai kembali apakah investor mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas entitas anak dimulai ketika Perseroan memiliki pengendalian atas entitas anak dan berhenti ketika Perseroan kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban atas entitas anak yang diakuisisi atau dilepas selama periode termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian dari tanggal Perseroan memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Perseroan menghentikan pengendalian atas entitas anak.

Laba atau rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemegang saham entitas induk dan kepada KNP, walaupun hasil mempunyai saldo defisit. Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan pada laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan. Semua aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas berkaitan dengan transaksi antar anggota Perseroan akan dieliminasi secara penuh dalam proses konsolidasi.

Perubahan kepemilikan di entitas anak, tanpa kehilangan pengendalian, dihitung sebagai transaksi ekuitas. Jika Perseroan kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Perseroan dan entitas anaknya:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Principles of consolidation (continued)

When the Company has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

- *The contractual arrangement with the other vote holders of the investee*
- *Rights arising from other contractual arrangements*
- *The Company's voting rights and potential voting rights*

The Company reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the period are included in the consolidated financial statements from the date the Company gains control until the date the Company ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income (OCI) are attributed to the equity holders of the parent company and to the NCI, even if this results in the NCI having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Company's accounting policies. All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses, and cash flows relating to transactions between members of the Company are eliminated in full on consolidation.

A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. In case of loss of control over a subsidiary, the Company and its subsidiaries:

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi; dan
- mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain ke laba rugi atau saldo laba, jika Perseroan melepas secara langsung aset atau liabilitas yang terkait.

c. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi, dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disertakan dalam beban administrasi.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Perseroan dan entitas anaknya mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi, dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi. Hal ini termasuk pemisahan derivatif melekat dalam kontrak utama oleh pihak yang diakuisisi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Principles of consolidation (continued)

- derecognize the assets (including *goodwill*) and liabilities of the subsidiary;
- derecognize the carrying amount of any NCI;
- derecognize the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;
- recognize the fair value of the consideration received;
- recognize the fair value of any investment retained;
- recognize any surplus or deficit in profit or loss; and
- reclassify the parent's share of components previously recognized in other comprehensive income to profit or loss or retained earnings, as appropriate, as would be required if the Company had directly disposed of the related assets or liabilities.

c. Business Combination

Business combination is recorded by using the acquisition method. Cost from acquisition is measured at the sum value of the consideration transferred, measured at fair value at the acquisition date, and the amount of each NCI on acquired parties. For each business combination, the acquirer measures the NCI on the acquired entity either at fair value or the proportion of NCI's ownership of net identifiable assets of the acquired entity. Costs incurred in respect of acquisition charged directly and included in administrative expenses.

When the Company and its subsidiaries acquire a business, they assess the financial assets and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as at the acquisition date. This includes the separation of embedded derivatives in host contracts by the acquiree.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

c. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Imbalan kontinjensi yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi diakui pada nilai wajar tanggal akuisisi.

Perubahan nilai wajar atas imbalan kontinjensi setelah tanggal akuisisi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas, akan diakui dalam laba rugi atau penghasilan komprehensif lainnya sesuai dengan PSAK No. 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Jika diklasifikasikan sebagai ekuitas, imbalan kontinjensi tidak diukur kembali sampai penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laba rugi.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada harga perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Perseroan dan entitas anaknya yang diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Business Combination (continued)

Contingent consideration transferred by the acquirer is recognized at fair value on the acquisition date.

Change in fair value of contingent consideration after the acquisition date, which is classified as an asset or liability, will be recognized in profit or loss or other comprehensive income in accordance with PSAK No. 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement". If classified as equity, contingent consideration is not measured again until the next settlement accounted in equity.

At the date of acquisition, goodwill is initially measured at cost which represents the excess of the sum value of the consideration transferred and the amount of any difference in the number of NCI on the acquired identifiable assets and liabilities acquired. If the compensations are less than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired from a business combination, since the date of the acquisition is allocated to each Cash Generating Unit ("CGU") of the Company and its subsidiaries which is expected to benefit from the synergy of the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquired CGU is set up.

If goodwill has been allocated to CGU and specific operation on CGU is discontinued, the goodwill associated with discontinued operations are included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal. The goodwill disposal is measured based on the relative value of discontinued operations and the portion retained CGU.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut :
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Transactions with related parties

Related party represents a person or an entity who is related to the reporting entity:

- a) A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - iii. Both entities are joint venture of the same third party.
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
 - vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
 - vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi
(lanjutan)**

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Perseroan memperoleh jasa personil manajemen kunci dari perusahaan profesional. Jumlah yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk penyediaan jasa personil manajemen kunci oleh perusahaan profesional dan jumlah saldo diungkapkan dalam Catatan 34.

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri atas kas dan bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak saat penempatan dan tidak dibatasi penggunaannya.

f. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi, jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Transactions with related parties (continued)

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements.

The Company obtains key management personnel services from professional firms. The amounts incurred by the Company for the provision of key management personnel services that are provided by those professional firms and any outstanding balances are disclosed in Note 34.

e. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents comprise cash on hand and in banks and short-term deposits with an original maturity of 3 months or less at the time of placement and not restricted as to use.

f. Leases

The determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is based on the substance of the arrangement at the inception date and whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset and the arrangement conveys a right to use the asset. Leases that transfer to the lessee substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the leased item are classified as finance leases. Leases which do not transfer substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the leased item are classified as operating leases.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

f. Sewa (lanjutan)

Perseroan dan entitas anaknya sebagai lessee

- i) Dalam sewa pembiayaan, Perseroan dan entitas anaknya mengakui aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada awal masa sewa, sebesar nilai wajar aset sewa pembiayaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa dipisahkan antara bagian yang merupakan biaya keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas sewa. Biaya keuangan dialokasikan pada setiap periode selama masa sewa, sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Sewa kontinjen dibebankan pada periode terjadinya. Biaya keuangan dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Aset sewa pembiayaan (disajikan sebagai bagian aset tetap) disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewa pembiayaan dan periode masa sewa, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Perseroan dan entitas anaknya akan mendapatkan hak kepemilikan aset pada akhir masa sewa.
- ii) Dalam sewa operasi, Perseroan dan entitas anaknya mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

Perseroan dan entitas anaknya sebagai lessor

- i) Dalam sewa pembiayaan Perseroan dan entitas anaknya mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan sewa pembiayaan. Pengakuan pendapatan sewa pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto Perseroan dan entitas anaknya sebagai lessor dalam sewa pembiayaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Leases (continued)

The Company and its subsidiaries as lessee

- i) Under a finance lease, the Company and its subsidiaries are required to recognize assets and liabilities in the consolidated statement of financial position at amounts equal to the fair value of the leased property or, if lower, the present value of the minimum lease payments, each determined at the inception of the lease. Minimum lease payments are required to be apportioned between finance costs and the reduction of the outstanding liability. The finance costs are required to be allocated to each period during the lease term so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability. Contingent rents are required to be charged as expenses in the periods in which they are incurred. Finance costs are reflected in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. Capitalized leased assets (presented as part of fixed assets) are depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset and the lease term, if there is no reasonable certainty that the Company and its subsidiaries will obtain ownership of the asset by the end of the lease term.
- ii) Under an operating lease, the Company and its subsidiaries recognize lease payments as an expense on a straight-line basis over the lease term.

The Company and its subsidiaries as lessors

- i) Under finance lease, the Company and its subsidiaries are required to recognize assets held under a finance lease in the consolidated statement of financial position and present them as a receivable at an amount equal to the net investment in the lease. Lease payments received are treated as repayments of principal and finance lease income. The recognition of finance lease income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the Company and its subsidiaries net investments in the finance lease.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

f. Sewa (lanjutan)

- ii) Perseroan dan entitas anaknya mengakui aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan konsolidasian sesuai sifat aset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa operasi (Catatan 2k). Sewa kontingen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

g. Aset tetap

Perseroan dan entitas anaknya telah memilih model biaya untuk aset tetap.

Aset tetap, selain tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("carrying amount") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Nilai sisa aset adalah estimasi jumlah yang akan diperoleh Perseroan dan entitas anaknya dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, jika aset tersebut sudah dalam kondisi yang diharapkan pada akhir masa manfaatnya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut:

	Tahun/ Years
Menara-menara	30
Mesin	8
Peralatan kantor	4-8
Kendaraan bermotor	3-4
Peralatan proyek	4-25
Perabotan kantor	3-5

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

f. Leases (continued)

- ii) The Company and its subsidiaries are required to present assets subject to operating leases in the consolidated statement of financial position according to the nature of the asset. Initial direct costs incurred in negotiating an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized as an expense over the lease term on the same basis as operating rental income (Note 2k). Contingent rents, if any, are recognized as revenue in the periods in which they are earned. Lease income from operating leases is recognized as income on a straight-line basis over the lease term.

g. Fixed assets

The Company and its subsidiaries have chosen the cost model for fixed assets.

Fixed assets, except land, are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are satisfied. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the profit or loss as incurred.

The residual value of an asset is the estimated amount that the Company and its subsidiaries would currently obtain from disposal of the asset, after deducting the estimated costs of disposal, if the asset were already in the condition expected at the end of its useful life.

Depreciation is calculated on a straight-line basis over the estimated useful life of the assets as follows:

Towers
Machinery
Office equipment
Motor vehicles
Field equipment
Furniture and fixtures

Land is stated at cost and is not depreciated.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

g. Aset tetap (lanjutan)

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir periode pelaporan, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direviu, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif. Perubahan dalam umur manfaat aset yang diharapkan dan nilai sisa menjadi pertimbangan untuk modifikasi periode depresiasi dan jumlah terdepresiasi yang diperlakukan sebagai perubahan dalam estimasi akuntansi.

Aset dalam penyelesaian merupakan akumulasi biaya bahan dan biaya terkait lainnya sampai dengan tanggal dimana aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan. Biaya-biaya tersebut direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan ketika aset tersebut telah siap dipakai.

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai.

h. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perseroan dan entitas anaknya menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian tahunan penurunan nilai aset (yaitu, aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset takberwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Perseroan dan entitas anaknya membuat estimasi formal atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Fixed assets (continued)

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the period the asset is derecognized.

The residual values, useful life and methods of depreciation of fixed assets are reviewed, and adjusted prospectively if appropriate, at the end of each financial period. Changes in the expected useful life of assets and residual value are considered to modify the depreciation period and depreciable amount which are treated as changes in accounting estimates.

Construction in progress represents the accumulated costs of materials and other relevant costs up to the date when the asset is complete and ready for use. These costs are reclassified to the respective fixed asset accounts when the asset has been made ready for use.

When the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount, the asset is written down to its estimated recoverable amount, which is determined as the higher of the net selling price and value in use.

h. Impairment of non-financial assets

The Company and its subsidiaries assess at each end of reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset (i.e. an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination) is required, the Company and its subsidiaries make formal estimate of the asset's recoverable amount.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**h. Penurunan nilai aset non-keuangan
(lanjutan)**

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai terpulihkannya.

Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai laba rugi sesuai kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terkini, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perseroan dan entitas anaknya menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan ketika keadaan yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai tercatat. Penurunan nilai *goodwill* ditetapkan dengan menentukan jumlah tercatat setiap UPK (atau kelompok UPK) dimana *goodwill* terkait. Ketika jumlah terpulihkan dari UPK kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui. Kerugian penurunan nilai atas *goodwill* tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**h. Impairment of non-financial assets
(continued)**

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or Cash Generating Unit (CGU)'s fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

Impairment losses from continuing operations are recognized in consolidated statement of comprehensive income as profit or loss under expense categories that are consistent with the functions of the impaired asset.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pretax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

Goodwill is tested for impairment annually and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. Impairment is determined for goodwill by assessing the recoverable amount of each CGU (or group of CGUs) to which the goodwill relates. When the recoverable amount of the CGU is less than its carrying amount, an impairment loss is recognised. Impairment losses relating to goodwill cannot be reversed in future periods.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

i. Liabilitas imbalan kerja

Perseroan dan entitas anaknya mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan jangka panjang untuk memenuhi dan menutup imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("Undang-undang Tenaga Kerja"). Liabilitas tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuarial dengan metode "Projected Unit Credit".

Efektif 1 Januari 2017, Perseroan dan entitas anaknya telah menerapkan PSAK No. 24 (Penyesuaian 2013), "Imbalan Kerja".

PSAK ini menetapkan antara lain, (i) menghapuskan "corridor approach" yang digunakan dalam PSAK sebelumnya dan (ii) perubahan signifikan dalam pengakuan, penyajian dan pengungkapan imbalan pasca-kerja yang antara lain sebagai berikut:

- Keuntungan dan kerugian aktuarial saat ini diharuskan untuk diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan dikeluarkan secara permanen dari laba rugi.
- Keuntungan yang diharapkan atas aset program tidak lagi diakui dalam laba rugi, tetapi diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya. Keuntungan yang diharapkan digantikan dengan mengakui penghasilan bunga (atau beban) atas aset (atau liabilitas) program manfaat pasti neto dalam laba rugi, yang dihitung menggunakan tingkat diskonto untuk mengukur kewajiban pensiun.
- Biaya jasa lalu yang belum menjadi hak karyawan tidak bisa lagi ditangguhkan dan diakui periode mendatang. Semua biaya jasa lalu akan diakui lebih awal ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika Perseroan dan entitas anaknya mengakui biaya restrukturisasi atau biaya pemutusan terkait.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Employee benefits liability

The Company and its subsidiaries have long-term employee benefits liability in order to meet and cover the minimum benefits required to be paid to the qualified employees under Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Law"). The liability is estimated using actuarial calculations using the "Projected Unit Credit" method.

Effective January 1, 2017, the Company has prospectively adopted PSAK No. 24 (2013 Improvement), "Employee Benefits".

This PSAK provides, among others, (i) the elimination of the "corridor approach" permitted under the previous version and (ii) significant changes in the recognition, presentation and disclosure of post-employment benefits which, among others, are as follows:

- Actuarial gains and losses are now required to be recognized in other comprehensive income and excluded permanently from profit or loss.
- Expected return on plan assets will no longer be recognized in profit or loss, but are recognized through other comprehensive income. Expected returns are replaced by recognizing interest income (or expense) on the net defined benefit asset (or liability) in profit or loss, which is calculated using the discount rate used to measure the pension obligation.
- Unvested past service costs can no longer be deferred and recognized over the future vesting period. Instead, all past service costs will be recognized at the earlier of when the amendment/curtailment occurs or when the Company and its subsidiaries recognizes related restructuring or termination costs.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

j. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Perseroan. Setiap entitas anak menentukan mata uang fungsional dan transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan keuangan pada setiap entitas diukur dengan mata uang fungsional tersebut.

Transaksi dalam mata uang asing yang pada awal pengakuan dicatat oleh Perseroan dan entitas anaknya dengan mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk periode yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode kini.

Transaksi-transaksi non-moneter dalam mata uang asing yang diukur dengan metode biaya historis dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal terjadinya transaksi. Transaksi-transaksi non-moneter yang diukur pada nilai wajar dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal penentuan nilai wajar tersebut.

Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke mata uang Rupiah, dibebankan pada laba rugi periode berjalan, kecuali keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari aset keuangan dalam mata uang asing yang merupakan lindung nilai atas komitmen pengeluaran modal. Keuntungan dan kerugian selisih kurs tersebut akan diakui dalam ekuitas hingga pengakuan atas aset tersebut, pada saat itu keuntungan dan kerugian selisih kurs tersebut diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Foreign currency transactions and balances

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is also the Company's functional currency. Each subsidiary determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

Transactions in foreign currencies are initially recorded by the Company and its subsidiaries at their respective functional currency rates prevailing at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average of the selling and buying rates of exchange prevailing at the last banking transaction date of the period, as published by Bank Indonesia, and any resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current period.

Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are translated using the exchange rates as at the dates of the initial transactions. Non-monetary items measured at fair value in a foreign currency are translated using the exchange rates at the date when the fair value is determined.

Exchange gains and losses arising on foreign currency transactions and on the translation of foreign currency monetary assets and liabilities into Rupiah are recognized in the current period's profit or loss, with the exception of exchange differences on foreign currency financial assets that provide a hedge against capital expenditure commitment. These are recognized directly to equity until the recognition of the assets, at which time they are recognized as part of the assets acquisition costs.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

j. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing (lanjutan)

Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas operasi luar negeri dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal pelaporan dan akun-akun laba rugi dijabarkan menggunakan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Selisih kurs yang timbul atas penjabaran tersebut diakui pada penghasilan komprehensif lain.

Kurs yang digunakan untuk penjabaran pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2017 (angka penuh)/ (full amount)	31 Desember/ December 31, 2016 (angka penuh)/ (full amount)
Rupiah/1 Dolar AS	13.548	13.436
Rupiah/1 EUR	16.174	14.162
Rupiah/1 SGD	10.134	9.299

k. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari sewa operasi diakui pada saat diperoleh.

Beban diakui pada saat terjadinya.

Penghasilan atau beban bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penghasilan dan beban bunga dicatat dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskonto estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, menjadi nilai tercatat neto aset dan liabilitas keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Foreign currency transactions and balances (continued)

For consolidation purpose, the assets and liabilities of foreign operations are translated into Rupiah at the rate of exchange prevailing at the reporting date and their income statements are translated at exchange rates prevailing at the dates of the transactions. The exchange differences arising on the translation are recognized in other comprehensive income.

The exchange rates used as of December 31, 2017 and 2016 were as follows:

	31 Desember/ December 31, 2017 (angka penuh)/ (full amount)	31 Desember/ December 31, 2016 (angka penuh)/ (full amount)	
Rupiah/US Dollar 1	13.548	13.436	Rupiah/US Dollar 1
Rupiah/EUR 1	16.174	14.162	Rupiah/EUR 1
Rupiah/SGD 1	10.134	9.299	Rupiah/SGD 1

k. Revenue and expense recognition

Rental income is recognized when earned.

Expenses are recognized as incurred.

Interest income or expense

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using the Effective Interest Rate, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial assets or liabilities.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

I. Perpajakan

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Perseroan dan entitas anaknya menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan". PSAK revisi ini mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan.

Pajak Final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Mengacu pada revisi PSAK No. 46 yang disebutkan di atas, pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 46. Oleh karena itu, Perseroan dan entitas anaknya memutuskan untuk menyajikan beban pajak final sehubungan dengan penghasilan bunga sebagai pos tersendiri.

Perbedaan antara nilai tercatat dari aset revaluasi dan dasar pengenaan pajak merupakan perbedaan temporer sehingga menimbulkan liabilitas atau aset pajak tangguhan, kecuali untuk aset tertentu seperti tanah yang pada saat realisasinya dikenakan pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi.

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Perseroan dan entitas anaknya juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Taxation

Effective on January 1, 2015, the Company and its subsidiaries applied PSAK No. 46 (Revised 2014), "Income Taxes". The revised PSAK prescribes the accounting treatment for income taxes.

Final Tax

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subjected to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Referring to revised PSAK No. 46 as mentioned above, final tax is no longer governed by PSAK No. 46. Therefore, the Company and its subsidiaries have decided to present all of the final tax arising from interest income as separate line item.

The difference between the carrying amount of a revalued asset and its tax base is a temporary difference and gives rise to a deferred tax liability or asset, except for certain asset such as land, which realization is taxed with final tax on gross value of transaction.

Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority.

Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.

Underpayment/overpayment of income tax are presented as part of "Tax Expense - Current" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. The Company and its subsidiaries also presented interest/penalty, if any, as part of "Tax Expense - Current".

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

I. Perpajakan (lanjutan)

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Perseroan dan entitas anaknya menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Perseroan dan entitas anaknya mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Taxation (continued)

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined.

Deferred Tax

Deferred tax assets and liabilities are recognized using the liability method for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the financial statements and their respective tax bases at each reporting date. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. At the end of each reporting period, the Company and its subsidiaries reassess unrecognized deferred tax assets. The Company and its subsidiaries recognize a previously unrecognized deferred tax assets to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current period operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the consolidated statements of financial position, except if they are for different legal entity, consistent with the presentation of current tax assets and liabilities.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

l. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer kena pajak, kecuali jika aset dan liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari pengakuan awal *goodwill* (untuk liabilitas pajak tangguhan) atau aset atau kewajiban dalam suatu transaksi yang bukan merupakan penggabungan usaha dan, pada saat transaksi, mempengaruhi baik laba komersial maupun laba atau rugi fiskal.

m. Segmen operasi

Segmen adalah bagian khusus dari Perseroan dan entitas anaknya yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk pos-pos yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Perseroan dan entitas anaknya dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

n. Instrumen keuangan derivatif dan akuntansi lindung nilai

Perseroan dan entitas anaknya menggunakan instrumen keuangan derivatif seperti swap atas perubahan kurs dan *call spread* untuk melindungi risiko atas fluktuasi kurs.

Instrumen keuangan derivatif diakui baik sebagai aset maupun liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan dicatat pada nilai wajar.

Instrumen keuangan derivatif tersebut pada awalnya diukur menggunakan nilai wajar pada tanggal dimana kontrak derivatif itu terjadi dan setelah itu diukur kembali pada nilai wajarnya. Derivatif diakui sebagai aset keuangan jika nilai wajarnya positif sedangkan jika negatif diakui sebagai liabilitas keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

l. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except when the deferred tax asset and liability arises from the initial recognition of goodwill (for deferred tax liability) or an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss.

m. Operating segments

A segment is a distinguishable component of the Company and its subsidiaries that is engaged either in providing certain products and services (business segment) or in providing products and services within a particular economic environment (geographical segment), which is subjected to risks and rewards that are different from those in other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before the intra-company and its subsidiaries balances and intra-group transactions are eliminated as part of consolidation process.

n. Derivative financial instruments and hedge accounting

The Company and its subsidiaries use derivative financial instruments such as cross currency swap and call spread to hedge the currency risks.

Derivative financial instruments are recognized as either assets or liabilities in the consolidated statement of financial position and are carried at fair value.

Such derivative financial instruments are initially recognized at fair value on the date on which a derivative contract is entered into and are subsequently remeasured at fair value. Derivatives are carried as financial assets when the fair value is positive and as financial liabilities when the fair value is negative.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**n. Instrumen keuangan derivatif dan
akuntansi lindung nilai (lanjutan)**

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dalam derivatif selama periode berjalan yang tidak memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai dan porsi tidak efektif dari suatu lindung nilai yang efektif harus dibebankan dalam laba rugi.

Nilai wajar atas kontrak swap perubahan kurs dan *call spread* ditetapkan dengan mengacu pada nilai pasar atas instrumen sejenis.

Pada saat dimulainya lindung nilai, Peseroan dan entitas anaknya melakukan penetapan dan pendokumentasian formal atas hubungan lindung nilai dan tujuan manajemen risiko entitas serta strategi pelaksanaan lindung nilai. Pendokumentasian tersebut meliputi identifikasi instrumen lindung nilai, item atau transaksi yang dilindung nilai, sifat dari risiko yang dilindung nilai, dan cara yang akan digunakan entitas untuk menilai efektivitas instrumen lindung nilai tersebut dalam rangka saling hapus eksposur yang berasal dari perubahan dalam nilai wajar item yang dilindung nilai atau perubahan arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai. Lindung nilai tersebut diharapkan akan sangat efektif dalam rangka saling hapus atas perubahan nilai wajar atau perubahan arus kas dan dapat dinilai secara berkelanjutan untuk menentukan bahwa lindung nilai tersebut sangat efektif diseluruh periode pelaporan keuangan sesuai dengan tujuannya.

Lindung nilai atas arus kas

Bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai yang efektif diakui secara langsung dalam ekuitas, sementara itu bagian yang tidak efektif atas keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai diakui dalam laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**n. Derivative financial instruments and hedge
accounting (continued)**

Gains or losses arising from changes in the fair value of derivatives during the period that do not qualify for hedge accounting and the ineffective portion of an effective hedge are recognized directly in profit or loss.

The fair value of cross currency swap contracts and call spread are determined by reference to market values for similar instruments.

At the inception of a hedge relationship, the Company and its subsidiaries formally designate and document the hedge relationship to which the Company and its subsidiaries wish to apply hedge accounting and the risk management objective and strategy for undertaking the hedge. The documentation includes identification of the hedging instrument, the hedged item or transaction, the nature of the risk being hedged and how the entity will assess the hedging instrument's effectiveness in offsetting the exposure to changes in the hedged item's fair value or cash flows attributable to the hedged risk. Such hedges are expected to be highly effective in achieve offsetting changes in fair value or cash flows and are assessed on an ongoing basis to determine that they actually have been highly effective throughout the financial reporting periods for which they were designated.

Cash flow hedge

The effective portion of gains or losses on hedging instrument is recognized directly in equity, while any ineffective portion is recognized immediately in profit or loss.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**n. Instrumen keuangan derivatif dan
akuntansi lindung nilai (lanjutan)**

Lindung nilai atas arus kas (lanjutan)

Jumlah yang sebelumnya telah diakui di ekuitas dipindahkan ke laba rugi Perseroan dan entitas anaknya ketika transaksi lindung nilai tersebut mempengaruhi laba rugi, misalnya pada saat penghasilan atau beban keuangan lindung nilai tersebut diakui atau pada saat prakiraan penjualan terjadi. Jika suatu item lindung nilai menimbulkan pengakuan aset non-keuangan atau liabilitas non-keuangan, maka jumlah yang sebelumnya telah diakui di ekuitas dipindahkan ke dalam biaya perolehan awal atas nilai tercatat aset atau liabilitas non-keuangan tersebut.

Jika prakiraan transaksi atau komitmen tidak lagi diharapkan akan terjadi maka jumlah yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus dipindahkan ke dalam laba rugi. Jika instrumen lindung nilai kadaluarsa atau dijual, dihentikan atau dilaksanakan tanpa penggantian atau perpanjangan atau jika tujuan lindung nilai dibatalkan maka jumlah yang diakui dalam ekuitas tetap diakui dalam ekuitas hingga prakiraan transaksi atau komitmen tersebut mempengaruhi laba rugi.

o. Laba per saham

Laba per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perseroan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan. Rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 berjumlah 3.322.620.187 saham.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**n. Derivative financial instruments and hedge
accounting (continued)**

Cash flow hedge (continued)

Amounts recognized in equity are transferred to the Company and its subsidiaries' profit or loss when the hedged transaction affects profit or loss, such as when the hedged financial income or financial expense is recognized or when a forecast sale occurs. Where the hedged item is the cost of a non-financial asset or a non-financial liability, the amounts recognized in equity are transferred to the initial carrying amount of the non-financial asset or liability.

If the forecast transaction or firm commitment is no longer expected to occur, amounts previously recognized in equity are transferred to profit or loss. If the hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised without replacement or roll-over, or if its designation as a hedge is revoked, amounts previously recognized in equity remain in equity until the forecast transaction or firm commitment affects profit or loss.

o. Earning per share

Earning per share is computed by dividing net income for the year attributable to the owner of the Company by the weighted average number of outstanding shares during the year. The weighted average number of outstanding shares for the year ended December 31, 2017 and 2016 was 3,322,620,187 shares.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Instrumen keuangan

p. Financial instruments

i. Aset keuangan

i. Financial assets

Pengakuan awal dan pengukuran

Initial recognition and measurement

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, jika sesuai. Perseroan dan entitas anaknya menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Financial assets are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, available-for-sale financial assets, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Company and its subsidiaries determine the classification of its financial assets at initial recognition.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajarnya, ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan tersebut.

When financial assets are recognized initially, they are measured at fair value, plus, in the case of financial assets not at fair value through profit or loss, directly attributable transaction costs.

Seluruh pembelian dan penjualan yang lazim pada aset keuangan diakui atau dihentikan pengakuannya pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal pada saat Perseroan dan entitas anaknya berkomitmen untuk membeli atau menjual aset. Pembelian atau penjualan yang lazim adalah pembelian atau penjualan aset keuangan yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu umumnya ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar yang bersangkutan.

All regular way purchases and sales of financial assets are recognized or derecognized on the trade date, i.e., the date that the Company and its subsidiaries commit to purchase or sell the asset. Regular way purchases or sales are purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within the period generally established by regulation or convention in the market place concerned.

Perseroan dan entitas anaknya menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan dievaluasi kembali setiap akhir periode keuangan.

The Company and its subsidiaries determine the classification of its financial assets at initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluate this designation at each end of financial period.

Aset keuangan Perseroan dan entitas anaknya terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, piutang derivatif, uang muka dan aset tidak lancar lainnya - uang jaminan yang termasuk dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang.

The Company and its subsidiaries' financial assets include cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, derivative receivables, advances and other non-current assets - deposits which fall under the loans and receivables category.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Aset keuangan Perseroan dan entitas anaknya juga termasuk piutang derivatif yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi dalam laporan posisi keuangan konsolidasian diukur pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan (atau, apabila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) terjadi bila: (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau (2) Perseroan dan entitas anaknya memindahkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan salah satu diantara (a) Perseroan dan entitas anaknya secara substansial memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) Perseroan dan entitas anaknya secara substansial tidak memindahkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah memindahkan pengendalian atas aset tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued)

The company and its subsidiaries' financial assets also include derivative receivable which is classified as financial asset at fair value through profit or loss.

Subsequent measurement

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Such financial assets are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, less impairment. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

Financial assets at fair value through profit or loss are carried in the consolidated statements of financial position at fair value with gains or losses recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Derecognition

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired; or (2) the Company and its subsidiaries have transferred its rights to receive cash flows from the asset or have assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; and either (a) the Company and its subsidiaries have transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company and its subsidiaries have neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but have transferred control of the asset.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum pembayaran yang mungkin harus dibayar kembali oleh Perseroan dan entitas anaknya.

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perseroan dan entitas anaknya mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perseroan dan entitas anaknya terlebih dahulu menentukan bahwa terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Perseroan dan entitas anaknya menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued)

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company and its subsidiaries could be required to repay.

Impairment of financial assets

The Company and its subsidiaries assess at each reporting date whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired.

For loans and receivables carried at amortized cost, the Company and its subsidiaries first assess whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Company and its subsidiaries determine that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in a collective assessment of impairment.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto dengan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini yang berlaku.

Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan pos cadangan penurunan nilai dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laba rugi. Penghasilan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan. Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta dengan cadangan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan telah terealisasi atau dialihkan kepada Perseroan dan entitas anaknya. Jika, pada periode berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan pos cadangan penurunan nilai. Jika di masa mendatang penghapusan tersebut dapat dipulihkan, jumlah pemulihan tersebut diakui pada laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued)

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset's original effective interest rate. If a loan has a variable interest rate, the discount rate for measuring impairment loss is the current effective interest rate.

The carrying amount of the financial asset is reduced through the use of an allowance for impairment account and the amount of the loss is recognized in profit or loss. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the original effective interest rate of the financial asset. Loans and receivables, together with the associated allowance, are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Company and its subsidiaries. If, in a subsequent period, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance for impairment account. If a future write-off is later recovered, the recovery is recognized in profit or loss.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan

Pengakuan awal dan pengukuran

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Perseroan dan entitas anaknya menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Perseroan dan entitas anaknya terdiri dari utang pembangunan menara dan usaha lainnya, utang lain-lain, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, akrual, utang obligasi dan utang jangka panjang yang termasuk dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan Perseroan dan entitas juga terdiri dari utang swap valuta asing diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan kecuali utang swap valuta asing, diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan tingkat bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas dihentikan pengakuannya atau diturunkan nilainya melalui proses amortisasi suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskon atau premium terhadap biaya jasa transaksi yang merupakan satu kesatuan dari amortisasi suku bunga efektif.

Utang swap valuta asing selanjutnya diukur dengan nilai wajar (Catatan 2n).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial instruments (continued)

ii. Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial liabilities are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss, financial liabilities measured at amortized cost, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Company and its subsidiaries determine the classification of their financial liabilities at initial recognition.

Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case financial liabilities measured at amortized cost, inclusive of directly attributable transaction costs.

The Company and its subsidiaries' financial liabilities include tower construction and other trade payables, other payables, short-term employee benefits liability, accruals, bonds payable and long-term loans which falls under financial liabilities measured at amortized cost category.

The Company and its subsidiaries' financial liabilities also include cross currency swap payable which is classified under financial liabilities at fair value through profit or loss category.

Subsequent measurement

Subsequent to initial recognition, all financial liabilities except cross currency swap payable, are measured at amortized cost using the effective interest method. Gains and losses are recognized in profit or loss when liabilities are derecognized as well as through the effective interest method amortization process. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or transaction costs that are an integral part of the effective interest rate amortization.

Cross currency swap payable is subsequently measured at fair value (Note 2n).

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan ketentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laba rugi.

iii. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

iv. Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama aset dan liabilitas tersebut, atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan aset atau liabilitas tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial instruments (continued)

ii. Financial liabilities (continued)

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

iii. Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

iv. Fair value of financial instruments

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- In the principal market for the asset or liability, or
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

**iv. Nilai wajar instrumen keuangan
(lanjutan)**

Perseroan dan entitas anaknya harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar atas aset non keuangan mempertimbangkan kemampuan pelaku pasar dalam menghasilkan keuntungan ekonomi dengan penggunaan aset pada kemampuan tertinggi dan terbaik aset atau dengan menjualnya ke pelaku pasar yang lain yang akan menggunakan aset di kemampuan tertinggi dan terbaik.

Perseroan dan entitas anaknya menggunakan teknik penilaian yang tepat sesuai keadaan dan dimana tersedia kecukupan data untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalisir penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik
- Level 2 - teknik penilaian yang menggunakan input yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung
- Level 3 - teknik penilaian yang menggunakan input yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diobservasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial instruments (continued)

**iv. Fair value of financial instruments
(continued)**

The principal or the most advantageous market must be accessible to the Company and its subsidiaries.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Company and its subsidiaries use valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities
- Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable
- Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

**iv. Nilai wajar instrumen keuangan
(lanjutan)**

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Perseroan dan entitas anaknya menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi ulang kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada setiap akhir tahun pelaporan.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Perseroan dan entitas anaknya telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, dan risiko aset atau liabilitas, dan level hirarki nilai wajar seperti dijelaskan di atas.

q. Provisi

Provisi diakui jika Perseroan dan entitas anaknya memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, provisi dibatalkan.

r. Goodwill

Goodwill merupakan selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian Perseroan atas nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi pada tanggal akuisisi. *Goodwill* diuji penurunan nilainya setiap tahun dan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai atas *goodwill* tidak dapat dipulihkan. Keuntungan dan kerugian pelepasan entitas mencakup jumlah tercatat *goodwill* yang terkait dengan entitas yang dijual.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial instruments (continued)

**iv. Fair value of financial instruments
(continued)**

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Company and its subsidiaries determine whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

For the purpose of fair value disclosures, the Company and its subsidiaries have determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

q. Provisions

Provisions are recognized when the Company and its subsidiaries have a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimates. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

r. Goodwill

Goodwill represents the excess of the cost of an acquisition over the fair value of the Company's share of the net identifiable assets of the acquired subsidiary at the date of acquisition. *Goodwill* is tested annually for impairment and carried at cost less accumulated impairment losses. Impairment losses on goodwill are not reversed. Gains and losses on disposal of an entity include the carrying amount of goodwill relating to the entity sold.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

r. Goodwill (lanjutan)

Goodwill dialokasikan pada unit penghasil kas dalam rangka menguji penurunan nilai. Alokasi dibuat untuk unit penghasil kas atau kelompok unit penghasil kas yang diharapkan mendapat manfaat dari kombinasi bisnis dimana goodwill tersebut timbul.

s. Aset takberwujud

Aset takberwujud terdiri dari hubungan pelanggan yang diperoleh sebagai bagian dari kombinasi bisnis diakui sebesar nilai wajar pada tanggal perolehannya. Hubungan pelanggan memiliki masa manfaat yang terbatas dan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan hubungan pelanggan selama estimasi masa manfaatnya antara 2 sampai 15 tahun.

t. Operasi yang dihentikan

Dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode pelaporan, dan juga untuk periode komparatif tahun sebelumnya, pendapatan dan beban dari operasi yang dihentikan dilaporkan terpisah dari pendapatan dan beban dari operasi yang dilanjutkan sampai ke level laba setelah pajak, walaupun dalam kondisi Perseroan masih memiliki bagian sebagai nonpengendali dalam entitas anak tersebut setelah penjualan.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perseroan dan entitas anaknya yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Goodwill (continued)

Goodwill is allocated to cash-generating units for the purpose of impairment testing. The allocation is made to those cash-generating units or groups of cash-generating units that are expected to benefit from the business combination in which the goodwill arose.

s. Intangible assets

Intangible assets consisting of customer relationships acquired in a business combination are recognized at fair value at the acquisition date. Customer relationships have a finite useful life and are carried at cost less accumulated amortization. Amortization is calculated using the straight-line method to allocate the cost of customer relationships over their estimated useful life of 2 to 15 years.

t. Discontinued operations

In the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as of the reporting period, and of the comparable period of the previous year, income and expenses from discontinued operations are reported separately from income and expenses from continuing operations, down to the level of profit after taxes, even when the Company retains a non-controlling interests in the subsidiary after the sale.

**3. JUDGMENTS, ESTIMATIONS AND
ASSUMPTIONS**

The preparation of consolidated financial statements, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, requires management to make judgments, estimations and assumptions that affect amounts reported therein. Due to inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods may differ from those estimates.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Company and its subsidiaries' accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
(lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perseroan dan entitas anaknya menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan dan entitas anaknya seperti diungkapkan pada Catatan 2p.

Cadangan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha

Perseroan dan entitas anaknya mengevaluasi akun tertentu yang diketahui bahwa para pelanggannya tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Perseroan dan entitas anaknya mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perseroan dan entitas anaknya.

Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan penurunan nilai piutang usaha. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 5.

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perseroan dan entitas anaknya merupakan mata uang dalam lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan dan beban pokok pendapatan. Berdasarkan penilaian manajemen Perseroan dan entitas anaknya, mata uang fungsional mereka adalah Rupiah.

**3. JUDGMENTS, ESTIMATIONS AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Judgments (continued)

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Company and its subsidiaries determine the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company and its subsidiaries' accounting policies disclosed in Note 2p.

Allowance for Impairment of Trade Receivables

The Company and its subsidiaries evaluate specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Company and its subsidiaries use judgment, based on available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Company and its subsidiaries expected to collect.

These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment of trade receivables. Further details are shown in Note 5.

Determination of Functional Currency

The functional currencies of the Company and its subsidiaries are the currency of the primary economic environment in which each entity operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services. Based on the Company and its subsidiaries management assessment, their functional currency is Rupiah.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
(lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Alokasi Harga Beli dan Penurunan Nilai Goodwill

Akuntansi akuisisi mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi secara ekstensif dalam mengalokasikan harga beli berdasarkan nilai pasar wajar aset dan liabilitas yang diakuisisi, termasuk aset takberwujud. Akuisisi bisnis tertentu oleh Perseroan dan entitas anaknya menimbulkan *goodwill*. Sesuai PSAK No. 22 (Revisi 2010), "Kombinasi Bisnis", *goodwill* tidak diamortisasi dan diuji penurunan nilai setiap tahunnya.

Uji penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. *Goodwill* diuji untuk penurunan nilai setiap tahunnya dan jika terdapat indikasi penurunan nilai, manajemen harus menggunakan pertimbangan dalam mengestimasi nilai terpulihkan dan menentukan adanya indikasi penurunan nilai.

Sewa

Perseroan dan entitas anaknya menyewakan menara berdasarkan perjanjian sewa operasi, dengan sewa yang dinegosiasikan dalam jangka waktu tertentu. Perseroan dan entitas anaknya telah menentukan, berdasarkan evaluasi dari syarat dan ketentuan dari perjanjian, bahwa tidak terjadi perpindahan atas semua risiko yang signifikan dan hak kepemilikan menara yang disewakan atas sewa operasi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan dibawah ini. Perseroan dan entitas anaknya mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Situasi dan asumsi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perseroan dan entitas anaknya. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

**3. JUDGMENTS, ESTIMATIONS AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Judgments (continued)

Purchase Price Allocation and Goodwill Impairment

Acquisition accounting requires extensive use of accounting estimates to allocate the purchase price to the fair market values of the assets and liabilities purchased, including intangible assets. Certain business acquisitions of the Company and its subsidiaries have resulted in goodwill. Under PSAK No. 22 (Revised 2010), "Business Combinations", such goodwill is not amortized and subject to an annual impairment testing.

Impairment test is performed when certain impairment indicators are present. In case of goodwill, such assets are subjected to annual impairment test and whenever there is an indication that such asset may be impaired, management has to use its judgment in estimating the recoverable value and determining if there is any indication of impairment.

Leases

The Company and its subsidiaries lease their towers under an operating lease arrangement, with the lease negotiated for a specific terms. The Company and its subsidiaries have determined, based on an evaluation of the terms and conditions of the arrangements, that it retains all the significant risks and rewards of ownership of the towers which are leased out on operating leases.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Company and its subsidiaries based their assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company and its subsidiaries. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
(lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Imbalan Kerja

Penentuan kewajiban dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Perseroan dan entitas anaknya bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perseroan dan entitas anaknya diperlakukan sesuai dengan kebijakan yang dijelaskan pada Catatan 2i. Sementara Perseroan dan entitas anaknya berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perseroan dan entitas anaknya dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Nilai tercatat atas estimasi liabilitas imbalan kerja Perseroan dan entitas anaknya telah diungkapkan dalam Catatan 19.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 3 sampai dengan 30 tahun. Ini adalah umur secara umum diharapkan dalam industri dimana Perseroan dan entitas anaknya menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Berdasarkan hasil penilaian kembali Perseroan dan entitas anaknya atas masa manfaat dan nilai sisa dari aset menara, manajemen menentukan bahwa masa manfaat aset menara telah berubah dari 20 menjadi 30 tahun dan mengestimasi 10% nilai sisa untuk aset menara berdasarkan laporan Kantor Jasa Penilai Publik independen. Dengan demikian, Perseroan dan entitas anaknya telah menerapkan perubahan ini secara prospektif, efektif 1 Januari 2017. Dampak dari perubahan estimasi akuntansi ini disajikan di Catatan 7.

3. JUDGMENTS, ESTIMATIONS AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Employee Benefits

The determination of the Company and its subsidiaries' cost of pension and employee benefits liability is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turnover rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Company and its subsidiaries' assumptions are treated in accordance with the policies as mentioned in Note 2i. While the Company and its subsidiaries' believe that their assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company and its subsidiaries' actual experiences or significant changes in the Company and its subsidiaries' assumptions may materially affect their estimated liability for employee benefits and net employee benefits expense. The carrying amounts of the Company and its subsidiaries' estimated employee benefits liability are disclosed in Note 19.

Depreciation of Fixed Assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful life. Management properly estimates the useful life of these fixed assets to be within 3 to 30 years. These are common life expectations applied in the industries where the Company and its subsidiaries conduct their businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful life and the residual value of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

Based on the Company and its subsidiaries reassessment of the tower assets useful life and residual value, management determined that the useful life of the tower assets has changed from 20 to 30 years and an estimated 10% residual value for its tower assets based on independent appraisal reports. Accordingly, the Company and its subsidiaries have applied the change prospectively, effective starting January 1, 2017. The impact of the changes in accounting estimates is disclosed in Note 7.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
(lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perseroan dan entitas anaknya mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 17.

Instrumen Keuangan

Perseroan dan entitas anaknya mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perseroan dan entitas anaknya menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba rugi Perseroan dan entitas anaknya. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 38.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan total aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 17e.

**3. JUDGMENTS, ESTIMATIONS AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Income Tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company and its subsidiaries recognize liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Note 17.

Financial Instruments

The Company and its subsidiaries carry certain financial assets and liabilities at fair value, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidences, the amount of changes in fair value would differ if the Company and its subsidiaries utilized different valuation methodology. Any changes in a fair value of these financial assets and liabilities would directly affect the Company and its subsidiaries' profit or loss. Further details are disclosed in Note 38.

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences are used. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of the future taxable profit together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Note 17e.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
(lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi Biaya Pembongkaran Menara

Perseroan dan entitas anak melakukan penelaahan atas estimasi biaya pembongkaran menara pada akhir periode laporan. Dalam penentuan jumlah estimasi biaya tersebut diperlukan estimasi dan asumsi yang signifikan karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi jumlah liabilitas pada akhirnya. Faktor-faktor tersebut mencakup estimasi untuk waktu dan jumlah biaya untuk aktivitas pembongkaran, perubahan teknologi, perubahan peraturan, peningkatan biaya karena tingkat inflasi dan perubahan tingkat bunga diskonto. Ketidakpastian tersebut dapat mengakibatkan jumlah pengeluaran aktual di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah yang dicadangkan saat ini. Jumlah estimasi biaya pada akhir periode pelaporan merupakan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini dari biaya restorasi masa mendatang yang diperlukan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 16.

3. JUDGMENTS, ESTIMATIONS AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Estimated Cost of Dismantling of Towers

The Company and its subsidiaries assess their estimated cost of dismantling of towers at end of reporting period. Significant estimates and assumptions are made in determining the estimation cost as there are numerous factors that will affect the ultimate liability. These factors include estimates of the extent and costs of dismantling activities, technological changes, regulatory changes, cost increases due to inflation rates and changes in discount rates. Those uncertainties may result in future actual expenditure differing from the amounts currently provided. The estimated cost at end of reporting period represents management's best estimate of the present value of the future dismantling costs required. Further details are disclosed in Note 16.

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
Kas	4.556	3.137	Cash on hand
Rekening giro			Current accounts
Bank - pihak ketiga			Cash in banks - third parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank UOB Indonesia	111.233	3.283	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	88.318	21.012	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	29.882	8.631	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
PT Bank DBS Indonesia	12.180	5.381	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank OCBC NISP Tbk.	10.033	6.053	PT Bank OCBC NISP Tbk.
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	6.342	415	PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., cabang Jakarta	3.223	263	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta branch
PT Bank BTPN	3.182	-	PT Bank BTPN
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	1.018	790	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
PT Bank DKI	329	217	PT Bank DKI
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	275	2	PT Bank CIMB Niaga Tbk.
PT Bank Mega Syariah	266	10	PT Bank Mega Syariah
PT Bank Rabobank Indonesia	217	219	PT Bank Rabobank Indonesia
PT Bank Bukopin Tbk.	194	289	PT Bank Bukopin Tbk.
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	141	136	PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
PT Bank Sinarmas	125	342	PT Bank Sinarmas
Bank of America, NA, Indonesia	101	100	Bank of America, NA, Indonesia
PT BRI Syariah	5	5	PT BRI Syariah
PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	1	2	PT Bank Mayapada Internasional Tbk.
PT Bank MNC Internasional Tbk.	-	1	PT Bank MNC Internasional Tbk.
	267.065	47.151	

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
Dolar AS			US Dollar
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	64.620	62.629	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
DBS Bank Ltd, Singapura	22.762	24.673	DBS Bank Ltd, Singapore
JPMorgan Chase, N.A., Singapura	14.489	10.543	JPMorgan Chase, N.A., Singapore
ING Bank N.V.	10.251	7.996	ING Bank N.V.
PT Bank UOB Indonesia	3.989	40.509	PT Bank UOB Indonesia
OCBC Bank, Singapura	3.053	2.136	OCBC Bank, Singapore
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	2.735	2.691	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Rabobank Indonesia	1.564	1.534	PT Bank Rabobank Indonesia
PT Bank OCBC NISP Tbk.	611	723	PT Bank OCBC NISP Tbk.
PT Bank BTPN	254	-	PT Bank BTPN
PT Bank BNP Paribas	99	-	PT Bank BNP Paribas
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ	59	13	Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	53	53	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	30	30	PT Bank Mayapada Internasional Tbk.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	5	6	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Bank of America, Singapura	-	5.096	Bank of America, Singapore
	124.574	158.632	
Dolar Singapura			Singapore Dollar
DBS Bank Ltd, Singapura	6.067	7	DBS Bank Ltd, Singapore
Euro			Euro
ING Bank N.V.	29	25	ING Bank N.V.
	397.735	205.815	
Bank - pihak berelasi (Catatan 34)			Cash in bank - related party (Note 34)
PT Bank Central Asia Tbk.			PT Bank Central Asia Tbk.
Rupiah	44.000	62.370	Rupiah
Dolar AS	5.745	2.918	US Dollar
Dolar Singapura	4	5	Singapore Dollar
	49.749	65.293	
Total rekening giro	447.484	271.108	Total current accounts
Deposito berjangka			Time deposits
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	-	654.540	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
PT Bank UOB Indonesia	-	520.000	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.	-	100.000	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.
PT Bank Mega Syariah	-	8.000	PT Bank Mega Syariah
Dolar AS			US Dollar
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	1.372.180	1.011.328	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
PT Bank UOB Indonesia	474.180	134.361	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.	40.644	201.540	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.
Total deposito berjangka	1.887.004	2.629.769	Total time deposits
	2.339.044	2.904.014	

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, tingkat bunga rata-rata untuk rekening giro Rupiah berkisar antara 2,25% per tahun (tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 sebesar 2,25%), 0,50% per tahun untuk rekening Dolar AS (tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 sebesar 0,50%) dan 0,40% per tahun untuk rekening Euro (tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 sebesar 0,40%).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, tingkat bunga untuk deposito berjangka Rupiah dan Dolar AS masing-masing berkisar antara 6,35% sampai dengan 7,25% dan 1,25% sampai dengan 1,8% per tahun (tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016: 7,25% sampai dengan 8,75% dan 0,9% sampai dengan 1,75% per tahun).

5. PIUTANG USAHA

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016
Pihak ketiga		
Rupiah	823.864	434.644
Dolar AS	10.853	6.325
	834.717	440.969
Pihak berelasi		
Rupiah	17.128	23
	851.845	440.992
Dikurangi: Cadangan penurunan nilai	(227.850)	(89.293)
	623.995	351.699

Rincian piutang usaha berdasarkan nama pelanggan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016
PT Internux	330.718	256.872
PT XL Axiata Tbk.	235.362	39.470
PT Telekomunikasi Selular	166.747	41.672
PT Smartfren Telecom Tbk.	41.794	59.501
PT Angkasa Komunikasi Global Utama	16.762	-
PT Hutchison 3 Indonesia	14.179	9.518
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika	11.410	3.493
PT Sampoerna Telecom Indonesia	5.402	8.870
PT Indosat Tbk.	1.912	6.317
PT Smart Telecom	91	3.221
Lain-lain	27.468	12.058
	851.845	440.992
Dikurangi: Cadangan penurunan nilai	(227.850)	(89.293)
	623.995	351.699

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

For the year ended December 31, 2017, current account in banks earned an average interest rate of 2.25% per annum for Rupiah (year ended December 31, 2016: 2.25%), 0.50% per annum for US Dollar (year ended December 31, 2016: 0.50%) and 0.40% per annum for Euro (year ended December 31, 2016 : 0.40%).

For the year ended December 31, 2017, time deposits earned interest at the rates ranging from 6.35% to 7.25% and 1.25% to 1.8% per annum for Rupiah and US Dollar, respectively (year ended December 31, 2016: 7.25% to 8.75% and 0.9% to 1.75%, respectively).

5. TRADE RECEIVABLES

The details of trade receivables per currency are as follows:

Third parties	
Rupiah	
US Dollar	
Related parties	
Rupiah	
Less: Allowance for impairment	

The details of trade receivables per customer are as follows:

PT Internux	
PT XL Axiata Tbk.	
PT Telekomunikasi Selular	
PT Smartfren Telecom Tbk.	
PT Angkasa Komunikasi Global Utama	
PT Hutchison 3 Indonesia	
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika	
PT Sampoerna Telecom Indonesia	
PT Indosat Tbk.	
PT Smart Telecom	
Others	

Less: Allowance for impairment

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016
Belum jatuh tempo	319.651	151.569
Lewat jatuh tempo		
1 - 30 hari	61.874	25.608
31 - 60 hari	69.959	8.940
61 - 90 hari	34.548	2.519
Lebih dari 90 hari	365.813	252.356
	851.845	440.992
Dikurangi: Cadangan penurunan nilai	(227.850)	(89.293)
	623.995	351.699

Piutang usaha tidak dijamin, tidak berbunga dan biasanya dilunasi dalam jangka waktu selama 30 - 60 hari.

Mutasi cadangan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,	
	2017	2016
Saldo awal	89.293	270.559
Penambahan cadangan penurunan nilai (Catatan 31)	139.719	158.429
Penghapusan cadangan penurunan nilai	(1.162)	(500)
Reklasifikasi ke aset tidak lancar lainnya (Catatan 11)	-	(339.195)
Saldo akhir	227.850	89.293

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut. Manajemen juga berkeyakinan bahwa tidak ada konsentrasi risiko kredit yang signifikan atas piutang kepada pihak ketiga.

6. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016
Biaya jaminan	8.524	8.330
Asuransi	5.841	5.232
Sewa kantor	5.382	4.785
Lain-lain	814	1.899
	20.561	20.246

5. TRADE RECEIVABLES (continued)

The aging of trade receivables is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2016	
151.569		Current
25.608		Overdue
8.940		1 - 30 days
2.519		31 - 60 days
252.356		61 - 90 days
		Over 90 days
440.992		
(89.293)		Less: Allowance for impairment
351.699		

Trade receivables are unsecured, interest free and normally settled on terms between 30 - 60 days.

Movements in the allowance for impairment are as follows:

	2017	2016	
270.559			Beginning balance
158.429			Additional allowance for impairment (Note 31)
(500)			Write-off of allowance for impairment
(339.195)			Reclassification to other non-current assets (Note 11)
89.293			Ending balance

Management believes that the allowance for impairment is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts. Management also believes that there are no significant concentrations of credit risk in trade receivables.

6. PREPAID EXPENSES

Guarantee fee
Insurance
Office rental
Others

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

7. ASET TETAP

	Saldo 31 Des. 2016 (Disajikan kembali - Catatan 41)/ Balance Dec. 31, 2016 (As restated - Note 41)	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi dan transfer/ Reclassification and transfer	Balance Dec. 31, 2017
Harga perolehan					
Pemilikan Langsung					
Tanah	3.793	-	-	-	3.793
Menara	15.482.996	48.670	(73.993)	487.366	15.945.039
Mesin	7.720	-	-	530	8.250
Peralatan kantor	85.394	22.734	(173)	7.340	115.295
Kendaraan bermotor	6.963	6.928	(2.796)	-	11.095
Peralatan proyek	155.353	41.918	-	62.986	260.257
Perabotan kantor	40.757	141	-	75	40.973
Sewa Pembiayaan					
Peralatan proyek	32.500	-	-	-	32.500
	15.815.476	120.391	(76.962)	558.297	16.417.202
Aset dalam penyelesaian	308.393	698.091	-	(558.297)	448.187
	16.123.869	818.482	(76.962)	-	16.865.389
Akumulasi penyusutan					
Pemilikan Langsung					
Menara	3.674.762	407.453	(29.836)	-	4.052.379
Mesin	1.181	997	-	-	2.178
Peralatan kantor	63.680	12.488	(131)	-	76.037
Kendaraan bermotor	4.301	877	(1.784)	-	3.394
Peralatan proyek	69.145	17.710	-	-	86.855
Perabotan kantor	40.235	322	-	-	40.557
Sewa Pembiayaan					
Peralatan proyek	1.174	2.257	-	-	3.431
	3.854.478	442.104	(31.751)	-	4.264.831
Nilai buku neto	12.269.391				12.600.558

Acquisition cost
Direct Ownership
Land
Tower
Machinery
Office equipment
Motor vehicles
Field equipment
Furniture and fixtures
Finance Lease
Field equipment
Construction in progress
Accumulated depreciation
Direct Ownership
Tower
Machinery
Office equipment
Motor vehicles
Field equipment
Furniture and fixtures
Finance Lease
Field equipment
Net book value

	Saldo 31 Des. 2015 (Disajikan kembali - Catatan 41)/ Balance Dec. 31, 2015 (As restated - Note 41)	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi dan transfer/ Reclassification and transfer	Balance Dec. 31, 2016
Harga perolehan					
Pemilikan Langsung					
Tanah	21.927	-	(18.134)	-	3.793
Menara	12.515.905	3.133.740	(359.827)	193.178	15.482.996
Mesin	4.689	557	-	2.474	7.720
Peralatan kantor	76.483	7.105	(1.797)	3.603	85.394
Kendaraan bermotor	6.266	697	-	-	6.963
Peralatan proyek	133.689	21.191	-	473	155.353
Perabotan kantor	43.160	-	(2.588)	185	40.757
Sewa Pembiayaan					
Peralatan proyek	-	32.500	-	-	32.500
	12.802.119	3.195.790	(382.346)	199.913	15.815.476
Aset dalam penyelesaian	180.370	327.936	-	(199.913)	308.393
	12.982.489	3.523.726	(382.346)	-	16.123.869
Akumulasi penyusutan					
Pemilikan Langsung					
Menara	3.016.601	725.676	(67.515)	-	3.674.762
Mesin	427	754	-	-	1.181
Peralatan kantor	51.326	13.838	(1.484)	-	63.680
Kendaraan bermotor	3.736	565	-	-	4.301
Peralatan proyek	56.852	12.293	-	-	69.145
Perabotan kantor	39.715	3.023	(2.503)	-	40.235
Sewa Pembiayaan					
Peralatan proyek	-	1.174	-	-	1.174
	3.168.657	757.323	(71.502)	-	3.854.478
Nilai buku neto	9.813.832				12.269.391

Acquisition cost
Direct Ownership
Land
Tower
Machinery
Office equipment
Motor vehicles
Field equipment
Furniture and fixtures
Finance Lease
Field equipment
Construction in progress
Accumulated depreciation
Direct Ownership
Tower
Machinery
Office equipment
Motor vehicles
Field equipment
Furniture and fixtures
Finance Lease
Field equipment
Net book value

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

7. ASET TETAP (lanjutan)

Sebagai akibat penjualan saham Perseroan dalam entitas anak, Protelindo Netherlands B.V. ("PNBV"), kepada Cellnex pada tanggal 27 Mei 2016, terdapat transaksi pengurangan menara sebesar Rp329.072 (Catatan 1c).

Pada tanggal 31 Desember 2017, seluruh aset tetap (kecuali tanah dan aset dalam penyelesaian) telah diasuransikan kepada PT AIG Insurance Indonesia, PT Asuransi ASEI Indonesia, dan PT Asuransi FPG Indonesia terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp9.301.193 (31 Desember 2016: Rp9.287.863). Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan asuransi memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Penyusutan yang dibebankan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp442.104 (31 Desember 2016: Rp757.323) (Catatan 26). Dampak dari perubahan estimasi akuntansi atas umur manfaat dan nilai sisa menara-menara dalam aset tetap untuk tahun berjalan dan tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

	Penurunan dalam beban penyusutan/ Decrease in depreciation expense	
2017	382.315	2017
2018 - 2022	1.931.735	2018 - 2022
2023 - akhir masa manfaat	3.208.295	2023 - end of useful life

Rincian aset dalam penyelesaian beserta persentase penyelesaian terhadap nilai kontrak yang berlokasi di Jawa, Sumatera dan pulau lainnya di Indonesia adalah sebagai berikut:

7. FIXED ASSETS (continued)

As a result of the sale of the Company's shares in a subsidiary, Protelindo Netherlands B.V. ("PNBV"), to Cellnex on May 27, 2016, there was a deduction of towers amounting to Rp329,072 (Note 1c).

As of December 31, 2017, all of fixed assets (except for land and construction in progress) are insured with PT AIG Insurance Indonesia, PT Asuransi ASEI Indonesia, and PT Asuransi FPG Indonesia against fire, theft and other possible risks for Rp9,301,193 (December 31, 2016: Rp9,287,863). Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

Depreciation expense charged for the year ended December 31, 2017 amounted to Rp442,104 (December 31, 2016: Rp757,323) (Note 26). The impact of the change in accounting estimate on useful life and residual value of towers in fixed assets for current year and the following are as follows:

The details of construction in progress with the percentages of completion of the contract value which are located in Java, Sumatera and other islands in Indonesia are as follows:

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

7. ASET TETAP (lanjutan)

7. FIXED ASSETS (continued)

	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Akumulasi biaya/ Accumulated costs	Estimasi penyelesaian/ Estimated completion	
31 Desember 2017				December 31, 2017
Menara-menara	75%	58.379	Januari/ January 2018	Towers
Menara-menara	50%	119.892	Februari/ February 2018	Towers
Menara-menara	25%	77.609	Maret/ March 2018	Towers
Peralatan proyek	10%-75%	174.676	Januari-Maret/ January-March 2018	Field Equipment
Peralatan kantor	50%	7.680	Februari/ February 2018	Office Equipment
Perangkat lunak	25%	9.951	Maret/ March 2018	Software
		448.187		
31 Desember 2016				December 31, 2016
Menara-menara	75%	161.661	Januari/ January 2017	Towers
Menara-menara	50%	48.282	Februari/ February 2017	Towers
Menara-menara	25%	12.256	Maret/ March 2017	Towers
Peralatan proyek	25%	86.194	Maret/ March 2017	Field equipment
		308.393		

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset tetap.

As of December 31, 2017 and 2016, management believes that there was no indication of impairment in the value of fixed assets.

8. GOODWILL

8. GOODWILL

	31 Desember/ December 31, 2016	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Penurunan nilai/ Impairment	31 Desember/ December 31, 2017	
Harga perolehan Goodwill	152.812	-	-	-	152.812	Acquisition cost Goodwill
	31 Desember/ December 31, 2015	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Penurunan nilai/ Impairment	31 Desember/ December 31, 2016	
Harga perolehan Goodwill	363.150	-	(186.097)	(24.241)	152.812	Acquisition cost Goodwill

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. GOODWILL (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, *goodwill* yang dihasilkan dari transaksi akuisisi iForte pada 1 Juli 2015 sebesar Rp177.053 berasal dari selisih antara harga beli dengan nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi (Catatan 1c).

Sebagai akibat penjualan saham Perseroan dalam entitas anak, Protelindo Netherlands B.V. ("PNBV") kepada Cellnex pada tanggal 27 Mei 2016, terdapat transaksi pengurangan *goodwill* sebesar Rp186.097 (Catatan 1c).

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan dan entitas anaknya melakukan pengujian penurunan nilai setiap tahun untuk unit penghasil kas tersebut berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dengan menggunakan proyeksi arus kas yang didiskontokan. Pengujian penurunan nilai menggunakan proyeksi arus kas yang telah disetujui manajemen menggunakan tingkat diskonto tahunan sebesar 12,4%.

Pada tahun 2016, Perseroan telah mengakui kerugian penurunan nilai *goodwill* yang timbul dari iForte sebesar Rp24.241, yang dicatat sebagai bagian dari beban usaha lainnya, neto pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Penurunan nilai dihasilkan dari perubahan tingkat pertumbuhan yang mempengaruhi proyeksi arus kas.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan dan entitas anaknya melakukan pengujian penurunan nilai setiap tahun untuk unit penghasil kas tersebut berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dengan menggunakan proyeksi arus kas yang didiskontokan. Pengujian penurunan nilai menggunakan proyeksi arus kas yang telah disetujui manajemen menggunakan tingkat diskonto tahunan sebesar 11,9%.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai *goodwill*.

8. GOODWILL (continued)

As of December 31, 2017 and 2016, goodwill resulted from acquisition of the iForte on July 1, 2015 of Rp177,053 was derived from the difference between the purchase price consideration and the fair value of identifiable net assets (Note 1c).

As a result of the sale of the Company's shares in a subsidiary, Protelindo Netherlands B.V. ("PNBV"), to Cellnex on May 27, 2016, there was a deduction in goodwill amounting to Rp186,097 (Note 1c).

As of December 31, 2016, the Company and its subsidiaries performed their annual impairment tests on this cash generating unit based on fair value less cost to sell using discounted cash flow projections. The impairment tests use cash flows projections which have been approved by management using annual discount rate of 12.4%.

In 2016, the Company has recognized impairment loss on the goodwill arising from iForte amounting to Rp24,241, recorded as part of other operating losses, net in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. The impairment resulted from the change in perpetuity growth rate which affects the projected cash flows.

As of December 31, 2017, the Company and its subsidiaries performed their annual impairment tests on this cash generating unit based on fair value less cost to sell using discounted cash flow projections. The impairment tests use cash flows projections which have been approved by management using annual discount rate of 11.9%.

As of December 31, 2017, the Company believes that there was no indicators of impairment in the value of goodwill.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

9. ASET TAKBERWUJUD

	31 Desember/ December 31, 2016	Penambahan/ Additions	Penurunan/ Deductions	31 Desember/ December 31, 2017	
Harga perolehan					Acquisition cost
Hubungan pelanggan	771.043	-	-	771.043	Customer relationships
Amortisasi					Amortization
Akumulasi amortisasi hubungan pelanggan	(104.886)	(76.526)	-	(181.412)	Accumulated amortization of customer relationships
	666.157			589.631	

	31 Desember/ December 31, 2015	Penambahan/ Additions	Penurunan/ Deductions	31 Desember/ December 31, 2016	
Harga perolehan					Acquisition cost
Hubungan pelanggan	1.360.610	104.813	(694.380)	771.043	Customer relationships
Amortisasi					Amortization
Akumulasi amortisasi hubungan pelanggan	(173.835)	(94.580)	163.529	(104.886)	Accumulated amortization of customer relationships
	1.186.775			666.157	

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, hubungan pelanggan berasal dari transaksi akuisisi iForte pada tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp666.231, serta beberapa menara pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp104.813.

Sebagai akibat penjualan saham Perseroan dalam entitas anak, Protelindo Netherlands B.V. ("PNBV"), kepada Cellnex pada tanggal 27 Mei 2016, terdapat transaksi pengurangan hubungan pelanggan sebesar Rp530.851.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, alokasi jumlah amortisasi ke dalam laba rugi adalah Rp76.526 (31 Desember 2016: Rp94.580) (Catatan 26).

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada penurunan nilai aset takberwujud.

10. SEWA LOKASI JANGKA PANJANG

Akun ini merupakan beban sewa dibayar dimuka atas tanah atau bangunan untuk menara yang berlokasi di Jawa, Sumatera dan pulau lainnya di Indonesia. Masa sewa lokasi adalah 3 tahun sampai 10 tahun.

9. INTANGIBLE ASSETS

As of December 31, 2017 and 2016, customer relationships resulted from acquisition of iForte on July 1, 2015 of Rp666,231, and certain towers on June 30, 2016 of Rp104,813.

As a result of the sale of the Company's shares in a subsidiary, Protelindo Netherlands B.V. ("PNBV"), to Cellnex on May 27, 2016, there was a deduction in customer relationships amounting to Rp530,851.

For the year ended December 31, 2017, the allocation of amortization to profit or loss amounted to Rp76,526 (December 31, 2016: Rp94,580) (Note 26).

As of December 31, 2017 and 2016, the management believes that there was no impairment in the value of intangible assets.

10. LONG-TERM SITE RENTALS

This account represents land or building rental prepayments for towers which are located in Java, Sumatra and other islands in Indonesia. The rental periods are from 3 years to 10 years.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

10. SEWA LOKASI JANGKA PANJANG (lanjutan)

Sewa lokasi jangka panjang ini diamortisasi secara garis lurus selama masa sewa.

	31 Desember/ December 31, 2016	Penambahan/ Additions	Amortisasi/ Amortization	Pengurangan/ Deductions	31 Desember/ December 31, 2017	
Sewa tanah di lokasi menara	1.858.790	574.778	(369.237)	-	2.064.331	Tower site rentals
	31 Desember/ December 31, 2015	Penambahan/ Additions	Amortisasi/ Amortization	Pengurangan/ Deductions	31 Desember/ December 31, 2016	
Sewa tanah di lokasi menara	1.297.608	890.872	(325.551)	(4.139)	1.858.790	Tower site rentals

10. LONG-TERM SITE RENTALS (continued)

These long-term site rentals are amortized on a straight-line basis over the rental periods.

11. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
Piutang usaha tidak lancar	339.195	339.195	Non-current trade receivables
Cadangan penurunan nilai			Allowance for impairment loss
piutang usaha tidak lancar (Catatan 5)	(339.195)	(339.195)	of non-current trade receivables (Note 5)
Uang muka pembelian aset tetap	98.759	27.408	Advances for purchase of fixed assets
Uang jaminan	11.081	32.142	Deposits
Lain-lain	8.752	5.456	Others
	118.592	65.006	

11. OTHER NON-CURRENT ASSETS

Pada tanggal 10 November 2014, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan PT Bakrie Telecom Tbk. dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") Sementara berdasarkan perkara PKPU No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pusat. Pada tanggal 9 Desember 2014, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan pengadilan untuk mengesahkan Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Desember 2014 yang dibuat antara PT Bakrie Telecom Tbk. dengan para kreditur terkait, termasuk Perseroan ("Perjanjian Perdamaian"), dimana hutang sewa PT Bakrie Telecom Tbk. kepada Perseroan akan dibayarkan melalui mekanisme *Cash Waterfall*, tunai bertahap dan/atau diselesaikan dengan menggunakan obligasi konversi wajib/mandatory convertible bonds.

Piutang usaha tidak lancar merupakan piutang usaha yang berasal dari PT Bakrie Telecom Tbk. sebesar Rp339.195 dimana telah dibentuk cadangan penuh atas penurunan nilai. Pada tahun 2016, Manajemen memutuskan untuk memindahkan piutang ini dari piutang usaha ke aset tidak lancar lainnya sebagai hasil dari penilaian penurunan nilai (Catatan 5).

On November 10, 2014, the Commercial Court of the District Court of Central Jakarta had granted PT Bakrie Telecom Tbk. a Temporary Suspension of Payment (the "SOP") based on SOP case No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pusat. On December 9, 2014, the Commercial Court of the District Court of Central Jakarta has given a court order to legalize the Settlement Agreement dated December 8, 2014, made by PT Bakrie Telecom Tbk. and the respective creditors, including the Company (the "Settlement Agreement"), which the lease debt of PT Bakrie Telecom Tbk. to the Company will be paid through Cash Waterfall mechanism, cash installments and/or settled by mandatory convertible bonds.

Non-current trade receivables related to receivable from PT Bakrie Telecom Tbk. amounting to Rp339,195 which full allowance for impairment has been provided. In 2016, management decided to reclassify this receivable from trade to other non-current assets as a result of impairment assessment (Note 5).

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

11. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)

Uang muka pembelian aset tetap merupakan pembayaran dimuka yang dilakukan oleh Perseroan dan entitas anak kepada kontraktor untuk pembangunan menara dan rumah panel.

11. OTHER NON-CURRENT ASSETS (continued)

Advances for purchase of fixed assets represent payments in advance made by the Company and subsidiaries to contractors to construct towers and shelters.

12. UTANG PEMBANGUNAN MENARA DAN USAHA LAINNYA - PIHAK KETIGA

12. TOWER CONSTRUCTION AND OTHER TRADE PAYABLES - THIRD PARTIES

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016
Rincian per mata uang		
Pihak ketiga		
Rupiah	266.188	186.640
Dolar AS	5.475	2.420
Euro	-	267
	271.663	189.327

Details per currency
Third parties
Rupiah
US Dollar
Euro

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016
Rincian per pemasok		
PT Bach Multi Global	21.442	3.479
PT Marsa Kanina Bestari	14.795	5.583
PT Ciptakomunindo Pradipta	14.593	8.292
PT Aneka Cahaya Surya	11.835	1.169
PT Tata Bersama	9.908	11.129
Tn. Novan Soekarno	8.863	7.056
PT Kurongkor Utama	8.794	5.860
PT Dwi Pilar Pratama	7.061	2.420
PT Sarana Artha Lestari	6.842	1.565
PT Smart Telecom	6.465	11.267
PT Baruna Tele Nusa	6.327	-
PT Paradise Communications	6.270	2.255
PT Handal Karya Abadi	6.033	2.529
PT Solu Sindo Kreasi Pratama	5.500	-
PT Telehouse Engineering	5.440	467
PT Duta Hita Jaya	4.848	678
PT Communication Cable Systems Indonesia	4.194	1.024
PT Bhuztan Menara Jaya	4.120	3.508
PT Amala	3.890	992
PT Citramas Heavy Industries	3.340	3.191
PT Dwijaya Cipta Persada	3.330	4.881
PT Pilar Gapura Nusa	3.298	884
PT Halik Selindo Alpha	3.181	1.453
PT Central Investindo	3.158	4.334
PT Semangat Putratama	1.936	3.674
PT Whidia Bharaya	650	3.988
PT Bahana Sandisat Global	296	9.469
CV Lintas Reka Cipta	69	4.467
Lain-lain		
(masing-masing kurang dari Rp3.000)	95.185	83.713
	271.663	189.327

Details per vendor
PT Bach Multi Global
PT Marsa Kanina Bestari
PT Ciptakomunindo Pradipta
PT Aneka Cahaya Surya
PT Tata Bersama
Mr. Novan Soekarno
PT Kurongkor Utama
PT Dwi Pilar Pratama
PT Sarana Artha Lestari
PT Smart Telecom
PT Baruna Tele Nusa
PT Paradise Communications
PT Handal Karya Abadi
PT Solu Sindo Kreasi Pratama
PT Telehouse Engineering
PT Duta Hita Jaya
PT Communication Cable Systems Indonesia
PT Bhuztan Menara Jaya
PT Amala
PT Citramas Heavy Industries
PT Dwijaya Cipta Persada
PT Pilar Gapura Nusa
PT Halik Selindo Alpha
PT Central Investindo
PT Semangat Putratama
PT Whidia Bharaya
PT Bahana Sandisat Global
CV Lintas Reka Cipta
Others
(below Rp3,000 each)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**12. UTANG PEMBANGUNAN MENARA DAN USAHA
LAINNYA - PIHAK KETIGA (lanjutan)**

Umur utang pembangunan menara dan usaha lainnya adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016
Belum jatuh tempo	242.785	181.762
Lewat jatuh tempo		
1 - 30 hari	17.611	4.225
31 - 60 hari	6.131	352
61 - 90 hari	679	326
Lebih dari 90 hari	4.457	2.662
	271.663	189.327

Utang pembangunan menara dan usaha lainnya - pihak ketiga tidak dijamin, tidak berbunga dan biasanya dilunasi dalam jangka waktu selama 30 - 60 hari.

**12. TOWER CONSTRUCTION AND OTHER TRADE
PAYABLES - THIRD PARTIES (continued)**

The aging of tower construction and other trade payables is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
Belum jatuh tempo	242.785	181.762	Current
Lewat jatuh tempo			Overdue
1 - 30 hari	17.611	4.225	1 - 30 days
31 - 60 hari	6.131	352	31 - 60 days
61 - 90 hari	679	326	61 - 90 days
Lebih dari 90 hari	4.457	2.662	Over 90 days
	271.663	189.327	

Tower construction and other trade payables - third parties are unsecured, interest free and normally settled on terms between 30 to 60 days.

13. AKRUAL

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016
Pihak ketiga		
Perijinan dan lisensi	39.472	100.586
Biaya pembangunan menara	29.015	7.232
Bunga pinjaman dan biaya bank	27.717	12.757
Pemeliharaan	26.393	34.392
Jasa profesional	14.336	16.352
Penalti	14.114	7.534
Bunga obligasi	14.044	17.236
Pemasaran	4.923	436
Lain-lain (masing-masing kurang dari Rp3.000)	91.768	44.537
	261.782	241.062

13. ACCRUALS

Third parties
Permits and licenses
Tower construction costs
Interest on loans and bank fees
Maintenance
Professional fees
Penalties
Interest on bonds
Marketing
Others (below Rp3,000 each)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

14. UTANG JANGKA PANJANG

14. LONG-TERM LOANS

31 Desember 2017	Jatuh tempo dalam 1 tahun/ Current portion	Jatuh tempo lebih dari 1 tahun/ Non-current portion	Total/ Total	December 31, 2017
Fasilitas pinjaman				Loans facilities
Pihak ketiga				Third parties
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., cabang Jakarta (Rp965.000)	65.000	900.000	965.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Jakarta branch (Rp965,000)
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, cabang Jakarta (Rp1.000.000)	-	1.000.000	1.000.000	PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, Jakarta branch (Rp1,000,000)
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., cabang Jakarta (AS\$38.000.000 dan Rp500.000)	-	1.014.824	1.014.824	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta branch (US\$38,000,000 and Rp500,000)
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Singapura (AS\$36.000.000)	-	487.728	487.728	Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore branch (US\$36,000,000)
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, cabang Singapura (AS\$36.000.000)	-	487.728	487.728	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Singapore branch (US\$36,000,000)
DBS Bank Ltd., cabang Singapura (AS\$18.000.000)	-	243.864	243.864	DBS Bank Ltd., Singapore branch (US\$18,000,000)
PT Bank DBS Indonesia, cabang Jakarta (Rp570.000)	570.000	-	570.000	PT Bank DBS Indonesia, Jakarta branch (Rp570,000)
PT Bank Mandiri, cabang Jakarta (Rp1.000.000)	-	1.000.000	1.000.000	PT Bank Mandiri, Jakarta branch (Rp1,000,000)
Pihak berelasi				Related party
PT Bank Central Asia Tbk., cabang Jakarta (Rp750.000)	-	750.000	750.000	PT Bank Central Asia Tbk., Jakarta branch (Rp750,000)
	635.000	5.884.144	6.519.144	
Dikurangi				Less
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(1.179)	(108.852)	(110.031)	Unamortized costs of loans
	633.821	5.775.292	6.409.113	

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

14. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

14. LONG-TERM LOANS (continued)

31 Desember 2016	Jatuh tempo dalam 1 tahun/ Current portion	Jatuh tempo lebih dari 1 tahun/ Non-current portion	Total/ Total	December 31, 2016
Fasilitas pinjaman Pihak ketiga				Loans facilities Third parties
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., cabang Jakarta (Rp1.798.500)	221.500	1.577.000	1.798.500	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Jakarta branch (Rp1,798,500)
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, cabang Jakarta (Rp1.000.000)	-	1.000.000	1.000.000	PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, Jakarta branch (Rp1,000,000)
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., cabang Jakarta (AS\$38.000.000 dan Rp500.000)	-	1.010.568	1.010.568	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta branch (US\$38,000,000 and Rp500,000)
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Singapura (AS\$60.000.000)	-	806.160	806.160	Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore branch (US\$60,000,000)
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, cabang Singapura (AS\$60.000.000)	-	806.160	806.160	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Singapore branch (US\$60,000,000)
DBS Bank Ltd., cabang Singapura (AS\$30.000.000)	-	403.080	403.080	DBS Bank Ltd., Singapore branch (US\$30,000,000)
PT Bank DBS Indonesia, cabang Jakarta (Rp298.000)	298.000	-	298.000	PT Bank DBS Indonesia, Jakarta branch (Rp298,000)
Pihak berelasi PT Bank Central Asia Tbk., cabang Jakarta (Rp500.000)	-	500.000	500.000	Related party PT Bank Central Asia Tbk., Jakarta branch (Rp500,000)
	519.500	6.102.968	6.622.468	
Dikurangi Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(2.755)	(131.713)	(134.468)	Less Unamortized cost of loans
	516.745	5.971.255	6.488.000	

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

14. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Biaya pinjaman merupakan biaya ditangguhkan yang berasal dari biaya komitmen, biaya perolehan pinjaman dan biaya provisi sehubungan dengan perolehan pinjaman dan diamortisasi selama masa pinjaman.

Amortisasi atas biaya pinjaman yang diakui pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp59.276 (31 Desember 2016: Rp59.256) (Catatan 30).

Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2017

Pada tanggal 20 Juni 2017, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Transaksi Khusus Rp1.000.000 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama atas Perjanjian Pinjaman Transaksi Khusus tertanggal 4 Oktober 2017 ("Perjanjian Pinjaman Mandiri"). Sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman Mandiri tersebut, Perseroan menerima suatu fasilitas pinjaman berjangka dengan komitmen sejumlah Rp1.000.000 ("Fasilitas Pinjaman Mandiri"). Tujuan Perjanjian Pinjaman Mandiri adalah untuk pembiayaan perseroan secara umum, yang dapat dipergunakan antara lain untuk: (i) melakukan pembayaran terhadap kewajiban yang terhutang berdasarkan satu atau lebih Perjanjian Fasilitas-Fasilitas Bank atau perjanjian fasilitas bank lainnya (apabila ada) melalui skema pembiayaan kembali (*refinancing*) dan/atau pengambilalihan (*take over*); dan (ii) membiayai belanja modal serta kebutuhan Perseroan lainnya.

Periode bunga untuk Fasilitas Pinjaman Mandiri ini adalah satu atau tiga bulan untuk suatu pinjaman. Fasilitas Pinjaman Mandiri ini jatuh tempo pada tanggal 19 Juni 2022.

Fasilitas Pinjaman Mandiri dikenakan tingkat suku bunga yang sama dengan JIBOR ditambah marjin yang berlaku yaitu 1,80% per tahun atau tingkat suku bunga yang disepakati oleh Perseroan dan Mandiri.

Tingkat bunga efektif untuk Fasilitas Pinjaman Mandiri berkisar antara 6,58% sampai dengan 8,77% per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Perseroan diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan finansial tertentu, yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA* (Catatan 37).

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

14. LONG-TERM LOANS (continued)

Costs of loans represent deferred charges arising from commitment fees, upfront fees and provision fees in relation to obtaining loans and is amortized over the respective loan periods.

Amortization of costs of loans recognized for the year ended December 31, 2017 was Rp59,276 (December 31, 2016: Rp59,256) (Note 30).

The 2017 Loan Facilities

On June 20, 2017, the Company entered into a Rp1,000,000 Specific Transaction Loan with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") as amended by First Addendum of Specific Transaction Loan dated October 4, 2017 (the "Mandiri Loan Agreement"). In connection with the Mandiri Loan Agreement, the Company obtained a committed non-revolving credit facility in the amount of Rp1,000,000 ("Mandiri Loan Facility"). The purposes of the Mandiri Loan Agreement are for general corporate purposes, which can be used for the following matters: (i) to pay existing debts based on one or more Bank Facilities Agreement or other bank facility agreement (if any) through refinancing and/or take over scheme; and (ii) to fund capital expenditure and other needs of the Company.

Interest period for the Mandiri Loan Facility is one or three months for a loan. The Mandiri Loan Facility is due for repayment on June 19, 2022.

The Mandiri Loan Facility is subject to an interest rate equal to JIBOR plus an applicable margin of 1.80% per annum or other interest rate agreed by the Company and Mandiri.

The effective interest rate of Mandiri Loan Facility ranged from 6.58% to 8.77% per annum for the year ended December 31, 2017. The Company is required to comply with certain financial covenants, i.e. debt service coverage ratio and net debt to running EBITDA (Note 37).

As of December 31, 2017, the Company was in compliance with all of the aforementioned financial ratio covenants.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

14. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2017 (lanjutan)

Pada tanggal 28 Februari 2017, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berulang Rp250.000 dengan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ LTD., Cabang Jakarta ("BTMU") ("Perjanjian Fasilitas BTMU 2017"). Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas BTMU 2017 tersebut, Perseroan menerima suatu fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen sejumlah Rp250.000 ("Fasilitas Pinjaman BTMU 2017"). iForte memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Perseroan atas fasilitas ini. Tujuan Perjanjian Fasilitas BTMU 2017 adalah untuk membiayai kebutuhan modal kerja Perseroan.

Periode bunga untuk Fasilitas Pinjaman BTMU 2017 ini adalah satu bulan atau setiap jangka waktu lain yang disepakati antara Perseroan dan BTMU untuk suatu pinjaman. Fasilitas Pinjaman BTMU 2017 jatuh tempo pada hari terakhir Periode Bunga atau, dalam hal apapun, selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo terakhir pada tanggal 28 Februari 2018.

Fasilitas Pinjaman BTMU 2017 dikenakan tingkat suku bunga yang sama dengan (i) JIBOR ditambah margin Rupiah yaitu sebesar 1,65% per tahun apabila fasilitas dicairkan dalam Rupiah; dan (ii) ICE LIBOR ditambah margin AS\$, yaitu sebesar 1,10% per tahun apabila fasilitas dicairkan dalam AS\$.

Sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pinjaman BTMU 2017, telah ditandatangani juga Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Penggantian Kerugian Perusahaan tertanggal 28 Februari 2017 oleh dan antara iForte sebagai pemberi jaminan perusahaan dan BTMU sebagai pemberi pinjaman.

Pada tanggal 31 Desember 2017, belum ada penarikan atas Fasilitas Pinjaman BTMU 2017 ini.

Pada tanggal 28 Februari 2017, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berulang Rp150.000 dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("BSMI") ("Perjanjian Fasilitas BSMI 2017"). Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas BSMI 2017 tersebut, Perseroan menerima suatu fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen sejumlah Rp150.000 ("Fasilitas Pinjaman BSMI 2017"). iForte memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Perseroan atas fasilitas ini. Tujuan Perjanjian Fasilitas BSMI 2017 adalah untuk membiayai modal kerja Perseroan.

14. LONG-TERM LOANS (continued)

The 2017 Loan Facilities (continued)

On February 28, 2017, the Company entered into a Rp250,000 Revolving Loan Facility Agreement with The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ LTD., Jakarta Branch ("BTMU") (the "2017 BTMU Facility Agreement"). In connection with the 2017 BTMU Facility Agreement, the Company obtained an uncommitted revolving loan facility in the amount of Rp250,000 ("2017 BTMU Loan Facility"). iForte provided a corporate guarantee to secure the fulfillment of the Company's liabilities for this facility. The purpose of the 2017 BTMU Agreement is to fund working capital of the Company.

Interest period for the 2017 BTMU Loan Facility is one month or any other time period agreed between the Company and BTMU for a loan. The 2017 BTMU Loan Facility is due for repayment on the last day of the Interest Period or, in any case, no later than the final maturity date on February 28, 2018.

The 2017 BTMU Loan Facility is subject to an interest rate equal to (i) JIBOR plus an Rupiah margin of 1.65% per annum if facility is drawn in Rupiah and (ii) ICE LIBOR plus US\$ margin of 1.10% per annum if facility is drawn in US\$.

In connection with the provision of the 2017 BTMU Loan Facility, a Corporate Guarantee and Indemnity Agreement, dated February 28, 2017 has also been signed by and between iForte as a company guarantor and BTMU as lender.

As of December 31, 2017, there has been no drawdown on this 2017 BTMU Loan Facility.

On February 28, 2017, the Company entered into a Rp150,000 Revolving Loan Facility Agreement with PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("BSMI") (the "2017 BSMI Facility Agreement"). In connection with the 2017 BSMI Facility Agreement, the Company obtained an uncommitted revolving loan facility in the amount of Rp150,000 ("2017 BSMI Loan Facility"). iForte provided a corporate guarantee to secure the fulfillment of the Company's liabilities for this facility. The purpose of the 2017 BSMI Agreement is to fund working capital of the Company.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

14. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2017 (lanjutan)

Periode bunga untuk Fasilitas Pinjaman BSMI 2017 ini adalah satu bulan atau setiap jangka waktu lain yang disepakati antara Perseroan dan BSMI untuk suatu pinjaman yang tidak melebihi satu bulan. Fasilitas Pinjaman BSMI 2017 jatuh tempo pada hari terakhir Periode Bunga atau, dalam hal apapun, selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo terakhir pada tanggal 28 Maret 2018.

Fasilitas Pinjaman BSMI 2017 dikenakan tingkat suku bunga yang sama dengan JIBOR ditambah margin yang berlaku yaitu sebesar 2,30% per tahun atau tingkat suku bunga lain yang disetujui oleh Perseroan dan BSMI.

Sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pinjaman BSMI 2017, telah ditandatangani juga Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Penggantian Kerugian Perusahaan tertanggal 28 Februari 2017 oleh dan antara iForte sebagai pemberi jaminan perusahaan dan BSMI sebagai pemberi pinjaman.

Pada tanggal 31 Desember 2017, belum ada penarikan atas Fasilitas Pinjaman BSMI 2017 ini.

Pada tanggal 21 Desember 2016, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berulang Rp500.000 dengan PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA") sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama atas Perjanjian Fasilitas tanggal 6 September 2017 ("Perjanjian Fasilitas BCA"). Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas BCA tersebut, Perseroan menerima suatu fasilitas pinjaman berulang sejumlah Rp750.000 ("Fasilitas Pinjaman A") dan fasilitas *uncommitted money market line* minimal sejumlah Rp5.000 ("Fasilitas Pinjaman B"). Tujuan Perjanjian Fasilitas BCA adalah untuk pembiayaan *general purposes* dan *cashflow bridging* Perseroan. Perseroan dapat memilih periode bunga satu, tiga atau enam bulan untuk Fasilitas Pinjaman A dan satu atau dua minggu untuk Fasilitas Pinjaman B ("Periode Bunga"). Periode Bunga pertama untuk Fasilitas Pinjaman A adalah satu bulan. Fasilitas A jatuh tempo pada hari terakhir Periode Bunga atau, dalam hal apapun, selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo terakhir pada tanggal 6 September 2020 dan untuk Fasilitas B jatuh tempo pada hari terakhir Periode Bunga atau, dalam hal apapun, selambat-lambatnya pada tanggal 21 Desember 2017.

14. LONG-TERM LOANS (continued)

The 2017 Loan Facilities (continued)

Interest period for the 2017 BSMI Loan Facility is one month or any other period agreed between the Company and BSMI for a loan but not more than a month. The 2017 BSMI Loan Facility is due for repayment on the last day of the Interest Period or, in any case, no later than the final maturity date on March 28, 2018.

The 2017 BSMI Loan Facility subject to an interest rate equal to JIBOR plus an applicable margin of 2.30% per annum or other interest rate agreed by the Company and BSMI.

In connection with the provision of the 2017 BSMI Loan Facility, a Corporate Guarantee and Indemnity Agreement, dated February 28, 2017 has also been signed by and between iForte as a company guarantor and BSMI as lender.

As of December 31, 2017, there has been no drawdown on this 2017 BSMI Loan Facility.

On December 21, 2016, the Company entered into a Rp500,000 Revolving Loan Facility Agreement with PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA") as amended by the First Amendment to the Facility Agreement dated September 6, 2017 (the "BCA Facilities Agreement"). In connection with the BCA Facilities Agreement, the Company obtained a time loan revolving facility in the amount of Rp750,000 ("Loan A Facility") and the uncommitted money market line facility in the minimum amount of Rp5,000 ("Loan B Facility"). The purposes of the BCA Facilities Agreement are for the general corporate purposes and cashflow bridging of the Company. The Company may select an interest period of one, three or six months for the Loan A Facility and one or two weeks for the Loan B Facility ("Interest Period"). The first Interest Period for the Loan A Facility is one month. The Loan A Facility is due for repayment on the last day of the Interest Period or, in any case, no later than the final maturity date on September 6, 2020 and for Loan B Facility is due for repayment on the last day of the Interest Period or, in any case, no later than December 21, 2017.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

14. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2016

Fasilitas Pinjaman A dikenakan tingkat suku bunga yang sama dengan JIBOR ditambah marjin yang berlaku yaitu sebesar 1,50% per tahun. Fasilitas Pinjaman B (i) ditentukan berdasarkan surat Konfirmasi dan (ii) dihitung dari tanggal penggunaan Fasilitas Pinjaman B sampai tanggal pembayaran kembali sebagaimana disebutkan dalam Surat Konfirmasi. Fasilitas Pinjaman A telah dicairkan seluruhnya pada tanggal 22 Desember 2016.

Tingkat bunga efektif untuk Fasilitas Pinjaman A berkisar antara 6,28% sampai dengan 8,59% per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (31 Desember 2016: 8,59% per tahun). Perseroan diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan finansial tertentu, yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA* (Catatan 37).

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

Pada tanggal 24 Juni 2016, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas-Fasilitas Pinjaman Berjangka Rp500.000 dan AS\$38.000.000 dengan BTMU sebagaimana diubah dengan Surat Perubahan tanggal 21 Juli 2017 ("Perjanjian Fasilitas-Fasilitas BTMU"). Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas-Fasilitas BTMU tersebut, Perseroan menerima suatu fasilitas pinjaman sejumlah Rp500.000 ("Fasilitas Pinjaman A") dan AS\$38.000.000 ("Fasilitas Pinjaman B") ("Fasilitas-Fasilitas Pinjaman BTMU"). iForte memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Perseroan atas fasilitas-fasilitas ini. Tujuan Perjanjian Fasilitas-Fasilitas BTMU adalah untuk kepentingan pembayaran atas pembelian aset menara telekomunikasi dari PT XL Axiata Tbk. Perseroan dapat memilih periode bunga satu atau tiga bulan untuk Fasilitas Pinjaman A dan Fasilitas Pinjaman B ("Periode Bunga"). Periode Bunga pertama untuk Fasilitas Pinjaman A adalah satu bulan, dan untuk Fasilitas Pinjaman B adalah tiga bulan. Fasilitas-Fasilitas Pinjaman BTMU jatuh tempo pada hari terakhir Periode Bunga atau, dalam hal apapun, selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo terakhir pada tanggal 24 Juni 2021.

14. LONG-TERM LOANS (continued)

The 2016 Loan Facilities

The Loan A Facility is subject to an interest rate equal to JIBOR plus an applicable margin of 1.50% per annum. The Loan B Facility is (i) determined based on the Confirmation Letter and (ii) calculated from the date of utilisation of such Loan B Facility until the repayment dated mentioned under the Confirmation Letter. The Loan A Facility were fully drawn on December 22, 2016.

The effective interest rates of Loan A Facility ranged from 6.28% to 8.59% per annum for the year ended December 31, 2017 (December 31, 2016: 8.59% per annum). The Company is required to comply with certain financial covenants, i.e. *debt service coverage ratio* and *net debt to running EBITDA* (Note 37).

As of December 31, 2017 and 2016, the Company was in compliance with all of the aforementioned financial ratio covenants.

On June 24, 2016, the Company entered into Rp500,000 and US\$38,000,000 Term Loan Facilities Agreement with BTMU as amended by Amendment Letter dated July 21, 2017 (the "BTMU Facilities Agreement"). In connection with the BTMU Facilities Agreement, the Company obtained a loan facility in the amount of Rp500,000 (the "Loan A Facility") and US\$38,000,000 (the "Loan B Facility") (the "BTMU Loan Facilities"). iForte provided a corporate guarantee to secure the fulfillment of the Company's liabilities for these facilities. The purpose of the BTMU Facilities Agreement is for the payment on the purchase of telecommunication tower assets from PT XL Axiata Tbk. The Company may select an interest period of one or three months for the Loan A Facility and the Loan B Facility ("Interest Period"). The first Interest Period for the Loan A Facility is one month, and for the Loan B Facility is three months. The BTMU Loan Facilities is due for repayment on the last day of the Interest Period or, in any case, no later than the final maturity date on June 24, 2021.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

14. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2016 (lanjutan)

Fasilitas Pinjaman A dikenakan tingkat suku bunga yang sama dengan JIBOR ditambah marjin yang berlaku yaitu sebesar 2,50% per tahun. Fasilitas Pinjaman B dikenakan tingkat presentase per tahun sebagaimana disetujui oleh BTMU dan Perseroan dalam konfirmasi. Fasilitas-Fasilitas Pinjaman BTMU telah dicairkan seluruhnya pada tanggal 29 Juni 2016.

Sehubungan dengan pemberian Perjanjian Fasilitas-Fasilitas BTMU, telah ditandatangani juga Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Penggantian Kerugian Perusahaan tertanggal 24 Juni 2016 oleh dan antara iForte sebagai pemberi jaminan perusahaan dan BTMU sebagai pemberi pinjaman sebagaimana diubah dengan Surat Perubahan tanggal 21 Juli 2017.

Tingkat bunga efektif untuk pinjaman BTMU Rupiah dan Dolar AS tersebut masing-masing berkisar antara 6,78% sampai dengan 10,38% dan 3,05% sampai dengan 3,72% per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (31 Desember 2016: masing-masing sebesar 8,54% sampai dengan 10,38% dan 2,68% sampai dengan 3,05% per tahun). Perseroan diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan finansial tertentu, yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA* (Catatan 37).

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

Pada tanggal 24 Juni 2016, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Rp1.000.000 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") ("Perjanjian Fasilitas BNI"). Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas BNI tersebut, Perseroan menerima suatu fasilitas pinjaman sejumlah Rp1.000.000 ("Fasilitas Pinjaman BNI") dan iForte memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Perseroan atas fasilitas ini. Tujuan Perjanjian Fasilitas BNI adalah untuk kepentingan pembayaran atas pembelian aset menara telekomunikasi dari PT XL Axiata Tbk. Perseroan dapat memilih periode bunga satu, tiga atau enam bulan untuk Fasilitas Pinjaman BNI ("Periode Bunga"). Periode Bunga pertama untuk Fasilitas Pinjaman BNI adalah satu bulan. Fasilitas Pinjaman BNI jatuh tempo pada hari terakhir Periode Bunga atau, dalam hal apapun, selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo terakhir pada tanggal 24 Juni 2023.

14. LONG-TERM LOANS (continued)

The 2016 Loan Facilities (continued)

The Loan A Facility is subject to an interest rate equal to JIBOR plus an applicable margin of 2.50% per annum. The Loan B Facility is subject to interest rate in the percentage of rate per annum as agreed by BTMU and the Company in the confirmation. The BTMU Loan Facilities were fully drawn on June 29, 2016.

In connection with the provision of the BTMU Facilities Agreement, a Corporate Guarantee and Indemnity Agreement, dated June 24, 2016 has also been signed by and between iForte as a company guarantor and BTMU as lender as amended by Amendment Letter dated July 21, 2017.

The effective interest rates of the BTMU Rupiah and US Dollar loans ranged from 6.78% to 10.38% and 3.05% to 3.72% per annum, respectively, for the year ended December 31, 2017 (December 31, 2016: 8.54% to 10.38% and 2.68% to 3.05% per annum, respectively). The Company is required to comply with certain financial covenants, i.e. debt service coverage ratio and net debt to running EBITDA (Note 37).

As of December 31, 2017 and 2016, the Company was in compliance with all of the aforementioned financial ratio covenants.

On June 24, 2016, the Company entered into a Rp1,000,000 Term Loan Facility Agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") (the "BNI Facility Agreement"). In connection with the BNI Facility Agreement, the Company obtained a loan facility in the amount of Rp1,000,000 (the "BNI Loan Facility"), whereby iForte provided a corporate guarantee to secure the fulfillment of the Company's liabilities for this facility. The purpose of the BNI Facility Agreement is for the payment of purchase of telecommunication tower assets from PT XL Axiata Tbk. The Company may select an interest period of one, three or six months for the BNI Loan Facility ("Interest Period"). The first Interest Period for the BNI Loan Facility is one month. The BNI Loan Facility is due for repayment on the last day of the Interest Period or, in any case, no later than the final maturity date on June 24, 2023.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

14. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2016 (lanjutan)

Fasilitas Pinjaman BNI dikenakan tingkat suku bunga yang sama dengan JIBOR ditambah marjin yang berlaku yaitu sebesar 2,50% per tahun. Fasilitas Pinjaman BNI seluruhnya telah dicairkan pada tanggal 29 Juni 2016. Efektif sejak tanggal 15 Juni 2017, marjin yang berlaku untuk Fasilitas Pinjaman BNI menjadi 1,80% per tahun.

Sehubungan dengan pemberian Perjanjian Fasilitas BNI, telah ditandatangani juga Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Penggantian Kerugian Perusahaan tertanggal 24 Juni 2016 oleh dan antara iForte sebagai pemberi jaminan perusahaan dan BNI sebagai agen fasilitas.

Tingkat bunga efektif untuk pinjaman tersebut berkisar antara 6,58% sampai dengan 10,38% per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (31 Desember 2016: 8,54% sampai dengan 10,38% per tahun). Perseroan diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan finansial tertentu, yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA* (Catatan 37).

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan telah melunasi cicilan pinjaman masing-masing sebesar Rp25.000 dan Rp10.000. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah sisa pinjaman dari Fasilitas Pinjaman 2016 ini masing-masing sebesar Rp965.000 dan Rp990.000.

14. LONG-TERM LOANS (continued)

The 2016 Loan Facilities (continued)

The BNI Loan Facility is subject to an interest rate equal to JIBOR plus an applicable margin of 2.50% per annum. The BNI Loan Facility was fully drawn on June 29, 2016. Effective as of June 15, 2017, the applicable margin for BNI Loan Facility became 1.80%.

In connection with the provision of the BNI Facility Agreement, a Corporate Guarantee and Indemnity Agreement, dated June 24, 2016 has also been signed by and between iForte as a company guarantor and BNI as facility agent.

The effective interest rates of the loan ranged from 6.58% to 10.38% per annum for the year ended December 31, 2017 (December 31, 2016: 8.54% to 10.38% per annum). The Company is required to comply with certain financial covenants, i.e. debt service coverage ratio and net debt to running EBITDA (Note 37).

As of December 31, 2017 and 2016, the Company was in compliance with all of the aforementioned financial ratio covenants.

For the year ended December 31, 2017 and 2016, the Company has paid the loan installments amounting to Rp25,000 and Rp10,000 respectively. As of December 31, 2017 and 2016, the outstanding amount of the 2016 Loan Facility amounted to Rp965,000 and Rp990,000, respectively.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

14. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2016 (lanjutan)

Pada tanggal 24 Juni 2016, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Rp1.000.000 dengan BSMI sebagaimana diubah dengan Surat Perubahan tanggal 21 Juli 2017 ("Perjanjian Fasilitas BSMI"). Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas BSMI tersebut, Perseroan menerima suatu fasilitas pinjaman sejumlah Rp1.000.000 ("Fasilitas Pinjaman BSMI") dan iForte memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Perseroan atas fasilitas ini. Tujuan Perjanjian Fasilitas BSMI adalah untuk kepentingan pembayaran atas pembelian aset menara telekomunikasi dari PT XL Axiata Tbk. Perseroan dapat memilih periode bunga satu atau tiga bulan untuk Fasilitas Pinjaman BSMI ("Periode Bunga"). Periode Bunga pertama untuk Fasilitas Pinjaman BSMI adalah satu bulan. Fasilitas Pinjaman BSMI jatuh tempo pada hari terakhir Periode Bunga atau, dalam hal apapun, selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo terakhir pada tanggal 24 Juni 2021.

Fasilitas Pinjaman BSMI dikenakan tingkat suku bunga yang sama dengan JIBOR ditambah margin yang berlaku yaitu sebesar 2,50% per tahun. Fasilitas Pinjaman BSMI telah dicairkan seluruhnya pada tanggal 29 Juni 2016.

Sehubungan dengan pemberian Perjanjian Fasilitas BSMI, telah ditandatangani juga Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Penggantian Kerugian Perusahaan tertanggal 24 Juni 2016 oleh dan antara iForte sebagai pemberi jaminan perusahaan dan BSMI sebagai pemberi pinjaman sebagaimana diubah dengan surat *Amendment Letter* tanggal 21 Juli 2017.

Tingkat bunga efektif untuk pinjaman tersebut berkisar antara 6,78% sampai dengan 10,83% per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (31 Desember 2016: 8,54% sampai dengan 10,38% per tahun). Perseroan diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan finansial tertentu, yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA* (Catatan 37).

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

14. LONG-TERM LOANS (continued)

The 2016 Loan Facilities (continued)

On June 24, 2016, the Company entered into a Rp1,000,000 Term Loan Facility Agreement with BSMI as amended by Amendment Letter dated July 21, 2017 (the "BSMI Facility Agreement"). In connection with the BSMI Facility Agreement, the Company obtained a loan facility in the amount of Rp1,000,000 (the "BSMI Loan Facility"), whereby iForte provided the corporate guarantee to secure the fulfillment of the Company's liabilities for this facility. The purpose of the BSMI Facility Agreement is for the payment of purchase of telecommunication tower assets from PT XL Axiata Tbk. The Company may select an interest period of one or three months for the BSMI Loan Facility ("Interest Period"). The first Interest Period for the BSMI Loan Facility is one month. The BSMI Loan Facility is due for repayment on the last day of the Interest Period or, in any case, no later than the final maturity date on June 24, 2021.

The BSMI Loan Facility is subject to an interest rate equal to JIBOR plus an applicable margin of 2.50% per annum. The BSMI Loan Facility was fully drawn on June 29, 2016.

In connection with the provision of the BSMI Facility Agreement, a Corporate Guarantee and Indemnity Agreement dated June 24, 2016 has also been signed by and between iForte as a company guarantor and BSMI as lender as amended by Amendment letter dated July 21, 2017.

The effective interest rates of the loan ranged from 6.78% to 10.83% per annum for the year ended December 31, 2017 (December 31, 2016: 8.54% to 10.38% per annum). The Company is required to comply with certain financial covenants, i.e. debt service coverage ratio and net debt to running EBITDA (Note 37).

As of December 31, 2017 and 2016, the Company was in compliance with all of the aforementioned financial ratio covenants.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

14. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Fasilitas Pinjaman 2015

Pada tanggal 11 Agustus 2015, iForte dan Perseroan menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berulang Rp350.000 dengan PT Bank DBS Indonesia ("BDI") sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan tanggal 1 Juli 2016, sebagaimana diubah dengan surat perubahan tanggal 1 Oktober 2016 sebagaimana diubah dengan *Amending Agreement* Rp500.000 tanggal 23 Maret 2017 sebagaimana diubah dengan *Amendment Letter* tanggal 21 Juli 2017 dan terakhir sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan tertanggal 14 Desember 2017 ("Perjanjian Fasilitas BDI"). Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas BDI tersebut, iForte menerima suatu fasilitas pinjaman sejumlah Rp750.000 ("Fasilitas Pinjaman BDI") dan Perseroan memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban iForte atas fasilitas ini. Tujuan Perjanjian Fasilitas BDI ini adalah untuk (i) melunasi fasilitas pinjaman yang dimiliki iForte berdasarkan perjanjian fasilitas tertanggal 22 Februari 2013 beserta amandemennya yang dibuat oleh dan antara iForte dan BDI, (ii) membayar biaya dan pengeluaran berdasarkan fasilitas ini, dan (iii) keperluan korporasi yang bersifat umum dari iForte. iForte dapat memilih periode bunga satu atau tiga bulan untuk Fasilitas Pinjaman BDI ("Periode Bunga"). Periode Bunga pertama untuk Fasilitas Pinjaman BDI adalah satu bulan. Fasilitas Pinjaman BDI jatuh tempo pada hari terakhir Periode Bunga atau, dalam hal apapun, selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo terakhir pada tanggal 14 Desember 2018.

Fasilitas Pinjaman BDI dikenakan tingkat suku bunga yang sama dengan JIBOR ditambah margin yang berlaku yaitu sebesar 2,15% per tahun. Fasilitas Pinjaman BDI telah dicairkan sebagian pada tahun 2015 sebesar Rp181.000, di tahun 2016 sebesar Rp117.000, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp272.000.

Sehubungan dengan pemberian Perjanjian Fasilitas BDI, telah ditandatangani juga Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Penggantian Kerugian Perusahaan tertanggal 11 Agustus 2015 oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi jaminan perusahaan dan BDI sebagai agen fasilitas sebagaimana diubah terakhir Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Penggantian Kerugian Perusahaan Yang Diamandemen dan Dinyatakan Kembali tanggal 14 Desember 2017.

14. LONG-TERM LOANS (continued)

The 2015 Loan Facilities

On August 11, 2015, iForte and the Company entered into a Rp350,000 Revolving Loan Facility Agreement with PT Bank DBS Indonesia ("BDI") as amended by an Amendment Agreement dated July 1, 2016, Second Amendment Agreement dated October 1, 2016, as amended by an Amendment Letter dated October 1, 2016 as amended by an Rp500,000 Amending Agreement dated March 23, 2017 as amended by an Amendment Letter dated July 21, 2017 and as lastly amended by Amending Agreement dated December 14, 2017 (the "BDI Facility Agreement"). In connection with the BDI Facility Agreement, iForte obtained a loan facility in the amount of Rp750,000 (the "BDI Loan Facility"), whereby the Company provided the corporate guarantee to secure the fulfillment of iForte's liabilities for this facility. The purposes of the BDI Facility Agreement are for (i) repayment of the loan facility of iForte under the facility agreement dated February 22, 2013 along with its amendment made by and between iForte and BDI, (ii) payment of fees and expenses under the Facility, and (iii) general corporate purposes of iForte. iForte may select an interest period of one or three months for the BDI Loan Facility ("Interest Period"). The first Interest Period for the BDI Loan Facility is one month. The BDI Loan Facility is due for repayment on the last day of the Interest Period or, in any case, no later than the final maturity date on December 14, 2018.

The BDI Loan Facility is subject to an interest rate equal to JIBOR plus an applicable margin of 2.15% per annum. The BDI Loan Facility was partially drawn in 2015 in the amount of Rp181,000, in 2016 in the amount of Rp117,000, and for the year ended December 31, 2017 in the amount of Rp272,000.

In connection with the provision of the BDI Facility Agreement, a Corporate Guarantee and Indemnity Agreement, dated August 11, 2015 has also been signed by and between the Company as a company guarantor and BDI as a facility agent and as lastly amended Amended and Restated Corporate Guarantee and Indemnity Agreement dated December 14, 2017.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

14. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Fasilitas Pinjaman 2015 (lanjutan)

Tingkat bunga efektif untuk pinjaman tersebut berkisar antara 6,58% sampai 9,13% per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (31 Desember 2016: 8,19% sampai 10,70% per tahun). Perseroan diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan finansial tertentu, yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA*. Selain itu, entitas anak juga diwajibkan untuk memenuhi ketentuan *running EBITDA to interest expenses*.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan dan iForte telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2014

Pada tanggal 19 November 2014, Protelindo Finance B.V. dan Perseroan menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka EUR20.000.000 dan Kredit Berulang AS\$100.000.000 dengan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited ("Perjanjian Fasilitas-Fasilitas OCBC"), sebagaimana diubah dengan Perjanjian Novasi dan Perubahan tanggal 1 Juli 2016 ("Perjanjian Novasi dan Perubahan OCBC") Perjanjian Novasi dan Perubahan OCBC terakhir kali diubah dengan *Amendment Letter* OCBC tanggal 21 Juni 2017 ("*Amendment Letter* OCBC"). Sehubungan dengan Perjanjian Novasi dan Perubahan OCBC tersebut, Protelindo Finance B.V. yang telah menerima suatu fasilitas pinjaman sejumlah EUR20.000.000 ("Fasilitas Pinjaman A") dan AS\$100.000.000 ("Fasilitas Pinjaman B") mengalihkan hak dan kewajiban yang ada dalam Perjanjian Fasilitas-Fasilitas OCBC kepada Perseroan ("Fasilitas-Fasilitas Pinjaman OCBC") dan iForte memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Perseroan atas fasilitas-fasilitas ini. Adapun pertimbangan dan alasan dilakukannya Perjanjian Novasi dan Perubahan OCBC adalah sebagai berikut: (i) menggunakan kesempatan untuk melakukan penjualan saham anak perusahaan di Belanda dengan peningkatan nilai (*capital gain*) yang substansial, (ii) mengurangi beban pinjaman, dan (iii) menyederhanakan struktur pinjaman/pembiayaan.

14. LONG-TERM LOANS (continued)

The 2015 Loan Facilities (continued)

The effective interest rates of the loan ranged from 6.58% to 9.13% per annum for the year ended December 31, 2017 (December 31, 2016: 8.19% to 10.70% per annum). The Company is required to comply with certain financial covenants, i.e. *debt service coverage ratio* and *net debt to running EBITDA*. Beside these certain ratios, subsidiaries are also required to comply *running EBITDA to interest expenses*.

As of December 31, 2017 and 2016, the Company and iForte were in compliance with all of the aforementioned financial ratio covenants.

The 2014 Loan Facilities

On November 19, 2014, Protelindo Finance B.V. and the Company entered into a EUR20,000,000 Term Loan and a US\$100,000,000 Revolving Credit Facilities Agreement with Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (the "OCBC Facilities Agreement"), as amended by a Novation and Amendment Agreement dated July 1, 2016 (the "OCBC Novation and Amendment Agreement") OCBC Novation and Amendment Agreement lastly amended by OCBC Amendment Letter dated June 21, 2017 ("OCBC Amendment Letter"). In connection with the OCBC Novation and Amendment Agreement, Protelindo Finance B.V. which has obtained loan facilities in amounts of EUR20,000,000 (the "Loan A Facility"), and US\$100,000,000 (the "Loan B Facility") assigned its rights and obligations under the OCBC Facilities Agreement to the Company (the "OCBC Loan Facilities"), whereby iForte provided the corporate guarantee to secure the fulfillment of the Company's liabilities for these facilities. The underlying considerations and reasons on the OCBC Novation and Amendment Agreement are as follows: (i) using the opportunity to conduct the sale of shares of a subsidiary in the Netherlands with substantial capital gains, (ii) to reduce the burden of debt, and (iii) to simplify the structure of loan/financing.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

14. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2014 (lanjutan)

Tujuan Perjanjian Fasilitas-Fasilitas OCBC ini adalah untuk pembayaran lebih awal dari setiap jumlah yang masih terutang berdasarkan Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2013 dan Fasilitas Pinjaman IFC. Perseroan dapat memilih periode bunga satu, tiga atau enam bulan untuk Fasilitas Pinjaman A dan Fasilitas Pinjaman B ("Periode Bunga"). Periode Bunga pertama untuk Fasilitas Pinjaman A dan Fasilitas Pinjaman B adalah tiga bulan. Fasilitas Pinjaman A akan jatuh tempo pada tanggal 19 November 2022. Fasilitas Pinjaman B akan jatuh tempo pada hari terakhir Periode Bunga atau, dalam hal apapun, selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo terakhir pada tanggal 19 November 2022.

Fasilitas Pinjaman A akan dikenakan tingkat suku bunga yang sama dengan EURIBOR ditambah margin yang berlaku yaitu 1,95% per tahun. Fasilitas Pinjaman B akan dikenakan tingkat suku bunga yang sama dengan LIBOR ditambah margin yang berlaku yaitu 1,95% per tahun. Fasilitas-Fasilitas Pinjaman OCBC telah dicairkan seluruhnya pada tanggal 28 November 2014. Efektif sejak tanggal 14 Juli 2017, margin yang berlaku untuk Fasilitas Pinjaman A dan Fasilitas Pinjaman B menjadi 1,50% per tahun.

Pada tanggal 14 Juli 2016 dan 28 September 2016, Perseroan melakukan pelunasan atas Fasilitas-Fasilitas Pinjaman OCBC masing-masing sebesar EUR20.000.000 dan AS\$40.000.000. Pada tanggal 29 Desember 2017, Perseroan melakukan pelunasan kembali atas sebagian Fasilitas-Fasilitas Pinjaman OCBC sebesar AS\$24.000.000.

Tingkat bunga efektif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 untuk pinjaman dalam Dolar AS dan Euro tersebut masing-masing berkisar antara 2,72% sampai dengan 3,18% dan nihil (31 Desember 2016: berkisar antara 2,36% sampai 2,72% dan 1,95% per tahun). Perseroan diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan finansial, yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA* (Catatan 37).

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

14. LONG-TERM LOANS (continued)

The 2014 Loan Facilities (continued)

The purpose of the OCBC Facilities Agreement is for prepayment of any amounts outstanding under the 2013 Loan Facilities and the IFC Loan Facility. The Company may select an interest period of one, three, or six months for the Loan A Facility and the Loan B Facility ("Interest Period"). The first Interest Periods for the Loan A Facility and Loan B Facility are three months. The Loan A Facility is due on November 19, 2022. The Loan B Facility is due for repayment on the last day of the Interest Period or, in any case, no later than the final maturity date on November 19, 2022.

The Loan A Facility is subject to an interest rate equal to EURIBOR plus an applicable margin of 1.95% per annum. The Loan B Facility is subject to an interest rate equal to LIBOR plus an applicable margin of 1.95% per annum. The OCBC Loan Facilities were fully drawn on November 28, 2014. Effective July 14, 2017, the applicable margin for the Loan A Facility and the Loan B Facility became 1.50% per annum.

On July 14, 2016 and September 28, 2016, the Company paid the OCBC Loan Facilities in the amount of EUR20,000,000 and US\$40,000,000, respectively. On December 29, 2017, the Company partially paid the OCBC Loan Facilities in the amount of US\$24,000,000.

The effective interest rates for the year ended December 31, 2017 for the US dollar and Euro loan ranged from 2.72% to 3.18% and nil, respectively (December 31, 2016: ranged from 2.36% to 2.72% and 1.95% per annum, respectively). The Company is required to comply with certain financial covenants, i.e. debt service coverage ratio and net debt to running EBITDA (Note 37).

As of December 31, 2017 and 2016, the Company was in compliance with all of the aforementioned financial ratio covenants.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

14. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2014 (lanjutan)

Pada tanggal 20 November 2014, Protelindo Finance B.V. dan Perseroan menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit Berulang AS\$100.000.000 dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura ("Perjanjian Fasilitas SMBC"), sebagaimana diubah dengan Perjanjian Novasi dan Perubahan tanggal 30 Juni 2016 ("Perjanjian Novasi dan Perubahan SMBC"). Perjanjian Novasi dan Perubahan SMBC terakhir kali diubah dengan *Amendment Letter* SMBC tanggal 20 Juni 2017 ("*Amendment Letter* SMBC"). Sehubungan dengan Perjanjian Novasi dan Perubahan SMBC tersebut, Protelindo Finance B.V. yang telah menerima suatu fasilitas pinjaman sejumlah AS\$100.000.000 mengalihkan hak dan kewajibannya yang ada dalam Perjanjian Fasilitas SMBC kepada Perseroan ("Fasilitas Pinjaman SMBC") dan iForte memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Perseroan atas fasilitas ini. Adapun pertimbangan dan alasan dilakukannya Perjanjian Novasi dan Perubahan SMBC adalah sebagai berikut: (i) menggunakan kesempatan untuk melakukan penjualan saham anak perusahaan di Belanda dengan peningkatan nilai (capital gain) yang substansial, (ii) mengurangi beban pinjaman, dan (iii) menyederhanakan struktur pinjaman/pembiayaan. Tujuan Perjanjian Fasilitas SMBC ini adalah untuk pembayaran lebih awal dari setiap jumlah yang masih terutang berdasarkan Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2013 dan Fasilitas Pinjaman IFC. Perseroan dapat memilih periode bunga satu, tiga atau enam bulan untuk Fasilitas Pinjaman SMBC ("Periode Bunga"). Periode Bunga pertama untuk Fasilitas Pinjaman SMBC adalah tiga bulan. Fasilitas Pinjaman SMBC jatuh tempo pada hari terakhir Periode Bunga atau, dalam hal apapun, selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo terakhir pada tanggal 19 November 2020.

Fasilitas Pinjaman SMBC dikenakan tingkat suku bunga yang sama dengan LIBOR ditambah margin yang berlaku yaitu 1,95% per tahun. Fasilitas Pinjaman SMBC telah dicairkan seluruhnya pada tanggal 28 November 2014. Efektif sejak tanggal 7 Juli 2017, margin yang berlaku untuk Fasilitas Pinjaman SMBC menjadi 1,50% per tahun.

Pada tanggal 28 September 2016, Perseroan melakukan pelunasan sebagian atas Fasilitas Pinjaman SMBC sebesar AS\$40.000.000. Pada tanggal 27 Desember 2017, Perseroan melakukan kembali pelunasan sebagian atas Fasilitas Pinjaman SMBC sebesar AS\$24.000.000.

14. LONG-TERM LOANS (continued)

The 2014 Loan Facilities (continued)

On November 20, 2014, Protelindo Finance B.V. and the Company entered into a US\$100,000,000 Revolving Loan Facility Agreement with Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (the "SMBC Facility Agreement"), as amended by a Novation and Amendment Agreement dated June 30, 2016 (the "SMBC Novation and Amendment Agreement"). SMBC Novation and Amendment Agreement lastly amended by SMBC Amendment Letter dated June 20, 2017 ("SMBC Amendment Letter"). In connection with the SMBC Novation and Amendment Agreement, Protelindo Finance B.V. which has obtained a loan facility in an amount of US\$100,000,000 assigned its rights and obligations under the SMBC Facility Agreement to the Company (the "SMBC Loan Facility"), whereby iForte provided the corporate guarantee to secure the fulfillment of the Company's liabilities for this facility. The underlying considerations and reasons on the SMBC Novation and Amendment Agreement are as follows: (i) using the opportunity to conduct the sale of shares of a subsidiary in the Netherlands with substantial capital gains, (ii) to reduce the burden of debt, and (iii) to simplify the structure of loan/financing. The purpose of the SMBC Facility Agreement is for prepayment of any amounts outstanding under the 2013 Loan Facilities and the IFC Loan Facility. The Company may select an interest period of one, three, or six months for the SMBC Loan Facility ("Interest Period"). The first Interest Period for the SMBC Loan Facility is three months. The SMBC Loan Facility is due for repayment on the last day of the Interest Period or, in any case, no later than the final maturity date on November 19, 2020.

The SMBC Loan Facility is subject to an interest rate equal to LIBOR plus an applicable margin of 1.95% per annum. The SMBC Loan Facility was fully drawn down on November 28, 2014. Effective as of July 7, 2017, the applicable margin for SMBC Loan Facility became 1.50% per annum.

On September 28, 2016, the Company partially paid the SMBC Loan Facility in the amount of US\$40,000,000. On December 27 2017, the Company partially paid the SMBC Loan Facility in the amount of US\$24,000,000.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

14. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2014 (lanjutan)

Tingkat bunga efektif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 untuk pinjaman dalam Dolar AS tersebut berkisar antara 2,72% sampai dengan 3,17% per tahun (31 Desember 2016: 2,36% sampai 2,72% per tahun). Perseroan diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan finansial, yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA* (Catatan 37).

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

Pada tanggal 19 November 2014, Protelindo Finance B.V. dan Perseroan menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit Berulang AS\$50.000.000 dengan DBS Bank Ltd. ("Perjanjian Fasilitas DBS") sebagaimana diubah dengan Perjanjian Novasi dan Perubahan tanggal 30 Juni 2016 ("Perjanjian Novasi dan Perubahan DBS"). Perjanjian Novasi dan Perubahan DBS diubah terakhir kali dengan *Amendment Letter* DBS tanggal 19 Juni 2017 ("*Amendment Letter* DBS"). Sehubungan dengan Perjanjian Novasi dan Perubahan DBS tersebut, Protelindo Finance B.V. yang telah menerima suatu fasilitas pinjaman sejumlah AS\$50.000.000 mengalihkan hak dan kewajibannya yang ada dalam Perjanjian Fasilitas DBS kepada Perseroan ("Fasilitas Pinjaman DBS") dan iForte memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Perseroan atas fasilitas ini. Adapun pertimbangan dan alasan dilakukannya Perjanjian Novasi dan Perubahan DBS adalah sebagai berikut: (i) menggunakan kesempatan untuk melakukan penjualan saham anak perusahaan di Belanda dengan peningkatan nilai (*capital gain*) yang substansial, (ii) mengurangi beban pinjaman, dan (iii) menyederhanakan struktur pinjaman/pembiayaan. Tujuan Perjanjian Fasilitas DBS ini adalah untuk pembayaran lebih awal dari setiap jumlah yang masih terutang berdasarkan Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2013 dan Fasilitas Pinjaman IFC.

Perseroan dapat memilih periode bunga satu, tiga atau enam bulan untuk Fasilitas Pinjaman DBS ("Periode Bunga"). Periode Bunga pertama untuk Fasilitas Pinjaman DBS adalah tiga bulan. Fasilitas Pinjaman DBS jatuh tempo pada hari terakhir Periode Bunga atau, dalam hal apapun, selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo terakhir pada tanggal 19 November 2019.

14. LONG-TERM LOANS (continued)

The 2014 Loan Facilities (continued)

The effective interest rates for the year ended December 31, 2017 for the US dollar loan ranged from 2.72% to 3.17% per annum (December 31, 2016: 2.36% to 2.72% per annum). The Company is required to comply with certain financial covenants, i.e. *debt service coverage ratio* and *net debt to running EBITDA* (Note 37).

As of December 31, 2017 and 2016, the Company was in compliance with all of the aforementioned financial ratio covenants.

On November 19, 2014, Protelindo Finance B.V. and the Company entered into a US\$50,000,000 Revolving Loan Facility Agreement with DBS Bank Ltd. (the "DBS Facility Agreement"), as amended by a Novation and Amendment Agreement dated June 30, 2016 (the "DBS Novation and Amendment Agreement"). DBS Novation and Amendment Agreement lastly amended by DBS Amendment Letter dated June 19, 2017 ("DBS Amendment Letter"). In connection with the DBS Novation and Amendment Agreement, Protelindo Finance B.V. which has obtained a loan facility in an amount of US\$50,000,000 assigned its rights and obligations under the DBS Facility Agreement to the Company, (the "DBS Loan Facility"), whereby iForte provided the corporate guarantee to secure the fulfillment of the Company's liabilities for this facility. The underlying considerations and reasons on the DBS Novation and Amendment Agreement are as follows: (i) using the opportunity to conduct the sale of shares of a subsidiary in the Netherlands with substantial capital gains, (ii) to reduce the burden of debt, and (iii) to simplify the structure of loan/financing. The purpose of the DBS Facility Agreement is for prepayment of any amounts outstanding under the 2013 Loan Facilities and the IFC Loan Facility.

The Company may select an interest period of one, three, or six months for the DBS Loan Facility ("Interest Period"). The first Interest Period for the DBS Loan Facility is three months. The DBS Loan Facility is due for repayment on the last day of the Interest Period or, in any case, no later than the final maturity date on November 19, 2019.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

14. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2014 (lanjutan)

Fasilitas Pinjaman DBS dikenakan tingkat suku bunga yang sama dengan LIBOR ditambah margin yang berlaku yaitu 1,95% per tahun. Fasilitas Pinjaman DBS telah dicairkan seluruhnya pada tanggal 28 November 2014. Efektif sejak tanggal 23 Juni 2017, margin yang berlaku untuk Fasilitas Pinjaman DBS menjadi 1,40% per tahun.

Pada tanggal 23 September 2016, Perseroan melakukan pelunasan sebagian atas Fasilitas Pinjaman DBS sebesar AS\$20.000.000. Pada tanggal 22 Desember 2017, Perseroan melakukan kembali pelunasan sebagian Fasilitas Pinjaman DBS sebesar AS\$12.000.000.

Tingkat bunga efektif untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 untuk pinjaman dalam Dolar AS tersebut berkisar antara 2,63% sampai dengan 3,17% per tahun (31 Desember 2016: 2,36% sampai 2,71% per tahun). Perseroan diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan finansial, yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA* (Catatan 37).

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

Fasilitas Pinjaman Desember 2012

Pada tanggal 20 Desember 2012, Perseroan menandatangani Perjanjian Fasilitas Sampai Dengan Rp1.100.000 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan Pertama tanggal 20 Mei 2013, Perjanjian Perubahan Kedua tanggal 25 Februari 2014, Perjanjian Perubahan tanggal 30 Juni 2015 dan Perjanjian Perubahan terakhir tanggal 30 Juni 2016 ("Fasilitas Pinjaman Desember 2012") dan iForte memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Perseroan atas fasilitas ini. Seluruh dana dari Fasilitas Pinjaman Desember 2012 telah digunakan untuk membayar Pinjaman Antar Perusahaan kepada Protelindo Towers B.V. Protelindo Towers B.V. selanjutnya telah mendistribusikan dana yang diterima kepada Protelindo Netherlands B.V. yang selanjutnya telah digunakan untuk melunasi sebagian pinjaman dari Protelindo Finance B.V. Selanjutnya Protelindo Finance B.V. menggunakan dana yang diterima untuk membayar sebagian Fasilitas Pinjaman *Bridge* yang diterimanya.

14. LONG-TERM LOANS (continued)

The 2014 Loan Facilities (continued)

The DBS Loan Facility is subject to an interest rate equal to LIBOR plus an applicable margin of 1.95% per annum. The DBS Loan Facility was fully drawn down on November 28, 2014. Effective June 23, 2017, the applicable margin for DBS Loan Facility became 1.40% per annum.

On September 23, 2016, the Company partially paid the DBS Loan Facility in the amount of US\$20,000,000. On December 22, 2017, the Company partially paid the DBS Loan Facility in the amount of US\$12,000,000.

The effective interest rates for the year ended December 31, 2017 for the US dollar loan ranged from 2.63% to 3.17% per annum (December 31, 2016: 2.36% to 2.71% per annum). The Company is required to comply with certain financial covenants, i.e. *debt service coverage ratio* and *net debt to running EBITDA* (Note 37).

As of December 31, 2017 and 2016, the Company was in compliance with all of the aforementioned financial ratio covenants.

The December 2012 Loan Facility

On December 20, 2012, the Company entered into the Up To Rp1,100,000 Facility Agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. as amended by the First Amendment Agreement dated May 20, 2013, the Second Amendment Agreement dated February 25, 2014, the Amendment Agreement dated June 30, 2015 and by the latest Amendment Agreement dated June 30, 2016 (the "December 2012 Loan Facility"), whereby iForte provided the corporate guarantee to secure the fulfillment of the Company's liabilities for this facility. All funds from the December 2012 Loan Facility were used to repay a portion of the Intercompany Loan for Protelindo Towers B.V. Protelindo Towers B.V. which in turn, distributed the funds received to Protelindo Netherlands B.V. which in turn, used the funds received to repay a portion of the loan from Protelindo Finance B.V. Subsequently, Protelindo Finance B.V. used the funds received to repay a portion of the Bridge Loan Facility.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

14. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Fasilitas Pinjaman Desember 2012 (lanjutan)

Fasilitas Pinjaman Desember 2012 ini akan dibayar secara kuartalan mulai 31 Maret 2013 sampai dengan 19 Desember 2019 dan dikenakan bunga sebesar JIBOR ditambah margin yang berlaku sebesar 2,95% per tahun. Tingkat bunga efektif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar 7,94% sampai 10,38% per tahun (31 Desember 2016: 8,53% sampai 10,85% per tahun).

Perseroan diwajibkan untuk memenuhi rasio-rasio keuangan tertentu yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA* (Catatan 37). Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

Pada tanggal 5 Juli 2017 Perseroan telah melakukan pelunasan atas seluruh Fasilitas Pinjaman Desember 2012 sebesar Rp717.750.

Bank Garansi

Perseroan memperoleh fasilitas bank garansi dari PT Bank Mandiri Tbk (Persero) sebesar Rp100.000 berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi tertanggal 6 Desember 2017. Fasilitas bank garansi tersebut merupakan fasilitas global line yang dapat digunakan oleh PT Iforte Global Internet ("IGI"). Fasilitas Bank Garansi dapat diterbitkan dengan tenor/jangka waktu penerbitan/pembukaan maksimal 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 5 Desember 2018. Fasilitas bank garansi ini bertujuan untuk keperluan jaminan pembayaran, jaminan penawaran, atau jaminan pelaksanaan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan dan/atau IGI.

Pada tanggal 31 Desember 2017, tidak ada jumlah terutang atas fasilitas tersebut.

14. LONG-TERM LOANS (continued)

The December 2012 Loan Facility (continued)

The December 2012 Loan Facility is payable in quarterly installments starting on March 31, 2013 through December 19, 2019 and subject to interest at JIBOR plus an applicable margin of 2.95% per annum. The effective interest rates for year ended December 31, 2017 ranged from 7.94% to 10.38% per annum (December 31, 2016: 8.53% to 10.85% per annum).

The Company is required to comply with certain financial covenants, i.e. debt service coverage ratio and net debt to running EBITDA (Note 37). As of December 31, 2016, the Company was in compliance with all of the aforementioned financial ratio covenants.

On July 5, 2017, the Company has fully repaid the December 2012 Loan Facility in the amount of Rp717,750.

Bank Guarantee

The Company has granted a bank guarantee facility from PT Bank Mandiri Tbk (Persero) in the amount of Rp100,000 based on Bank Guarantee Facility Agreement dated December 6, 2017. The bank guarantee facility is a global line facility which can be used by PT Iforte Global Internet ("IGI"). The bank guarantee can be issued within maximum of 12 months up to December 5, 2018. The purposes of this facility are for surety bond, bid bond, or performance bond of the Company and/or IGI's business activities.

As of December 31, 2017, there is no outstanding amount of this facility.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

15. UTANG OBLIGASI

15. BONDS PAYABLE

	31 Desember/December 31, 2017			31 Desember/December 31, 2016		
	Saldo terutang/Amount payable			Saldo terutang/Amount payable		
	Mata uang/ Currency	Mata uang asal (dalam jutaan)/ Original currency (in million)	Setara Rupiah/ Rupiah equivalent	Mata uang asal (dalam jutaan)/ Original currency (in million)	Setara Rupiah/ Rupiah equivalent	
Utang Obligasi						Bonds Payable
Bagian jangka pendek						Current portion
Seri I	Rupiah	-	-	1.000.000	1.000.000	Series I
Dikurangi:						Less:
Biaya obligasi yang belum diamortisasi			-		(1.299)	Unamortized costs of bonds
Total			-		998.701	Total
Bagian jangka panjang						Long-term portion
Obligasi 2016	Rupiah	800.000	800.000	800.000	800.000	2016 Bonds
CGIF	Dolar Singapura	180	1.824.035	180	1.673.806	CGIF
Dikurangi:						Less:
Biaya obligasi yang belum diamortisasi			(34.439)		(41.636)	Unamortized costs of bonds
Total			2.589.596		2.432.170	Total
	Tanggal emisi/ Date of issue	Jatuh tempo/ Maturity	Penerbit/ Issuer	Periode	Tingkat bunga	
				pembayaran bunga/ Interest payment period	per tahun/ Interest rate per year	
Utang Obligasi						Bonds Payable
Seri I	28 Februari/ February 28, 2014	28 Februari/ February 28, 2017	Perseroan/ Company	Kuartalan/ Quarterly	10,50%	Series I
CGIF	27 November/ November 27, 2014	27 November/ November 27, 2024	Perseroan/ Company	Tengah tahunan/ Semi annually	3,25%	CGIF
Obligasi 2016 Seri A	23 November/ November 23, 2016	23 November/ November 23, 2019	Perseroan/ Company	Kuartalan/ Quarterly	7,90%	2016 Obligation Series A
Obligasi 2016 Seri B	23 November/ November 23, 2016	23 November/ November 23, 2021	Perseroan/ Company	Kuartalan/ Quarterly	8,25%	2016 Obligation Series B
Obligasi 2016 Seri C	23 November/ November 23, 2016	23 November/ November 23, 2023	Perseroan/ Company	Kuartalan/ Quarterly	8,75%	2016 Obligation Series C

Obligasi Protelindo I Tahun 2014

Pada tanggal 20 Februari 2014, Perseroan telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK melalui surat No. S-95/D.04/2014 dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Protelindo I Tahun 2014 ("Obligasi") dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Maret 2014. Obligasi ini dikeluarkan dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,5% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2017. Wali amanat sehubungan dengan penawaran umum ini adalah PT Bank Permata Tbk., yang mana tidak mempunyai hubungan afiliasi dan tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan. Pada tanggal 13 Mei 2015, Obligasi mendapat peringkat AA+ (idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Protelindo Bonds I Year 2014

On February 20, 2014, the Company received an effective statement from OJK based on its letter No. S-95/D.04/2014 in conjunction with the Public Offering of Protelindo Bonds I Year 2014 (the "Bonds") with a nominal value of Rp1,000,000 which were listed on the Indonesia Stock Exchange on March 3, 2014. The Bonds were issued with a fixed interest rate of 10.5% per annum and a term of three years, and will be due on February 28, 2017. PT Bank Permata Tbk. is the trustee in connection with this public offering, which is not an affiliated party nor a lender of the Company. On May 13, 2015, the Bonds were rated AA+ (idn) by PT Fitch Ratings Indonesia.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

15. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Protelindo I Tahun 2014 (lanjutan)

Pada tanggal 13 Mei 2016, peringkat Obligasi Protelindo I Tahun 2014 telah ditingkatkan oleh PT Fitch Ratings Indonesia menjadi AAA (idn).

Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan Obligasi telah dipergunakan untuk pembayaran lebih awal sebagian saldo utang Perseroan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Bunga dari Obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan sekali dengan pembayaran pertama yang jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2014 dan pembayaran terakhir dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok Obligasi. Perjanjian perwalianamanatan mengatur beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Larangan untuk memberikan pinjaman kepada pihak manapun, termasuk kepada afiliasi Perseroan, dalam jumlah lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan, kecuali, antara lain, untuk pinjaman yang diberikan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan;
- b. Memelihara perbandingan total Pinjaman Bersih dengan *Running EBITDA* ("Rasio Pinjaman") tidak lebih dari 5:1, kecuali dalam hal tertentu, Perseroan diperbolehkan memiliki Rasio Pinjaman sampai dengan 7:1; dan
- c. Memelihara perbandingan antara *Running EBITDA* dengan Beban Bunga Kas tidak kurang dari 1,5:1.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah memenuhi ketentuan tersebut.

Tingkat bunga efektif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar 10,57%.

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi untuk sebagian atau seluruhnya setiap saat setelah ulang tahun pertama tanggal penjatahan. Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus.

Pada tanggal 28 Februari 2017, Perseroan telah melunasi Obligasi ini.

15. BONDS PAYABLE (continued)

Protelindo Bonds I Year 2014 (continued)

On May 13, 2016, the rating of Protelindo Bonds I Year 2014 was upgraded by PT Fitch Ratings Indonesia to AAA (idn).

The proceeds from the Bonds issuance has been used for early repayment of part of the Company's outstanding loans from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Interest on the Bonds will be paid on a quarterly basis with the first payment being due on May 28, 2014 and the last payment will be made along with the principal repayment. The trustee agreement provides for several covenants of the Company, including, without limitation:

- a. A prohibition to provide loans to any party, including to Company's affiliates, in an amount more than 20% of the equity of the Company except for, among others, loans related to the business activities of the Company;
- b. To maintain a ratio of the total Net Debt to Running EBITDA ("Debt Ratio") of not more than 5:1, except in certain conditions, the Company is allowed to have a Debt Ratio up to 7:1; and
- c. To maintain a ratio of Running EBITDA to Cash Interest Expense of not less than 1.5:1.

As of December 31, 2016, the Company was in compliance with the aforementioned covenants.

The effective interest rate for the year ended December 31, 2016 was 10.57%.

The Company may buy back the Bonds in part or in whole at any time after the first anniversary of the allotment date. This Bonds are not secured by any specific collateral.

On February 28, 2017, the Company has fully repaid the Bonds.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

15. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Senior Tanpa Jaminan Jatuh Tempo 2024

Pada tanggal 27 November 2014, Protelindo Finance B.V. menerbitkan Obligasi Senior Tanpa Jaminan dengan jumlah pokok sebesar SGD180.000.000 dengan bunga 3,25%, yang akan jatuh tempo di 2024 ("Obligasi Senior"). Kewajiban pembayaran dari Protelindo Finance B.V. sehubungan dengan Obligasi Senior akan ditanggung tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan oleh *Credit Guarantee and Investment Facility* ("CGIF"), sebuah dana amanat dari Asian Development Bank, sesuai dengan syarat dalam Jaminan CGIF. Sehubungan dengan Obligasi Senior, Perseroan, Protelindo Finance B.V., dan CGIF telah menandatangani suatu perjanjian pembayaran kembali dan ganti rugi yang mana, antara lain, mengatur tentang pembayaran biaya penjaminan dan lainnya sehubungan Jaminan CGIF dan dasar dari biaya yang dibayarkan oleh CGIF berdasarkan Jaminan CGIF akan diganti dan dijamin oleh Protelindo Finance B.V. dan Perseroan.

DB Trustees (Hong Kong) Limited bertindak sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan Obligasi Senior. Obligasi Senior tersebut tercatat dan diperdagangkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited ("SGX-LT") pada tanggal 28 November 2014.

Obligasi Senior tersebut dikenakan bunga sejak 27 November 2014 pada tingkat suku bunga sebesar 3,25 % per tahun, yang dibayarkan setiap semester pada tanggal 27 Mei dan 27 November setiap tahunnya, dimulai sejak 27 Mei 2015.

Baik Perseroan ataupun para entitas anaknya tidak akan membuat atau tidak diizinkan untuk menjamin seluruh atau sebagian dari properti, aset ataupun pendapatan (termasuk saham yang belum dibayarkan) yang ada atau yang akan ada.

Tingkat bunga efektif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah 3,27%.

Pada tanggal 13 November 2014, Standard and Poor's Ratings Services memberikan peringkat 'AA' untuk Obligasi Senior tersebut. Protelindo Finance B.V. mempergunakan dana dari penerbitan Obligasi Senior, setelah dipotong biaya manajemen, komisi dan biaya lainnya sehubungan dengan Obligasi Senior tersebut, untuk melunasi sebagian dari pinjamannya yang ada.

15. BONDS PAYABLE (continued)

The Senior Unsecured Guaranteed Bonds due 2024

On November 27, 2014, Protelindo Finance B.V. issued the 3.25% Senior Unsecured Guaranteed Bonds amounting to SGD180,000,000, which is due in 2024 (the "Senior Bonds"). The payment obligations of Protelindo Finance B.V. in respect of the Senior Bonds will be unconditionally and irrevocably guaranteed by Credit Guarantee and Investment Facility ("CGIF"), a trust fund of the Asian Development Bank, subject to the terms of the CGIF Guarantee. In relation to the Senior Bonds, the Company, Protelindo Finance B.V., and CGIF have entered in a reimbursement and indemnity agreement which, among other things, specifies the payment of guarantee fees and other amounts in respect of the CGIF Guarantee and the basis on which amounts paid by the CGIF under the CGIF Guarantee are to be reimbursed and indemnified by Protelindo Finance B.V. and the Company.

DB Trustees (Hong Kong) Limited is acting as a trustee in respect to the issuance of the Senior Bonds. The Senior Bonds were listed and traded on the Singapore Exchange Securities Trading Limited ("SGX-LT") on November 28, 2014.

The Senior Bonds bears interest starting from November 27, 2014 at the rate of 3.25% per annum, payable semi-annually in arrears on May 27 and November 27, in each year, commencing on May 27, 2015.

Neither the Company nor its subsidiaries shall create or permit to exist any security interest on the whole or any part of its present or future property, assets or revenues (including uncalled share capital).

The effective interest rate for the year ended December 31, 2017 and 2016 was 3.27% respectively.

On November 13, 2014, Standard and Poor's Ratings Services rated the Senior Bonds with 'AA'. Protelindo Finance B.V. used the proceeds from the issuance of the Senior Bonds, after deducting management fees, commissions and other expenses associated with the Senior Bonds, to settle a portion of its existing debt.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

15. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

**Obligasi Senior Tanpa Jaminan Jatuh Tempo
2024 (lanjutan)**

Pada tanggal 3 Agustus 2016, Protelindo Finance B.V. dan Perseroan menandatangani (i) *Amended and Restated Trust Deed*, (ii) *Amended and Restated Agency Agreement*, (iii) *Deed of Amendment relating to the Reimbursement and Indemnity Agreement*, dengan Credit Guarantee and Investment Facility, a Trust Fund of the Asian Development Bank sebagai Penjamin, DB Trustees (Hong Kong) Limited sebagai Wali Amanat, Deutsche Bank AG, Cabang Hong Kong sebagai *Principal Paying Agent* dan *Transfer Agent* dan Deutsche Bank Luxembourg S.A. sebagai *Registrar*. Penandatanganan perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan diatas merupakan implementasi atau pelaksanaan dari tindak lanjut diperolehnya persetujuan dari para pemegang surat utang (*bondholders*) melalui *Consent Solicitation Memorandum* pada tanggal 22 Juli 2016 untuk mengubah ketentuan dalam Surat Utang, terkait pengalihan dari penerbit awal Obligasi Senior, yaitu Protelindo Finance B.V. menjadi Perseroan. Sehubungan dengan perjanjian tersebut, selanjutnya Perseroan menggantikan kedudukan Protelindo Finance B.V. sebagai penerbit Obligasi Senior terhadap para pemegang Obligasi Senior (*bondholders*).

**Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I
Tahun 2016**

Pada tanggal 17 November 2016, Perseroan telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK melalui surat No. S-375/D.01/2016 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 ("Obligasi 2016") dengan nilai nominal sebesar Rp800.000 yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 November 2016. Obligasi ini dikeluarkan dalam 3 seri, yaitu:

- (a) seri A sebesar Rp661.000 dengan tingkat bunga tetap 7,90% per tahun, berjangka waktu tiga tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2019;
- (b) seri B sebesar Rp36.000 dengan tingkat bunga tetap 8,25% per tahun, berjangka waktu lima tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2021; dan
- (c) seri C sebesar Rp103.000 dengan tingkat bunga tetap 8,75% per tahun, berjangka waktu tujuh tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2023.

15. BONDS PAYABLE (continued)

**The Senior Unsecured Guaranteed Bonds due
2024 (continued)**

On August 3, 2016, Protelindo Finance B.V. and the Company entered into a (i) *Amended and Restated Trust Deed*, (ii) *Amended and Restated Agency Agreement*, (iii) *Deed of Amendment relating to the Reimbursement and Indemnity Agreement*, with Credit Guarantee and Investment Facility, a Trust Fund of the Asian Development Bank as Guarantor, DB Trustees (Hong Kong) Limited as Trustee, Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch as *Principal Paying Agent* and *Transfer Agent* and Deutsche Bank Luxembourg S.A. as *Registrar*. As mentioned above, the signing of those agreements is the implementation upon an approval from bondholders through the *Consent Solicitation Memorandum* dated July 22, 2016 to amend the provisions related to the transfer of the initial issuer of the Senior Bonds, from Protelindo Finance B.V. to the Company. In connection with the abovementioned agreements, the Company replaced Protelindo Finance B.V. position as an issuer of Senior Bonds to the bondholders.

**Sustainable Bonds I of Protelindo Stage I Year
2016**

On November 17, 2016, the Company received an effective statement from OJK based on its letter No. S-375/D.01/2016 in conjunction with the Sustainable Public Offering of Sustainable Bonds I of Protelindo Stage I Year 2016 (the "Bonds 2016") with a nominal value of Rp800,000 which were listed on the Indonesia Stock Exchange on November 24, 2016. The Bonds were issued in three series, namely:

- (a) series A of Rp661,000 with a fixed interest rate of 7.90% per annum, a term of three years, and will be due on November 23, 2019;
- (b) series B of Rp36,000 with a fixed interest rate of 8.25% per annum, a term of five years and will be due on November 23, 2021; and
- (c) series C of Rp103,000 with a fixed interest rate of 8.75% per annum, a term of seven years and will be due on November 23, 2023.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

15. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 (lanjutan)

Wali amanat sehubungan dengan penawaran umum berkelanjutan ini adalah PT Bank Permata Tbk., yang mana tidak mempunyai hubungan afiliasi dan tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan. Pada tanggal 9 Mei 2017, Peringkat Obligasi 2016 diafirmasi dengan AAA (idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan Obligasi 2016 telah dipergunakan sebagian sebagai modal kerja Perseroan untuk pembayaran perpanjangan biaya sewa lahan menara, biaya tenaga ahli, pemeliharaan menara dan pengoperasian menara.

Bunga dari Obligasi 2016 akan dibayarkan setiap tiga bulan sekali dengan pembayaran pertama yang jatuh tempo pada tanggal 23 Februari 2017 dan pembayaran terakhir dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok masing-masing seri Obligasi 2016. Perjanjian perwaliamanatan mengatur beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Larangan untuk memberikan pinjaman kepada pihak manapun, termasuk kepada afiliasi Perseroan, dalam jumlah lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan kecuali, antara lain, untuk pinjaman yang diberikan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan;
- b. Memelihara perbandingan total Pinjaman Bersih dengan *Running EBITDA* ("Rasio Pinjaman") tidak lebih dari 5:1, kecuali dalam hal tertentu, Perseroan diperbolehkan memiliki Rasio Pinjaman sampai dengan 7:1; dan
- c. Memelihara perbandingan antara *Running EBITDA* dengan Beban Bunga Kas tidak kurang dari 1,5:1.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan telah memenuhi ketentuan tersebut.

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi 2016 untuk sebagian atau seluruhnya setiap saat setelah ulang tahun pertama tanggal penjatahan.

Obligasi 2016 ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus.

15. BONDS PAYABLE (continued)

Sustainable Bonds I of Protelindo Stage I Year 2016 (continued)

PT Bank Permata Tbk. is the trustee in connection with this sustainable public offering, which is not an affiliated party nor a lender of the Company. On May 9, 2017, the rating of Bonds 2016 were affirmed with AAA (idn) by PT Fitch Ratings Indonesia.

The proceeds from the Bonds 2016 issuance have been used partially as working capital of the Company for the payment of renewal fees of tower ground leases, the fees of the experts, maintenance and operation of the tower.

Interest on the Bonds 2016 will be paid on a quarterly basis with the first payment being due on February 23, 2017 and the last payment will be made along with the repayment principal of each series of Bonds 2016. The trustee agreement provides for several covenants of the Company, including, without limitation:

- a. A prohibition to provide loans to any party, including to Company's affiliates, in an amount more than 20% of the equity of the Company except for, among others, loans related to the business activities of the Company;*
- b. To maintain a ratio of the total Net Debt to Running EBITDA ("Debt Ratio") of not more than 5:1, except in certain conditions, the Company is allowed to have a Debt Ratio up to 7:1; and*
- c. To maintain a ratio of Running EBITDA to Cash Interest Expense of not less than 1.5:1.*

As of December 31, 2017 and 2016, the Company was in compliance with the aforementioned covenants.

The Company may buy back the Bonds 2016 in part or in whole at any time after the first anniversary of the allotment date.

This Bonds 2016 are not secured by any specific collateral.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. PROVISI JANGKA PANJANG

	Saldo 31 Des./ Balance Dec. 31, 2016	Provisi tambahan/ Additional provision	Jumlah yang terjadi dan dibebankan/ Amount realized and expense	Kenaikan selama periode/ Increase during the period	Selisih kurs/ Foreign exchange	Saldo 31 Des./ Balance Dec. 31, 2017	
Estimasi biaya pembongkaran menara	226.417	7.553	(3.416)	17.901	-	248.455	Estimated cost of dismantling of towers
	Saldo 31 Des./ Balance Dec. 31, 2015	Provisi tambahan/ Additional provision	Jumlah yang terjadi dan dibebankan/ Amount realized and expense	Kenaikan selama periode/ Increase during the period	Selisih kurs/ Foreign exchange	Saldo 31 Des./ Balance Dec. 31, 2016	
Estimasi biaya pembongkaran menara	208.638	42.086	(39.395)	15.579	(491)	226.417	Estimated cost of dismantling of towers

Asumsi signifikan pada tanggal 31 Desember 2017 terdiri dari tingkat diskonto dan sisa periode sebelum pembongkaran dilakukan, yaitu masing-masing adalah 8,47% dan 14,84 tahun.

The significant assumptions as of December 31, 2017 consist of discount rate and remaining periods before dismantling of 8.47% and 14.84 years, respectively.

Pembongkaran menara akan dilakukan pada saat selesainya masa sewa lahan terkait menara tersebut.

Dismantling of towers will be realized at the end of land rent period of related towers.

17. PERPAJAKAN

17. TAXATION

a. Pajak dibayar pengembalian pajak	dimuka/Estimasi	a. Prepaid taxes/Estimated claims for tax refund	
	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
<u>Aset lancar</u>			<u>Current assets</u>
Perseroan			The Company
Pajak pertambahan nilai	-	292.385	Value-added tax
Entitas anak			The subsidiaries
Pajak pertambahan nilai	6.325	6.518	Value-added tax
Total	6.325	298.903	Total
<u>Aset tidak lancar</u>			<u>Non-current assets</u>
Entitas anak			The subsidiaries
Lebih bayar			Refundable
pajak penghasilan badan - 2015	-	2.175	corporate income tax - 2015
Lebih bayar			Refundable
pajak penghasilan badan - 2016	910	1.145	corporate income tax - 2016
	910	3.320	

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

17. TAXATION (continued)

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
Perseroan			The Company
Pajak penghasilan			Employee income tax -
karyawan - Pasal 21	1.256	1.759	Article 21
Pemotongan pajak			Withholding income tax -
penghasilan - Pasal 23/26	983	5.158	Articles 23/26
Pemotongan pajak			Withholding income tax -
penghasilan - Pasal 4(2)	4.596	3.603	Article 4(2)
Pajak pertambahan nilai	5.033	-	Value-added tax
Pajak penghasilan badan - 2016	-	307.989	Corporate income tax - 2016
Pajak penghasilan badan - 2017	3.589	-	Corporate income tax - 2017
	15.457	318.509	
Entitas anak			The subsidiaries
Pajak penghasilan			Employee income tax -
karyawan - Pasal 21	853	635	Article 21
Pemotongan pajak			Withholding income tax -
penghasilan - Pasal 23/26	1.273	615	Articles 23/26
Pemotongan pajak			Withholding income tax -
penghasilan - Pasal 4(2)	474	143	Article 4(2)
Pajak penghasilan badan - 2016	-	14.328	Corporate income tax - 2016
Pajak penghasilan badan - 2017	22.888	-	Corporate income tax - 2017
	25.488	15.721	
	40.945	334.230	

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan yang ditunjukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan penghasilan kena pajak, beban pajak kini dan (klaim)/utang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

The reconciliations between income before corporate income tax expense as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, taxable income, current tax expense and corporate income tax (claim)/payable are as follows:

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

17. TAXATION (continued)

b. Utang pajak (lanjutan)

b. Taxes payable (continued)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31		
	2017	2016	
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari operasi yang dilanjutkan	2.802.519	2.488.727	Income before corporate income tax expense per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from continuing operations
Laba tahun berjalan dari operasi yang dihentikan	-	372.836	Profit for the year from discontinued operations
Laba entitas anak sebelum pajak penghasilan	(123.026)	(25.165)	Subsidiaries income before corporate income tax
Laba sebelum pajak penghasilan - Perseroan	2.679.493	2.836.398	Income before corporate income tax - the Company
Perbedaan temporer			Temporary differences
Provisi (pembayaran) imbalan kerja	(90.030)	17.465	Provision (payment) for employee benefits
Akrual bonus karyawan	5.663	(7.421)	Accrued employee bonuses
Biaya pinjaman	33.558	13.359	Cost of loans
Provisi (pembalikan cadangan) biaya perijinan dan lisensi	(61.113)	16.638	Provision (reversal of allowance) for permit and licenses
Depresiasi aset tetap	(577.140)	(174.950)	Fixed assets depreciation
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	138.406	87.507	Allowance for impairment of trade receivables
Provisi untuk potongan harga	-	(11.470)	Provision for discount
Rencana opsi manajemen	57.446	30.000	Management option plan
Perbedaan permanen			Permanent differences
Pendapatan bunga telah dikenakan pajak penghasilan final, neto	(58.431)	(45.966)	Interest income subject to final income tax, net
Beban yang tidak dapat dikurangkan, neto	26.047	95.953	Non-deductible expenses, net
Penghasilan kena pajak	2.153.899	2.857.513	Taxable income
Beban pajak kini - Perseroan	538.475	714.378	Current corporate income tax expense - the Company
Beban pajak kini - entitas anak	47.039	19.856	Current corporate income tax expense - subsidiaries
	585.514	734.234	
Dikurangi pembayaran pajak dimuka - Perseroan			Less prepaid taxes - the Company
Pasal 23	90.873	93.841	Article 23
Pasal 25	444.013	312.549	Article 25
Pajak dibayar dimuka - entitas anak	24.151	6.673	Prepaid taxes - subsidiaries
	559.037	413.063	
Taksiran utang (klaim) pajak penghasilan badan			Estimated corporate income tax payable (claim)
Perseroan	3.589	307.989	The Company
Entitas anak	22.888	14.328	The subsidiaries
Entitas anak	-	(1.145)	The subsidiaries
	26.477	321.172	

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Utang pajak (lanjutan)

Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Indonesia, pajak penghasilan badan dihitung secara tahunan untuk Perseroan dan masing-masing entitas anaknya sebagai entitas hukum yang terpisah (laporan keuangan konsolidasian tidak dapat digunakan untuk menghitung pajak penghasilan badan).

c. Analisa beban pajak penghasilan

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31	
	2017	2016 (Disajikan kembali - Catatan 41/ As restated - Note 41)
Perseroan		
Beban pajak kini	538.475	714.378
Beban pajak tangguhan	105.748	7.218
	644.223	721.596
Entitas anak		
Beban pajak kini	47.039	19.856
Beban (manfaat) pajak tangguhan	3.806	(11.202)
	50.845	8.654
Konsolidasian		
Beban pajak kini	585.514	734.234
Beban (manfaat) pajak tangguhan	109.554	(3.984)
	695.068	730.250

d. Rekonsiliasi pajak penghasilan badan

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan hasil perkalian laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

17. TAXATION (continued)

b. Taxes payable (continued)

In accordance with Indonesia Taxation Law, corporate income tax is calculated for the Company and each of its subsidiaries in the understanding that they are separate legal entities (consolidated financial statements are not permitted for computing corporate income tax) on an annual basis.

c. Analysis of corporate income tax expense

	The Company
	Current tax expense
	Deferred tax expense
	The subsidiaries
	Current tax expense
	Deferred tax expense (benefits)
	Consolidated
	Current tax expense
	Deferred tax expense (benefits)

d. Reconciliation of corporate income tax expense

Reconciliations between income tax expense as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and income tax expense calculated using prevailing tax rate on the consolidated income before corporate income tax are as follows:

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

17. TAXATION (continued)

**d. Rekonsiliasi pajak penghasilan badan
(lanjutan)**

**d. Reconciliation of corporate income tax
expense (continued)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31		
	2017	2016 (Disajikan kembali - Catatan 41/ As restated - Note 41)	
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari operasi yang dilanjutkan	2.802.519	2.488.727	Income before corporate income tax expense per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income from continuing operations
Laba tahun berjalan dari operasi yang dihentikan	-	372.836	Profit for the year from discontinued operations
Total	2.802.519	2.861.563	Total
Beban pajak dihitung dengan tarif 25% yang berlaku umum	700.630	715.391	Tax expense calculated at statutory rates of 25%
Efek pajak atas perbedaan permanen			Tax effect of permanent differences
Pendapatan bunga telah dikenakan pajak penghasilan final	(14.608)	(11.492)	Interest income already subjected to final income tax
Beban yang tidak dapat dikurangkan, neto	9.046	26.351	Non-deductible expenses, net
Total beban pajak penghasilan konsolidasian	695.068	730.250	Total consolidated income tax expense

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

17. TAXATION (continued)

e. Liabilitas pajak tangguhan, neto

Analisa saldo liabilitas pajak tangguhan, neto adalah sebagai berikut:

e. Deferred tax liabilities, net

An analysis of the deferred tax liabilities, net is as follows:

	2017	2016 (Disajikan kembali - Catatan 41/ As restated - Note 41)	
Perseroan			The Company
Aset pajak tangguhan			Deferred tax assets
Rencana opsi manajemen	21.861	7.500	Management option plan
Provisi imbalan kerja	-	17.846	Provision for employee benefits
Provisi biaya perijinan dan lisensi	9.868	25.146	Provision for permit and licenses
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	56.591	21.990	Impairment allowance of trade receivables
Revaluasi lindung nilai arus kas	-	9.609	Revaluation of cash flow hedge
Akrual bonus karyawan	8.217	6.801	Accrued employee bonuses
	96.537	88.892	
Liabilitas pajak tangguhan			Deferred tax liabilities
Aset tetap	(505.350)	(359.489)	Fixed assets
Aset takberwujud	(147.407)	(166.539)	Intangible assets
Biaya pinjaman	(35.961)	(44.351)	Costs of loans
Revaluasi lindung nilai arus kas	(8.712)	-	Revaluation of cash flow hedge
Provisi imbalan kerja	(2.825)	-	Provision employee benefits
	(700.255)	(570.379)	
Liabilitas pajak tangguhan Perseroan, neto	(603.718)	(481.487)	Deferred tax liabilities the Company, net

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

17. TAXATION (continued)

e. Liabilitas pajak tangguhan, neto (lanjutan)

e. Deferred tax liabilities, net (continued)

	2017	2016 (Disajikan kembali - Catatan 41/ As restated - Note 41)	
Entitas anak			The subsidiaries
Aset pajak tangguhan			Deferred tax assets
Provisi imbalan kerja	5.131	3.568	Provision for employee benefits
Cadangan pinalti	2.243	-	Penalty reserves
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	371	333	Impairment allowance of trade receivables
Provisi biaya perijinan dan lisensi	337	146	Provision for permit and licenses
	8.082	4.047	
Liabilitas pajak tangguhan Aset tetap	(18.086)	(10.769)	Deferred tax liabilities Fixed assets
Liabilitas pajak tangguhan entitas anak, neto	(10.004)	(6.722)	Deferred tax liabilities subsidiaries, net
Liabilitas pajak tangguhan konsolidasian, neto	(613.722)	(488.209)	Consolidated deferred tax liabilities, net

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Manajemen Perseroan dan entitas anaknya berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan dapat dimanfaatkan dimasa mendatang.

Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that future taxable income will be available against which the temporary differences can be utilized. The Company and its subsidiaries management believe that the deferred tax assets can be utilized in the future.

f. Analisa perubahan aset (liabilitas) pajak tangguhan

f. Analysis of changes in deferred tax assets (liabilities)

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
Perseroan			The Company
Saldo awal liabilitas pajak tangguhan	(481.487)	(499.240)	Deferred tax liabilities - beginning balance
Beban pajak tangguhan tahun berjalan	(105.748)	7.218	Deferred tax expense for the year
Efek pajak tangguhan atas ekuitas	(16.483)	10.535	Deferred tax effect on equity
Saldo akhir liabilitas pajak tangguhan - Perseroan	(603.718)	(481.487)	Deferred tax liabilities ending balance - the Company
Entitas anak			The subsidiaries
Saldo awal liabilitas pajak tangguhan	(6.722)	(7.178)	Deferred tax liabilities - beginning balance
Beban pajak tangguhan tahun berjalan	(3.806)	(209)	Deferred tax expense for the year
Efek pajak tangguhan atas ekuitas	524	665	Deferred tax effect on equity
Saldo akhir liabilitas pajak tangguhan - entitas anak	(10.004)	(6.722)	Deferred tax liabilities ending balance - the subsidiaries
Saldo akhir liabilitas pajak tangguhan - konsolidasian	(613.722)	(488.209)	Consolidated deferred tax liabilities - ending balance

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Lain-lain

Pada tanggal 6 September 2017, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan Bangunan. Sesuai dengan peraturan tersebut, efektif sejak tanggal 2 Januari 2018, atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, baik sebagian maupun seluruh bangunan, yang diterima oleh orang pribadi atau badan, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan tersebut.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat 1, penghasilan atas pelaksanaan sewa yang telah dimulai sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dikenakan pajak penghasilan non-final sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa sesuai dengan perjanjian sewa tersebut. Manajemen berpendapat bahwa pendapatan sewa menara telekomunikasi dikenakan pajak penghasilan non-final sampai dengan selesainya periode sewa. Pada tanggal 31 Desember 2017, tidak ada perjanjian sewa yang dikenakan pajak final. Dengan demikian, Perseroan dan entitas anaknya masih mengakui liabilitas pajak tangguhan terkait aset tetap di dalam laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2017.

Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan Pajak dan untuk mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam meningkatkan penerimaan pajak, pada tanggal 28 September 2016, Perseroan menyampaikan surat pernyataan harta kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I dan membayar uang tebusan sebesar Rp71 pada tanggal 26 September 2016. Pada tanggal 11 Oktober 2016, Perseroan menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak dari Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I. Jumlah yang diakui sebagai aset pengampunan pajak adalah sebesar Rp3.567.

Pada tanggal 15 Mei 2017, iForte menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2015 dengan jumlah pajak penghasilan yang lebih bayar sebesar Rp2.182. iForte menerima hasil SKPLB tersebut dan telah menerima seluruh hasil restitusi pada tanggal 9 Juni 2017.

17. TAXATION (continued)

g. Others

On September 6, 2017, Indonesian Government issued Government Regulation No.34 Year 2017 related with Income Tax from Land and Building Lease. In accordance with that regulation, effective from January 2, 2018, income from land and/or building lease, either partly or all of the building, which received by individual or corporate, will be charged by final income tax by 10% from gross amount of the land and/or building lease value.

In accordance with Article 5 (1), income from rental which has started before this Government Regulation was enacted, will be charged with non-final income tax until the end of rental period in accordance with the rental agreement. Management believes that income from tower lease is charged by non-final income tax until the end of lease period. As of December 31, 2017, there are no rental agreements subject to the final tax. Therefore, the Company and its subsidiaries still recognize deferred tax liabilities in the financial statements as of December 31, 2017.

Regarding the Tax Amnesty Law No. 11 Year 2016 and to support the government of the Republic of Indonesia program to increase tax revenues, on September 28, 2016, the Company filed asset declaration letter for tax amnesty program to the Regional Office of the Directorate General of Taxes (DGT) West Java I and paid compensation totaling Rp71 on September 26, 2016. On October 11, 2016, the Company received the Tax Amnesty Certificate from the Regional Office of DGT West Java I. The amount recognized as asset tax amnesty was Rp3,567.

On May 15, 2017, iForte received tax overpayment letter (SKPLB) confirming the refundable corporate income tax for fiscal year 2015 totaling Rp2,182. iForte accepted the SKPLB and the restitution has been received on June 9, 2017.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Lain-lain (lanjutan)

Pada tanggal 19 Juli 2017, Perseroan menerima STP pajak penghasilan Pasal 21 untuk masa Desember 2016 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp3. Perseroan telah melakukan pembayaran pada tanggal 23 Agustus 2017.

Pada tanggal 8 Desember 2017, iForte menerima STP pajak penghasilan Pasal 21 untuk masa Januari sampai dengan Juli 2016 dan masa Desember 2016 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp91. iForte telah melakukan pembayaran pada tanggal 18 Desember 2017.

h. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perseroan menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. SPT konsolidasian tidak diperkenankan dalam peraturan perpajakan di Indonesia. Berdasarkan peraturan pajak yang berlaku mulai tahun 2008, DJP dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

18. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini antara lain merupakan provisi Perseroan atas pengurangan sewa PT Smartfren Telecom Tbk. yang besarnya sesuai dengan MLA antara kedua belah pihak (baik yang langsung maupun MLA peralihan dari pembelian tower), karena adanya penambahan penyewa menara (sebagai penyewa berikutnya).

17. TAXATION (continued)

g. Others (continued)

On July 19, 2017, the Company received a tax payment request letter of tax article 21 confirming tax underpayment for the period December 2016 totaling Rp3. The Company made the payment on August 23, 2017.

On December 8, 2017, iForte received a tax assessment letter referring to tax article 21 for tax underpayment for the month January until July 2016 and December 2016 totaling Rp91. iForte made the payment on December 18, 2017.

h. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self assessment. Consolidated SPT are not allowed by the local taxation regulation. Based on taxation laws which are applicable starting in year 2008, DGT may assess or amend taxes within five years from the date the tax becomes due.

18. OTHER PAYABLES

This account represents the Company's provision for discounts to PT Smartfren Telecom Tbk. in relation to the reduction of tower rental rates which amount is based on MLA between both parties (both direct and MLA transition from tower purchase) due to additional leases for the towers (as second and third tenants).

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG

Pada tanggal 1 Desember 2017 Perseroan mengikuti Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon yang diselenggarakan oleh PT AIA Financial. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang diakui Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 berdasarkan perhitungan aktuaria independen, PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, dalam laporannya masing-masing tanggal 15 Januari 2018 dan 10 Januari 2017.

Perseroan mengikuti program ini guna memenuhi ketentuan pemerintah terkait program DPLK dan memenuhi kewajiban Perseroan yang timbul akibat Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau peraturan perusahaan yang berlaku di Perseroan serta berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang diakui iForte dan IGI pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 berdasarkan perhitungan aktuaria independen PT Dayamandiri Dharmakonsilindo dalam laporannya masing-masing tanggal 12 Januari 2018 dan 13 Januari 2017.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2017
Tingkat diskonto tahunan	7% - 7,5%
Tingkat pengembalian aset	7,5%
Tingkat kenaikan gaji tahunan	7% - 9%
Usia pensiun	56 tahun/years
Tingkat kematian	TMI 2011
Metode	Projected unit credit

Perincian beban imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (Catatan 29) adalah sebagai berikut:

19. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

On December 1, 2017 the Company join into Pension Program for Severance Compensation organized by PT AIA Financial. Long-term employee benefits liability recognized by the Company as of December 31, 2017 and December 31, 2016 are based on actuarial calculations prepared by PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, an independent actuary, as per its report dated January 15, 2018 and January 10, 2017, respectively.

The Company joined this program in order to fulfill the Government regulation related to Pension Program and to fulfill the Company's obligation arising from the Employment Termination ("Employment Termination") based on prevailing laws and regulation within Indonesia and/or company regulation which applies in the Company and based on Law No.13 Year 2003 on Labor.

Long-term employee benefits liability recognized by iForte and IGI as of December 31, 2017 and December 31, 2016 are based on actuarial calculations prepared by PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, an independent actuary, as per its report dated January 12, 2018 and January 13, 2017, respectively.

The assumptions used in determining the long-term employee benefits liability are as follows:

31 Desember/ December 31, 2016	
8,25% - 8,75%	Annual Discount rate
N/A	Expected rate of asset return
7% - 10%	Annual salary increase
55 tahun/years	Retirement age
TMI 2011	Mortality rate
Projected unit credit	Method

The details of the employee benefits expense recognized for the year ended December 31, 2017 and 2016 in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income (Note 29) are as follows:

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**19. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA
PANJANG (lanjutan)**

**19. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY
(continued)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2017	2016	
Biaya jasa kini	16.245	13.718	Current service cost
Biaya jasa lalu atas perubahan imbalan	(18.868)	-	Past service costs due to plan amendment
Biaya bunga	7.171	5.683	Interest cost
Kelebihan pembayaran	253	3.694	Excess benefits paid
Pendapatan bunga atas aset program	(159)	-	Interest income on plan assets
	4.642	23.095	

Berikut merupakan rincian perubahan saldo nilai kini kewajiban imbalan pasti dan aset program:

The following are details of the changes in balance of present value of the defined benefit obligation and plan assets:

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti			Present value of defined benefit obligation
Saldo awal	85.659	58.301	Beginning balance
Biaya jasa kini	16.245	13.718	Current service cost
Biaya jasa lalu atas perubahan imbalan	(18.868)	-	Past service cost due to plan amendment
Biaya bunga	7.171	5.683	Interest cost
Pengaruh kurtailmen dan penyelesaian	-	1.829	Effect of curtailment and settlement
Provisi atas kelebihan pembayaran di luar provisi yang dihitung	253	3.694	Provision for excess benefit payment
Pembayaran imbalan oleh Perseroan	(93)	(235)	Benefit payment from the Company
Kelebihan pembayaran	(253)	(3.694)	Excess payment
Kerugian aktuarial	8.522	6.363	Actuarial loss
Saldo akhir	98.636	85.659	Ending balance
Aset program			Plan assets
Saldo awal	-	-	Beginning balance
Kontribusi Perseroan	(90.179)	-	Company contributions
Pendapatan bunga atas aset program	(160)	-	Interest income on plan assets
Saldo akhir	(90.339)	-	Ending balance
Dampak batas atas aset	921	-	Effect of asset ceiling
Liabilitas imbalan kerja neto	9.218	85.659	Net employee benefits liability

Aset program pensiun merupakan portofolio pasar uang dengan nilai wajar sebesar Rp90.339.

The pension plan assets represent money market portfolio with fair value of Rp90,339.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**19. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA
PANJANG (lanjutan)**

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto tahunan akan memiliki efek pada tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas	(11.098)	13.052	<i>Effect on present value of obligation</i>

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat kenaikan gaji tahunan akan memiliki efek pada tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas	12.861	(11.151)	<i>Effect on present value of obligation</i>

Perubahan saldo liabilitas imbalan kerja jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed annual discount rate would have the following effects as of December 31, 2017:

A one percentage point change in the assumed annual salary increment rate would have the following effects as of December 31, 2017:

The changes in the long-term employee benefits liability for the year ended December 31, 2017 and 2016, are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2017	2016	
Saldo awal	85.659	58.301	<i>Beginning balance</i>
luran program	(90.179)	-	<i>Contributions during period</i>
Penambahan di periode berjalan	4.642	23.095	<i>Additions during the period</i>
Kerugian aktuarial	9.443	6.363	<i>Actuarial losses</i>
Pembayaran imbalan kerja	(347)	(3.929)	<i>Benefits paid</i>
Penyesuaian liabilitas atas karyawan transfer masuk	-	1.829	<i>Net liability assumed due to employee transferred in</i>
Saldo akhir	9.218	85.659	<i>Ending balance</i>

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

Berikut merupakan rincian perubahan saldo liabilitas imbalan kerja jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016
Aset neto imbalan kerja		
Perseroan	11.299	-
	11.299	-
Liabilitas imbalan kerja		
Perseroan	-	71.384
PT Iforte Solusi Infotek	15.267	11.266
PT Iforte Global Internet	5.250	3.009
	20.517	85.659

Net asset for employee benefits:
The Company

Liability for employee benefits
The Company
PT Iforte Solusi Infotek
PT Iforte Global Internet

Pembayaran berikut merupakan kontribusi yang diharapkan atas nilai kini dari kewajiban imbalan di tahun-tahun mendatang:

Tahun 1	7.101	1st year
Tahun 2 - 5	6.025	2nd - 5th years
Tahun 6 - 10	47.536	6 - 10th years
Tahun 11 - 15	79.439	11 - 15th years
Tahun 16 - 20	88.935	16 - 20th years
Tahun 21 dan selanjutnya	64.667	21th years and beyond

The following payments are expected contributions to present value of benefit obligation in future years:

Durasi rata-rata tertimbang dari nilai kini liabilitas tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah 15,33 tahun dan 15,52 tahun.

The weighted average duration of present value of obligation as of December 31, 2017 and 2016 are 15.33 years and 15.52 years, respectively.

20. PENDAPATAN DITANGGUHKAN

Akun ini merupakan penerimaan uang dari pelanggan sehubungan dengan perjanjian sewa dan diakui sebagai pendapatan pada saat penyerahan jasa terkait kepada pelanggan.

20. UNEARNED REVENUE

This account represents cash received from customers related to lease agreement and recognized as revenue upon delivery of service to customers.

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016
PT Telekomunikasi Selular	467.814	473.970
PT Hutchison 3 Indonesia	431.413	478.843
PT Angkasa Komunikasi Global Utama	49.375	-
PT XL Axiata Tbk.	27.420	31.100
PT Indosat Tbk.	22.749	22.237
PT Djarum	2.725	3.006
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp3.000)	6.273	4.948
	1.007.769	1.014.104
Bagian jangka pendek	(927.171)	(953.352)
Bagian jangka panjang	80.598	60.752

PT Telekomunikasi Selular
PT Hutchison 3 Indonesia
PT Angkasa Komunikasi Global Utama
PT XL Axiata Tbk.
PT Indosat Tbk.
PT Djarum
Others
(each below Rp3,000)

Current portion

Non-current portion

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. PENDAPATAN DITANGGUHKAN (lanjutan)

Periode penagihan untuk PT Hutchison 3 Indonesia diakui setiap bulan Januari dan April, untuk PT XL Axiata Tbk., diakui setiap bulan Januari (satu tahun sekali), untuk PT Telekomunikasi Selular diakui secara tahunan, untuk PT Indosat Tbk. diakui setiap bulan Februari dan Agustus (enam bulan sekali), dan untuk PT Smart Telecom diakui setiap tiga bulan sekali di depan.

20. UNEARNED REVENUE (continued)

The billing period for PT Hutchison 3 Indonesia is every January and April, for PT XL Axiata Tbk. is every January (once a year), for PT Telekomunikasi Selular is on yearly basis, for PT Indosat Tbk. is every February and August (once every six months), and for PT Smart Telecom is every three months in advance.

21. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

21. NON-CONTROLLING INTERESTS

a. Kepentingan nonpengendali atas ekuitas entitas anak

a. Non-controlling interests in equity of subsidiaries

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,	
	2017	2016
Protelindo Netherlands B.V.		
Nilai tercatat - awal	-	(1.623)
Bagian laba neto	-	3.264
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan	-	1.858
Penjualan operasi yang dihentikan	-	(3.499)
	-	-
PT Iforte Solusi Infotek		
Nilai tercatat - awal	4	4

Protelindo Netherlands B.V.
Carrying amount - beginning
Equity in net income
Exchange difference from translation of
financial statements
Sale of a discontinued operation

PT Iforte Solusi Infotek
Carrying amount - beginning

b. Bagian laba komprehensif yang diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali

b. Total comprehensive income attributable to non-controlling interests

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,	
	2017	2016
Protelindo Netherlands B.V.		
Bagian laba neto	-	3.264
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan	-	1.858
	-	5.122

Protelindo Netherlands B.V.
Equity in net income
Exchange difference from
translation of financial statements

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

22. MODAL SAHAM

Komposisi pemegang saham Perseroan, jumlah dan nilai saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah saham (angka penuh)/ Number of shares issued (full amount)	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Modal disetor/ Issued and paid-up capital	Shareholders
PT Sarana Menara Nusantara Tbk.	3.322.600.187	99,9994%	332.260	PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
PT Triipta Mandhala Gumilang	10.000	0,0003%	1	PT Triipta Mandhala Gumilang
PT Caturguwiratna Sumapala	10.000	0,0003%	1	PT Caturguwiratna Sumapala
	3.322.620.187	100,0000%	332.262	

22. SHARE CAPITAL

The composition of the Company's shareholders, the number of issued and fully paid-up shares and the related value as of December 31, 2017 and 2016, were as follows:

23. PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN

Akun ini merupakan selisih transaksi perubahan ekuitas Perseroan dan entitas anaknya yang terdiri dari keuntungan (kerugian) neto dari lindung nilai arus kas, keuntungan aktuarial kumulatif atas liabilitas imbalan kerja, sesudah pajak.

23. OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)

This account represents differences arising from transactions resulting in changes in equity of the Company and its subsidiaries which consist of net gain (loss) on cash flow hedge and cumulative actuarial gains on employee benefits liability, net of tax.

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
Keuntungan (kerugian) neto dari lindung nilai arus kas	26.135	(28.826)	Net gain (loss) on cash flow hedge
Keuntungan (kerugian) aktuarial kumulatif atas liabilitas imbalan kerja	(1.541)	5.541	Cumulative actuarial gains (losses) on employee benefits liability
Saldo akhir	24.594	(23.285)	Ending balance

**24. SALDO LABA YANG TELAH DITENTUKAN
PENGUNAANNYA**

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan. Penyisihan cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

24. APPROPRIATED RETAINED EARNINGS

Based on Law No. 40 year 2007 on Limited Liability Companies, the Company is required to allocate a specific amount from its net profit every financial year as a reserve fund. The reserve fund reaches at least 20% of the issued and paid-up capital.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**24. SALDO LABA YANG TELAH DITENTUKAN
PENGGUNAANNYA (lanjutan)**

Berdasarkan Keputusan Direksi 30 November 2017 dan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 November 2017, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku, Direksi dengan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan, memutuskan untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2017 kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp92,13 (angka penuh) per saham atau sama dengan sebesar Rp306.113 atau sebesar 14,77% dari laba bersih Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, dan telah dibayarkan pada tanggal 8 Desember 2017.

Keputusan Pemegang Saham Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 31 Mei 2017, memutuskan penggunaan laba bersih 2016 sebagai berikut:

- a. sebesar Rp700.004 dibagikan sebagai dividen kas untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 kepada para pemegang saham, yang dibayarkan pada tanggal 13 Juni 2017 dengan rincian sebagai berikut:
 - (i) SMN menerima dividen tunai sebesar Rp700.000;
 - (ii) PT Tricipta Mandhala Gumilang menerima dividen tunai sebesar Rp2; dan
 - (iii) PT Caturguwiratna Sumapala menerima dividen tunai sebesar Rp2;
- b. sebesar Rp100, dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan, dan sisanya dibukukan sebagai laba ditahan.

Saldo laba dicadangkan masing-masing sebesar Rp400 dan Rp300 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

**24. APPROPRIATED RETAINED EARNINGS
(continued)**

Based on the Resolution of the Board of Directors dated November 30, 2017 and Resolution in lieu of a General Meeting of Shareholders of the Company dated November 30, 2017, with due observance to the prevailing tax regulations, the Board of Directors with the approval from the Shareholders of the Company decided to distribute cash dividends for the financial year of 2017 to the shareholders of the Company in the amount of Rp92.13 (full amount) per share or equivalent to Rp306,113 or 14.77% of the Company's net profit for the nine-month period ended September 30, 2017 and were paid December 8, 2017.

The Shareholders' Resolution of the Company In Lieu of The Annual General Meeting of Shareholders dated May 31, 2017, resolved the appropriation of 2016 net income as follows:

- a. an amount of Rp700,004 distributed as cash dividends for the year ended December 31, 2016 to the shareholders, which was paid on June 13, 2017 with the following details:
 - (i) SMN received cash dividends in an amount of Rp700,000;
 - (ii) PT Tricipta Mandhala Gumilang received cash dividends in an amount of Rp2; and
 - (iii) PT Caturguwiratna Sumapala received cash dividends in an amount of Rp2;
- b. an amount of Rp100 was appropriated as reserve funds, with the remaining profits allocated as retained earnings.

Appropriated retained earnings balance amounted to Rp400 and Rp300 as of December 31, 2017 and 2016, respectively.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

25. PENDAPATAN

25. REVENUES

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2017	2016	
Pihak ketiga			Third parties
Sewa menara	4.999.155	4.884.822	Tower rentals
Sewa VSAT	182.080	99.911	VSAT rentals
Sewa MWIFO	89.647	54.034	MWIFO rentals
Sewa pemancar	261	-	Repeater rentals
	5.271.143	5.038.767	
Pihak berelasi			Related parties
Sewa MWIFO	38.800	8.504	MWIFO rentals
Sewa VSAT	27.996	5.841	VSAT rentals
	66.796	14.345	
	5.337.939	5.053.112	

Very Small Aperture Terminal (VSAT) merupakan jasa telekomunikasi yang menggunakan teknologi satelit sehingga dapat menjangkau daerah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi lainnya.

Very Small Aperture Terminal (VSAT) is a telecommunication service using satellite technology to cover remote locations without other type of telecommunications network.

Metropolitan Wireless Fiber Optic (MWIFO) merupakan jasa telekomunikasi yang menggunakan jaringan serat optik dan nirkabel untuk layanan internet broadband dan Virtual Private Network.

Metropolitan Wireless Fiber Optic (MWIFO) is a telecommunication service using fiber optic and wireless network to provide internet broadband and Virtual Private Network.

Perincian pelanggan dengan nilai pendapatan melebihi 10% dari pendapatan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Details of customers which represent more than 10% of the consolidated revenues are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,				
	Pendapatan/Revenue		Persentase dari total penjualan/ Percentage of total revenue		
	2017	2016	2017	2016	
<u>Pelanggan</u>					<u>Customers</u>
PT Hutchison 3 Indonesia	1.908.440	1.968.804	36%	39%	PT Hutchison 3 Indonesia
PT XL Axiata Tbk.	1.334.335	1.066.774	25%	21%	PT XL Axiata Tbk.
PT Telekomunikasi Selular	1.021.055	983.596	19%	20%	PT Telekomunikasi Selular
	4.263.830	4.019.174	80%	80%	

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

26. DEPRESIASI DAN AMORTISASI

26. DEPRECIATION AND AMORTIZATION

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2017	2016 (Disajikan kembali - Catatan 41/ As restated - Note 41)	
Depresiasi aset tetap (Catatan 7)	442.104	757.323	Depreciation of fixed assets (Note 7)
Amortisasi sewa lokasi (Catatan 10)	369.237	325.551	Amortization of site rentals (Note 10)
Amortisasi aset takberwujud (Catatan 9)	76.526	94.580	Amortization of intangible assets (Note 9)
Amortisasi asuransi	6.209	6.493	Amortization of insurance
Lain-lain	169	372	Others
	894.245	1.184.319	

27. BEBAN POKOK PENDAPATAN LAINNYA

27. OTHER COST OF REVENUES

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2017	2016	
Perawatan lokasi	166.694	135.873	Site maintenance
Sewa transponder	37.172	22.894	Transponder rentals
Sewa local link	23.032	6.826	Local link rentals
Perjalanan dinas	18.969	18.439	Business trip
Listrik	10.450	6.862	Electricity
Lain-lain (masing-masing kurang dari Rp3.000)	21.098	18.561	Others (below Rp3,000 each)
	277.415	209.455	

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, tidak ada transaksi dari satu pemasok yang total pembelian kumulatifnya melebihi 10% dari pendapatan konsolidasian.

For the year ended December 31, 2017 and 2016, there were no purchases made from any single supplier with a total cumulative amount exceeding 10% of the consolidated revenues.

Seluruh beban pokok pendapatan lainnya, sewa lokasi dan asuransi merupakan beban operasi langsung yang timbul dari aset tetap yang menghasilkan pendapatan rental.

All other cost of revenues, site rental and insurance represent direct operating expenses arising from fixed assets that generated rental income.

28. BEBAN PENJUALAN DAN PEMASARAN

28. SELLING AND MARKETING EXPENSES

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2017	2016	
Gaji dan kesejahteraan karyawan	41.220	32.950	Salaries and employee welfare
Jamuan dan representasi	13.160	6.026	Entertainment and representation
Perjalanan dan transportasi	12.097	9.303	Travel and transportation
Lain-lain	13.941	545	Others
	80.418	48.824	

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

29. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

29. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2017	2016	
Gaji dan kesejahteraan karyawan	238.027	178.146	Salaries and employee welfare
Jasa profesional	112.974	126.597	Professional fees
Perlengkapan kantor	26.783	25.373	Office supplies
Imbalan kerja (Catatan 19)	4.642	23.095	Employee benefits (Note 19)
Provisi (pemulihan) perizinan dan lisensi	(11.485)	39.350	Provision for (reversal of) permits and licenses
Lain-lain (masing-masing kurang dari Rp1.000)	4.497	4.287	Others (below Rp1,000 each)
	375.438	396.848	

30. BIAYA KEUANGAN

30. FINANCE COSTS

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2017	2016	
Beban bunga bank	429.350	386.074	Bank interest expense
Beban bunga obligasi	178.123	204.546	Bond interest expense
Amortisasi biaya pinjaman (Catatan 14)	59.276	59.256	Amortization of cost of loans (Note 14)
Beban keuangan lainnya	20.560	18.992	Other finance costs
	687.309	668.868	

31. BEBAN USAHA LAINNYA, NETO

31. OTHER OPERATING EXPENSES, NET

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2017	2016 (Disajikan kembali - Catatan 41/ As restated - Note 41)	
Beban cadangan penurunan nilai piutang usaha (Catatan 5)	(139.719)	(158.429)	Allowance for impairment loss of trade receivables (Note 5)
Beban rencana opsi manajemen	(57.446)	(30.000)	Management option plan expense
Beban pembongkaran aset menara	(41.381)	(20.774)	Cost on dismantling of tower assets
Keuntungan (kerugian) selisih kurs, neto	(2.397)	186.516	Foreign exchange gains (losses), net
Beban penurunan nilai goodwill (Catatan 8)	-	(24.241)	Impairment loss of goodwill (Note 8)
Lain-lain	(45.580)	(65.206)	Others
	(286.523)	(112.134)	

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

31. BEBAN USAHA LAINNYA, NETO (lanjutan)

Rincian keuntungan (kerugian) selisih kurs, neto:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,	
	2017	2016
Keuntungan (kerugian) selisih kurs yang berasal dari		
Utang bank	(36.759)	224.158
Kas dan setara kas	33.201	(29.900)
Lain-lain	1.161	(7.742)
	(2.397)	186.516

**31. OTHER OPERATING EXPENSES, NET
(continued)**

Detail foreign exchange gains (losses), net:

Foreign exchange gains (losses)
in relation to
Bank loans
Cash and cash equivalents
Others

32. DERIVATIF

a. Swap valuta asing

Pada tanggal 20 November 2014, Protelindo Finance B.V. menandatangani kontrak swap dengan DBS Bank Ltd. dan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited yang ditujukan sebagai sarana lindung nilai terhadap pembayaran pokok pinjaman dan bunga obligasi dalam Dolar Singapura ("Kontrak Swap"). Pada tanggal 3 Agustus 2016, Protelindo Finance B.V. mengalihkan hak dan kewajibannya dalam Kontrak Swap kepada Perseroan dengan menandatangani Perjanjian Novasi. Perseroan juga telah menandatangani Perjanjian Pengakhiran sehubungan dengan Kontrak Swap tersebut, dan menandatangani ISDA 2002 Master Agreement masing-masing dengan DBS Bank Ltd. dan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, yang ditujukan sebagai sarana lindung nilai terhadap pembayaran pokok pinjaman dan bunga obligasi dalam Dolar Singapura.

Di bawah ini adalah informasi sehubungan dengan kontrak swap valuta asing dan nilai wajarnya pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

32. DERIVATIVES

a. Cross currency swap

On November 20, 2014, Protelindo Finance B.V. entered into swap contracts with DBS Bank Ltd. and Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, to hedge the principal and interest payments of bonds payable in Singapore Dollars ("Swap Contracts"). On August 3, 2016, Protelindo Finance B.V. assigned its rights and obligations under the Swap Contracts to the Company by signing the Novation Agreement. The Company has also entered into Termination Deed with respect to the Swap Contracts, and ISDA 2002 Master Agreement respectively with DBS Bank Ltd. and Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, to hedge the principal and interest payments of bonds payable in Singapore Dollars.

Information related to the cross currency swap contracts and their fair values as of December 31, 2017 and 2016, are as follows:

Kontrak-kontrak swap valuta asing	Jumlah nosional/ Notional amount (SGD)	Nilai wajar/Fair value		Cross currency swap contracts
		31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
DBS Bank Ltd.	144.000.000	(12.459)	(179.262)	DBS Bank Ltd.
OCBC Bank	36.000.000	(3.094)	(44.388)	OCBC Bank
	180.000.000	(15.553)	(223.650)	

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

32. DERIVATIF (lanjutan)

32. DERIVATIVES (continued)

a. Swap valuta asing (lanjutan)

a. Cross currency swap (continued)

No.	Pihak lawan/ Counter parties	Periode kontrak efektif/ Effective contract period	Tingkat bunga swap tahunan/Annual interest rate swap	Tanggal penerimaan penghasilan/(beban) swap/Swap income/(expense) receipt date	Total beban swap dibayar/Amount of swap expense paid	
					31 Des./ Dec. 31, 2017	31 Des./ Dec. 31, 2016
1	Oversea-Chinese Banking Corporation Bank	27 November 2014 - 27 November 2024	3,25% dari Dolar Singapura sebesar SGD36.000.000 sebagai pertukaran dengan Dolar AS sebesar 3,60% dari AS\$27.671.022,29. 3,25% from Singapore Dollar of SGD36,000,000 as an exchange with 3.60% of US\$27,671,022.29.	Setiap tanggal 27 setiap bulan Mei dan November setiap tahun mulai dan termasuk 27 Mei 2015 sampai dengan 27 November 2024. The 27th day of each May and November every year starting and including May 27, 2015 until November 27, 2024.	(2.128)	(2.167)
2	DBS Bank Ltd.	27 November 2014 - 27 November 2024	3,25% dari Dolar Singapura sebesar SGD144.000.000 sebagai pertukaran dengan Dolar AS sebesar 3,60% dari AS\$110.684.089,16. 3,25% from Singapore Dollar of SGD144,000,000 as an exchange with 3.60% of US\$110,684,089.16.	Setiap tanggal 27 setiap bulan Mei dan November setiap tahun mulai dan termasuk 27 Mei 2015 sampai dengan 27 November 2024. The 27th day of each May and November every year starting and including May 27, 2015 until November 27, 2024.	(8.510)	(8.669)

b. Call spread

b. Call spread

Pada tanggal 13 Mei 2016, Perseroan telah menandatangani ISDA 2002 Master Agreement dengan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd ("BTMU") sebagaimana ditambah pada tanggal 8 Desember 2016, yang ditujukan sebagai sarana lindung nilai terhadap pembayaran pinjaman BTMU senilai AS\$38.000.000 ("Kontrak Opsi"). Berdasarkan Kontrak Opsi, harga strike minimal adalah sebesar Rp13.750 (angka penuh) per AS\$ dan harga strike maksimal adalah sebesar Rp15.500 (angka penuh) per AS\$. Opsi 1 adalah Perseroan membeli AS\$ call/Rp Put NDO sedangkan Opsi 2 adalah Perseroan menjual ASD Call/Rp Put NDO. Jika Opsi Tingkat Penyelesaian ("SRO") di bawah Rp13.750 (angka penuh) per AS\$, Opsi 1 dan 2 akan berakhir. Jika harga SRO sama dengan atau di atas Rp13.750 (angka penuh) per AS\$, tetapi di bawah Rp15.500 (angka penuh) per AS\$, Perseroan akan melaksanakan Opsi 1, dan hasil akhirnya Perseroan menerima jumlah penyelesaian neto antara Rp13.750 (angka penuh) per AS\$ dengan SRO, dan Opsi 2 akan berakhir. Jika SRO di atas Rp15.500 (angka penuh) per AS\$, Perseroan akan melaksanakan Opsi 1 dan BTMU akan melaksanakan Opsi 2, dan hasil akhirnya Perseroan menerima jumlah penyelesaian neto dari perbedaan Rp13.750 (angka penuh) per AS\$ dan Rp15.500 (angka penuh) per AS\$.

On May 13, 2016, the Company entered into ISDA 2002 Master Agreement with The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd ("BTMU") as supplemented on December 8, 2016, to hedge the payments of loan granted by BTMU in the amount of US\$38,000,000 with Call Spread Non-deliverable Currency Option Transaction ("Option Contract"). Option 1 is when the Company buys US\$ Call/Rp Put NDO while option 2 is when the Company sells US\$ Call/Rp Put NDO. Based on the Option Contract, the minimum strike price is Rp13,750 (full amount) per US\$ and the maximum strike price is Rp15,500 (full amount) per US\$. If the Settlement Rate Option ("SRO") is below Rp13,750 (full amount) per US\$, Option 1 and 2 will lapse. If the SRO is equal to or above Rp13,750 (full amount) per US\$ but below Rp15,500 (full amount) per US\$, the Company will exercise Option 1, and in effect the Company receives the net settlement amount between Rp13,750 (full amount) per US\$ and the SRO and Option 2 will lapse. If the SRO is above Rp15,500 (full amount) per US\$, the Company will exercise Option 1 and BTMU will exercise Option 2, and in effect the Company receives the nett settlement amount between Rp13,750 (full amount) per US\$ and Rp15,500 (full amount) per US\$.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

32. DERIVATIF (lanjutan)

b. Call spread (lanjutan)

Kontrak <i>call spread</i>	Jumlah nosional/ Notional amount (US\$)	Nilai wajar/Fair value		Call spread contract
		31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd	38.000.000	26.442	32.599	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd

No.	Pihak lawan/ Counter parties	Tanggal penyelesaian/ Settlement date	Harga strike minimal dan harga strike maksimal/Minimum and maximum strike price	Penurunan nilai wajar call spread/Decrease in fair value of call spread	
				31 Des./ Dec. 31, 2017	31 Des./ Dec. 31, 2016
1	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ	24 Juni/ June 24, 2021	Harga strike minimal adalah sebesar Rp13.750 (angka penuh) per AS\$ dan harga strike maksimal adalah sebesar Rp15.500 (angka penuh) per AS\$/ The minimum strike price is Rp13,750 (full amount) per US\$ and the maximum strike price is Rp15,500 (full amount) per US\$	(6.156)	(5.534)

33. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

- a. Pada tanggal 14 Agustus 2006, Perseroan menandatangani perjanjian dengan PT Bakrie Telecom Tbk. ("Bakrie") tentang sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu awal perjanjian adalah sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa lokasi yang tercantum dalam berita acara sewa terakhir.

Pada tanggal 2 Juli 2007, Perseroan dan Bakrie menandatangani Perjanjian Sewa Induk sebagaimana telah diubah dengan amandemen pertama tanggal 20 Juli 2007 dan dengan amandemen perjanjian kedua tanggal 8 Mei 2009 mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan komunikasi. Jangka waktu awal untuk *site leases* yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun sejak tanggal Sertifikat Siap Instalasi di masing-masing lokasi. Selanjutnya, Bakrie akan melakukan pembayaran atas biaya tambahan untuk pemakaian listrik bulanan.

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS

- a. On August 14, 2006, the Company entered into an agreement with PT Bakrie Telecom Tbk. ("Bakrie") regarding rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment. The initial period of this agreement is from the execution date until the end of the lease term as stated in the latest site lease.

On July 2, 2007, the Company and Bakrie entered into a Master Lease Agreement as subsequently amended by a first amendment dated July 20, 2007 and by a second amendment dated May 8, 2009 regarding the rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment. The initial period of the site leases signed under this agreement is for 10 years with a commencement date upon the date of the Ready For Installation Certificate for each site. In addition, Bakrie will pay an additional charge for pass-through of monthly electricity costs.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

33. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

- b. Perseroan menandatangani sejumlah perjanjian dengan PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel") mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu awal dari *site leases* yang ditandatangani dalam perjanjian adalah 10 tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penggunaan Site untuk masing-masing lokasi menara.

Pada tanggal 27 Oktober 2009, Perseroan dan Telkomsel menandatangani Perjanjian Sewa Induk untuk *Co-location* sebagaimana diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 6 April 2015 tentang sewa menyewa infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu awal dari *site leases* yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun yang akan diperpanjang 2 kali masing-masing untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali jika Telkomsel memberitahu Perseroan secara tertulis bahwa Telkomsel tidak bersedia untuk memperpanjang jangka waktu sewa. Jangka waktu sewa dihitung sejak tanggal Sertifikat Siap Instalasi untuk tiap lokasi. Selanjutnya, Telkomsel akan melakukan pembayaran atas biaya tambahan pemakaian listrik bulanan.

- c. Pada tanggal 15 Maret 2007, Perseroan dan PT Smartfren Telecom Tbk. (dahulu PT Mobile-8 Telecom Tbk.) ("Smartfren") menandatangani Perjanjian Sewa Induk sebagaimana telah diubah dalam perjanjian terakhir tanggal 1 November 2007 mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu awal sewa lokasi adalah 11 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari masing-masing pihak. Selanjutnya, Smartfren akan melakukan pembayaran atas biaya tambahan pemakaian listrik bulanan.

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

- b. The Company entered into several agreements with PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel") regarding the rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment. The initial period of the site leases signed under these agreements is 10 years with a commencement date upon the Minutes of Site Utilization for each site.

On October 27, 2009, the Company and Telkomsel entered into a Master Lease Agreement for Co-location as subsequently amended by Amendment No. 1 dated April 6, 2015 regarding the rental of tower infrastructure for the placement of telecommunications equipment. The initial period of the site leases signed under this agreement is 10 years, which period will be extended for two 10-year periods, unless Telkomsel informs the Company in writing that it does not wish to extend the lease term. The lease period starts upon the date of the Ready For Installation Certificate for each site. In addition, Telkomsel will pay an additional charge for pass-through of monthly electricity cost.

- c. On March 15, 2007, the Company and PT Smartfren Telecom Tbk. (formerly PT Mobile-8 Telecom Tbk.) ("Smartfren") entered into a Master Lease Agreement as subsequently amended by latest amendment dated November 1, 2007 regarding the rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment. The initial term of the sites leases is 11 years, which period may be extended based on written agreements between the parties. In addition, Smartfren will pay an additional charge for pass-through of monthly electricity costs.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

33. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Pada tanggal 31 Agustus 2010, Perseroan dan Smartfren telah menandatangani Perjanjian Ambil atau Bayar 1.000 Lokasi ("TOPA") sebagaimana telah diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 7 Juni 2012 dan Amandemen No. 2 tanggal 18 Juli 2014 dimana Smartfren setuju untuk menyewa 1.000 lokasi sebelum 31 Agustus 2015 sesuai dengan Perjanjian Sewa Induk Perseroan dengan Smartfren sebagaimana diubah dengan TOPA. Jangka waktu awal dari *site leases* yang ditandatangani dalam TOPA adalah 6 tahun dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk 2 periode secara otomatis dengan jangka waktu pembaharuan masing-masing selama 5 tahun kecuali jika Smartfren memberitahu Perseroan untuk tidak memperpanjang.

Pada tanggal 7 Juni 2012 Perseroan dan Smartfren menandatangani Perjanjian Sewa Induk untuk sewa menara atas lokasi-lokasi yang dibeli oleh Perseroan dari penyedia-penyedia menara lain dimana Smartfren adalah penyewa yang telah ada.

Pada tanggal 31 Agustus 2012 Perseroan dan Smartfren menandatangani suatu perjanjian mengenai, antara lain, mengubah TOPA dan Perjanjian Pembayaran tanggal 17 Desember 2009.

- d. Pada tanggal 15 Agustus 2007, Perseroan dan PT Hutchison 3 Indonesia (dahulu PT Hutchison CP Telecommunications) ("Hutchison") menandatangani Perjanjian Sewa Induk, sebagaimana telah diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 17 Desember 2007, Amandemen No. 2 tanggal 24 Agustus 2010 dan Amandemen No. 3 tanggal 9 Agustus 2012, mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan komunikasi. Jangka waktu awal untuk *site leases* yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun dan akan diperpanjang secara langsung untuk 2 kali masing-masing untuk jangka waktu 5 tahun, kecuali apabila Hutchison tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perseroan. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal Sertifikat Siap Instalasi di masing-masing lokasi. Selanjutnya, Hutchison akan melakukan pembayaran atas biaya penambahan pemakaian listrik bulanan.

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

On August 31, 2010, the Company and Smartfren entered into a 1,000 Site Take or Pay Agreement ("TOPA") as subsequently amended by Amendment No.1 dated June 7, 2012 and Amendment No. 2 dated July 18, 2014 whereby Smartfren agreed to lease an additional 1,000 sites before August 31, 2015 in accordance with terms set forth in the Company's Master Lease Agreement with Smartfren as amended by the TOPA. The initial term of the site leases executed under the TOPA is 6 years, and such term is automatically extended for two 5-year renewal periods, unless Smartfren notifies the Company that it does not wish to renew.

On June 7, 2012, the Company and Smartfren entered into a Master Lease Agreement for acquired sites regarding the rental of tower sites acquired by the Company from other tower providers on which Smartfren is an existing tenant.

On August 31, 2012, the Company and Smartfren entered into an agreement that, among other things, amends the TOPA and Payment Agreement dated December 17, 2009.

- d. On August 15, 2007, the Company and PT Hutchison 3 Indonesia (formerly PT Hutchison CP Telecommunications) ("Hutchison") entered into a Master Lease Agreement, as subsequently amended by Amendment No. 1 dated December 17, 2007, Amendment No. 2 dated August 24, 2010 and Amendment No. 3 dated August 9, 2012, regarding the rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment. The initial period of the site leases signed under this agreement is for 10 years, which period will automatically be extended for two 5-year periods, unless Hutchison informs the Company in writing that it does not wish to extend the lease term. The lease period starts upon the date of the Ready For Installation Certificate for each site. In addition, Hutchison will pay an additional charge amount for pass-through of monthly electricity costs.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

33. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Pada tanggal 18 Maret 2008, Perseroan dan Hutchison menandatangani Perjanjian Sewa Induk, sebagaimana telah diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 24 November 2009, Amandemen No. 2 tanggal 28 Desember 2010 dan Amandemen No. 3 tanggal 9 Agustus 2012, ("Purchase MLA") mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi terhadap lokasi-lokasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Pengalihan Menara 2008. Jangka waktu awal untuk site leases yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 12 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 tahun. Sebagai tambahan, Hutchison akan membayar biaya tambahan untuk biaya listrik bulanan.

Pada tanggal 28 Desember 2010, Perseroan dan Hutchison menandatangani Perjanjian Pengalihan Menara, sebagaimana telah diubah dalam Amandemen No. 1 tanggal 21 Desember 2012 ("Perjanjian Awal") dan terakhir kali diubah dengan Amandemen No. 2 tanggal 27 Desember 2013 ("Amandemen Kedua") mengenai persetujuan pembelian sebanyak sampai dengan 1.500 menara milik Hutchison oleh Perseroan. Perjanjian Awal dan Amandemen Kedua secara bersama-sama akan disebut sebagai Perjanjian Pengalihan Menara 2010. Jangka waktu perjanjian ini adalah sejak 28 Desember 2010 hingga tanggal 30 Juni 2014.

Pada tanggal 27 Desember 2013, Perseroan telah menyelesaikan pembelian 150 menara tambahan, secara total terdapat 1.482 menara yang dibeli berdasarkan Perjanjian Pengalihan Menara 2010. "Purchase MLA" secara khusus diperbaharui oleh Amandemen No. 2 tanggal 28 Desember 2010 yang mengatur untuk penyewaan kembali menara yang diperoleh dari Perjanjian Pengalihan Menara 2010. Periode awal dari sewa menara yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun dan akan diperpanjang 2 kali masing-masing untuk jangka waktu 5 tahun, kecuali apabila Hutchison tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perseroan.

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

On March 18, 2008, the Company and Hutchison entered into a Master Lease Agreement as subsequently amended by Amendment No. 1 dated November 24, 2009, Amendment No. 2 dated December 28, 2010, and Amendment No. 3 dated August 9, 2012, (the "Purchase MLA") regarding the rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment for sites acquired under the 2008 Tower Transfer Agreement. The initial period of the site leases signed under this agreement is 12 years, which period may be extended for 6 years. In addition, Hutchison will pay an additional charge for pass-through of monthly electricity costs.

On December 28, 2010, the Company and Hutchison entered into a Tower Transfer Agreement, as amended by Amendment No. 1 dated December 21, 2012 ("Initial Agreement") and lastly amended by Amendment No. 2 dated December 27, 2013 ("Second Amendment") regarding the agreement of the Company to acquire up to 1,500 towers from Hutchison. The Initial Agreement and the Second Amendment shall be referred collectively as the "2010 Tower Transfer Agreement". The term of this agreement is from December 28, 2010 until June 30, 2014.

On December 27, 2013, the Company concluded the purchase of an additional 150 towers, making a total of 1,482 towers acquired under the 2010 Tower Transfer Agreement. The Purchase MLA, specifically as amended by Amendment No. 2 dated December 28, 2010, governs the lease back of the towers acquired under the 2010 Tower Transfer Agreement. The initial period of the site leases signed under this agreement is 10 years, which period will be extended for two 5-year periods, unless Hutchison informs the Company in writing that it does not wish to extend the lease term.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

33. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

- e. Pada tanggal 4 Desember 2007, Perseroan dan PT XL Axiata Tbk. (sebelumnya PT Excelcomindo Pratama Tbk.) ("XL") menandatangani Perjanjian Sewa Induk, sebagaimana telah diubah dalam perjanjian Amandemen No. 1 tanggal 18 April 2008, Amandemen No. 2 tanggal 5 Januari 2010, Amandemen tanggal 7 November 2011, Amandemen terhadap Perjanjian Sewa Induk BTS dan Colo, tanggal 1 November 2012, tanggal 20 September 2013, 19 Mei 2014, dan terakhir kali dengan Amandemen terhadap Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 8 November 2017. Jangka waktu awal untuk *site leases* dalam perjanjian ini adalah 10 tahun, akan berakhir secara otomatis tanpa pemberitahuan sebelumnya dari XL. Namun, jika XL ingin memperpanjang masa sewa, XL akan memberikan pemberitahuan kepada Perseroan sekurang-kurangnya 120 hari sebelum hari terakhir masa sewa atas masing-masing *site lease* yang ingin diperpanjang. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal Sertifikat Siap Instalasi di masing-masing lokasi. Sebagai tambahan, XL akan membayar biaya tambahan untuk biaya listrik bulanan.

Pada tanggal 19 Juli 2010, Perseroan dan XL menandatangani Perjanjian *Build to Suit* dan Perjanjian Sewa Induk sebagaimana diubah pada tanggal 7 November 2011, 1 November 2012, 19 Februari 2013, 26 Agustus 2013 dan 20 September 2013 dan 8 November 2017. Jangka waktu untuk *site leases* yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun dan akan berakhir secara otomatis tanpa pemberitahuan sebelumnya dari XL. Namun, jika XL ingin memperpanjang masa sewa, XL akan memberikan pemberitahuan kepada Perseroan sekurang-kurangnya 120 hari sebelum hari terakhir masa sewa atas masing-masing *site lease* yang ingin diperpanjang. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal Sertifikat Siap Instalasi di masing-masing lokasi.

Pada tanggal 28 Maret 2016, Perseroan dan XL menandatangani Perjanjian Pembelian Aset mengenai persetujuan pembelian sebanyak 2.500 menara milik XL oleh Perseroan ("Perjanjian Pembelian Aset"). Bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Pembelian Aset, Perseroan dan XL juga menandatangani Perjanjian Induk Sewa Menara dimana XL telah setuju untuk menyewa kembali 2.432 menara dari Perseroan untuk jangka waktu 10 tahun.

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

- e. On December 4, 2007, the Company and PT XL Axiata Tbk. (formerly PT Excelcomindo Pratama Tbk.) ("XL") entered into a Master Lease Agreement, as amended by Amendment No. 1 dated April 18, 2008, by Amendment No. 2 dated January 5, 2010, an Amendment dated November 7, 2011, by the Amendment to the BTS and Colo Master Lease Agreements dated November 1, 2012, dated September 20, 2013, May 19, 2014, and lastly by Amendment to the Master Lease Agreements dated November 8, 2017. The initial term for site leases signed under this agreement is 10 years, and will be automatically ended without prior notification from XL. However, if XL wishes to extend the lease term, XL will notify the Company at least 120 days before the latest day of the lease term of each site to be renewed. The lease period starts upon the date of the Ready For Installation Certificate for each site. In addition, XL will pay an additional charge for pass-through of monthly electricity costs.

On July 19, 2010, the Company and XL entered into a *Build to Suit* and Master Lease Agreement as amended on November 7, 2011, November 1, 2012, February 19, 2013, August 26, 2013 and September 20, 2013 and November 8, 2017. The initial period of the site leases signed under this agreement is 10 years, and will be automatically ended without prior notification from XL. However, if XL wishes to extend the lease term, XL will notify the Company at least 120 days before the latest day of the lease term of each site to be renewed. The lease period starts upon the date of the Ready For Installation Certificate for each site.

On March 28, 2016, the Company and XL entered into an Asset Purchase Agreement regarding the agreement of the Company to acquire 2,500 towers from XL ("Asset Purchase Agreement"). Concurrent with the signing of the Asset Purchase Agreement, the Company and XL have also entered into a Master Tower Lease Agreement whereby XL will be the anchor tenant on 2,432 towers for a period of 10 years.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

33. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan dan XL telah menyelesaikan transaksi penjualan 2.500 menara telekomunikasi milik XL kepada Perseroan dan Perseroan telah menyewakan kembali sebanyak 2.432 menara dari 2.500 menara tersebut, dimana XL merupakan penyewa utama untuk jangka waktu 10 tahun berdasarkan Perjanjian Induk Sewa Menara.

- f. Pada tanggal 7 Desember 2007, Perseroan dan PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia ("Sampoerna") menandatangani Perjanjian Sewa Induk ("MLA") mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi. Jangka waktu awal untuk *site leases* yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun, dan akan diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila Sampoerna tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perseroan. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal Sertifikat Siap Instalasi di masing-masing lokasi.

Pada tanggal 7 Desember 2007, Perseroan dan Sampoerna menandatangani Perjanjian Build to Suit dan Co-location. Berdasarkan Perjanjian tersebut, Perseroan ditunjuk oleh Sampoerna untuk mengakuisisi, mengembangkan dan membangun BTS di lokasi yang dibutuhkan oleh Sampoerna, mengidentifikasi dan mengembangkan lokasi yang ada dan menyediakan jasa berdasarkan kebutuhan masing-masing pihak.

- g. Pada tanggal 14 Desember 2007, Perseroan dan PT Axis Telekom Indonesia (sebelumnya PT Natrindo Telepon Seluler) ("Axis") menandatangani Perjanjian Sewa Induk untuk Co-location mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi ("MLA Axis") sebagaimana diubah oleh XL, sebagai penerus yang sah dari MLA Axis, melalui Perjanjian tanggal 19 Mei 2014 dengan Perseroan. Jangka waktu awal untuk *site leases* yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun, dan akan diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila Axis tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perseroan. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal Sertifikat Siap Instalasi di masing-masing lokasi.

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

On June 30, 2016, the Company and XL has completed the sale transaction of 2,500 telecommunication towers owned by XL to the Company and the Company has leased back 2,432 towers from the 2,500 towers to XL, where XL is the main lessee for a period of 10 years under a Master Tower Lease Agreement.

- f. On December 7, 2007, the Company and PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia ("Sampoerna") entered into a Master Lease Agreement regarding the rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment. The initial period of the site leases signed under this agreement is 10 years, which period will be extended for two 10-year periods, unless Sampoerna notifies the Company in writing that it does not wish to extend the lease term. The lease period starts upon the date of the Ready For Installation Certificate for each site.

On December 7, 2007, the Company and Sampoerna entered into a Build to Suit and Co-location Agreement. Pursuant to the agreement, the Company has been engaged by Sampoerna to acquire, develop and build BTS sites required by Sampoerna, to identify and develop space on existing sites and to perform services based on the needs of the parties.

- g. On December 14, 2007, the Company and PT Axis Telekom Indonesia (formerly PT Natrindo Telepon Seluler) ("Axis") entered into a Master Lease Agreement for Co-locations regarding the rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment ("Axis MLA") as amended by XL, as the rightful successor in interest of Axis MLA, through an Agreement dated May 19, 2014 with the Company. The initial period of the site leases signed under this agreement is 10 years, which period will be extended for two 10-year periods, unless Axis notifies the Company in writing that it does not wish to extend the lease term. The lease period starts upon the date of the Ready For Installation Certificate for each site.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

33. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Pada tanggal 8 April 2014, XL dan Axis telah melakukan penggabungan usaha (*merger*). Pada merger tersebut, Axis bergabung dan menjadi XL. Akibatnya, seluruh aset dan liabilitas Axis beralih seluruhnya kepada XL sebagai perusahaan penerima penggabungan. Sejak tanggal 8 April 2014, seluruh aktifitas dengan Axis dan XL dikonsolidasikan dengan XL.

- h. Pada tanggal 2 Juli 2008, Perseroan dan PT Indosat Tbk. ("Indosat") menandatangani Perjanjian Sewa Induk untuk *Co-location* sebagaimana telah diubah dalam perjanjian Amandemen pertama tanggal 22 Juni 2009, Amandemen Kedua tanggal 13 Mei 2011 dan terakhir oleh Amandemen Ketiga tanggal 5 Maret 2012 mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi. Jangka waktu awal untuk *site leases* yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun dan akan diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila Indosat tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perseroan. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal Sertifikat Siap Instalasi di masing-masing lokasi.

Pada tanggal 13 Mei 2011, Perseroan dan Indosat menandatangani Perjanjian *Build to Suit*. Jangka waktu untuk *site leases* yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun dan akan diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila Indosat tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perseroan. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal Sertifikat Siap Instalasi di masing-masing lokasi.

- i. Pada tanggal 1 Maret 2010, Perseroan dan PT Smart Telecom ("Smart") menandatangani Perjanjian Sewa Induk untuk *Co-location* mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan komunikasi. Jangka waktu awal dari *site leases* yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun dan akan diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila Smart tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perseroan. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal Sertifikat Siap Instalasi di masing-masing lokasi.

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

On April 8, 2014, XL and Axis has accomplished a merger. In this merger, Axis merged with and into XL. As a result, all assets and liabilities of Axis were transferred entirely to XL as the surviving company. Since April 8, 2014, all of the activity with Axis and XL are consolidated with XL.

- h. On July 2, 2008, the Company and PT Indosat Tbk. ("Indosat") entered into a Master Lease Agreement for Co-locations as amended by the First Amendment dated June 22, 2009, by the Second Amendment dated May 13, 2011 and lastly by the Third Amendment dated March 5, 2012 regarding the rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment. The initial period of the site leases signed under this agreement is 10 years, which period will be extended for two 10-year periods, unless Indosat informs the Company in writing that it does not wish to extend the lease term. The lease period starts upon the date of the Ready For Installation Certificate for each site.

On May 13, 2011, the Company and Indosat entered into a Build to Suit Agreement. The period of the site leases signed under this agreement is 10 years, which period will be extended for two 10 year periods, unless Indosat informs the Company in writing that it does not wish to extend the lease term. The lease period starts upon the date of the Ready For Installation Certificate for each site.

- i. On March 1, 2010, the Company and PT Smart Telecom ("Smart") entered into a Master Lease Agreement for Co-locations regarding the rental of tower infrastructure for the placement of telecommunications equipment. The initial period of the site leases signed under this agreement is 10 years, which period will be extended for two 10-year periods, unless Smart informs the Company in writing that it does not wish to extend the lease term. The lease period starts upon the date of the Ready For Installation Certificate for each site.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

33. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

- j. Pada tanggal 17 Juni 2010, Perseroan dan PT Berca Hardayaperkasa dan PT Berca Global-Access ("Berca") menandatangani Perjanjian Sewa Induk untuk *Co-location* mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan komunikasi. Jangka waktu awal untuk *site leases* yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun dan akan diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila Berca tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perseroan. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal Sertifikat Siap Instalasi di masing-masing lokasi.
- k. Pada tanggal 25 Juni 2010, Perseroan dan PT First Media Tbk. ("First Media") menandatangani Perjanjian Sewa Induk untuk *Co-location* mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan komunikasi. Jangka waktu awal untuk *site leases* dalam perjanjian ini adalah 10 tahun dan akan diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu 5 tahun, kecuali apabila First Media tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perseroan. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal Sertifikat Siap Instalasi di masing-masing lokasi.

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pengalihan dengan PT First Media, Tbk ("First Media"), dan PT Internux ("Internux"), tertanggal 11 Oktober 2013 ("Perjanjian Pengalihan"). Berdasarkan Perjanjian Pengalihan, First Media mengalihkan seluruh hak, kewajiban dan kepentingannya berdasarkan Perjanjian Sewa Induk untuk *Co-location* tertanggal 25 Juni 2010 yang dibuat antara Perseroan dan First Media ("MLA") sehubungan dengan penyewaan 139 lokasi menara milik Perseroan ("Sewa Lokasi yang Telah Ada") kepada Internux. First Media setuju untuk menjamin kewajiban-kewajiban sehubungan dengan Sewa Lokasi yang Telah Ada berdasarkan MLA untuk suatu periode waktu tertentu.

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

- j. On June 17, 2010, the Company and PT Berca Hardayaperkasa and PT Berca Global-Access ("Berca") entered into a Master Lease Agreement for *Co-locations* regarding the rental of tower infrastructure for placement of Berca's telecommunications equipment. The initial period of the site leases signed under this agreement is 10 years, which period will be extended for two 10-year periods, unless Berca informs the Company in writing that it does not wish to extend the lease term. The lease period starts upon the date of the Ready For Installation Certificate for each site.
- k. On June 25, 2010, the Company and PT First Media Tbk. ("First Media") entered into a Master Lease Agreement for *Co-locations* regarding the rental of tower infrastructure for the placement of First Media's telecommunications equipment. The initial period of the site leases signed under this agreement is 10 years, which period will be extended for two 5-year periods, unless First Media informs the Company in writing that it does not wish to extend the lease term. The lease period starts upon the date of the Ready For Installation Certificate for each site.

The Company has entered into an Assignment Agreement with First Media, and PT Internux ("Internux"), dated October 11, 2013 ("Assignment Agreement"). Under the Assignment Agreement, First Media assigns all of its rights, title, obligations and interests under the Master Lease Agreement For Colocation dated June 25, 2010 made between the Company and First Media ("MLA") regarding the lease of 139 tower sites owned by the Company ("Existing Site Leases") to Internux. First Media agreed to guarantee the obligations related to the Existing Site Leases under the MLA for a certain period of time.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

33. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perseroan dan First Media menandatangani Perjanjian Sewa Induk untuk Co-location yang baru mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan komunikasi yang berlaku efektif sejak tanggal 18 Juli 2014. Jangka waktu awal untuk site leases dalam perjanjian ini adalah 10 tahun dan akan diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu 5 tahun, kecuali apabila First Media tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perseroan. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal Sertifikat Siap Instalasi di masing-masing lokasi.

- I. Pada tanggal 7 November 2017, Perseroan dan PT Hartono Plantation Indonesia ("HPI") menandatangani perjanjian kerjasama mengenai penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi dalam rangka kerjasama telekomunikasi antara HPI dengan pihak operator telekomunikasi. Jangka waktu awal untuk site leases dalam perjanjian ini adalah 10 tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penggunaan Site untuk masing-masing lokasi, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak.
- m. Pada tanggal 18 Desember 2015, Perseroan telah memberikan fasilitas dan program insentif kepada Peter Djatmiko, yang merupakan Presiden Direktur iForte dengan menandatangani *Management Incentive Program Agreement* ("MIP Agreement"). Sehubungan dengan rencana Peter Djatmiko untuk melakukan pembelian 34.000.000 saham Perseroan berdasarkan MIP Agreement, Perseroan memberikan pinjaman sejumlah AS\$9.635.140 kepada Peter Djatmiko dengan menandatangani Loan Agreement tertanggal 18 Desember 2015 ("Perjanjian Pinjaman"). Guna menjamin kewajiban Peter Djatmiko berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Perseroan juga telah menandatangani *Pledge of Shares Agreement* tertanggal 18 Desember 2015 sehubungan dengan jaminan atas pemberian pinjaman dari Perseroan kepada Peter Djatmiko.

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Company and First Media executed a new Master Lease Agreement for Co-locations regarding the rental of tower infrastructure for the placement of First Media's telecommunications equipment which was effective as of July 18, 2014. The initial period of the site leases signed under this agreement is 10 years, which period will be extended for two 5-year periods, unless First Media informs the Company in writing that it does not wish to extend the lease term. The lease period starts upon the date of the Ready For Installation Certificate for each site.

- I. On November 7, 2017, the Company and PT Hartono Plantation Indonesia ("HPI") entered into a cooperation agreement regarding the provisions of tower infrastructure in the framework of cooperation of telecommunication between HPI and telecommunication operators. The initial period of the site leases under this agreement is 10 years with a commencement date upon the Minutes of Site Utilization for each site, and may be extended based on mutual written agreements by both parties.
- m. On December 18, 2015, the Company has provided facilities and incentive program to Peter Djatmiko who is the President Director of iForte, by signing a Management Incentive Program Agreement ("MIP Agreement"). In connection with the plan of Peter Djatmiko to purchase 34,000,000 shares of the Company under the MIP Agreement, the Company provided a loan in the amount of US\$9,635,140 to Peter Djatmiko by signing a Loan Agreement dated December 18, 2015 ("Loan Agreement"). In order to guarantee the obligations of Peter Djatmiko under the Loan Agreement, the Company has also signed a Pledge of Shares Agreement dated December 18, 2015 in connection with the security of the loan provided by the Company to Peter Djatmiko.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

33. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

- n. Pada tanggal 16 Desember 2016, Perseroan menandatangani Perjanjian Sewa Induk dengan PT MNC Kabel Mediacom ("MNC"), mengenai sewa ruang pada *site* yang diperlukan untuk memasang, memelihara dan mengoperasikan peralatan milik MNC. Jangka waktu awal untuk *site leases* dalam perjanjian ini adalah 15 tahun dan akan diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu 5 tahun, kecuali apabila MNC tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perseroan. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal Sertifikat Siap Instalasi di masing-masing lokasi.

- o. Pada tanggal 11 Oktober 2013, iForte dan XL menandatangani Perjanjian Sewa-Menyewa Pole untuk Semi Macro/Mini Macro, sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir kali dengan Amandemen No. 4 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur tanggal 12 Oktober 2016 mengenai sewa *pole* untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu sewa yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun sejak tanggal Berita Acara Penggunaan *Site* untuk masing-masing lokasi.

Pada tanggal 13 Maret 2013, iForte dan XL menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Semi BTS Hotel sebagaimana telah diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 1 Maret 2016 mengenai sewa infrastruktur semi BTS Hotel untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu sewa yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun sejak tanggal Berita Acara Penggunaan *Site* untuk masing-masing lokasi.

- p. Pada tanggal 26 Juni 2014, iForte dan Telkomsel menandatangani Perjanjian Pekerjaan Sewa Sarana Infrastruktur BTS Hotel di 11 Lokasi mengenai sewa infrastruktur BTS Hotel untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu sewa perjanjian ini adalah 5 tahun sejak tanggal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penggunaan *Site* untuk masing-masing lokasi.

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

- n. On December 16, 2016, the Company and PT MNC Kabel Mediacom ("MNC") entered into a Master Lease Agreement regarding the rental space for the installing, maintain and operating of MNC's equipment. The initial period of the site leases signed under this agreement is 15 years, which period will be extended for two 5-year periods, unless MNC informs the Company in writing that it does not wish to extend the lease term. The lease period starts upon the commencement date of the Ready For Installation Certificate for each site.

- o. On October 11, 2013, iForte and XL entered into a Pole Lease Agreement for Semi Macro/Mini Macro, as lastly amended with Amendment No. 4 of the Infrastructure Lease Agreement dated October 12, 2016 regarding lease of pole space for installation of telecommunication equipment. The lease period signed under this agreement is 10 years with a commencement date upon the Minutes of Site Utilization for each site.

On March 13, 2013, iForte and XL entered into a Lease Agreement of Semi BTS Hotel Infrastructure as amended by Amendment No. 1 dated March 1, 2016, regarding lease of semi BTS Hotel infrastructure for installation of telecommunication equipment. The lease period signed under this agreement is 10 years with a commencement date upon the Minutes of Site Utilization for each site.

- p. On June 26, 2014, iForte and Telkomsel entered into a Work Agreement for Lease of BTS Hotel Infrastructure Facilities at 11 Locations, regarding lease of BTS Hotel infrastructure for installation of telecommunication equipment. The lease period signed under this agreement is 5 years with a commencement date upon the Minutes of Site Utilization for each site.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

33. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Pada tanggal 25 Mei 2015, iForte dan Telkomsel menandatangani *Master Purchase Agreement* Sewa Sarana Infrastruktur Add System di 3 Lokasi BTS Hotel mengenai sewa infrastruktur *add system* untuk 3 lokasi BTS Hotel untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu sewa perjanjian ini adalah 5 tahun sejak tanggal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penggunaan *Site* untuk masing-masing lokasi.

Pada tanggal 24 Juni 2015, iForte dan Telkomsel menandatangani Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur BTS Hotel 3 Site di Jabotabek mengenai sewa infrastruktur BTS Hotel untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu sewa yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 1 tahun terhitung sejak mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penggunaan *Site*.

Pada tanggal 24 Agustus 2015, iForte dan Telkomsel menandatangani *Master Purchase Agreement* Sewa Sarana Infrastruktur Add System di 6 Lokasi BTS Hotel mengenai sewa infrastruktur BTS Hotel untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu sewa perjanjian ini adalah 5 tahun sejak tanggal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penggunaan *Site* untuk masing-masing lokasi.

Pada tanggal 1 Oktober 2015, iForte dan Telkomsel menandatangani Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur BTS Hotel 15 Site di Regional Jabotabek mengenai sewa infrastruktur BTS Hotel untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu sewa yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 1 tahun terhitung sejak mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penggunaan *Site*.

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

On May 25, 2015, iForte and Telkomsel entered into a Master Purchase Agreement for Lease of Add System Infrastructure at 3 BTS Hotel Locations, regarding lease of add system infrastructure at 3 BTS Hotel locations for installation of telecommunication equipment. The lease period signed under this agreement is 5 years with a commencement date upon the Minutes of Site Utilization for each site.

On June 24, 2015, iForte and Telkomsel entered into a Lease Agreement of BTS Hotel Infrastructure at 3 Sites in Jabotabek, regarding lease of BTS Hotel infrastructure for installation of telecommunication equipment. The lease period signed under this agreement is 1 year as of the date of lease as stated in the Minutes of Site Utilization.

On August 24, 2015, iForte and Telkomsel entered into a Master Purchase Agreement for Lease of Add System Infrastructure at 6 BTS Hotel Locations, regarding lease of BTS Hotel infrastructure for installation of telecommunication equipment. The lease period signed under this agreement is 5 years with a commencement date upon the Minutes of Site Utilization for each site.

On October 1, 2015, iForte and Telkomsel entered into a Lease Agreement of BTS Hotel Infrastructure at 15 Sites in Jabotabek, regarding lease of BTS Hotel infrastructure for installation of telecommunication equipment. The lease period signed under this agreement is 1 year as of the date of lease as stated in the Minutes of Site Utilization.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

33. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Pada tanggal 19 November 2015, iForte dan Telkomsel menandatangani Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur BTS Hotel Add System 4 Site Regional Jabotabek mengenai sewa infrastruktur add system untuk 4 lokasi BTS Hotel untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu sewa yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 1 tahun terhitung sejak mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penggunaan Site.

Pada tanggal 26 Januari 2016, iForte dan Telkomsel menandatangani Master Purchase Agreement Sarana Infrastruktur Tower 10 Site mengenai sewa infrastruktur tower untuk 10 lokasi untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu sewa adalah 5 tahun terhitung sejak mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam Purchase Order yang diterbitkan oleh Telkomsel.

Pada tanggal 5 Mei 2016, iForte dan Telkomsel menandatangani Master Purchase Agreement Sarana Infrastruktur Tower 15 Site mengenai sewa infrastruktur tower untuk 15 lokasi untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu sewa adalah 5 tahun terhitung sejak mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam Purchase Order yang diterbitkan oleh Telkomsel.

Pada tanggal 24 Mei 2016, iForte dan Telkomsel menandatangani Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur BTS Hotel 2 Lokasi di Jabotabek untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu sewa adalah 1 tahun terhitung sejak mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penggunaan Site.

Pada tanggal 25 Mei 2016, iForte dan Telkomsel menandatangani Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur BTS Hotel Add System 4 Site untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu sewa adalah 1 tahun terhitung sejak mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam Purchase Order yang diterbitkan oleh Telkomsel.

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

On November 19, 2015, iForte and Telkomsel entered into a Lease Agreement of BTS Hotel Infrastructure Add System at 4 Sites in Jabotabek, regarding lease of BTS Hotel infrastructure for installation of telecommunication equipment. The lease period signed under this agreement is 1 year as of the date of lease as stated in the Minutes of Site Utilization.

On January 26, 2016, iForte and Telkomsel entered into a Master Purchase Agreement for Tower Infrastructure Lease at 10 Sites, regarding lease of tower infrastructure at 10 locations for installation of telecommunication equipment. The lease period is 5 years as of the date of lease as stated in the Purchase Order issued by Telkomsel.

On May 5, 2016, iForte and Telkomsel entered into a Master Purchase Agreement for Tower Infrastructure Lease at 15 Sites, regarding lease of tower infrastructure at 15 locations for installation of telecommunication equipment. The lease period is 5 years as of the date of lease as stated in the Purchase Order issued by Telkomsel.

On May 24, 2016, iForte and Telkomsel entered into a Lease Agreement of BTS Hotel Infrastructure at 2 Locations in Jabotabek, regarding lease of BTS Hotel infrastructure for installation of telecommunication equipment. The lease period signed under this agreement is 1 year as of the date of lease as stated in the Minutes of Site Utilization.

On May 25, 2016, iForte and Telkomsel entered into a Lease Agreement of BTS Hotel Infrastructure Add System at 4 Sites, regarding lease of BTS Hotel infrastructure for installation of telecommunication equipment. The lease period signed under this agreement is 1 year as of the date of lease as stated in the Purchase Order issued by Telkomsel.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

33. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Pada tanggal 1 Desember 2016, iForte dan Telkomsel menandatangani Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Tower Micro Cell Pole (MCP) 1 Site di Regional Jawa Tengah. Jangka waktu sewa adalah 1 tahun terhitung sejak mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penggunaan Site.

Pada tanggal 21 Desember 2016, iForte dan Telkomsel menandatangani Kontrak Sewa Sarana Infrastruktur BTS Hotel dan Jasa Pemeliharaan Area Jabotabek untuk 32 Site. Jangka waktu sewa adalah 1 tahun terhitung sejak mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penggunaan Site.

Pada tanggal 18 Januari 2017, iForte dan Telkomsel menandatangani Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Tower MCP 1 Site di Regional Jawa Tengah No. HOC161548. Jangka waktu sewa adalah 1 tahun terhitung sejak mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penggunaan Site.

Pada tanggal 16 Agustus 2017, iForte dan Telkomsel menandatangani Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower Hotel BTS Batch#1 Regional Jabotabek (11 Site) Tahun 2017 No. HOC170520. Jangka waktu sewa adalah 1 tahun terhitung sejak mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penggunaan Site.

Pada tanggal 6 September 2017, iForte dan Telkomsel menandatangani Perjanjian Pekerjaan Sewa Infrastruktur Tower Collo Hotel BTS Batch#1 Regional Jabotabek (6 Site) Tahun 2017 No. HOC170597. Jangka waktu sewa adalah 1 tahun terhitung sejak mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penggunaan Site.

- q. Pada tanggal 14 September 2012, iForte dan Indosat menandatangani Perjanjian Induk Kerjasama Sewa Microcell sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama tanggal 13 Mei 2013 mengenai sewa microcell untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu sewa yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun terhitung sejak mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penggunaan Site.

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

On December 1, 2016, iForte and Telkomsel entered into a Lease Agreement of Micro Cell Pole (MCP) Infrastructure at 1 Site in Central Java Region. The lease period signed under this agreement is 1 year as of the date of lease as stated in the Minutes of Site Utilization.

On December 21, 2016, iForte and Telkomsel entered into a Lease Contract of BTS Hotel Infrastructure and Maintenance Service in Jabotabek Area at 32 Sites. The lease period signed under this agreement is 1 year as of the date of lease as stated in the Minutes of Site Utilization.

On January 18, 2017, iForte and Telkomsel entered into a Lease Agreement of Tower MCP Infrastructure at 1 Site in Central Java Region No. HOC161548. The lease period signed under this agreement is 1 year as of the date of lease as stated in the Minutes of Site Utilization.

On August 16, 2017, iForte and Telkomsel entered into a Lease Agreement of Tower BTS Hotel Infrastructure Batch#1 Jabotabek Region (11 Sites) Year 2017 No. HOC170520. The lease period signed under this agreement is 1 year as of the date of lease as stated in the Minutes of Site Utilization.

On September 6, 2017, iForte and Telkomsel entered into a Lease Agreement of Tower Collo BTS Hotel Infrastructure Batch#1 Jabotabek Region (6 Sites) Year 2017 No. HOC170597. The lease period signed under this agreement is 1 year as of the date of lease as stated in the Minutes of Site Utilization.

- q. *On September 14, 2012, iForte and Indosat entered into a Master Cooperation Agreement for Lease of Microcell as amended by a First Amendment dated May 13, 2013, regarding lease of microcell for installation of telecommunication equipment. The lease period signed under this agreement is 10 years as of the date of lease as stated in the Minutes of Site Utilization.*

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

33. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

- r. Pada tanggal 4 September 2013, iForte dan Internux menandatangani Nota Kesepakatan Mengenai Sewa Menyewa Infrastruktur *Micro* BTS, sebagaimana telah diubah dalam Amandemen I tanggal 4 Desember 2013 ("Nota Kesepahaman I") mengenai sewa infrastruktur *micro* BTS untuk penempatan peralatan telekomunikasi dengan skema kolokasi. Jangka waktu sewa untuk masing-masing Infrastruktur *Micro* BTS dalam Nota Kesepahaman ini adalah 5 tahun terhitung sejak hari ke-14 setelah ditandatanganinya Berita Acara Uji Kelayakan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pada tanggal 4 September 2013, iForte dan Internux menandatangani Nota Kesepakatan Mengenai Sewa Menyewa Infrastruktur *Micro* BTS, sebagaimana telah diubah dalam Amandemen I tanggal 4 Desember 2013 dan Amandemen II tanggal 27 Agustus 2014 ("Nota Kesepahaman II") mengenai sewa infrastruktur *micro* BTS untuk penempatan peralatan telekomunikasi dengan skema *Build to Suit*. Jangka waktu sewa untuk masing-masing Infrastruktur *Micro* BTS dalam Nota Kesepahaman ini adalah 10 tahun terhitung sejak hari ke-14 setelah ditandatanganinya Berita Acara Uji Kelayakan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun sesuai dengan kesepakatan para pihak.

- s. Pada tanggal 16 Desember 2014, iForte dan Hutchison menandatangani *MCP Master Lease Agreement* mengenai sewa *Microcell Pole* untuk penempatan peralatan telekomunikasi, sebagaimana telah diubah dalam *Amendment No. 1 to The MCP Master Lease Agreement H3I Ref No. 060/LGL-AMD1/PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK/AM-CKT/Tech/II/17* tanggal 30 Januari 2017. Periode awal dari sewa *Microcell Pole* yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 5 tahun sejak tanggal penandatanganan *Site License* untuk masing-masing lokasi dan dapat diperpanjang 5 tahun oleh Hutchison dengan memberikan pemberitahuan paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu awal.

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

- r. On September 4, 2013, iForte and Internux entered into a Memorandum of Understanding For Lease of *Micro* BTS Infrastructure, as amended by Amendment No. I dated December 4, 2013 ("Memorandum of Understanding No. I"), regarding lease of *micro* BTS infrastructure for installation of telecommunication equipment with colocation scheme. The lease period for each *Micro* BTS Infrastructure is 5 years as of the 14th day after upon the signing of the Minutes of Feasibility Test, which period may be extended for 5 years based on agreement between the parties.

On September 4, 2013, iForte and Internux entered into a Memorandum of Understanding For Lease of *Micro* BTS Infrastructure, as amended by Amendment No. I dated December 4, 2013 and lastly amended by Amendment No. II dated August 27, 2014 ("Memorandum of Understanding No. II"), regarding lease of *micro* BTS infrastructure space for installation of telecommunication equipment with *Build to Suit* scheme. The lease period for each *Micro* BTS Infrastructure is 10 years as of the 14th day upon signing of the Minutes of Feasibility Test, which period may be extended for 5 years based on agreement between the parties.

- s. On December 16, 2014, iForte and Hutchison entered into a *MCP Master Lease Agreement* regarding lease of *Microcell Pole* for installation of telecommunication equipment, as amended by Amendment No. 1 to The *MCP Master Lease Agreement H3I Ref No. 060/LGL-AMD1/PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK/AM-CKT/Tech/II/17* dated January 30, 2017. The initial period of lease of *Microcell Pole* signed under this agreement is 5 years as of the date of execution of *Site License* for each site, which period may be extended for 5 years by Hutchison by giving a prior notice no later than 3 months before the expiration of the initial term.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

33. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

- t. Pada tanggal 6 April 2016, iForte dan Pemerintah Kota Malang menandatangani Perjanjian mengenai kerjasama sewa menyewa pemanfaatan aset milik pemerintah kota Malang di 50 titik atau lokasi di kota Malang guna pendirian menara *Monopole*. Jangka waktu sewa adalah 5 tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian.
- u. Pada tanggal 12 Februari 2016, Perseroan menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan iForte ("Perjanjian Pinjaman"). Sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman tersebut, Perseroan memberikan pinjaman sejumlah Rp30.398 kepada iForte dengan jangka waktu pinjaman selama 5 tahun sejak tanggal efektifnya Perjanjian Pinjaman. Tujuan penggunaan pinjaman tersebut adalah untuk modal kerja iForte sehubungan dengan bisnis *micro* BTS nya. Perjanjian Pinjaman tersebut dikenakan bunga yaitu dari jumlah suku bunga per tahun JIBOR ditambah 2,5% per tahun. Pada tanggal 29 Desember 2017, iForte melakukan seluruh pelunasan atas Perjanjian Pinjaman kepada Perseroan sebesar Rp38.183.
- v. Pada tanggal 11 Mei 2016, iForte dan Hutchison menandatangani Perjanjian IRU mengenai pemberian hak eksklusif, tidak terbatas dan tidak bisa dibatalkan kepada iForte untuk menggunakan kapasitas dari titik(-titik) jaringan fiber optik yang dimiliki dan dioperasikan oleh Hutchison ("Objek Jaringan"). Jangka waktu IRU untuk setiap Objek Jaringan adalah 15 tahun terhitung dari tanggal *Ready For Service* ("RFS") yang tertera di *Acceptance Form* atau hingga berakhirnya *Structural Life* dari Objek Jaringan (mana yang lebih lama), kecuali diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan Perjanjian ini.
- w. iForte dan PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("SKP") telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Infrastruktur *In-Building* di Grand Indonesia Complex, ("Perjanjian Pembelian Aset") sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 136, tanggal 17 Februari 2017.

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

- t. On April 6, 2016, iForte and the Municipality of Malang entered into an Agreement regarding the cooperation lease in utilizing the asset of the municipality of Malang in 50 points or location in the city of Malang for the construction of *Monopole* tower. The lease period is 5 years as of the signing of the agreement.
- u. On February 12, 2016, the Company entered into a Loan Agreement with iForte (the "Loan Agreement"). In connection with the Loan Agreement, the Company provided a loan in the amount of Rp30,398 to iForte with a loan term of 5 years as of the effective date of the Loan Agreement. The purpose of the loan is to be used for iForte's working capital in connection with its *micro* BTS business. The Loan Agreement is subject to an interest being the total JIBOR interest rate per annum plus 2.5% per annum. On December 29, 2017, iForte fully paid the Loan Agreement to the Company in the amount of Rp38,183.
- v. On May 11, 2016, iForte and Hutchison entered into IRU Agreement, regarding the grant of exclusive, unrestricted and indefeasible right to iForte for using capacity resulting from the core(s) of fiber optic network owned and operated by Hutchison ("Network Object"). The lease period of the IRU for each Network Object shall be 15 years as of the Ready For Service ("RFS") date stated in the Acceptance Form or until the end of the Structural Life of the Network Object (whichever is later), unless terminated earlier in accordance with this Agreement.
- w. iForte and PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("SKP") have entered into a Sale and Purchase Agreement of *In-Building* Infrastructure in Grand Indonesia Complex, ("Asset Purchase Agreement") as stipulated in Deed No. 136, dated February 17, 2017.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

33. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Kepemilikan atas Infrastruktur *In-Building* di Grand Indonesia Complex beralih dan menjadi milik iForte terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pembelian Aset. SKP mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan administrasi pengalihan (novasi) perjanjian dengan Telkomsel, XL, Indosat, Hutchison dan Smartfren ("Pengalihan Perjanjian"). Administrasi Pengalihan Perjanjian wajib diselesaikan seluruhnya oleh SKP dengan mengikuti kebijakan masing-masing operator telekomunikasi.

- x. Pada tanggal 3 Januari 2017, IGI dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) dahulu Balai Penyedia dan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika ("BP3TI") menandatangani Perjanjian Pekerjaan Penyediaan Akses Internet Tahun 2017 (VSAT) No. 002.A/IGI-BP3TI/MWIFO//2017 mengenai penyediaan jasa akses internet untuk 299 lokasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 12 bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Jumlah estimasi pembayaran sewa minimum di masa depan untuk perjanjian-perjanjian sewa induk di atas adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016
Estimasi pembayaran sewa minimum di masa depan		
Sampai dengan satu tahun	4.027.127	3.946.230
Lebih dari satu tahun		
sampai dengan lima tahun	14.778.733	15.859.967
Lebih dari lima tahun	4.623.764	5.234.752
	23.429.624	25.040.949

Tabel di bawah ini memuat rincian jumlah *telecommunication sites* dan total sewa per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Perusahaan/ Company	31 Desember/December 31, 2017			31 Desember/December 31, 2016		
	Jumlah <i>telecommunication sites</i> - siap untuk diinstalasi/ Number of <i>telecommunication sites</i> - ready for installation	Jumlah <i>telecommunication sites</i> - commenced/ Number of <i>telecommunication sites</i> - commenced	Jumlah sewa / Number of total sites leases	Jumlah <i>telecommunication sites</i> - siap untuk diinstalasi/ Number of <i>telecommunication sites</i> - ready for installation	Jumlah <i>telecommunication sites</i> - commenced/ Number of <i>telecommunication sites</i> - commenced	Jumlah sewa/ Number of total sites leases
Perseroan dan entitas anaknya/ the Company and its subsidiaries	14.854	14.651	25.011	14.562	14.382	24.144

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The ownership of *In-Building Infrastructure* in Grand Indonesia Complex were transferred to iForte as of the signing date of the Asset Purchase Agreement. SKP has an obligation to settle the administration of assignment (novation) of agreements with Telkomsel, XL, Indosat, Hutchison and Smartfren ("Assignment Agreement"). The administration of the Assignment Agreement shall be settled entirely by SKP following the policies of each telecommunication operators.

- x. On January 3, 2017, IGI and Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) was Balai Penyedia dan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika ("BP3TI") signed Internet Access Service Provider Working Agreement Year 2017 (VSAT) No. 002.A/IGI-BP3TI/MWIFO//2017, about internet access services providers for 299 sites. The lease period is for 12 months, starting from January 1, 2017 until December 31, 2017.

Total estimated future minimum lease payments for the preceding master lease agreements are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016
Estimated future minimum lease payments		
Within one year	4.027.127	3.946.230
From one year to five years	14.778.733	15.859.967
More than five years	4.623.764	5.234.752
	23.429.624	25.040.949

The table below contains the number of *telecommunication sites* and total site leases as of December 31, 2017 and 2016.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

33. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Tabel di bawah ini memuat rincian jumlah *telecommunication sites* Perseroan dan entitas anaknya yang disewakan kepada masing-masing pelanggan per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The table below contains the number of leases on the Company and its subsidiaries' telecommunication site portfolio per customer as of December 31, 2017 and 2016.

No	Pelanggan/Customers	Catatan/ Notes	31 Des./Dec. 31, 2017	31 Des./Dec. 31, 2016
			Sewa/Leases	Sewa/Leases
1	PT Telekomunikasi Selular	33b,p	5.105	4.978
2	PT Smartfren Telecom Tbk.	33c	1.032	1.547
3	PT Hutchison 3 Indonesia (dahulu PT Hutchison CP Telecommunications)	33d,s	8.472	8.554
4	PT XL Axiata Tbk.	33e,g,o	7.869	6.638
5	PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia	33f	159	124
6	PT Indosat Tbk.	33h,q	1.160	1.098
7	PT Smart Telecom	33i	119	120
8	PT Berca Global-Access	33j	17	17
9	PT First Media Tbk. / PT Internux	33k,r	1.059	1.060
10	PT Tower Bersama		8	8
11	PT Media Nusantara Citra Tbk.	33n	9	-
12	PT Fajar Surya Swadaya		2	-
	Jumlah/Total		25.011	24.144

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

34. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI

Tabel berikut adalah jumlah transaksi yang telah terjadi dengan pihak berelasi selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta saldo dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Saldo dengan pihak-pihak berelasi:

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016
Aset		
<u>Pihak-pihak berelasi lainnya</u>		
Kas dan setara kas		
Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk.	44.000	62.370
Dolar AS		
PT Bank Central Asia Tbk.	5.745	2.918
Dolar Singapura		
PT Bank Central Asia Tbk.	4	5
Piutang usaha		
Rupiah		
PT Grand Indonesia	55	-
PT Djarum	18	-
PT Asuransi Jiwa BCA	243	-
PT Asuransi Umum BCA	-	23
PT Angkasa Komunikasi		
Global Utama	16.762	-
PT Fajar Surya Swadaya	51	-
Piutang lain-lain		
Dolar AS		
Direksi Perseroan dan entitas anak	144.227	139.500
	211.105	204.816
Persentase total aset dari pihak-pihak berelasi terhadap total aset	1%	1%

34. RELATED PARTIES INFORMATION

The following table provides the total amount of transactions that have been entered into related party for the years ended December 31, 2017 and 2016, as well as balances with related parties as of December 31, 2017 and 2016.

Balances with related parties:

Assets
<u>Other related parties</u>
Cash and cash equivalents
Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk.
US Dollar
PT Bank Central Asia Tbk.
Singapore Dollar
PT Bank Central Asia Tbk.
Trade receivables
Rupiah
PT Grand Indonesia
PT Djarum
PT Asuransi Jiwa BCA
PT Asuransi Umum BCA
PT Angkasa Komunikasi
Global Utama
PT Fajar Surya Swadaya
Other receivables
US Dollar
The Company and subsidiaries' Directors
Percentage of total assets involving related parties to total assets

Piutang lain-lain kepada direksi Perseroan dan entitas anak terutama merupakan piutang kepada Peter Djatmiko dengan jumlah pokok piutang sebesar AS\$9.635.140 dan dikenakan bunga sebesar 5% per tahun (Catatan 33m). Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, total piutang (termasuk akrual bunga) kepada Peter Djatmiko masing-masing adalah sebesar AS\$10.643.114 (ekuivalen dengan Rp144.193) dan AS\$10.136.300 (ekuivalen dengan Rp136.191). Piutang ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2019.

Piutang kepada direksi lain adalah sebesar Rp34 pada tanggal 31 Desember 2017 (31 Desember 2016: Rp3.309). Piutang ini akan diselesaikan dengan cara pemotongan gaji bulanan.

Other receivables from the Company and subsidiaries' directors are mainly receivable from Peter Djatmiko amounting to US\$9,635,140 with interest rate of 5% per annum (Note 33m). As of December 31, 2017 and 2016, total receivables (including accrued interest) from Peter Djatmiko amounted to US\$10,643,114 (equivalent to Rp144,193) and US\$10,136,300 (equivalent to Rp136,191), respectively. This receivable will be due on March 31, 2019.

Receivables from other directors amounted to Rp34 as of December 31, 2017 (December 31, 2016: Rp3,309). These receivables will be settled through monthly salary deduction.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**34. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

34. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Saldo dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan):

Balances with related parties (continued):

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016
Liabilitas		
<u>Perusahaan induk</u>		
Utang pembangunan menara dan usaha lainnya		
PT Sarana Menara Nusantara Tbk.	22.465	34.243
Noraeg Holdings LLC	4.742	-
<u>Pihak-pihak berelasi lainnya</u>		
Pendapatan ditangguhkan		
PT Djarum	2.725	2.925
PT Angkasa Komunikasi Global Utama	49.375	82
Liabilitas rencana opsi manajemen Peter Djatmiko	87.446	30.000
Utang jangka panjang PT Bank Central Asia Tbk.	750.000	500.000
	916.753	567.250
Persentase total liabilitas dari pihak-pihak berelasi terhadap total liabilitas	8%	4%

Liabilities
<u>Parent entity</u>
Tower construction and other trade payables
PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
Noraeg Holdings LLC
<u>Other related parties</u>
Unearned revenue
PT Djarum
PT Angkasa Komunikasi Global Utama
Management option plan liability Peter Djatmiko
Long-term loan PT Bank Central Asia Tbk.
Percentage of total liabilities involving related party to total liabilities

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi:

Transactions with related parties:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,	
	2017	2016
Pendapatan	66.796	14.345
Persentase pendapatan dari pihak berelasi terhadap total pendapatan	1%	0%
Beban usaha		
<u>Perusahaan induk</u>		
Biaya pemasaran dan perijinan	30.000	36.000
<u>Pihak-pihak berelasi lainnya</u>		
Sewa kantor	20.365	22.800
Jasa profesional	64.229	58.682
	114.594	117.482
Persentase beban usaha dari pihak berelasi terhadap total beban usaha	25%	25%

Operating expense
<u>Parent entity</u>
Marketing and licensing fee
<u>Other related parties</u>
Office lease
Professional fees
Percentage of operating expense involving related parties to total operating expenses

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**34. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

34. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan):

Transactions with related parties (continued):

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember / Year Ended December 31,		
	2017	2016	
Beban usaha lainnya, neto <u>Pihak-pihak berelasi lainnya</u> Beban rencana opsi manajemen	57.446	30.000	Other operating expenses, net <u>Other related parties</u> Management option plan expense
Persentase beban usaha lainnya, neto dari pihak berelasi terhadap total beban usaha lainnya, neto	20%	27%	Percentage of other operating expense, net involving related parties to total other operating expenses, net
Penghasilan keuangan <u>Pihak-pihak berelasi lainnya</u> PT Bank Central Asia Tbk.	14.171	13.165	Finance income <u>Other related parties</u> PT Bank Central Asia Tbk.
Persentase penghasilan keuangan dari pihak berelasi terhadap total penghasilan keuangan	21%	23%	Percentage of finance income involving related party to total finance income
Biaya keuangan <u>Pihak-pihak berelasi lainnya</u> PT Bank Central Asia Tbk.	41.501	1.193	Finance costs <u>Other related parties</u> PT Bank Central Asia Tbk.
Persentase biaya keuangan dari pihak berelasi terhadap total biaya keuangan	7%	0%	Percentage of finance cost involving related parties to total finance cost

Personil manajemen kunci Perseroan meliputi
Dewan Komisaris dan Direksi. Total kompensasi
personil manajemen kunci dalam Perseroan dan
entitas anaknya:

Key management personnel of the Company are
the Boards of Commissioners and Directors.
Compensation of key management personnel of
the Company and its subsidiaries:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember / Year Ended December 31,		
	2017	2016	
Imbalan kerja jangka pendek Dewan Komisaris	8.250	3.326	Short-term employee benefits Board of Commissioners
Direksi	61.070	28.542	Directors
Imbalan kerja jangka panjang Direksi	3.238	10.233	Long-term employee benefits Directors
	72.558	42.101	

Jumlah dalam tabel di atas merupakan jumlah yang
diakui sebagai beban selama periode pelaporan
sehubungan dengan kompensasi yang diberikan
kepada personil manajemen kunci.

The amounts disclosed in the above table are the
amounts recognized as expenses during the
reporting period related to the key management
personnel.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**34. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan):

Tidak ada kompensasi dalam bentuk imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon pemutusan kontrak kerja dan pembayaran berbasis saham.

Dalam tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan telah membayar jasa manajemen dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,	
	2017	2016
Jasa personil manajemen kunci (dalam AS\$) Noraeg Holding LLC	4.800.000	5.971.000

Key management personnel services
(in US\$)
Noraeg Holding LLC

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi

Noraeg

Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan Noraeg tanggal 1 Agustus 2008, untuk jasa berikut:

"Proyek manajemen dan jasa serupa sehubungan dengan proyek-proyek khusus yang berkaitan dengan inisiatif pelanggan, termasuk studi pemasaran, ekonomi dan gambaran pasar dan strategi, pembangunan menara baru, inisiatif kolokasi dan perjanjian pemasaran situs menara, dan jasa-jasa bisnis lainnya yang diminta dari waktu ke waktu oleh Perseroan."

34. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Transactions with related parties (continued):

There are no compensation of other long-term benefits, termination benefits, and share-based payment.

For the year ended December 31, 2017 and 2016, the Company has paid management services with the following details:

Nature of relationships with related parties

Noraeg

The Company has entered into an engagement agreement with Noraeg dated August 1, 2008, for the following services:

"Project management and similar services in connection with special projects relating to customer initiatives, including marketing studies, economic and market overview and strategy, new tower builds, collocation initiatives and tower site marketing agreements, and any other business services requested from time to time by the Company."

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**34. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

34. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

**Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi
(lanjutan)**

**Nature of relationships with related parties
(continued)**

Sifat hubungan/Relationship	Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Transaksi/ Transactions
· Pemegang Saham/Shareholder	- PT Sarana Menara Nusantara Tbk.	Biaya pemasaran dan perijinan, penggantian biaya (perjanjian pemasaran dan perijinan pada tanggal 1 Agustus 2009 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan Ketiga pada tanggal 28 Februari 2017)/Marketing and licensing fee, reimbursable expenses (the marketing and licensing agreement dated August 1, 2009 as lastly amended by third amendment dated February 28, 2017)
· Pihak-pihak berelasi lainnya/Other related parties:		
· Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali PT Bank Central Asia Tbk./ Family relationship with ultimate shareholders of PT Bank Central Asia Tbk.	PT Bank Central Asia Tbk.	Kas dan setara kas/Cash and cash equivalents, pinjaman/loan, pendapatan/revenues, penghasilan dan biaya keuangan/finance income and finance costs
· Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali PT Asuransi Umum BCA/ Family relationship with ultimate shareholders of PT Asuransi Umum BCA.	- PT Asuransi Umum BCA	Pendapatan/Revenue
· Hubungan afiliasi berdasarkan komposisi kepemilikan saham/Affiliated party based on shareholding composition	- PT Grand Indonesia	Pembayaran sewa kantor/Payment of office lease
· Hubungan afiliasi berdasarkan komposisi kepemilikan saham/Affiliated party based on shareholding composition	- Peter Djatmiko	Pinjaman/Loan, piutang lain-lain/other receivable
· Personil manajemen kunci/Key management personnel	- Noraeg Holdings LLC	Jasa konsultasi manajemen kunci/Key management consultation services
· Hubungan afiliasi berdasarkan komposisi kepemilikan saham/Affiliated party based on shareholding composition	- PT Djarum	Piutang, pendapatan ditangguhkan, pendapatan/Receivable, unearned revenue, revenue
· Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali PT Asuransi Jiwa BCA/Family relationship with ultimate shareholders of PT Asuransi Jiwa BCA	- PT Asuransi Jiwa BCA	Piutang usaha, pendapatan/Trade receivable, revenue

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**34. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

34. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

**Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi
(lanjutan)**

**Nature of relationships with related parties
(continued)**

Sifat hubungan/Relationship	Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Transaksi/ Transactions
Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali PT Hartono Plantation Indonesia/Family relationship with ultimate shareholders of PT Hartono Plantation Indonesia	- PT Hartono Plantation Indonesia	Kerjasama dalam penyediaan infrastruktur menara / Cooperation in the provision of tower infrastructure
Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali PT Angkasa Komunikasi Global Utama/Family relationship with ultimate shareholders of PT Angkasa Komunikasi Global Utama	- PT Angkasa Komunikasi Global Utama	Pendapatan/Revenue
Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali PT Fajar Surya Swadaya/Family relationship with ultimate shareholders of PT Fajar Surya Swadaya	- PT Fajar Surya Swadaya	Pendapatan/Revenue

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi menggunakan kebijakan harga dan syarat transaksi yang disepakati oleh para pihak.

All transactions with related parties are based on terms and conditions agreed among the parties.

35. SEGMENT OPERASI

35. OPERATING SEGMENTS

Entitas anak memiliki tiga segmen sebagai berikut:

The subsidiaries have three segments as follows:

- Penyewaan menara
- Jasa VSAT
- MWIFO dan internet

- Tower rental
- VSAT Services
- MWIFO and internet

Tidak ada segmen operasi yang digabung untuk membentuk segmen operasi yang dilaporkan di atas.

No operating segments have been aggregated to form the above reportable operating segment.

Manajemen sebagai pengambil keputusan operasional memantau hasil operasi unit bisnis secara terpisah untuk tujuan pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dinilai berdasarkan laba atau rugi dan diukur sesuai dengan laba atau rugi dalam laporan keuangan konsolidasian. Pendapatan dan beban segmen meliputi transaksi antara segmen operasi dan dicatat sebesar nilai pasar.

The management as the Company's Chief Operating Decision Maker monitors the operating results of business units separately for the purpose of making decisions about resource allocation and performance assessment. Segment performance is evaluated based on profit or loss and is measured consistently with profit or loss in the consolidated financial statements. Segment revenues and expenses include transactions between operating segments and are accounted at market value.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

35. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017

35. OPERATING SEGMENTS (continued)

Year Ended December 31, 2017

	Sewa Menara/ Tower Rental	Jasa Lainnya (VSAT & MWIFO)/ Other Services (VSAT & MWIFO)	Jumlah/ Total
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN			
Pendapatan	4.998.210	339.729	5.337.939
Laba bruto	3.922.574	243.705	4.166.279
Beban penjualan dan pemasaran	(46.172)	(34.246)	(80.418)
Beban umum dan administrasi	(341.198)	(34.240)	(375.438)
Beban usaha lainnya, neto	(274.261)	(12.262)	(286.523)
Laba usaha	3.260.943	162.957	3.423.900
Penghasilan keuangan, neto	65.688	240	65.928
Biaya keuangan	(660.010)	(27.299)	(687.309)
Laba dari operasi yang dilanjutkan sebelum beban pajak penghasilan	2.666.621	135.898	2.802.519
Beban pajak penghasilan	(648.123)	(46.945)	(695.068)
Laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan	2.018.498	88.953	2.107.451
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN			
Total aset segmen	17.857.276	872.311	18.729.587
Total liabilitas segmen	(11.010.291)	(635.656)	(11.645.947)
INFORMASI LAINNYA			
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi	3.394.417	60.542	3.454.959
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi	(1.131.986)	(172.520)	(1.304.506)
Arus kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(2.848.230)	95.476	(2.752.754)

**CONSOLIDATED STATEMENT
OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME**

Revenues
Gross income
Selling and marketing expenses
General and administrative expenses
Other operating expenses, net
Operating income
Finance income, net
Finance costs
Income before corporate income tax expense
from continuing operations
Corporate income tax expense

**Income for the year
from continuing operations**

**CONSOLIDATED STATEMENT
OF FINANCIAL POSITION**

Total segment assets
Total segment liabilities

OTHER INFORMATION

Net cash provided by operating activities
Net cash used in investing activities
Net cash provided by (used in) financing activities

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

35. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

35. OPERATING SEGMENTS (continued)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016

Year Ended December 31, 2016

	Sewa Menara/ Tower Rental	Jasa Lainnya (VSAT & MWIFO)/ Other Services (VSAT & MWIFO)	Jumlah/ Total
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN			
Pendapatan	4.884.763	168.349	5.053.112
Laba bruto	3.558.461	100.877	3.659.338
Beban penjualan dan pemasaran	(37.969)	(10.855)	(48.824)
Beban umum dan administrasi	(369.337)	(27.511)	(396.848)
Beban usaha lainnya, neto	(111.110)	(1.024)	(112.134)
Laba usaha	3.040.045	61.487	3.101.532
Penghasilan keuangan, neto	55.864	199	56.063
Biaya keuangan	(654.697)	(14.171)	(668.868)
Laba dari operasi yang dilanjutkan sebelum beban pajak penghasilan	2.441.212	47.515	2.488.727
Beban pajak penghasilan	(714.768)	(15.482)	(730.250)
Laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan	1.726.444	32.033	1.758.477
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN			
Total aset segmen	18.354.007	426.523	18.780.530
Total liabilitas segmen	(12.535.575)	(310.528)	(12.846.103)
INFORMASI LAINNYA			
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi	3.791.568	40.556	3.832.124
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi	(3.660.730)	(64.420)	(3.725.150)
Arus kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(139.741)	14.017	(125.724)

**CONSOLIDATED STATEMENT
OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME**

Revenues
Gross income
Selling and marketing expenses
General and administrative expenses
Other operating expenses, net
Operating income
Finance income, net
Finance costs
Income before corporate income tax expense
from continuing operations
Corporate income tax expense
Income for the year from continuing operations

**CONSOLIDATED STATEMENT
OF FINANCIAL POSITION**

Total segment assets
Total segment liabilities

OTHER INFORMATION
Net cash provided by operating activities
Net cash used in investing activities
Net cash provided by (used in) financing activities

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**36. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM
MATA UANG ASING**

Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

**36. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES**

The monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies as of the consolidated statement of financial position dates are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2017		31 Desember/ December 31, 2016		
	Mata uang asing (angka penuh)/ Foreign currency (full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent in Rupiah	Mata uang asing (angka penuh)/ Foreign currency (full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent in Rupiah	
Aset					Assets
Kas	AS\$ 20.451	277	20.444	275	Cash on hand
Rekening giro					Current accounts
Pihak ketiga	AS\$ 9.194.965	124.574	11.806.559	158.632	Third parties
	EUR 1.787	29	1.787	25	
	SGD 598.685	6.067	754	7	
Pihak berelasi	AS\$ 424.005	5.745	217.221	2.918	Related party
	SGD 399	4	575	5	
Deposito berjangka					Time deposits
Pihak ketiga	AS\$ 139.282.856	1.887.004	100.270.027	1.347.229	Third parties
Piutang usaha - pihak ketiga	AS\$ 801.129	10.853	470.762	6.325	Trade receivables - third parties
Uang muka	AS\$ 167.669	2.272	634.821	8.529	Advances
Piutang lain-lain -					Other receivables -
pihak berelasi	AS\$ 10.643.114	144.193	10.363.160	139.239	related parties
Piutang derivatif	AS\$ 1.951.757	26.442	2.426.243	32.599	Derivative receivables
Aset tidak lancar lainnya	AS\$ 434.474	5.886	434.474	5.838	Other non-current assets
Total aset	AS\$ 162.920.420	2.207.246	126.643.711	1.701.584	Total assets
	EUR 1.787	29	1.787	25	
	SGD 599.084	6.071	1.329	12	
Liabilitas					Liabilities
Utang pembangunan menara					Tower construction and
dan usaha lainnya					other trade payables
Pihak ketiga	AS\$ 404.090	5.475	180.108	2.420	Third parties
	EUR		18.913	267	
Utang lain-lain					Other payables
Pihak ketiga	AS\$ 753	10	3.417	46	Third parties
Akrual					Accruals
Pihak ketiga	AS\$ 841.302	11.398	605.468	8.135	Third parties
	SGD 88.268	894	-	-	
	EUR		76.602	1.085	
Utang jangka panjang					Long-term loans
Pihak ketiga	AS\$ 128.000.000	1.734.144	188.000.000	2.525.968	Third parties
Utang obligasi	SGD 180.000.000	1.824.035	180.000.000	1.673.806	Bonds payable
Utang swap valuta asing	SGD 1.534.738	15.553	24.082.604	223.650	Cross currency swap payable
Total liabilitas	AS\$ 129.246.145	1.751.027	188.788.993	2.536.569	Total liabilities
	EUR -	-	95.515	1.352	
	SGD 181.623.006	1.840.482	204.082.604	1.897.456	

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**37. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO
MANAJEMEN KEUANGAN**

Liabilitas keuangan Perseroan dan entitas anaknya, terdiri dari utang pembangunan menara dan usaha lainnya, utang lain-lain, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, akrual, utang jangka panjang, utang obligasi dan utang swap valuta asing. Tujuan utama dari liabilitas keuangan tersebut adalah untuk mengumpulkan dana untuk keperluan operasi Perseroan dan entitas anaknya. Perseroan dan entitas anaknya memiliki kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, dan aset tidak lancar lainnya - uang jaminan yang timbul dari kegiatan usaha Perseroan dan entitas anaknya.

Perseroan dan entitas anaknya terpengaruh terhadap risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen senior Perseroan dan entitas anaknya mengawasi manajemen risiko atas risiko-risiko tersebut. Manajemen senior Perseroan dan entitas anaknya didukung oleh Komite Risiko Keuangan yang memberikan saran atas risiko keuangan dan kerangka pengelolaan risiko keuangan yang tepat untuk Perseroan dan entitas anaknya. Komite Risiko Keuangan memberikan kepastian kepada Manajemen senior Perseroan dan entitas anaknya bahwa aktivitas keuangan Perseroan dan entitas anaknya dikelola sesuai kebijakan dan prosedur yang tepat dan risiko keuangan diidentifikasi, diukur dan dikelola sesuai dengan kebijakan dan *risk appetite*.

Direksi Perseroan menelaah dan menyetujui kebijakan pengelolaan risiko-risiko sebagaimana dirangkum di bawah ini.

Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko nilai wajar arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar yang menggambarkan risiko tingkat suku bunga dan risiko mata uang asing. Harga pasar mengandung dua tipe risiko: risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing. Instrumen keuangan yang terpengaruh oleh risiko pasar termasuk kas dan setara kas, piutang usaha - pihak ketiga, piutang lain-lain - pihak ketiga dan pihak berelasi utang pembangunan menara dan usaha lainnya - pihak ketiga, utang jangka panjang, dan akrual.

**37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE
AND POLICIES**

The Company and its subsidiaries' financial liabilities, are comprised of tower construction and other trade payables, other payables, short-term employee benefits liability, accruals, long-term loans, bonds payable and cross currency swap payable. The main purpose of these financial liabilities is to raise finances for the Company and its subsidiaries' operations. The Company and its subsidiaries have cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, and other non-current assets - deposits that arise directly from their operations.

The Company and its subsidiaries are exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. The Company and its subsidiaries' senior management oversee the management of these risks. The Company and its subsidiaries senior management are supported by a Financial Risk Committee that advises on financial risks and the appropriate financial risk governance framework for the Company and its subsidiaries. The Financial Risk Committee provides assurance to the Company and its subsidiaries' senior management that the Company and its subsidiaries' financial activities are governed by appropriate policies and procedures and that financial risks are identified, measured and managed in accordance with policies and risk appetite.

The Company's Directors review and agree on policies for managing each of these risks which are summarized below.

Market risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices which represent interest rate risk and foreign currency risk. Financial instruments affected by market risk include cash and cash equivalent, trade receivables - third parties, other receivables - third party and related parties, tower construction and other trade payables - third parties, long-term loans, and accruals.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**37. TUJUAN DAN KEBIJAKAN
MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko pasar (lanjutan)

· Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar. Perseroan dan entitas anaknya terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan pinjaman jangka panjang dengan suku bunga mengambang. Eksposur terhadap risiko tingkat suku bunga dipantau secara berkelanjutan.

Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pinjaman. Dengan asumsi variabel lain konstan, laba sebelum beban pajak konsolidasian dipengaruhi oleh tingkat suku bunga mengambang sebagai berikut:

	Kenaikan/ penurunan dalam satuan poin/ Increase/ decrease in basis point	Dampak terhadap laba sebelum beban pajak/ Effect on income before tax expense	
31 Desember 2017			December 31, 2017
Dolar AS	+100	(17.341)	US Dollar
Dolar AS	-100	17.341	US Dollar
Rupiah	+100	(47.850)	Rupiah
Rupiah	-100	47.850	Rupiah
31 Desember 2016			December 31, 2016
Dolar AS	+100	(25.260)	US Dollar
Dolar AS	-100	25.260	US Dollar
Rupiah	+100	(40.965)	Rupiah
Rupiah	-100	40.965	Rupiah

**37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE
AND POLICIES (continued)**

Market risk (continued)

· Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company and its subsidiaries' exposure to the risk of changes in market interest rates related primarily to the Company and its subsidiaries' long-term loans with floating interest rates. Exposure to interest rate is monitored on an ongoing basis.

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in interest rates on that portion of loans. With all other variables held constant, the consolidated income before tax expense is affected by the impact on floating rate loans as follows:

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**37. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO
MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko pasar (lanjutan)

· Risiko mata uang asing

Risiko mata uang asing adalah risiko nilai wajar arus kas di masa depan yang berfluktuasi karena perubahan kurs pertukaran mata uang asing. Perseroan dan entitas anaknya terpengaruh risiko perubahan mata uang asing terutama berkaitan dengan pinjaman jangka panjang dan utang obligasi masing-masing dalam mata uang Dolar AS dan Dolar Singapura. Perseroan dan entitas anaknya mengelola risiko ini dengan melakukan perjanjian sewa menara dengan jangka waktu 10 tahun dan 12 tahun dengan Hutchison dalam mata uang Dolar AS. Manajemen Perseroan dan entitas anaknya berpendapat strategi atas manajemen risiko yang diterapkan, memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang bagi Perseroan dan entitas anaknya.

Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat pertukaran Rupiah terhadap Dolar AS, Euro dan Dolar Singapura, dengan asumsi variabel lain konstan, dampak terhadap laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian sebagai berikut:

**37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE
AND POLICIES (continued)**

Market risk (continued)

· Foreign currency risk

Foreign currency risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Company and its subsidiaries' exposure to the risk of changes in foreign exchange rates relates primarily to the Company and its subsidiaries' US Dollar and Singapore Dollar long-term loans and bonds payable, respectively. The Company and its subsidiaries manage this risk by entering into 10-year and 12-year tower rental agreements with Hutchison which are denominated in US Dollars. The Company and its subsidiaries' management believe that this risk management strategy results in a positive benefit for the Company and its subsidiaries both in the short-term and long-term.

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in the Rupiah exchange rate against the US Dollar, Euro and Singapore Dollar, with all other variables held constant, with the effect to the consolidated income before corporate income tax expense as follows:

	Perubahan tingkat Rp/ Change in Rp rate	Dampak terhadap laba sebelum beban pajak/ Effect on income before tax expense	
31 Desember 2017			December 31, 2017
Dolar AS	1%	(14.182)	US Dollar
Dolar AS	-1%	14.182	US Dollar
Euro	1%	-	Euro
Euro	-1%	-	Euro
Dolar SGD	1%	(95)	SGD Dollar
Dolar SGD	-1%	95	SGD Dollar
31 Desember 2016			December 31, 2016
Dolar AS	1%	(27.265)	US Dollar
Dolar AS	-1%	27.265	US Dollar
Euro	1%	(13)	Euro
Euro	-1%	13	Euro
Dolar SGD	1%	(2.239)	SGD Dollar
Dolar SGD	-1%	2.239	SGD Dollar

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**37. TUJUAN DAN KEBIJAKAN
MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan) RiSIKO**

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana lawan transaksi tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perseroan dan entitas anaknya terkena risiko kredit dari kegiatan operasi yang berhubungan dengan sewa menara. Risiko kredit pelanggan dikelola oleh komite kredit sesuai kebijakan Perseroan dan entitas anak, prosedur dan pengendalian yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan manajemen risiko kredit pelanggan. Posisi piutang pelanggan dipantau secara teratur.

Maksimum risiko kredit yang dihadapi oleh Perseroan dan entitas anaknya kurang lebih sebesar nilai tercatat neto dari piutang usaha sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.

Risiko kredit atas penempatan rekening koran dan deposito dikelola oleh manajemen sesuai dengan kebijakan Perseroan dan entitas anaknya. Investasi atas kelebihan dana dibatasi untuk tiap-tiap bank dan kebijakan ini dievaluasi setiap tahun oleh direksi. Batas tersebut ditetapkan untuk meminimalkan risiko konsentrasi kredit sehingga mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebangkrutan bank-bank tersebut.

Tabel berikut ini menyajikan piutang usaha yang mengalami penurunan nilai, piutang usaha yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai dan piutang usaha yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai serta kas dan setara kas:

**37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE
AND POLICIES (continued)**

Credit risk

Credit risk is the risk that a counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Company and its subsidiaries are exposed to credit risk from their operating activities related to tower rent. Customer credit risk is managed by a Credit Committee subject to the Company and its subsidiaries' established policies, procedures and controls relating to customer credit risk management. Outstanding customer receivables are regularly monitored.

The Company's and its subsidiaries' maximum exposure of the credit risk approximates net carrying amounts of trade receivables as disclosed in Note 5.

Credit risk arising from placements of current accounts and deposits is managed in accordance with the Company's and its subsidiaries' policies. Investments of surplus funds are limited for each bank and reviewed annually by the directors. Such limits are set to minimize the concentration of credit risk and therefore mitigate financial loss through potential failure of the banks.

The following table presents the impaired trade receivables, trade receivables past due but not impaired and trade receivables neither past due nor impaired and cash and cash equivalents:

31 Desember/December 31, 2017

	Belum jatuh tempo dan tidak ada penurunan nilai/ Neither past due nor impaired	Sudah jatuh tempo dan tidak ada penurunan nilai/ Past due but not impaired	Ada penurunan nilai/ Impaired	Sub Total/ Sub Total	Cadangan penurunan nilai/ Allowance for impairment	Total/ Total	
Kas dan setara kas	2.339.044	-	-	2.339.044	-	2.339.044	Cash and cash equivalents
Piutang usaha							Trade receivables
Pihak ketiga	302.816	304.051	227.850	834.717	(227.850)	606.867	Third parties
Pihak berelasi	16.835	293	-	17.128	-	17.128	Related parties
	<u>2.658.695</u>	<u>304.344</u>	<u>227.850</u>	<u>3.190.889</u>	<u>(227.850)</u>	<u>2.963.039</u>	

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**37. TUJUAN DAN KEBIJAKAN
MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko kredit (lanjutan)

31 Desember/December 31, 2016

	Belum jatuh tempo dan tidak ada penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Sudah jatuh tempo dan tidak ada penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Ada penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Sub Total/ Sub Total	Cadangan penurunan nilai/ <i>Allowance for impairment</i>	Total/ Total	
Kas dan setara kas	2.904.014	-	-	2.904.014	-	2.904.014	Cash and cash equivalents
Piutang usaha							Trade receivables
Pihak ketiga	151.546	200.130	89.293	440.969	(89.293)	351.676	Third parties
Pihak berelasi	23	-	-	23	-	23	Related parties
	<u>3.055.583</u>	<u>200.130</u>	<u>89.293</u>	<u>3.345.006</u>	<u>(89.293)</u>	<u>3.255.713</u>	

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul apabila Perseroan dan entitas anaknya mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan ketika liabilitas keuangan tersebut jatuh tempo.

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati berarti mempertahankan kas dan setara kas yang memadai untuk mendukung kegiatan bisnis secara tepat waktu. Perseroan dan entitas anaknya menjaga keseimbangan antara kesinambungan penagihan piutang serta melalui fleksibilitas penggunaan pinjaman bank untuk mengelola risiko likuiditas.

Perseroan dan entitas anaknya memonitor risiko likuiditas dengan menggunakan alat perencanaan likuiditas. Kebijakan Perseroan dan entitas anaknya adalah menjaga rasio-rasio sebagai berikut:

- *Net debt to running EBITDA* (Maksimum 5,00)
- *Debt Service Coverage Ratio* (Minimum 1,3)
- *Running EBITDA to interest expense* (Minimum 1,3)

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan dan entitas anaknya dapat menjaga rasio-rasio yang telah ditetapkan.

Tabel berikut ini menunjukkan profil jangka waktu pembayaran liabilitas Perseroan dan entitas anaknya berdasarkan pembayaran dalam kontrak.

**37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE
AND POLICIES (continued)**

Credit risk (continued)

Liquidity risk

Liquidity risk arise in situations where the Company and subsidiaries have difficulties in fulfilling financial liabilities when they become due.

Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents to support business activities on a timely basis. The Company and its subsidiaries maintain a balance between continuity of accounts receivable collections and flexibility through the use of bank loans in order to manage liquidity risk.

The Company and its subsidiaries monitor their risk of a shortage of funds by using a recurring liquidity planning tool. The Company and its subsidiaries maintain the following ratios:

- *Net debt to running EBITDA* (Maximum 5.00)
- *Debt Service Coverage Ratio* (Minimum 1.3)
- *Running EBITDA to interest expense* (Minimum 1.3)

As of December 31, 2017 and 2016, the Company and its subsidiaries were in compliance to maintain those ratios level.

The following table summarizes the maturity profile of the Company and its subsidiaries' financial liabilities based on contractual undiscounted payments.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**37. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO
MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko likuiditas (lanjutan)

	< 1 tahun/ < 1 year	1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	2 - 3 tahun/ 2 - 3 years	>3 tahun/ >3 years	Jumlah/ Total
31 Desember 2017					
Utang pembangunan menara dan usaha lainnya					
Pihak ketiga	271.663	-	-	-	271.663
Pihak berelasi	27.207	-	-	-	27.207
Utang lain-lain	4.112	-	-	-	4.112
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	48.067	-	-	-	48.067
Akrual	261.782	-	-	-	261.782
Utang jangka panjang	993.876	434.096	2.441.709	4.126.082	7.995.763
Utang obligasi	123.483	123.483	739.951	2.299.432	3.286.349
Utang swap valuta asing	-	-	-	15.553	15.553
	1.730.190	557.579	3.181.660	6.441.067	11.910.496

31 Desember 2016					
Utang pembangunan menara dan usaha lainnya					
Pihak ketiga	189.327	-	-	-	189.327
Pihak berelasi	34.243	-	-	-	34.243
Utang lain-lain	21.298	-	-	-	21.298
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	39.033	-	-	-	39.033
Akrual	241.062	-	-	-	241.062
Utang jangka panjang	969.212	716.926	2.585.986	4.018.538	8.290.662
Utang obligasi	1.135.285	118.600	774.021	2.124.333	4.152.239
Utang swap valuta asing	-	-	-	223.650	223.650
	2.629.460	835.526	3.360.007	6.366.521	13.191.514

Manajemen modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perseroan dan entitas anaknya adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perseroan dan entitas anaknya mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dan entitas anaknya dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses dalam manajemen modal untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

**37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE
AND POLICIES (continued)**

Liquidity risk (continued)

	< 1 tahun/ < 1 year	1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	2 - 3 tahun/ 2 - 3 years	>3 tahun/ >3 years	Jumlah/ Total
December 31, 2017					
Tower construction and other trade payables					
Third parties	271.663	-	-	-	271.663
Related party	27.207	-	-	-	27.207
Other payables	4.112	-	-	-	4.112
Short-term employee benefits liability	48.067	-	-	-	48.067
Accruals	261.782	-	-	-	261.782
Long-term loans	993.876	434.096	2.441.709	4.126.082	7.995.763
Bonds payable	123.483	123.483	739.951	2.299.432	3.286.349
Cross currency swap payables	-	-	-	15.553	15.553
	1.730.190	557.579	3.181.660	6.441.067	11.910.496

December 31, 2016					
Tower construction and other trade payables					
Third parties	189.327	-	-	-	189.327
Related party	34.243	-	-	-	34.243
Other payables	21.298	-	-	-	21.298
Short-term employee benefits liability	39.033	-	-	-	39.033
Accruals	241.062	-	-	-	241.062
Long-term loans	969.212	716.926	2.585.986	4.018.538	8.290.662
Bonds payable	1.135.285	118.600	774.021	2.124.333	4.152.239
Cross currency swap payables	-	-	-	223.650	223.650
	2.629.460	835.526	3.360.007	6.366.521	13.191.514

Capital management

The primary objective of the Company and its subsidiaries' capital management are to ensure that they maintain healthy capital ratios in order to support their business and maximize shareholder value.

The Company and its subsidiaries manage their capital structure and makes adjustments to it in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company and its subsidiaries may adjust the dividend payment to shareholders or issue new shares. No changes were made in the objectives, policies or processes for managing capital for the years ended December 31, 2017 and 2016.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**37. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO
MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)**

Manajemen modal (lanjutan)

Dalam pemenuhan kewajiban terhadap bank atas fasilitas kredit yang diterima, rasio yang dipersyaratkan adalah *net debt to running EBITDA* dengan nilai rasio yang disyaratkan tidak lebih dari 5,00 dan *debt service coverage ratio* (DSCR) dengan nilai rasio yang disyaratkan lebih besar dari 1,30. Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memenuhi semua persyaratan rasio tersebut. Tidak ada rasio yang disyaratkan terkait dengan struktur permodalan.

**37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE
AND POLICIES (continued)**

Capital management (continued)

In fulfillment of obligations towards the bank loans obtained, the required ratio is net debt to running EBITDA ratio which ratio shall not exceed 5.00 and debt service coverage ratio (DSCR) which ratio is to be greater than 1.30. As of December 31, 2017, the Company has fulfilled all of the requirements of these ratios. There is no required ratio associated with capital structure.

38. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Perseroan dan entitas anaknya yang tercatat dalam laporan keuangan konsolidasian:

38. FINANCIAL INSTRUMENTS

The table below is a comparison by class of the carrying amounts and fair value of the Company and its subsidiaries' financial instrument that are carried in the consolidated financial statements:

31 Desember/December 31, 2017					
	Nilai buku/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value			
<u>Aset keuangan</u>			<u>Financial assets</u>		
Pinjaman yang diberikan dan piutang			Loans and receivables		
Kas dan setara kas	2.339.044	2.339.044	Cash and cash equivalents		
Piutang usaha - pihak ketiga	606.867	606.867	Trade receivables - third parties		
Piutang usaha - pihak berelasi	17.128	17.128	Trade receivables - related parties		
Piutang lain-lain - pihak ketiga	3.024	3.024	Other receivables - third parties		
Piutang lain-lain - pihak berelasi	144.227	144.227	Other receivables - related parties		
Uang muka	13.860	13.860	Advances		
Aset tidak lancar			Other non-current		
lainnya - uang jaminan	11.081	11.081	assets - deposits		
Aset keuangan pada nilai wajar			Financial asset at fair value through		
melalui laba rugi	26.442	26.442	profit or loss		
Piutang derivatif			Derivative receivables		
<u>Liabilitas keuangan</u>			<u>Financial liabilities</u>		
Liabilitas keuangan pada biaya perolehan			Financial liabilities measured		
diamortisasi			at amortized cost		
Utang pembangunan menara			Tower construction and other		
dan usaha lainnya			trade payables		
Pihak ketiga	271.663	271.663	Third parties		
Pihak berelasi	27.207	27.207	Related parties		
Utang lain-lain - pihak ketiga	4.112	4.112	Other payables - third parties		
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	48.067	48.067	Short-term employee benefits liability		
Akrual	261.782	261.782	Accruals		
Utang jangka panjang			Long-term loans		
Pihak ketiga	5.659.113	5.769.144	Third parties		
Pihak berelasi	750.000	750.000	Related party		
Utang obligasi	2.589.596	2.701.557	Bonds payable		
Liabilitas keuangan pada nilai wajar			Financial liability at fair value		
melalui laba rugi			through profit or loss		
Utang swap valuta asing	15.553	15.553	Cross currency swap payable		

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

38. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

38. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

	31 Desember/December 31, 2016		
	Nilai buku/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
<u>Aset keuangan</u>			<u>Financial assets</u>
Pinjaman yang diberikan dan piutang			Loans and receivables
Kas dan setara kas	2.904.014	2.904.014	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - pihak ketiga	351.676	351.676	Trade receivables - third parties
Piutang usaha - pihak berelasi	23	23	Trade receivables - related parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga	1.345	1.345	Other receivables - third parties
Piutang lain-lain - pihak berelasi	139.500	139.500	Other receivables - related parties
Uang muka	8.529	8.529	Advances
Aset tidak lancar			Other non-current
lainnya - uang jaminan	32.142	32.142	assets - deposits
Aset keuangan pada nilai wajar			Financial asset at fair value through
melalui laba rugi			profit or loss
Piutang derivatif	32.599	32.599	Derivative receivables
<u>Liabilitas keuangan</u>			<u>Financial liabilities</u>
Liabilitas keuangan pada biaya perolehan			Financial liabilities measured
diamortisasi			at amortized cost
Utang pembangunan menara			Tower construction and other
dan usaha lainnya			trade payables
Pihak ketiga	189.327	189.327	Third parties
Pihak berelasi	34.243	34.243	Related parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	21.298	21.298	Other payables - third parties
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	39.033	39.033	Short-term employee benefits liability
Akrual	241.062	241.062	Accruals
Utang jangka panjang			Long-term loans
Pihak ketiga	5.988.000	6.122.468	Third parties
Pihak berelasi	500.000	500.000	Related party
Utang obligasi	3.430.871	3.491.872	Bonds payable
Liabilitas keuangan pada nilai wajar			Financial liability at fair value
melalui laba rugi			through profit or loss
Utang swap valuta asing	223.650	223.650	Cross currency swap payable

Perseroan dan entitas anaknya menggunakan hierarki berikut ini untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar instrumen keuangan:

The Company and its subsidiaries use the following hierarchy for determining and disclosing the fair value of financial instruments:

- Tingkat 1: Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis.
 - Tingkat 2: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.
 - Tingkat 3: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang tidak dapat diketahui yang memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.
- Level 1: Fair values measured based on quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
 - Level 2: Fair values measured based on valuation techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair values are observable, either directly or indirectly.
 - Level 3: Fair values measured based on valuation techniques for which any inputs which have a significant effect on the recorded fair value that are not based on observable market data (unobservable inputs).

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

38. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai wajar atau biaya perolehan diamortisasi, jika tidak, disajikan dalam jumlah tercatat apabila jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar:

- Nilai wajar kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, uang muka, utang pembangunan menara dan usaha lainnya, utang lain-lain, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, akrual dan bagian jangka pendek utang jangka panjang dan utang obligasi mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.
- Nilai wajar aset tidak lancar lainnya - uang jaminan dan utang jangka panjang dinilai menggunakan arus kas yang didiskontokan pada tingkat suku bunga pasar.
- Nilai wajar obligasi diestimasi menggunakan nilai kuotasi pasar terkini.
- Nilai wajar dari piutang derivatif dan utang swap valuta asing menggunakan nilai pasar.

38. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

Financial instruments presented in the consolidated statement of financial position are carried at fair value amortized cost, otherwise, they are presented at carrying values as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured.

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value:

- Cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, advances, tower construction and other trade payables, other payables, short-term employee benefits liability, accruals and current portion of long-term loans and bonds payable approximate their carrying amounts largely due to the short-term maturities of these instruments.
- The fair value of other non-current assets - deposits and long-term loans are calculated using discounted cash flows at market interest rate.
- The fair value of bonds is estimated by using the last quoted market price.
- The fair value of derivative receivable and cross currency swap payable is based on marked-to-market value.

39. LABA PER SAHAM

Perhitungan laba per saham adalah sebagai berikut:

39. EARNINGS PER SHARE

The computation of earnings per share is as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2017	2016	
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.107.451	2.128.049	Income for the year attributable to the owners of parent entity
Total rata-rata tertimbang saham yang beredar (lembar)	3.322.620.187	3.322.620.187	Weighted average number of shares outstanding (shares)
Laba per saham (angka penuh)	634	640	Earning per share (full amount)
Laba per saham dari operasi yang dilanjutkan (angka penuh)	634	528	Earning per share from continuing operations (full amount)

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

40. TRANSAKSI NON-KAS

Transaksi non-kas Perseroan dan entitas anaknya adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,	
	2017	2016
Kapitalisasi beban gaji dan overhead ke proyek pembangunan menara	76.625	60.513
Kapitalisasi estimasi biaya pembongkaran menara	3.088	37.814
Pembayaran neto utang jangka panjang dan beban bunga yang masih harus dibayar dengan penerimaan kas dari penjualan Protelindo Netherlands B.V. dan Entitas Anaknya (EUR15.293.142)	-	221.659
	79.713	319.986

40. NON-CASH TRANSACTIONS

Non-cash transactions of the Company and its subsidiaries are as follows:

Capitalized salaries and overhead costs for tower construction

Capitalization of the estimated cost of dismantling of towers

Net payment of long-term loans and accrued interest with cash proceeds from sale of Protelindo Netherlands B.V. and its subsidiary (EUR15,293,142)

41. PENYAJIAN KEMBALI

Perseroan dan entitas anaknya menerapkan ISAK 31 sebagai basis dari standar akuntansi atas aset menara. Dengan penerapan standar akuntansi ini, aset menara direklasifikasi dari properti investasi pada nilai wajar menjadi aset tetap pada nilai historis. Penerapan ini berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.36/SEOJK.04/2016 mengenai perlakuan akuntansi untuk aset menara telekomunikasi.

Dampak dari penyajian kembali adalah sebagai berikut:

41. RESTATEMENT

The Company and its subsidiaries applied ISAK 31 as the basis of accounting standard for its tower assets. With the application of this accounting standard, the tower assets were reclassified from investment properties at fair value to fixed assets at historical cost. This is to comply with Indonesia Financial Service Authority (OJK) circular letter No.36/SEOJK.04/2016 concerning the accounting treatment for telecommunication tower assets.

The impact of the restatement is as follows:

	2016			
	Sebelum disesuaikan/ Before restatement	Penyesuaian/ Adjustment	Setelah disesuaikan/ After restatement	
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN				CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
ASET				ASSETS
Aset tetap	238.958	12.030.433	12.269.391	Fixed asset
Properti investasi	18.268.830	(18.268.830)	-	Investment properties
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan, neto	1.978.153	(1.489.944)	488.209	Deferred tax liabilities, net
EKUITAS				EQUITY
Saldo laba				Retained earnings
Belum ditentukan penggunaannya	10.373.599	(4.748.453)	5.625.146	Unappropriated

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

41. PENYAJIAN KEMBALI (lanjutan)

41. RESTATEMENT (continued)

2016				
	Sebelum disesuaikan/ <i>Before restatement</i>	Penyesuaian/ <i>Adjustment</i>	Setelah disesuaikan/ <i>After restatement</i>	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN				CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Depresiasi dan amortisasi	(458.643)	(725.676)	(1.184.319)	Depreciation and amortization
Laba bruto	4.385.014	(725.676)	3.659.338	Gross income
Kenaikan nilai wajar properti investasi	495.399	(495.399)	-	Increase in fair value of investment properties
Beban usaha lainnya, neto	(121.510)	9.376	(112.134)	Other operating expenses, net
Laba usaha	4.313.231	(1.211.699)	3.101.532	Operating income
Beban pajak penghasilan	(1.036.585)	306.335	(730.250)	Corporate income tax expense
Laba tahun berjalan	2.663.841	(905.364)	1.758.477	Income for the year
2015				
	Sebelum disesuaikan/ <i>Before restatement</i>	Penyesuaian/ <i>Adjustment</i>	Setelah disesuaikan/ <i>After restatement</i>	
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN				CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
ASET				ASSETS
Aset tetap	157.179	9.656.653	9.813.832	Fixed asset
Properti investasi	14.683.352	(14.683.352)	-	Investment properties
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan, neto	1.690.027	(1.183.610)	506.417	Deferred tax liabilities, net
EKUITAS				EQUITY
Saldo laba				Retained earnings
Belum ditentukan penggunaannya	7.340.286	(3.843.089)	3.497.197	Unappropriated

**42. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU
EFEKTIF**

**42. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE**

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tanggal 31 Desember 2017 diungkapkan di bawah ini. Perseroan dan entitas anaknya berintensi untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK) and Indonesian Financial Service Authority (OJK), but not yet effective for December 31, 2017 financial statements are disclosed below. The Company and its subsidiaries intends to adopt these standards, if applicable, when they become effective.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**42. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU
EFEKTIF (lanjutan)**

- a. Amandemen PSAK 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amandemen ini mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas.

- b. Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan; estimasi atas kemungkinan besar laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya.

- c. Amandemen PSAK 53 - Pembayaran Berbasis Saham: Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amandemen ini bertujuan untuk memperjelas perlakuan akuntansi terkait klasifikasi dan pengukuran transaksi pembayaran berbasis saham.

- d. PSAK 67 (Penyesuaian 2017): Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa Persyaratan pengungkapan dalam PSAK 67, selain yang dideskripsikan dalam paragraf PP10-PP16 juga diterapkan pada setiap kepentingan dalam entitas yang diklasifikasikan sesuai PSAK 58.

**42. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

- a. Amendments to PSAK 2: Statement of Cash Flows on the Disclosures Initiative, effective January 1, 2018 with earlier application is permitted.

These amendments require entities to provide disclosures that enable the financial statements users to evaluate the changes in liabilities arising from financing activities, including changes from cash flow and non-cash.

- b. Amendments to PSAK 46: Income Taxes on the Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized Losses, effective January 1, 2018 with earlier application is permitted.

These amendments clarify that to determine whether the taxable income will be available so that the deductible temporary differences can be utilized; estimates of the most likely future taxable income can include recovery of certain assets of the entity exceeds its carrying amount.

- c. Amendments to PSAK 53 - Share-based Payment: Classification and Measurement of Share-based Payment Transaction, effective January 1, 2018 with earlier application is permitted.

This amendments aims to clarify the accounting treatment related to the classification and measurement of stock-based payment transactions.

- d. PSAK 67 (2017 Improvement): Disclosure of Interests in Other Entities, effective January 1, 2018 with earlier application is permitted.

This improvement Clarifies the disclosure requirements in PSAK 67, in addition to those described in paragraphs PP10-PP16, also applied to any interest in the entity that is classified in accordance with PSAK 58.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**42. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU
EFEKTIF (lanjutan)**

- e. PSAK 71: Instrumen Keuangan, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit yang diharapkan untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

- f. PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, berlaku efektif tanggal 1 Januari 2020 dan dapat diadopsi retrospektif penuh atau retrospektif yang dimodifikasi.

Standar akuntansi ini mengharuskan entitas menerapkan model 5-langkah dalam mengakui pendapatan. entitas harus mengidentifikasi pelaksanaan obligasi yang disyaratkan tiap kontrak dengan pelanggan, termasuk pertimbangan variabel, dan hanya mengakui pendapatan sesuai harga transaksi yang dialokasi/ditentukan pada saat pelaksanaan obligasi dipenuhi.

- g. PSAK 73: Sewa, berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020 dan dapat diadopsi secara retrospektif serta dapat diterapkan lebih awal.

PSAK 73 mensyaratkan lessee untuk mencatat serupa dengan sewa dalam model tunggal neraca seperti sewa pembiayaan dalam PSAK 30 yang digantikannya. Standar mengecualikan dua pengakuan atas sewa atas aset dengan nilai rendah dan sewa jangka pendek.

Saat tanggal sewa dimulai, lessee mengakui liabilitas atas pembayaran sewa dan aset atas hak penggunaan aset sewa selama jangka waktu sewa. Lessee disyaratkan untuk mengakui secara terpisah beban bunga untuk liabilitas sewa dan beban depresiasi untuk hak penggunaan aset. Perlakuan akuntansi untuk lessor secara substansi tidak berubah dari PSAK 30 yang digantikan.

**42. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

- e. PSAK 71: Financial Instruments, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted.

This PSAK provides for classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of contractual cash flows and business model of the entity; expected credit loss impairment model that resulting information more timely, relevant and understandable to users of financial statements; accounting for hedging that reflect the entity's risk management better by introduce a more general requirements based on management's judgment.

- f. PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers, effective January 1, 2020 and can be applied using either using full retrospective approach or modified retrospective approach.

This accounting standard requires the entity to apply 5-step model in recognizing revenue. The entity will be required to identify performance obligation promised in each contract with the customer, including any variable consideration, and only recognize revenue in accordance with the determined/allocated transactions price upon satisfaction of the performance obligation.

- g. PSAK 73: Leases, effective January 1, 2020, and shall be adopted retrospectively with early adoption allowed.

PSAK 73 requires lessees to account all leases under a single on-balance sheet model in a similar way to finance leases under the superseded PSAK 30. The standard includes two recognition exemptions for lessees such as for leases of 'low-value' assets and short-term leases.

At the commencement date of a lease, a lessee will recognize a liability to make lease payments and an asset representing the right to use the underlying asset during the lease term. Lessees will be required to separately recognize the interest expense on the lease liability and the depreciation expense on the right-of-use asset. Lessor accounting is substantially unchanged from the superseded PSAK 30.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

43. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a. Pada tanggal 2 Februari 2018, Perseroan dan BTMU telah menandatangani Surat Perubahan Perjanjian Fasilitas ("Surat Perubahan") untuk mengubah ketentuan mengenai margin Fasilitas Pinjaman BTMU pada Perjanjian Fasilitas BTMU. Fasilitas Pinjaman BTMU dikenakan tingkat suku bunga yang sama dengan JIBOR ditambah margin yang berlaku yaitu sebesar 1,25% per tahun dan perpanjangan untuk tanggal jatuh tempo terakhir selama 12 bulan.

Pada tanggal 9 Maret 2018, Perseroan telah melakukan penarikan atas Fasilitas Pinjaman BTMU 2017 sebesar Rp250.000.

- b. Pada tanggal 6 Februari 2018, iForte menerima SKPLB atas Pajak Pertambahan Nilai untuk masa Desember 2016 dengan jumlah sebesar Rp4.637. Manajemen entitas anak menerima SKPLB tersebut dan seluruhnya akan dikompensasi dengan kewajiban pajak iForte.
- c. Pada tanggal 14 Februari 2018, Fasilitas Pinjaman DBS telah dilunasi seluruhnya oleh Perseroan dengan pokok sejumlah AS\$18.000.000 dan bunga yang masih harus dibayar sejumlah AS\$45.898,29 serta melakukan pembayaran atas sebagian Fasilitas Pinjaman SMBC dengan pokok sejumlah AS\$26.000.000 dan bunga yang masih harus dibayar sejumlah AS\$92.007,90.
- d. Pada tanggal 20 Februari 2018, Perseroan telah melakukan pelunasan atas Fasilitas Pinjaman OCBC dengan pokok sejumlah AS\$36.000.000 dan bunga yang masih harus dibayar sejumlah AS\$86.056,60.

43. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

- a. On February 2, 2018, the Company and BTMU entered into an Amendment Letter of Facility Agreement to amend the terms of margin in BTMU Loan Facility on the BTMU Facility Agreement. The BTMU Loan Facility is subject to an interest rate equal to JIBOR plus an applicable margin of 1.25% per annum and an extension of its final maturity date for 12 months.

On March 9, 2018, the Company has drawdown the 2017 BTMU Loan Facility in the amount of Rp250,000.

- b. On February 6, 2018, iForte received a tax overpayment letter (SKPLB) referring to VAT for fiscal period December 2016 with totaling Rp4,637. Management of the subsidiary accepted the SKPLB and all the overpayment will be compensated with iForte tax obligation.
- c. On February 14, 2018, DBS Loan Facility has been fully repaid by the Company with the principal amount of US\$18,000,000 and accrued interest of US\$45,898.29 and prepaid a part of SMBC Loan Facility with the principal amount of US\$26,000,000 and accrued interest of US\$92,007.90.
- d. On February 20, 2018, the Company has fully repaid the OCBC Loan Facility with the principal amount of US\$36,000,000 and accrued interest of US\$86,056.60.

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)**

**43. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

- e. Pada tanggal 22 Maret 2018, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian di bawah ini sehubungan dengan rencana pengambilalihan saham PT Komet Infra Nusantara ("KIN") ("Rencana Transaksi"): (i) *Agreement For The Sale and Purchase of Call Option Interest in KIN* dengan PEPVII HKCO 1 LIMITED; (ii) *Agreement For The Sale and Purchase of Shares in KIN* dengan Telekom Infranasantara ("TI") dan PT Menara Telekomunikasi Indonesia; (iii) *Settlement and Release Agreement* dengan FYPM Management Pte. Ltd. ("FYPM"), TI, dan KIN untuk pengakhiran call option agreement tanggal 3 Juli 2017 yang dibuat oleh FYPM dan TI, dan perjanjian waran tanggal 3 Juli 2017 yang dibuat oleh FYPM dan KIN; dan (iv) *Settlement and Release Agreement* dengan KIN dan masing-masing pemegang waran KIN untuk pengakhiran warrant agreements yang dibuat oleh KIN dan masing-masing pemegang waran. Setelah terlaksananya Rencana Transaksi, Perseroan akan menguasai 100% saham dalam KIN. Penyelesaian dari Rencana Transaksi tetap tunduk kepada pemenuhan atau perolehan sejumlah syarat pendahuluan antara lain, termasuk perolehan persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan persetujuan perusahaan yang diperlukan. SMN dan Perseroan bukan merupakan afiliasi dari masing-masing pihak.

**43. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD
(continued)**

- e. On March 22, 2018, the Company has entered into the following agreements related to the proposed acquisition of shares in PT Komet Infra Nusantara ("KIN") ("Proposed Transaction"): (i) *Agreement for the Sale and Purchase of Call Option Interests in KIN* with PEPVII HKCO 1 LIMITED; (ii) *Agreement for the Sale and Purchase of Shares in KIN* with PT Telekom Infranasantara ("TI") and PT Menara Telekomunikasi Indonesia; (iii) *Settlement and Release Agreement* with FYPM Management Pte. Ltd. ("FYPM"), TI, and KIN for the termination of the call option agreement dated July 3, 2017 made between FYPM and TI, and the warrant agreement dated July 3, 2017 made between FYPM and KIN; and (iv) *Settlement and Release Agreement* with KIN and each of the warrant holders of KIN for the termination of the warrant agreements between KIN and each warrant holder. Following the completion of the Proposed Transaction, the Company will hold 100% shares in KIN. The completion of the Proposed Transaction remains subject to the fulfillment or obtainment of certain conditions precedent which among others, include obtaining approval from the Investment Coordinating Board (Badan Koordinasi Penanaman Modal) and the necessary corporate approval. SMN and the Company are not an affiliate of each parties mentioned above.



PROTELINDO

A Subsidiary of PT Sarana Menara Nusantara Tbk

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Menara BCA 55th Floor
Jl. M.H. Thamrin No.1
Jakarta 10310 - Indonesia
Phone : +62 21 2358 5500
Fax : +62 21 2358 6446

www.protelindo.co.id
www.ptsmn.co.id